

**PENGELOLAAN PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B  
DAN C DI KECAMATAN WIROBRAJAN KOTA YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan



Oleh:

Putri Syafrida Riyana  
NIM. 12101241003

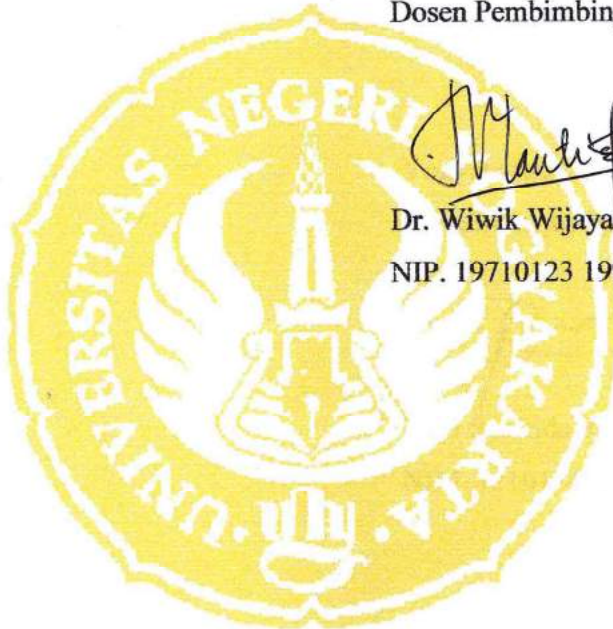
**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN  
JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
MEI 2016**

## PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “PENGELOLAAN PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B DAN C DI KECAMATAN WIROBRAJAN KOTA YOGYAKARTA” yang disusun oleh Putri Syafrida Riyana, NIM 12101241003 ini telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk diujikan.

Yogyakarta, 13 April 2016

Dosen Pembimbing,



  
Dr. Wiwik Wijayanti, M.Pd.

NIP. 19710123 199903 2 001

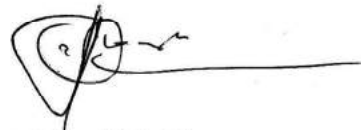
## **SURAT PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Tanda tangan dosen penguji yang tertera dalam halaman pengesahan adalah asli. Jika tidak asli, saya siap menerima sanksi ditunda yudisium pada periode berikutnya.

Yogyakarta, 13 April 2016

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized circular shape with a vertical line through it and a horizontal line extending to the right.

Putri Syafrida Riyana

NIM. 12101241003

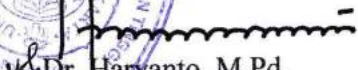
## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PENGELOLAAN PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B DAN C DI KECAMATAN WIROBRAJAN KOTA YOGYAKARTA” yang disusun oleh Putri Syafrida Riyana, NIM 12101241003 ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 4 Mei 2016 dan dinyatakan lulus.

### DEWAN PENGUJI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Dr. Wiwik Wijayanti, M.Pd.	Ketua Penguji		20/05/2016
MM. Wahyuningrum, MM.	Sekretaris Penguji		20/05/2016
Lutfi Wibawa, M.Pd.	Penguji Utama		20/05/2016

Yogyakarta, 24 MAY 2016  
Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Yogyakarta  
Dekan,

  
Dr. Haryanto, M.Pd.  
NIP. 19600902 198702 1 001

## **MOTTO**

Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, serta orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat – Q.S. Al-Mujadaah: 11  
(Terjemahan)

Tak ada yang bisa memberimu kemerdekaan. Tak ada yang bisa memberimu kesetaraan, keadilan atau apapun. Jika kamu manusia, buatlah – Malcolm X / el-Hajj Malik el-Shabazz. (Terjemahan)

Entah persamaan, perbedaan, atau bahkan keduanya akan beriring lalu dihargai bila kita selalu memantaskan diri - Penulis

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Atas limpahan Rahmat dan Karunia Allah Subhanahuwata'alla saya persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orangtua saya tercinta yang selalu mendukung dan menjadi motivasi terbesar. Terima kasih atas doa yang selalu mengiringi setiap langkah belajar saya.
2. Almamater saya, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Agama, Nusa dan Bangsa.

# **PENGELOLAAN PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B DAN C DI KECAMATAN WIROBRAJAN KOTA YOGYAKARTA**

Oleh  
Putri Syafrida Riyana  
NIM. 12101241003

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan program pendidikan kesetaraan paket B dan C di PKBM Rangsang Imo Joyo yang mencakup: (1) perencanaan; (2) pelaksanaan; dan (3) evaluasi yang dilihat dari lima aspek pendidikan yaitu peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, kurikulum, sarana prasarana, dan keuangan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji keabsahan data dengan triangulasi sumber dan teknik. Data dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman.

Hasil penelitian ini adalah: (1) Perencanaan, meliputi; (a) Penerimaan dan seleksi warga belajar secara terbuka (b) perekrutan tutor secara tertutup dengan syarat kemauan dan kesehatan psikologis; (c) Penggunaan kurikulum KTSP dengan struktur mata pelajaran terpadu pada Paket B dan penjurusan pada Paket C, fleksibilitas pada durasi SKK untuk kedua Paket; (d) perencanaan sarana prasarana menyangkut modul dan gedung tempat pembelajaran di SMK Pembangunan Yogyakarta; (e) sumber dana dari donatur, iuran warga belajar, dan kas lembaga. (2) Pelaksanaan, meliputi; (a) kebutuhan warga belajar terpenuhi, kedisiplinan kurang; (b) enam dari tujuh pengelola memenuhi kualifikasi pendidikan minimal SMA/ sederajat dan mengikuti pelatihan dari lembaga PLS terakreditasi minimal B, tugas menumpuk di pihak tertentu saja; (c) tiga belas dari empat belas tutor memenuhi kualifikasi yaitu berpendidikan minimal S1 dan konsentrasi pendidikan sesuai dengan mata pelajaran yang diampu, tidak kesemuanya berasal dari keguruan, kehadiran tutor sering tidak tepat waktu dan jadwal pelajaran meleset; (d) pemanfaatan sarana prasarana mayoritas dalam kelas; (e) pembelajaran dilaksanakan tiga kali seminggu, materi tidak selalu pada RPP/silabus; (f) alokasi dana pendidikan pada kebutuhan operasional insentif tutor dan kegiatan pembelajaran sehari-hari. (3) Evaluasi, meliputi: (a) EHB formatif dengan UH dan UTS, EHB sumatif dengan UAS, UKK, dan UNPK; (b) Evaluasi program dilakukan setiap satu semester sekali yaitu rapat dengan pihak Pembina (Kelurahan Patangpuluhan) dan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta secara rutin, serta Evaluasi Internal lembaga secara fleksibel.

**Kata kunci** : *pengelolaan, pendidikan kesetaraan, paket B dan C*

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ” Pengelolaan Program Pendidikan Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta” dengan lancar.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, saran, doa, dan motivasi dari berbagai pihak. Makadari itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan selama penulis menuntut ilmu.
2. Ketua Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UNY yang telah memberikan dukungan secara luas baik selama perkuliahan maupun dalam tugas akhir skripsi ini.
3. Dosen pembimbing, Dr. Wiwik Wijayanti, M.Pd. yang telah meluangkan waktu untuk selalu membimbing dan mengarahkan penyusunan skripsi ini hingga selesai.
4. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UNY yang telah mendidik dan memberikan ilmu sebagai bekal penulisan skripsi ini.
5. Drs. Supatmo Priyo, selaku Ketua PKBM Rangsang Imo Joyo, pengelola, pembina, tutor dan warga belajar program pendidikan kesetaraan paket B dan C yang telah memberikan izin penelitian serta mendukung dalam pengumpulan data.
6. Keluargaku tercinta, Bapak Supriyono dan Ibu Siti Nasikah, juga adik-adikku Farida Nisa'in Prihnaharin dan Muhammad Fadllurridlo yang selalu menjadi motivasi utama dan memberi dukungan serta do'a dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Tim PKM MP 2013 dan seluruh teman-teman MP-A 2012 yang selalu berbagi pengalaman, ilmu, dan memberi berbagai macam bentuk dukungan hingga menumbuhkan rasa kebersamaan yang pasti akan terkenang mulai dari awal hingga akhir.



8. Teman-teman Kos B20 yang tak lelah mengurus, membantu dalam segala hal, menghibur, dan mendukungku di setiap hari selama hampir empat tahun ini.
9. Anggota KKN 2134 tahun 2015 yang berhasil menjadi salah satu sisi kenangan tak terlupakan dari Yogyakarta.
10. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu, penulis menerima setiap kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Aamiin.

Yogyakarta, 22 April 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

	hal
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan Masalah.....	10
F. Manfaat Penelitian .....	10
 BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kajian Teoritis.....	12
1. Konsep Dasar Manajemen dan Manajemen Pendidikan.....	12
2. Pendidikan Nonformal .....	20
3. Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket .....	25
B. Penelitian yang Relevan .....	50
C. Pertanyaan Penelitian .....	58
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	60
B. <i>Setting</i> Penelitian.....	60

C. Subyek Penelitian.....	61
D. Teknik Pengumpulan Data.....	61
E. Instrumen Penelitian.....	64
F. Teknik Analisis Data.....	65
G. Pengujian Keabsahan Data.....	67
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lembaga Penyelenggara.....	69
1. Profil PKBM .....	69
2. Struktur Pengelola.....	70
3. Tujuan Umum Program.....	70
4. Bentuk Organisasi .....	71
5. Mitra Kerja .....	72
B. Hasil Penelitian .....	73
1. Perencanaan Program Pendidikan Kesetaraan .....	73
a. Bentuk Penerimaan dan Seleksi Warga Belajar.....	73
b. Bentuk Perekrutan dan Seleksi Calon Tutor dan Nara Sumber Teknis .....	77
c. Penetapan Kurikulum.....	82
d. Proses Penetapan Tempat Pembelajaran dan Pelatihan .....	85
e. Sumber Dana Pendidikan Kesetaraan Paket B dan C .....	87
2. Pelaksanaan Program Pendidikan Kesetaraan .....	89
a. Pemenuhan Tugas dan Kebutuhan Warga Belajar.....	89
b. Kualifikasi serta Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola .....	96
c. Kualifikasi serta Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Tutor.....	101
d. Pelaksanaan Pembelajaran Akademik .....	106
e. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana.....	110
f. Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan .....	114
3. Evaluasi Pendidikan Kesetaraan .....	118
a. Evaluasi Hasil Belajar .....	118

b. Evaluasi Penyelenggaraan Program .....	121
C. Pembahasan .....	124
1. Perencanaan Program Pendidikan Kesetaraan .....	124
a. Bentuk Penerimaan dan Seleksi Warga Belajar .....	124
b. Bentuk Perekrutan dan Seleksi Calon Tutor .....	127
c. Penetapan Kurikulum .....	132
d. Proses Penetapan Tempat Pembelajaran dan Pelatihan .....	134
e. Sumber Dana Pendidikan Kesetaraan Paket B dan C .....	136
2. Pelaksanaan Program Pendidikan Kesetaraan .....	138
a. Pemenuhan Tugas dan Kebutuhan Warga Belajar .....	138
b. Kualifikasi serta Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola .....	142
c. Kualifikasi serta Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Tutor .....	146
d. Pelaksanaan Pembelajaran Akademik dan Pemanfaatan Sarana Prasarana .....	149
e. Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan .....	155
3. Evaluasi Pendidikan Kesetaraan .....	158
a. Evaluasi Hasil Belajar .....	158
b. Evaluasi Penyelenggaraan Program .....	160
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan .....	163
B. Saran .....	165
DAFTAR PUSTAKA .....	166
LAMPIRAN .....	170

## DAFTAR TABEL

	hal
Tabel 1. Jumlah Murid Putus Sekolah menurut Jenjang Sekolah dan Kab/Kota di DIY per tahun 2012.....	5
Tabel 2. Struktur Kurikulum Paket B .....	45
Tabel 3. Struktur Kurikulum Paket C (Program IPA) .....	46
Tabel 4. Struktur Kurikulum Paket C (Program IPS) .....	47
Tabel 5. Daftar Pengelola PKBM Rangsang Imo Joyo.....	96
Tabel 6. Daftar Tutor PKBM Rangsang Imo Joyo .....	102
Tabel 7. Jadwal Pembelajaran Paket B .....	106
Tabel 8. Jadwal Pembelajaran Paket C .....	107

## DAFTAR GAMBAR

	hal
Gambar 1. <i>Components of Data Analysis Interactive Model Miles and Huberman</i> (Komponen Analisis Data: Model Interaktif) .....	65

## DAFTAR LAMPIRAN

	hal
Lampiran 1. Surat Penelitian.....	170
Lampiran 2. Instrumen Penelitian .....	174
Lampiran 3. Catatan Wawancara .....	186
Lampiran 4. Hasil Observasi.....	217
Lampiran 5. Studi Dokumen .....	221
Lampiran 6. Dokumentasi Foto.....	224
Lampiran 7. Hasil Dokumentasi .....	227
Lampiran 8. Analisis Data (Triagulas Sumber dan Teknik) .....	236

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kehidupan bermasyarakat saat ini memiliki jaringan yang lebih luas dengan ditetapkannya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) pada 31 Desember 2015. Keadaan ini terkesan fokus pada aspek ekonomi namun jika ditelaah secara mendalam, aspek ekonomi bisa dipengaruhi dan mempengaruhi aspek lain seperti sosial, budaya, pendidikan, ketahanan, dan sebagainya. Pelaku MEA sudah tentu menjadi sosok pokok yang dapat menentukan pencapaian negara Indonesia di ajang MEA tersebut. Pembahasan tentang pelaku MEA berarti masuk dalam ranah Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu aspek penting yang menciptakan sumber daya manusia adalah pendidikan. Manusia merupakan *input* dan *output* dari proses pendidikan, sementara sosial, budaya, geografis, lingkungan, keamanan, dan lainnya adalah aspek yang mempengaruhi dan dipertimbangkan dalam pelaksanaan pendidikan.

Pendidikan dilaksanakan dalam rangka memperbaiki kualitas manusia serta harkat dan martabat yang ingin diraihinya. Pembentukan manusia yang berkualitas harus disesuaikan dengan identitas bangsa agar mempunyai kapabilitas dan kemandirian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan pendidikan di Indonesia sangat beragam. Letak geografis bangsa dengan aneka ragam budaya, adat istiadat, dan bahasa menuntut adanya isi dan pola pelaksanaan pendidikan yang berbeda-beda. Keragaman kebutuhan manusia menurut lingkungan dan pekerjaannya menuntut pula isi dan pola layanan pendidikan yang berbeda.



Kewajiban negara yang utama dibidang pendidikan terdapat dalam pembukaan konstitusi negara Republik Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Lebih lanjut, dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 dijelaskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yaitu:

Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam hal ini masyarakat sangat membutuhkan pengelolaan pendidikan dengan dukungan ilmu manajemen pendidikan. Ilmu manajemen pendidikan merupakan kajian terhadap pendayagunaan berbagai potensi sebagai upaya dalam pengembangan potensi manusia untuk tumbuh secara optimal melalui proses belajar, dengan memanfaatkan kurikulum, dan mempergunakan metodologi dan media pendidikan yang selalu berkembang dan dikembangkan. Kajian ini tentunya saling bersinergi untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang telah disebutkan di atas.

Manajemen pendidikan sama halnya dengan pengelolaan pendidikan. Hal ini penting dikemukakan agar tidak terkesan bahwa manajemen pendidikan harus dalam makna manajemen-administratif (urutan kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menata staf, mengomando, mengkoordinasikan, dan mengontrol), karena dalam banyak hal tidak semuanya cocok digunakan (Tim Dosen AP, 2010: 11).

Dengan dicanangkannya wajib belajar 12 tahun oleh pemerintah maka segala segi pendidikan wajib mengembangkan diri untuk memperbesar kesempatan belajar. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa “jalur pendidikan

terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya”. Fokus penelitian ini ada pada pendidikan nonformal yang mana pendidikan nonformal juga ikut serta membantu masyarakat luas dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan dengan prinsipnya yaitu pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan dalam UU 20 Tahun 2003 maka “pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan”. Pendidikan nonformal menerima peserta didik (warga belajar) yang belum pernah sekolah, putus sekolah, maupun memiliki keterbatasan di beberapa bidang yang membuatnya kekurangan kesempatan menempuh pendidikan formal.

Permendikbud No.81 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal, BAB II Pasal 3 mengatakan bahwa satuan Pendidikan Nonformal (PNF) terdiri atas : (1) Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), (2) Kelompok Belajar (KB), (3) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), (4) Majelis Taklim, dan satuan PNF sejenis. Pasal ini mengisyaratkan bahwa sebagai PLS, PKBM merupakan salah satu bentuk kelembagaan yang dapat menyelenggarakan satuan-satuan pendidikan luar sekolah. Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan pada pasal 4 bahwa PKBM dapat menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini, pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan kepemudaan, pendidikan keterampilan kerja,

pengembangan budaya baca, dan pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat. Menurut Ishak dan Ugi (2012: 57) Program Kelompok Belajar pada pendidikan nonformal dapat diklasifikasi menjadi dua yaitu:

Kelompok Belajar Fungsional (termasuk dalam kelompok ini adalah: Keaksaraan Fungsional, Kelompok Belajar Usaha (KBU), Kelompok Pemuda Produktif pedesaan (KPPP), Kelompok Pemberdayaan Swadaya Masyarakat (KPSM), dan Kelompok Pemuda Produkdif Mandiri (KPPM). Kelompok Belajar Kesetaraan (Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SLTP, Kelompok Belajar Paket C setara SMU).

Program yang diangkat dalam penelitian ini adalah program kesetaraan kejar paket. Program kesetaraan merupakan program pendidikan nasional yang bermaksud pemeratakan kesempatan belajar bagi pihak yang belum memperoleh pendidikan seperti pada umumnya. Menurut Ida Kintamani (2012: 4) pendidikan kesetaraan merupakan bagian dari pendidikan nonformal yang memberikan layanan pendidikan Program Paket A setara SD, Program Paket B setara SMP dan Program Paket C setara SMA, dengan memberikan penekanan pada peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengembangan sikap kepribadian kepada peserta didik. Selain itu Ida Kintamani (2012: 4) juga menjelaskan:

Peserta didik pendidikan kesetaraan adalah anak usia sekolah dan dewasa yang belum mampu menyelesaikan SD, SMP, dan SMA. Dilihat dari sisi peserta didik kesetaraan mempunyai dimensi yang luas, yaitu warga negara yang belum menyelesaikan pendidikan karena keterbatasan yang dimiliki baik dibidang ekonomi, sosial, budaya atau karena kondisi geografis maka mereka berhak untuk mendapatkan pendidikan. Untuk itu, pendidikan kesetaraan yang dapat dikatakan sebagai pendidikan alternatif mempunyai peranan yang strategis untuk mengatasi masalah pendidikan masyarakat yang belum beruntung karena kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakmampuan lainnya.

Sesuai dengan kebijakan Menteri Pendidikan Nasional lulusan pendidikan kesetaraan mempunyai hak eligibilitas untuk meneruskan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik di lembaga pendidikan formal maupun nonformal, serta memiliki pengakuan yang sama ketika mereka memasuki dunia kerja (Direktorat Pendidikan Kesetaraan, 2010).

Badan Pusat Statistik DIY tahun 2013 menunjukkan bahwa data pada tahun 2012 jumlah murid putus sekolah tercatat 1.160 anak atau mengalami peningkatan 0,96 persen dibandingkan tahun 2011, yang berjumlah mencapai 1.149 anak. Hal tersebut dijelaskan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah Murid Putus Sekolah  
menurut Jenjang Sekolah dan Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta  
per tahun 2012

Tingkatan Sekolah	Kabupaten / Kota					DIY
	Kulon progo	Bantul	Gunung kidul	Sleman	Yogya karta	
Dikbud						
1. SD	27	58	54	33	15	187
2. SMP	34	26	76	30	10	176
3. SMA	18	39	50	9	8	124
4. SMK	40	179	138	69	140	566
Non-Dikbud						
1. SD-MI	8	4	12	3	0	27
2. SLTP-MTs	4	12	24	14	1	55
3. SLTA-MA	0	14	0	6	5	25
Jumlah	131	332	354	164	179	1160

*Sumber : Katalog BPS Provinsi DIY 2013*

Suatu paparan menarik bahwa Kota Yogyakarta yang terkenal sebagai pusat Provinsi DIY sekaligus julukan kota pelajar menjadi urutan ketiga dalam angka putus sekolah se-DIY. Penelitian ini mengambil lokasi di PKBM Rangsang Imojoyo, Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta. Lokasi ini dipilih karena berada di tengah kota Yogyakarta dengan daerah maju dan padat penduduk. Sebelumnya, selain

Rangsang Imojoyo, ada satu lagi PKBM yang berlokasi di Kecamatan Wirobrajan, namun karena suatu hal PKBM tersebut ditutup sehingga PKBM ini merupakan satu-satunya PKBM yang ada di Kecamatan Wirobrajan sekaligus satu-satunya pihak yang mengelola atau menyelenggarakan program kesetaraan di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta.

Program yang sedang berjalan di PKBM Rangsang Imojoyo saat ini hanyalah Program Kesetaraan Paket B dan C, sedangkan program lain yang disiapkan yaitu Taman Bacaan Masyarakat (TBM) serta Kelompok Belajar Usaha (KBU). Penanggungjawab untuk masing-masing program yang disiapkan sudah ada dan kini sedang proses pembentukan kegiatan program tersebut.

Penelitian ini menitikberatkan pada pengelolaan terhadap program kesetaraan saja sebab hal tersebut memiliki banyak aspek yang mempengaruhi pengelolaan PKBM secara umum. Program Kesetaraan yang diteliti adalah kejar paket B dan C. Paket A tidak masuk dalam penelitian sebab hanya sekali meluluskan warga belajar yakni pada tahun 2006 dan kini sudah dihentikan. Mulai berdiri pada tahun 2006 hingga sekarang PKBM Rangsang Imojoyo pernah satu kali vakum yakni di tahun 2012. Salah satu alasan vakumnya PKBM ini adalah karena kurangnya warga belajar pada program kesetaraan. Kekurangan ini terletak pada tahap perencanaan yaitu salah satunya penerimaan warga belajar sehingga jumlah yang mendaftar menjadi sedikit, bisa jadi dikarenakan kurang sosialisasi ataupun kurangnya pendekatan pengelola kepada masyarakat. Dalam perencanaan, sumber daya

manusia yang dibahas lainnya adalah tutor atau pengajar pendidikan kesetaraan yang mana dalam lembaga ini tutor diambil dari guru maupun mahasiswa. Selain membahas sumber daya manusia, sarana prasarana lembaga juga mengalami hambatan salah satunya adalah belum adanya gedung pembelajaran milik lembaga.

Dalam pelaksanaannya, setiap program kesetaraan berlangsung tiga tahun dengan intensitas tatap muka tiga kali seminggu yakni hari Senin, Rabu, dan Jum'at. Selama pembelajaran, tutor dan warga belajar terkadang tidak hadir atau terlambat dan hal tersebut mempengaruhi sistem pembelajaran di hari itu. Selain itu, ada perbedaan kondisi sebelum dan setelah vakumnya PKBM Rangsang Imojoyo misalnya di bagian keuangan. PKBM ini memang mendapat Ijin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta namun bantuan dana untuk program kesetaraan dari Dinas berhenti setelah PKBM ini mengalami kevakuman. Kekurangan jumlah warga belajar pada program kesetaraan mengakibatkan terhentinya dana bantuan dari Dinas setempat. Saat ini biaya diperoleh dari iuran warga belajar program kesetaraan paket B dan C itu sendiri secara bulanan. Walau demikian, Ketua PKBM mengaku biaya operasional dan lain halnya tidak dapat terpenuhi hanya dari iuran warga belajar tersebut.

Hasil observasi awal di atas dikuatkan oleh penuturan Ketua PKBM melalui wawancara informal yang dilakukan peneliti. Saat ini, jumlah pengelola PKBM seluruhnya adalah tiga belas orang dan pengelola inti pendidikan kesetaraan ada tujuh orang, namun pembagian tugasnya belum

terlalu jelas dan sering terjadi penumpukan di beberapa pihak saja. Kurang optimalnya pembagian kerja oleh pengelola cukup mempengaruhi hasil pengelolaan program kesetaraan yang ada.

Di tahap evaluasi ada beberapa masalah yang menyangkut tidak konsistennya pemberian evaluasi hasil belajar harian atau tengah semester oleh tutor kepada warga belajar sebab hal tersebut sepenuhnya merupakan tanggungjawab lembaga. Selain itu ada pula masalah internal yang mana evaluasi penyelenggaraan program di PKBM Rangsang Imo Joyo tidak berjalan tertib yang diiringi pula oleh kurang intensnya pembinaan dari pihak Kelurahan Patangpuluhan. Walau demikian, sebelum vakum PKBM Rangsang Imojoyo telah meluluskan dua generasi pada program kesetaraan. Lulusan pertama yakni periode 2006-2009, lulusan kedua yakni periode 2009-2011. Setelah vakum pada 2012, ditahun 2013 PKBM Rangsang Imojoyo mulai aktif kembali. Angkatan 2013 hingga 2015 kini mengalami penyusutan warga belajar namun pembelajaran program kesetaraan di PKBM tetap berjalan.

Maka dari itu, penelitian ini ingin menjelaskan bagaimana bentuk dan pola pengelolaan program pendidikan kesetaraan jika ditinjau dari teori pengelolaan, peraturan pemerintah dan kebijakan penyelenggara program tersebut melalui tiga tahap pengelolaan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

## B. Identifikasi Masalah

1. Pada tahap perencanaan, sistem penerimaan lembaga menghasilkan warga belajar program kesetaraan yang sedikit dan lembaga belum memiliki gedung pribadi untuk kegiatan pembelajaran.
2. Pada tahap pelaksanaan, pembagian kerja oleh pengelola tidak merata serta kehadiran tutor dan warga belajar kurang tertib sehingga mempengaruhi sistem pembelajaran dan hambatan keuangan dialami lembaga dengan dihentikannya BOK dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta karena jumlah warga belajar tidak memenuhi standar minimal.
3. Evaluasi belajar diserahkan pada lembaga namun belum konsisten dilaksanakan dan evaluasi penyelenggaraan program oleh pembina dan internal lembaga tidak berjalan tertib dan intens.

## C. Batasan Masalah

Pengelolaan program ini akan dilihat melalui 3 tahap manajemen yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi. Komponen yang diteliti melalui komponen tersebut adalah Pengelolaan Peserta didik (Warga Belajar), Kurikulum, Personalia (Pendidik dan Tenaga Kependidikan), Sarana Prasarana, dan Keuangan. Data yang diambil berkaitan dengan program kesetaraan paket B dan C di PKBM Rangsang Imojoyo, Wirobrajan Yogyakarta.



D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perencanaan program kesetaraan paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana pelaksanaan program kesetaraan paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta?
3. Bagaimana evaluasi program kesetaraan paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta?

E. Tujuan Masalah

1. Mendeskripsikan perencanaan program kesetaraan paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta
2. Mendeskripsikan pelaksanaan program kesetaraan paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta
3. Mendeskripsikan evaluasi program kesetaraan paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dalam rangka mendukung kajian tentang “Pengelolaan Program Pendidikan Kesetaraan”.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memperluas pengetahuan di bidang pendidikan yang terkait dengan pengelolaan pendidikan nonformal khususnya program kesetaraan di lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Wawasan pengetahuan

ini juga dapat menjadi wacana pengetahuan bagi mahasiswa di lingkungan pendidikan, khususnya bidang Manajemen Pendidikan.

c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan peneliti-peneliti selanjutnya yang mempunyai obyek penelitian yang sama.

## 2. Secara Praktis

Memberi informasi mengenai bentuk pengelolaan beserta program kesetaraan yang ada di PKBM Rangsang Imojoyo sehingga pengelola bisa melihat secara nyata capaian kinerja pengelola selama ini terhadap peraturan maupun *outcome* yang dihasilkan. Jika bentuk pengelolaan sudah diketahui, maka dapat meminimalisir masalah yang bisa timbul di pengelolaan lembaga. Hal ini bermanfaat secara sempit dan luas.

## **BAB II KAJIAN TEORI**

### **A. Kajian Teoritis**

#### **1. Konsep Dasar Manajemen dan Manajemen Pendidikan**

##### **a. Pengertian Manajemen**

Istilah *management* dalam bahasa Inggris (yang diserap dalam bahasa Indonesia) mengandung dua substansi menurut Tim Dosen AP UNY (2010:7) yaitu “manajemen sebagai proses atau kegiatan memanajementi dan sebagai orang yang melakukan kegiatan manajemen tersebut (*manager*).”

Manajemen bukan sekedar proses melakukan sesuatu, melainkan sebagai seni. Mary Parker Follet (dalam Sule dan Saefullah, 2010:5) menegaskan bahwa “*manajemen is the art of getting things done through people*.” Artinya, manajemen adalah seni menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Manajemen sebagai seni sangat tergantung pada subyek yang melaksanakannya.

Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Nickels dkk. (dalam Sule dan Saefullah, 2010:6). Mereka menyebutkan pengertian manajemen sebagai “*the process used to accomplish organizational goals through planning, organizing, directing, and controlling people and other organizational goals*”. Berbagai definisi dari kata manajemen, namun menurut perkembangan sekarang ini, “Manajemen bukan sekedar menyelenggarakan atau melaksanakan sesuatu, melainkan

menyelenggarakan atau melaksanakannya dengan lebih baik, yaitu dengan ditata dan diatur”, (Tim Dosen AP UNY, 2010:8).

Didin dan Imam (2013: 36) menyebutkan fungsi-fungsi manajemen menurut para ahli, antara lain: 1) Henry Fayol (Perencanaan, Pengorganisasian, Pemberian Perintah, Pengoordinasian, Pengendalian), 2) G.R Terry (Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pengendalian), 3) James Stoner (Perencanaan, Pengorganisasian, Memimpin, Pengendalian), dan 4) Louis A. Allen (Perencanaan, Penyusunan Kerja, Memimpin, Pengendalian).

Selanjutnya Didin dan Imam menjelaskan bahwa persamaan dari beberapa pendapat tersebut adalah Perencanaan, Pengorganisasian, dan Pengendalian. Sedangkan perbedaannya ada pada makna pelaksanaan (*actuating*) yang disebutkan melalui kata pemberian perintah, pelaksanaan, dan memimpin.

Dalam penelitian ini, peneliti lebih menitikberatkan fungsi manajemen kedalam 3 tahap sebagai pola penelitian sekaligus bahan pembahasan yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi.

#### b. Pengertian Manajemen Pendidikan

Dalam konteks lingkungan pendidikan, Manajemen adalah perencanaan program sekolah, pelaksanaan program sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, pengawas/evaluasi, dan sistem

informasi sekolah (Usman, 2011: 5). Lebih lanjut Usman (2011: 12)

mengemukakan definisi manajemen pendidikan sebagai berikut:

Manajemen pendidikan adalah seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Berdasar pada fungsi manajemen dalam Didin dan Imam di atas, ada tiga fungsi yang dibahas dalam penelitian ini yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang menyangkut tentang pendidikan nonformal khususnya pada pendidikan kesetaraan yang dilihat dari lima bidang manajemen berdasar pembatasan penelitian ini yaitu warga belajar, tenaga pendidik dan kependidikan (tutor dan pengelola), kurikulum, sarana prasarana, dan keuangan.

#### 1) Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap paling awal dalam fungsi-fungsi manajemen.

Perencanaan diartikan sebagai suatu proses kegiatan pemikiran yang sistematis mengenai apa yang akan dicapai, kegiatan yang harus dilakukan, langkah-langkah, metode, dan pelaksana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan pencapaian tujuan yang dirumuskan secara rasional dan logis serta berorientasi ke masa depan (Burhanuddin dalam Didin dan Imam, 2013: 126).

Perencanaan mencakup perumusan tujuan dan langkah strategis di masa depan demi mencapai tujuan. Perencanaan merupakan langkah awal yang juga menentukan hasil di masa

depan karena dari tahap ini akan diketahui sasaran-sasaran program dengan pemilihan prioritas dan beberapa hal yang bisa dikesampingkan. Dengan begitu perencanaan bisa membantu pelaksanaan secara baik, namun tetap harus didukung dengan segala sumber daya yang memadai dan saling bersinergi.

Menurut Sri Minarti (2011: 162), fungsi perencanaan bagi warga belajar adalah penerimaan siswa baru menyangkut waktu, persyaratan, dan proses penerimaan. Pada hakikatnya, penerimaan siswa baru bukan sekedar menerima siswa melainkan juga menyeleksi sesuai persyaratan yang ditetapkan.

Sri Minarti (2011: 134) juga menjelaskan perencanaan tenaga kependidikan meliputi kepastian jumlah dan kualitas pegawai, pengadaan pegawai, dan sistem penyusunan formasi melalui beberapa cara seperti persiapan, pemberian tes, wawancara, evaluasi medis, dan keputusan.

Perencanaan kurikulum menurut Sri Minarti (2011: 96) menyangkut penetapan tujuan dan memperkirakan cara pencapaian tujuan tersebut. Guru sebagai manajer hendaknya mampu mengelola kelas. Pada tahap ini perlu dijabarkan melalui Rencana Pembelajaran (a) menjabarkan silabus, (b) menghitung hari kerja efektif dan jam pelajaran, (c) menyusun program kerja tahunan, dan (d) menyusun program semester.

Sri Minarti (2011: 253) menjelaskan bahwa dalam perencanaan sarana prasarana harus memperhatikan syarat antara lain: (a) pengadaan harus integral dengan peningkatan kualitas, (b) perencanaan harus jelas, (c) berdasar kesepakatan bersama, (d) mengikuti pedoman, (e) sesuai plafon anggaran dan prosedur yang berlaku.

Perencanaan pembiayaan menurut (Sri Minarti, 2011: 229) mencakup dua kegiatan yaitu: (a) Penyusunan anggaran biaya dalam hal ini adalah sumber pendanaan dan pengeluaran, (b) Pengembangan Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RAPBS).

Berdasar pada uraian di atas, dalam tahap perencanaan dibahas :

- a) Penerimaan dan seleksi warga belajar baru
- b) Perekrutan dan seleksi tenaga kependidikan
- c) Penetapan Kurikulum
- d) Penyusunan sarana prasarana
- e) Sumber dana pendidikan kesetaraan.

## 2) Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan fungsi manajemen dengan maksud memastikan kinerja sumber daya harus sejalan dengan rencana kerja yang telah disusun, kecuali memang ada hal-hal khusus, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Penyesuaian bukan berarti merubah tujuan hanya merubah pola dalam pencapaian tujuan

tersebut. Setiap sumber daya khususnya sumber daya manusia harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi dan perannya masing-masing.

Keterangan tersebut senada dengan pendapat Didin dan Imam (2013: 131) yang menyatakan bahwa pelaksanaan (*actuating*) adalah upaya untuk menggerakkan atau mengarahkan tenaga kerja serta mendayagunakan fasilitas yang ada untuk melaksanakan pekerjaan secara bersama.

Dalam tahap pelaksanaan, warga belajar masuk dalam proses pembelajaran. Sri Minarti (2011: 170) menjelaskan bahwa pengelolaan proses pembelajaran merupakan pemberdayaan peserta didik yang dilakukan melalui interaksi perilaku guru dan peserta didik baik di ruang maupun di luar kelas. Sri Minarti (2011: 193) menambahkan bahwa menegakkan kedisiplinan bagi peserta didik tidak bertujuan mengurangi kebebasan namun sebaliknya yaitu untuk memberi kemerdekaan lebih besar kepada peserta didik dalam batas-batas kemampuannya.

Pelaksanaan tugas pengelola dan tutor dapat dilihat dari kegiatan sehari-hari sesuai peraturan yang disepakati. Sri Minarti (2011: 140) menjelaskan bahwa ketika tenaga kependidikan sudah bekerja dan mampu mengisi kekosongan jabatan yang ada, kepala wajib menjaga atau memelihara tenaga kependidikan itu untuk tetap profesional dan memiliki kinerja yang tinggi.



Pelaksanaan kurikulum telah dipaparkan Sri Minarti (2011: 97) dengan mengatakan bahwa pelaksanaan kurikulum adalah proses yang memberikan kepastian bahwa pembelajaran telah memiliki SDM dan sarana prasarana yang diperlukan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Pemanfaatan sarana prasarana harusnya menyangkut pemeliharaan dan penataan, menurut Sri Minarti (2011: 268) tujuan dari pemeliharaan sarana prasarana ini adalah: (a) mengoptimalkan usia pakai, (b) menjamin kesiapan operasional, (c) menjamin ketersediaan, dan (d) menjamin keselamatan pemakai.

Pelaksanaan pembiayaan menurut Sri Minarti (2011: 239) secara garis besar dapat dikelompokkan dalam dua kegiatan yaitu: (a) penerimaan pembiayaan pendidikan dari sumber-sumber dana yang menyangkut anggaran rutin, anggaran pembangunan, anggaran penunjang, dana masyarakat, donatur, dan lainnya; (b) pengeluaran yaitu penggunaan dana dari berbagai sumber perlu digunakan secara efektif dan efisien.

Berdasar pada uraian di atas, dalam tahap pelaksanaan dibahas :

- a) Pelaksanaan tugas dan pemenuhan kebutuhan warga belajar
- b) Pelaksanaan tugas pengelola
- c) Pelaksanaan tugas tutor

- d) Pemanfaatan sarana prasarana
  - e) Pelaksanaan pembiayaan pendidikan
- 3) Evaluasi

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa di dalam tahapan pengawasan dilakukan evaluasi untuk memperoleh umpan balik sebagai dasar perencanaan selanjutnya, atau untuk perencanaan kembali. Sebagai bagian dari fungsi manajemen, fungsi evaluasi tidaklah berdiri sendiri, ada pemantauan dan pelaporan.

Evaluasi sangat bermanfaat agar organisasi tidak mengulangi kesalahan yang sama setiap kali. Menurut Sudjana (2004: 248) evaluasi merupakan kegiatan penting untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai serta dampak apa yang terjadi setelah program dilaksanakan. Sementara Imam dan Didin (2013: 370) menyatakan evaluasi dalam konteks pembelajaran menjadi umpan balik bagi guru dalam memperbaiki dan menyempurnakan program dan kegiatan pembelajaran.

Farida Yusuf dalam Imam dan Didin (2013: 387) menyampaikan dua model evaluasi yaitu formatif dan sumatif. Model evaluasi formatif digunakan untuk memperoleh informasi dan membantu memperbaiki program yang sedang dilaksanakan,, sedangkan model evaluasi sumatif dilakukan di akhir program

untuk menilai apakah program diteruskan, direvisi, atau dihentikan.

Dalam penelitian ini akan ditemukan: a) evaluasi hasil belajar dan, b) evaluasi program sehingga pendidikan kesetaraan tetap berjalan walaupun dengan berbagai masalah yang ada selama proses pengelolaan program.

## 2. Pendidikan Nonformal

### a. Konsep Dasar Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal merupakan jenis pendidikan yang bukan di sekolah formal dan bukan pendidikan keluarga. Pendidikan ini disebut juga Pendidikan Luar Sekolah. Pendidikan luar sekolah lebih menitikberatkan pendidikan oleh, dari, dan untuk masyarakat. Pendidikan non formal memiliki ciri-ciri yang berbeda dari pendidikan sekolah. Namun kedua pendidikan tersebut saling menunjang dan melengkapi. Dengan meninjau sejarah dan banyaknya aktivitas, pendidikan non formal memiliki ciri-ciri yang dijelaskan Ishak Abdulhak (2012: 25) sebagai berikut:

- 1) Bertujuan untuk memperoleh keterampilan yang segera akan dipergunakan.
- 2) Pendidikan non formal menekankan pada belajar yang fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dalam kehidupan peserta didik.
- 3) Berpusat pada peserta didik. Dalam pendidikan non formal dan belajar mandiri, peserta didik adalah pengambilan inisiatif dan mengontrol kegiatan belajarnya.
- 4) Waktu penyelenggaraannya relative singkat, dan pada umumnya tidak berkesinambungan.

- 5) Menggunakan kurikulum kafetaria. Kurikulum bersifat fleksibel, dapat dimusyawarahkan secara terbuka, dan banyak ditentukan oleh peserta didik.
- 6) Menggunakan metode pembelajaran yang partisipatif, dengan penekanan pada belajar mandiri.
- 7) Hubungan pendidik dengan peserta didik bersifat mendatar. Pendidik adalah fasilitator bukan menggurui. Hubungan diantara kedua pihak bersifat informal dan akrab, peserta didik memandang fasilitator sebagai narasumber dan bukan sebagai instruktur.
- 8) Penggunaan sumber-sumber lokal. Mengingat sumber-sumber untuk pendidikan sangat langka, maka diusahakan sumber-sumber lokal digunakan seoptimal mungkin.

Pendidikan nonformal merupakan kebutuhan bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi warga masyarakat dengan dana dan daya mandiri. Dengan demikian, “Khalayak sasaran pendidikan non formal adalah semua orang yang membutuhkan layanan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan dalam upaya menggapai derajat, martabat, dan kualitas hidup yang lebih baik dan lebih bermakna.”, (Ishak Abdulhak, 2012: 45).

Pendidikan nonformal berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor : 20 tahun 2003 disebutkan secara jelas “Diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat”. Penambah sekolah formal maksudnya adalah memberi kesempatan bagi peserta didik atau masyarakat untuk memperdalam pengetahuan yang didapat di sekolah. Pelengkap sekolah formal maksudnya adalah memberi pengetahuan maupun

keterampilan baru yang belum didapat di sekolah. Sedangkan manfaat sebagai pengganti sekolah formal maksudnya adalah memberi peluang bagi anak-anak atau masyarakat umum yang belum memperoleh kesempatan menuntut ilmu di sekolah formal. Selain mendukung program pendidikan sepanjang hayat, pendidikan nonformal sangat bermanfaat bagi masyarakat awam karena salah satu prinsipnya yaitu mengutamakan pembelajaran partisipatif. Menurut Sujarwo (2013: 27) pembelajaran partisipatif melibatkan warga belajar dalam proses membuat rencana, kegiatan proses belajar-mengajar (PBM) , dan evaluasinya. Pembelajaran partisipatif menggunakan metode pembelajaran orang dewasa, maka pengertian orang dewasa menurut Suprijanto (2007: 14) adalah:

Pendidikan bagi orang dewasa yang menggunakan sebagian waktunya dan tanpa dipaksa ingin meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan mengubah sikapnya dalam rangka pengembangan dirinya sebagai individu dan meningkatkan partisipasi dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya secara seimbang dan utuh.

Kedua hal tersebut tercantum dalam pengembangan pembelajaran pendidikan noformal yang mana memiliki sasaran sangat bervariasi dan umum.

#### b. Manajemen Pendidikan Nonformal

Fungsi manajemen itu bewujud kegiatan berurutan dan berhubungan sehingga satu kegiatan menjadi syarat bagi kegiatan lainnya. Adapun fungsi manajemen pendidikan dari segi nonformal dapat dilihat dari hal dibawah ini:

### 1) Perencanaan

Langkah-langkah perencanaan program nonformal dilakukan kegiatan: Pertama, penelaahan kebijakan; Kedua, penelaahan terhadap kebutuhan belajar masyarakat (Sudjana, 2004: 102).

Pada langkah penyusunan program dilakukan identifikasi potensi dan seleksi sasaran program, pengolahan data, menyusun proposal, memotivasi calon warga belajar, melaksanakan evaluasi dan menganalisis hasil evaluasi (Sudjana, 2004: 103).

Berdasar pada uraian di atas, perencanaan pendidikan nonformal menyangkut:

- a) Identifikasi sasaran
- b) Persiapan administrasi
- c) Penyusunan proposal
- d) Persiapan pembelajaran

### 2) Penggerakan

Tahapan penggerakan dalam penyelenggaraan program di lapangan menurut Sudjana (2004: 203) adalah melakukan konsultasi kepada pemuka masyarakat, berkomunikasi dengan sasaran, menjelaskan manfaat program, dan mencatat sasaran dan kegiatan.

Konsultasi ini dapat diperoleh masukan antara lain tentang kondisi masyarakat, saran-saran untuk pelaksanaan program.

Komunikasi dengan sasaran menggunakan materi, metode dan teknik, serta waktu dan tempat pelaksanaan program.

Pelaksanaan program harus dapat menarik perhatian warga belajar sehingga bisa membangkitkan motivasi sehingga dapat memecahkan masalah yang telah terkonsep.

Sasaran kegiatan dicatat dalam daftar yang telah disiapkan berikut kejadian yang dianggap penting.

Berdasar uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pergerakan nonformal terdiri dari:

- a) Konsultasi dengan pembina
- b) Komunikasi yang baik untuk semua pihak
- c) Pemanfaatan materi dan metode pembelajaran
- d) Sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan
- e) Strategi pembelajaran yang berpusat pada warga belajar.

### 3) Evaluasi

Kategori pendekatan evaluasi dibagi menjadi penilaian untuk pengambilan keputusan, bagian program, jenis data dan kegiatan program, proses evaluasi, pencapaian tujuan, dan evaluasi hasil serta pengaruh (Sudjana, 2004: 303).

Evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini ada dalam bagian-bagian di atas, yakni evaluasi program dan evaluasi hasil kegiatan yang difokuskan pada pembelajaran.

### 3. Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket

#### a. Konsep Dasar dan Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan

Kedudukan pendidikan kesetaraan telah tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 ayat (6) bahwa hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Program Pendidikan Kesetaraan meliputi program Kelompok belajar paket A setara SD, Kelompok Belajar paket B setara SMP dan Kelompok Belajar paket C setara SMA. Program Kesetaraan berperan sebagai pengganti pendidikan di jalur formal. Pendidikan non formal yang difokuskan dalam penelitian ini adalah program pendidikan kesetaraan paket B dan C.

Draft Standar Nasional Pendidikan Nonformal Pasal 27 ayat 1 dan 5 menyatakan bahwa Pengelolaan Program Kesetaraan dilakukan oleh satuan program pendidikan kesetaraan yang terdiri dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Kelompok Belajar (KB), dan satuan pendidikan sejenis. Setiap satuan program pendidikan kesetaraan harus memiliki pedoman yang mengatur kurikulum, kalender pendidikan/akademik, struktur organisasi, pembagian tugas di antara pendidik, pembagian tugas di antara tenaga kependidikan, peraturan akademik, tata tertib, kode etik, dan biaya operasional.

Beberapa hal tersebut sudah seharusnya dimiliki program kesetaraan agar pengelolaan berjalan secara terarah. Kurikulum memastikan pembelajaran berjalan secara teratur, kalender pendidikan dapat menjadi pedoman pengelola maupun pendidik untuk



menyiapkan dan melaksanakan tugas masing-masing, struktur pendidikan menggambarkan sistem birokrasi yang menyangkut segala hal dalam program kesetaraan, pembagian tugas diantara pendidik dan tenaga kependidikan dimaksudkan pula untuk membagi pekerjaan sesuai porsi masing-masing dengan melihat jobdesk yang diampu dengan target penyelesaian yang sudah ditentukan, peraturan akademik/tata tertib/kode etik secara tidak langsung memberi stimulus kepada semua pihak untuk bersikap sebagaimana aturan telah ditetapkan demi tertibnya pelaksanaan kesetaraan, dan aspek terakhir adalah biaya operasional yang mana menjadi hal pokok pada setiap pengelolaan program karena biaya menjadi tonggak berjalannya sumber daya yang lain.

Sebagai sebuah pendidikan alternatif, pendidikan kesetaraan mempunyai sasaran peserta didik yang spesifik, yaitu anak usia sekolah maupun dewasa yang belum menyelesaikan pendidikan formal karena adanya lima hambatan, yaitu ekonomi, waktu, geografis, keyakinan, dan sosial/hukum (Ida Kintamani, 2012: 4). Hal ini menggambarkan bahwa program kesetaraan membantu menyelesaikan permasalahan pendidikan dengan maksud ikut menuntaskan pendidikan bagi masyarakat. Masalah ekonomi, geografis, sosial, dan lain sebagainya memang hambatan pendidikan, tetapi bukan berarti pendidikan berjuang sendiri untuk menghadapinya.

Aspek selain pendidikan juga harus mengemban tanggungjawab untuk menekan permasalahan yang dihadapi masyarakat umum.

Lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan salah satunya adalah PKBM. Mustofa Kamil (2011: 128) menerangkan beberapa prinsip yang perlu diterapkan dalam pengelolaan program PKBM sebagai strategi pembelajaran dan sekaligus sebagai wadah proses pembelajaran yaitu:

- 1) Partisipasi warga belajar dalam pengelolaan pembelajaran,
- 2) Pemberian tanggungjawab kepada warga belajar dalam mengelola kegiatan pembelajaran itu sendiri.

Pengelolaan program kesetaraan tidak akan berjalan tanpa pengelola yang menggerakkannya. Aturan pengelola bagi program kesetaraan adalah sebagai berikut :

Draf SNPPNF Th. 2013 Pasal 23 ayat (3) menyebutkan bahwa tenaga kependidikan (pengelola) yang harus ada untuk menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan paling kurang: 1 (satu) orang dan tenaga administrasi 1 (satu) orang yang bertanggungjawab pada pengelolaan keuangan, sarana prasarana, serta administrasi pembelajaran.

Draft Standar Nasional Pendidikan Nonformal Pasal 27 ayat 5 menyebutkan, Pengelola adalah warga masyarakat yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dan bertugas mengelola kegiatan program pendidikan kesetaraan. Tenaga administrasi adalah warga masyarakat yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dan bertugas menyelenggarakan administrasi pada program pendidikan kesetaraan.

Kualifikasi akademik bagi Pengelola program kesetaraan adalah Lulusan MA/SMK/MA/Paket C dan telah memperoleh sertifikat

pelatihan sebagai pengelola pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C yang dilakukan oleh Jurusan PLS terakreditasi minimal B, atau PPPNFI atau BPPNFI, (Permendiknas No. 44 Tahun 2009). Aturan tersebut menyangkut pula dengan kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh pengelola program kesetaraan. Adapun kompetensi yang harus dimiliki pengelola program kesetaraan ada tiga yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi manajerial.

- 1) Kompetensi kepribadian
  - a) Melaksanakan tugas atas dasar keimanan, akhlak mulia dan panggilan jiwa
  - b) Memiliki jiwa kewirausahaan.
- 2) Kompetensi Sosial
  - c) Membangun komunikasi dan kerjasama
  - d) Mempunyai tanggungjawab sosial atas kinerja dan citra program.
- 3) Kompetensi Manajerial
  - e) Memimpin penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
  - f) Memotivasi semua komponen penyelenggara Pendidikan Kesetaraan
  - g) Merencanakan penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan
  - h) Mengorganisasikan penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
  - i) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program pendidikan Kesetaraan
  - j) Mengendalikan program Pendidikan kesetaraan.

Selain itu, ada satu peraturan yang bisa dijadikan strategi pemecahan masalah saat lembaga belum bisa memenuhi kebutuhan sumber daya manusianya, yaitu: Draf SNPPNF Th. 2013 Pasal 23 ayat (4) yang berisi: Fungsi Tenaga Kependidikan (Pengelola) dapat dijalankan oleh Tenaga Pendidik (Tutor).

b. Program Kesetaraan Paket B dan C

1) Pengertian Program Kesetaraan Paket B dan C

Pengertian ini tertera dalam petunjuk teknis (juknis) program kesetaraan paket B dalam Ditjen PAUD-DIKMAS (2015.a: 5):

Program Pendidikan Kesetaraan Paket B adalah layanan pendidikan melalui jalur pendidikan nonformal yang ditujukan bagi anak yang karena berbagai faktor tidak dapat menyelesaikan pendidikannya di tingkat SMP/MTs (putus sekolah di SMP/MTS atau putus lanjut SD), yang diselenggarakan oleh lembaga/organisasi atau satuan pendidikan nonformal sehingga pada gilirannya lulusannya diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinyatakan dan diakui setara dengan lulusan SMP/MTs).

Menurut pengertian di atas, tujuan paket B adalah menetaskan wajib belajar sembilan tahun yang saat ini dilaksanakan oleh pendidikan Indonesia. Program kesetaraan paket B termasuk dalam ranah pendidikan dasar. Program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mendapat ijazah setara dengan SMP, dimana ijazah tersebut dapat digunakan sebagai syarat untuk menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun dan berguna bagi syarat untuk menempuh pendidikan tingkat atas setara SMA/ sederajat.

Pendidikan kesetaraan setingkat SMA/ sederajat adalah program kesetaraan paket C, pengertiannya menurut Ditjen PAUD-DIKMAS (2015.b: 5) sebagai berikut:

Program Pendidikan Kesetaraan Paket C adalah layanan pendidikan melalui jalur pendidikan nonformal yang ditujukan bagi masyarakat yang karena berbagai faktor tidak

dapat menyelesaikan pendidikannya atau putus sekolah di tingkat SMA/SMK/MA, yang diselenggarakan oleh lembaga/organisasi atau satuan pendidikan nonformal sehingga pada gilirannya lulusannya diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinyatakan dan diakui setara dengan lulusan SMA/MA.

Penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan Paket C bertujuan untuk PAUD-DIKMAS (2015.b: 6):

- a) Menyediakan layanan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal untuk menjaring anak-anak yang putus sekolah di tingkat SMA/SMK/MA untuk mensukseskan rintisan wajib belajar pendidikan menengah
- b) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga belajar sehingga memiliki kemampuan yang setara dengan SMA/MA
- c) Membekali dasar-dasar kecakapan hidup yang bermanfaat untuk bekerja mencari nafkah atau berusaha mandiri
- d) Membekali pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga belajar yang memungkinkan lulusan program dapat meningkatkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, atau meningkatkan kariernya dalam pekerjaannya.

Selain pengetahuan umum, program kesetaraan juga ingin mengembangkan keterampilan dan sikap warga belajarnya dengan maksud mempersiapkan tenaga kerja dibidangnya untuk mensejahterakan masyarakat.

## 2) Lembaga Penyelenggara Paket B dan C

Draft SNPNF Pasal 27 ayat 1 dan 5 menyatakan bahwa Pengelolaan Program Kesetaraan dilakukan oleh satuan program pendidikan kesetaraan yang terdiri dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Kelompok Belajar (KB), dan satuan pendidikan sejenis. Adapun kriteria untuk lembaga penyelenggara

Paket B dan C menurut Ditjen PAUD-DIKMAS (2015.a.b: 7-8)

adalah :

- a) Administratif:
  - i) memiliki legalitas, berupa akte notaris pendirian lembaga, dan/atau ijin operasional lembaga dari instansi berwenang
  - ii) memiliki rekening bank atas nama lembaga
  - iii) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga
  - iv) memperoleh rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/ kota setempat.
- b) Substantif:
  - i) memiliki sekretariat lembaga dengan alamat yang jelas
  - ii) memiliki susunan pengurus yang dilengkapi dengan uraian tugas
  - iii) mampu menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran/pelatihan
  - iv) dapat menyediakan tutor/narasumber yang kompeten sesuai bidang studi atau mata pelajaran yang dibelajarkan
  - v) sanggup melaksanakan proses pembelajaran dan pelatihan bagi warga belajar sesuai standar kompetensi yang ditentukan sampai dengan akhir program.

### 3) Perencanaan Program Kesetaraan Paket B dan C

Schaffer dalam Sudjana (2004:57) kegiatan perencanaan tidak akan terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan. Perencanaan Paket B dan C dimulai dengan perumusan tujuan Paket B dan C, kemudian lanjut pada sasaran secara umum yang dikembangkan dalam bentuk rencana penerapan tujuan yang lebih rinci dalam setiap kegiatan. Adapun tahapan perencanaan program Paket B dan C menurut Ditjen PAUD-DIKMAS (2015.a: 10) yaitu pendataan dan seleksi calon warga belajar, pembentukan rombongan belajar, pendataan dan

seleksi calon tutor dan narasumber teknis, penetapan tempat pembelajaran dan pelatihan, serta pengusulan bantuan operasional kegiatan.

a) Pendataan dan Seleksi Calon Warga Belajar

Peserta didik di Pendidikan Nonformal sering dikenal dengan istilah Warga Belajar. Lembaga penyelenggara program melakukan pendataan dan seleksi calon warga belajar yang meliputi aspek: nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat tempat tinggal, jenis kelamin, pendidikan terakhir yang pernah diikuti, dan nama ibu kandung (Ditjen PAUD-DIKMAS, 2015.a.b).

Dalam aturan Ditjen PAUD-DIKMAS tersebut juga dijelaskan mengenai Sasaran Program Pendidikan Kesetaraan Paket B adalah warga negara Indonesia yang ingin memperoleh pendidikan setara SMP/MTs yaitu (1) Tamatan Paket A/SD/MI, (2) Putus sekolah di SMP/MTS, dibuktikan dengan raport terakhir, (3) Prioritas bagi anak usia sekolah, (4) Bersedia mengikuti proses pembelajaran dan pelatihan sampai akhir program.

Sasaran Program Pendidikan Kesetaraan Paket C adalah (Ditjen PAUD-DIKMAS, 2015.b: 8) : (1) putus sekolah di kelas X, XI, dan XII di tingkat SMA/SMK/MA, dibuktikan dengan raport terakhir, (2) tamatan Paket B/SMP/MTs,

prioritas bagi anak usia sekolah (< 21 tahun), (3) bersedia mengikuti proses pembelajaran dan pelatihan sampai akhir program.

b) Pendataan dan Seleksi Calon Tutor dan Nara Sumber  
Teknis Paket B dan C

Tutor adalah pendidik yang memberikan bimbingan pada warga belajar dalam proses pembelajaran program Pendidikan Kesetaraan Paket B dan C sesuai dengan kompetensinya (Ditjen PAUD-DIKMAS, 2015.a.b).

Adapun persyaratan calon tutor, adalah sebagai berikut:

- i) Pendidikan minimal S1, prioritas yang berlatar belakang pendidikan keguruan diutamakan yang berprofesi sebagai Guru SMP/MTS (Paket B) dan sebagai Guru SMA/MAN (Paket C)
- ii) Menguasai substansi yang akan dibelajarkan
- iii) Memiliki dasar-dasar kemampuan pembelajaran partisipatif serta mampu mengelola proses pembelajaran orang dewasa
- iv) Bersedia membelajarkan warga belajar sampai akhir penyelenggaraan program.

Peraturan di atas menggambarkan tentang syarat calon tutor sedangkan di bawah ini ada peraturan yang hampir mirip mengenai kualifikasi akademik untuk tutor yang dinyatakan dengan ijazah menurut (Draf SNPPNF Pasal 22 ayat (1)) :

- i) Ijazah sarjana strata satu (S1) atau Diploma Empat (D-IV) pendidikan bidang studi atau sarjana bidang studi yang telah memiliki akta IV yang diperoleh dari program studi terakreditasi untuk melaksanakan proses pembelajaran pada program pendidikan kesetaraan, atau bukti lain bahwa yang bersangkutan mampu melakukan tugas sebagai pendidik suatu mata ajar yang diampu,



- ii) Ijazah serendah-rendahnya Pendidikan Menengah untuk Program Pendidikan Kesetaraan Paket A dan B.

Sedangkan persyaratan untuk calon narasumber teknis adalah:

- iii) Pendidikan tidak dipersyaratkan
- iv) Menguasai atau memiliki keterampilan/keahlian tertentu yang diminati oleh warga belajar
- v) Memiliki sarana dan prasarana pelatihan keterampilan sesuai substansi yang akan dilatihkan.

Data yang dikumpulkan berkaitan dengan calon tutor dan nara sumber teknis adalah: (1) nama lengkap, (2) tempat dan tanggal lahir, (3) alamat tempat tinggal, (4) pekerjaan atau profesi, (5) jenis kelamin, (6) pendidikan terakhir, (7) pelatihan yang pernah diikuti (Ditjen PAUD-DIKMAS, 2015.a.b).

#### c) Penetapan Tempat Pembelajaran dan Pelatihan Paket B dan C

Sarana dan prasarana termasuk kebutuhan yang harus dipersiapkan dalam perencanaan program Paket B dan C. Hal-hal yang termasuk dalam sarana prasarana program Paket B dan C adalah ruangan atau space untuk pembelajaran, alat-alat pembelajaran (papan tulis, spidol, buku pelajaran atau modul, meja, kursi), serta media pembelajaran yang dapat mendukung penyampaian materi kepada warga belajar.

Berdasar pada peraturan Ditjen PAUD-DIKMAS (2015.a.b) dalam menetapkan lokasi pembelajaran dan pelatihan, perlu mempertimbangkan:

- i) Jarak tempuh lokasi tempat belajar, tidak terlalu jauh dari rumah warga belajar, atau mudah dijangkau oleh warga belajar
- ii) Luas ruang belajar yang memadai, minimal bisa memuat sebanyak 15 orang (Paket B) dan minimal memuat 20 orang (Paket C).
- iii) Memiliki sarana belajar, seperti: papan tulis/*whiteboard*, kapur/spidol, meja belajar dan kursi, dan fasilitas pembelajaran lainnya
- iv) Memiliki penerangan yang cukup.

Apabila lokasi atau tempat pembelajaran/pelatihan kurang memadai sesuai persyaratan, dapat dipilih salah satu lokasi atau tempat yang paling mendekati persyaratan sebagai tempat penyelenggaraan program. Bila kondisi lembaga tidak dapat memenuhi hal tersebut secara mandiri, maka ada alternatif berdasar Draf SNPPNF Th. 2013 Pasal 24 ayat (3) yang mengatakan bahwa satuan pendidikan nonformal yang belum memiliki kemampuan untuk menyediakan sarana penunjang penyelenggaraan, dapat bermitra dengan pihak lain yang terkait.

d) Pengusulan Bantuan Operasional Kegiatan Paket B dan C

Menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, manajemen pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hal tersebut didukung oleh Draf Standar Nasional Pendidikan Nonformal Pasal 31 ayat (3) menyatakan bahwa sumber pembiayaan dapat diperoleh dari pemerintah,

pemerintah daerah, yayasan, partisipasi masyarakat dan atau pihak lain yang tidak mengikat.

Pengusulan Bantuan Operasional Kegiatan Paket B dan C dilakukan setelah memiliki data warga belajar, tutor, lokasi penyelenggaraan program, dan kelengkapan sarana dan prasarana pembelajaran/pelatihan.

Menurut Ditjen PAUD-DIKMAS (2015.a.b) Bantuan Operasional Kegiatan Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket B dan C selanjutnya disebut Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) adalah sejumlah dana yang diberikan kepada lembaga penyelenggara program yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran dan pelatihan program Pendidikan Kesetaraan Paket B dan C.

Pemberi BOK adalah pemerintah melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diberikan kepada lembaga penyelenggara program yang ditetapkan sebagai penyelenggara program Pendidikan Kesetaraan Paket B dan C.

Tahapan Penyaluran Dana Bantuan untuk Paket B dan C menurut Ditjen PAUD-DIKMAS (2015.a.b) yaitu (1) Sosialisasi Program, (2) Pengajuan Proposal, (3) Penilaian Proposal, (4) Verifikasi Lembaga, (5) Penetapan Lembaga Penerima Bantuan, (6) Penyaluran Bantuan.

Sebelum melaksanakan pengusulan dana, lebih baik bila merencanakan keuangan terlebih dahulu. Hartani (2011: 156), perencanaan keuangan yang strategis salah satunya diawali dengan analisis sumber-sumber dana dan jumlah nominal yang

mungkin diperoleh serta dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan.

#### 4) Pengorganisasian Program Kesetaraan Paket B dan C

Menurut Yohannes Yahya (2006: 81), pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas atau pekerjaan diantara para anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien.

Dalam mengorganisasikan pembelajaran Paket A, Paket B dan Paket C, pengelola atau penyelenggara harus mampu mengetahui kemampuan tutor dan dapat mendistribusiakan tugas dan tanggung jawab secara tepat serta menetapkan peraturan pelaksanaan dengan maksud agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan sesuai ketentuan (Linatus, 2010: 32).

Pendapat di atas bisa dilengkapi dengan pengorganisasian untuk pengelola program kesetaraan. Pengelola tidak selalu bersentuhan langsung dengan pelaksanaan program namun tugas pokok dan fungsi dari struktur pengelola sebaiknya dipaparkan pula sebagai bentuk pengorganisasian program kesetaraan.

Selain itu, pengorganisasian juga bisa dilaksanakan pada warga belajar dengan mengelompokkan mereka dalam kelompok belajar menurut aturan tertentu. Berikut dijelaskan mengenai pembagian rombongan belajar dalam Paket B dan C.

Rombongan Belajar Paket B merupakan pembagian warga belajar ke dalam beberapa kriteria. Penempatan warga belajar Paket B di kelas VII, VIII atau kelas IX, atas dasar kriteria sebagai berikut (Ditjen PAUD-DIKMAS, 2015.a: 11): (1) Rombongan belajar untuk kelas VII adalah calon warga belajar yang tamat SD/MI atau putus SMP/MTs di kelas VII, (2) Rombongan belajar untuk kelas VIII adalah calon warga belajar yang putus SMP/MTs di kelas VIII, (3) Rombongan belajar untuk kelas IX adalah calon warga belajar yang putus SMP/MTs di kelas IX. Setiap rombongan belajar dapat berjumlah antara 15 – 25 orang warga belajar.

Sementara itu, ada pula Penempatan Rombongan Belajar Paket C di kelas X, XI atau kelas XII, atas dasar kriteria sebagai berikut (Ditjen PAUD-DIKMAS, 2015.b: 12): (1) rombongan belajar untuk kelas X adalah calon warga belajar tamatan Paket B/SMP/MTs atau yang putus SMA/SMK/MA di kelas X, (2) rombongan belajar untuk kelas XI adalah calon warga belajar yang putus SMA/SMK/MA di kelas XI, (3) rombongan belajar untuk kelas XII adalah calon warga belajar yang putus SMA/SMK/MA di kelas XII. Setiap rombongan belajar dapat berjumlah antara 20 – 30 orang warga belajar.

5) Pelaksanaan Program Kesetaraan Paket B dan C

a) Lembaga Penyelenggara Program Paket B dan C

Dalam pelaksanaan program kesetaraan paket B dan C, lembaga penyelenggara memiliki tugas pokok sebagai berikut

(Ditjen PAUD-DIKMAS, 2015.a.b) :

- i) Bertanggungjawab penuh atas penyelenggaraan program
- ii) Membuat dan menyusun silabus pembelajaran dan pelatihan sebagai dasar penyusunan rpp oleh tutor dan nara sumber teknis
- iii) Membuat pedoman penyelenggaraan program
- iv) Membuat jadwal pembelajaran dan pelatihan
- v) Menyediakan dan menyiapkan sarana/prasarana pembelajaran dan pelatihan serta fasilitas belajar (teori dan praktek) yang diperlukan
- vi) Membuat dan menyusun peraturan dan tata tertib pembelajaran dan pelatihan
- vii) Menyediakan dan mengadministrasikan dokumen pendukung penyelenggaraan program, seperti: buku presensi peserta didik dan tutor, kapur atau spidol, alat dan bahan praktek keterampilan, buku evaluasi kemajuan belajar warga belajar
- viii) Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan program
- ix) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan program
- x) Menilai keaktifan dan kemampuan tutor
- xi) Menumbuhkan dan memotivasi minat belajar warga belajar.

b) Warga Belajar Paket B dan C

Warga belajar merupakan input penting yang menjadi fokus dalam pelaksanaan program kesetaraan paket B dan C. Adapun kewajiban warga belajar selama pelaksanaan program menurut Ditjen PAUD-DIKMAS (2015.a.b) adalah sebagai berikut (1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dan

pelatihan sesuai jadwal yang ditentukan, (2) mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang ditentukan, serta mentaati tata tertib yang disepakati, (3) menghargai dan menghormati tenaga pendidik (tutor dan nara sumber teknis) dan tenaga kependidikan (pengurus atau pengelola lembaga penyelenggara program), (4) memelihara dan merawat sarana/prasarana pembelajaran dan pelatihan.

Selain kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga belajar, adapula Hak warga belajar yang harus dipenuhi oleh tenaga pendidik dan kependidikan di program kesetaraan Paket B dan C menurut Ditjen PAUD-DIKMAS (2015.a.b). Hak tersebut yaitu (1) memperoleh bimbingan, pengajaran, dan pelatihan sesuai dengan kurikulum dan silabus pembelajaran dan pelatihan yang ditentukan, (2) memperoleh bahan belajar/modul yang digunakan, (3) memperoleh penilaian hasil belajar, sesuai dengan tahap-tahapannya, (4) mengikuti evaluasi hasil belajar dan ujian nasional yang dilaksanakan pemerintah.

c) Tutor dan Nara Sumber Teknis Paket B dan C

Dijelaskan dalam Ditjen PAUD-DIKMAS (2015.a.b) tentang tugas Tutor dan Nara Sumber Teknis program paket B dan C selama pelaksanaan program: (1) menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran/pelatihan (RPP), (2) mendidik,

mengajar, dan melatih peserta didik sesuai dengan bidang studi yang dipelajari baik di dalam kelas maupun di luar kelas, (3) membuat bahan belajar pelengkap yang diperlukan untuk mempercepat penguasaan warga belajar terhadap bidang studi yang dipelajari, (4) menilai perkembangan hasil belajar warga belajar, (5) menumbuhkan dan memotivasi minat belajar warga belajar.

d) Pelaksanaa Pembiayaan Pendidikan

Mulyasa dalam Sri Minarti (2011: 211) menyebutkan ada tiga kegiatan pokok atau tiga fase yang harus dilakukan dalam manajemen keuangan yaitu perencanaan pembiayaan (budgeting), pelaksanaan pembiayaan (accounting), dan evaluasi pembiayaan (controlling).

Draf SNPPNF Pasal 31 ayat (2) menyebutkan jenis dan pemanfaatan pembiayaan pendidikan kesetaraan yaitu:

- i) Biaya investasi, untuk pengadaan sarana prasarana, dan pengembangan SDM,
- ii) Biaya operasional, untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan (pengelola) serta tunjangan yang melekat, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya operasional pendidikan tak langsung,
- iii) Biaya personal, meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran.

Langkah awal pengelolaan anggaran biaya pendidikan mencakup dua hal menurut Sri Minarti (2011: 229) :



- i) Penyusunan anggaran pembiayaan yang dikembangkan dalam format sumber pendanaan dan pengeluaran,
  - ii) Pengembangan Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RAPBS), kegiatan ini termasuk kelanjutan poin di atas.
- e) Proses Pembelajaran dan Pelatihan Paket B dan C
- i) Pembelajaran Akademik

Pembelajaran pada Pendidikan Kesetaraan adalah serangkaian kegiatan yang diciptakan oleh tutor untuk mendorong dan menggiatkan aktivitas pembelajaran (Linatus, 2010: 20).

Pendidikan akademik mayoritas dilakukan di dalam kelas. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan ruang kelas menurut Hartani (2011: 145) adalah:

(1) Kapasitas Ruang : standar yang dipakai saat ini adalah antara 32-40 peserta didik per kelas. Semakin kecil jumlah peserta didik akan semakin tinggi tingkat interaksi antara guru dan peserta didik. (2) Jadwal Penggunaan Ruang : (a) menetap, peserta didik tetap di ruangan dan guru yang menghampiri, (b) bergerak, peserta didik bergerak menuju ruang kelas tempat guru mengajar mata pelajaran tertentu. (3) Pengaturan tata letak ruang kelas : tempat duduk dapat diatur setiap saat untuk kegiatan kelompok kecil atau kelompok besar, posisi tempat duduk dapat ditukar antar peserta didik pada waktu tertentu, dan mengganti posisi hiasan ruangan untuk menghindari kebosanan. (4) Kebersihan dan keindahan ruang kelas yang ditujukan untuk kenyamanan guru serta peserta didik dalam proses pembelajaran.

Pembelajaran akademik dilakukan sesuai ketentuan standar isi dan standar proses, yaitu: (1) pembelajaran

dilakukan minimal 2 hari dalam seminggu @3 jam pelajaran, atau 3 hari dalam seminggu @2 jam pelajaran, (2) pembelajaran dilakukan dengan tatap muka, tutorial, dan/atau mandiri, (3) materi pembelajaran mengacu kepada standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah dalam Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen PAUD-DIKMAS, 2015.a.b).

Pembelajaran pendidikan kesetaraan dikembangkan berdasar kurikulum yang berlaku. Kurikulum pendidikan kesetaraan terdiri dari tiga hal yaitu rencana pembelajaran, susunan materi, dan metode pembelajaran (Draf SNPPNF Th. 2013, Pasal 8 ayat 2).

Alternatif kurikulum yang baik digunakan untuk pendidikan kesetaraan salah satunya adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Prinsip yang terkandung dalam KTSP sesuai dengan prinsip pendidikan kesetaraan.

Menurut Trianto (2010: 22) KTSP dikembangkan berdasar pada prinsip: 1) berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya, 2) beragam dan terpadu, 3) tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, 4) relevan dengan kebutuhan kehidupan, 5) menyeluruh dan berkesinambungan, 6) belajar sepanjang hayat, 7) seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.

Bila kondisi pembelajaran belum sesuai dengan ketentuan, maka Trianto (2010: 119) yang mengatakan bahwa eksistensi guru dalam implikasi pembelajaran terpadu dapat dilakukan salah satunya dengan sistem guru tunggal yang mengajar mata pelajaran serumpun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C, beban belajar program pendidikan kesetaraan dinyatakan dalam satuan kredit kompetensi (SKK) yang menunjukkan bobot kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam mengikuti program pembelajaran, baik melalui tatap muka, praktek keterampilan, dan atau kegiatan mandiri.

Satu SKK dihitung berdasarkan pertimbangan muatan SK dan KD tiap mata pelajaran. Satu SKK adalah satu satuan kompetensi yang dicapai melalui pembelajaran 1 jam tatap muka atau 2 jam tutorial atau 3 jam mandiri, atau kombinasi secara proposional dari ketiganya. Satu jam tatap muka yang dimaksud adalah satu jam pembelajaran, yaitu sama dengan 40 menit (Paket B) dan 45 menit (Paket C).

Tabel 2. Struktur Kurikulum Paket B

Mata Pelajaran	Bobot Satuan Kredit Kompetensi (SKK)		
	Tingkatan 3 / Derajat Terampil 1 Setara Kelas VII-VIII	Tingkatan 4 / Derajat Terampil 2 Setara Kelas IX	Jumlah
1. Pendidikan Agama	4	2	6
2. Pendidikan Kewarganegaraan	4	2	6
3. Bahasa Indonesia	8	4	12
4. Bahasa Inggris	8	4	12
5. Matematika	8	4	12
6. Ilmu Pengetahuan Alam	8	4	12
7. Ilmu Pengetahuan Sosial	8	4	12
8. Seni Budaya	4	2	6
9. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	4	2	6
10. Keterampilan Fungsional *)	4	2	6
11. Muatan Lokal **)	4**)	2**)	6**)
12. Pengembangan Kepribadian Profesional	4	2	6
Jumlah	68	34	102

Sumber: Permendiknas Nomor 14 Tahun 2007

Keterangan:

\*) Pilihan Mata Pelajaran

\*\*) Substansinya dapat menjadi bagian dari mata pelajaran yang ada, baik mata pelajaran wajib maupun pilihan. SKK untuk substansi muatan lokal termasuk kedalam SKK mata pelajaran yang dimuat.

Tabel 3. Struktur Kurikulum Paket C (Program IPA)

Mata Pelajaran	Bobot Satuan Kredit Kompetensi (SKK)		
	Tingkatan 5 / Drajat Mahir 1 Setara Kelas X	Tingkatan 6 / Drajat Mahir 2 Setara Kelas XI-XII	Jumlah
1. Pendidikan Agama	2	4	6
2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	4	6
3. Bahasa Indonesia	4	8	12
4. Bahasa Inggris	4	8	12
5. Matematika	4	8	12
6. Fisika	2	8	10
7. Kimia	2	8	10
8. Biologi	2	8	10
9. Sejarah	1	2	3
10. Geografi	1	-	1
11. Ekonomi	2	-	2
12. Sosiologi	2	-	2
13. Seni Budaya	2	4	6
14. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	4*)	8*)	12*)
15. Keterampilan Fungsional *)	2**)	4**)	6**)
16. Muatan Lokal **)	2	4	6
17. Pengembangan Kepribadian Profesional			
<b>Jumlah</b>	<b>40</b>	<b>82</b>	<b>122</b>

Sumber: Permendiknas Nomor 14 Tahun 2007

Keterangan:

\*) Pilihan Mata Pelajaran

\*\*) Substansinya dapat menjadi bagian dari mata pelajaran yang ada, baik mata pelajaran wajib maupun pilihan. SKK untuk substansi muatan lokal termasuk kedalam SKK mata pelajaran yang dimuat.

Tabel 4. Struktur Kurikulum Paket C (Program IPS)

Mata Pelajaran	Bobot Satuan Kredit Kompetensi (SKK)		
	Tingkatan 5 / Drajat Mahir 1 Setara Kelas X	Tingkatan 6 / Drajat Mahir 2 Setara Kelas XI-XII	Jumlah
1. Pendidikan Agama	2	4	6
2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	4	6
3. Bahasa Indonesia	4	8	12
4. Bahasa Inggris	4	8	12
5. Matematika	4	8	12
6. Fisika	2	-	2
7. Kimia	2	-	2
8. Biologi	2	-	2
9. Sejarah	1	3	4
10. Geografi	1	7	8
11. Ekonomi	2	8	10
12. Sosiologi	2	8	10
13. Seni Budaya	2	4	6
14. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	4*)	8*)	12*)
15. Keterampilan Fungsional *)	2**)	4**)	6**)
16. Muatan Lokal **)	2	4	6
17. Pengembangan Kepribadian Profesional			
<b>Jumlah</b>	<b>40</b>	<b>82</b>	<b>122</b>

Sumber: Permendiknas Nomor 14 Tahun 2007

Keterangan:

\*) Pilihan Mata Pelajaran

\*\*) Substansinya dapat menjadi bagian dari mata pelajaran yang ada, baik mata pelajaran wajib maupun pilihan. SKK untuk substansi muatan lokal termasuk kedalam SKK mata pelajaran yang dimuat.

## ii) Pelatihan Keterampilan

Pemilihan jenis keterampilan yang akan dilaksanakan hendaknya harus sesuai dengan kebutuhan warga belajar. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nonformal yang berdasar pada masyarakat. Perencanaan

dan pemantapan pelatihan keterampilan kemudian didiskusikan dengan warga belajar. Pelatihan tersebut harus mempertimbangkan kearifan lokal dan manfaat.

Pelatihan keterampilan difasilitasi oleh nara sumber teknis. Lama dan kedalaman pelatihan keterampilan sesuai dengan silabus dan RPP yang ditentukan serta tingkat penguasaan warga belajar (Ditjen PAUD-DIKMAS, 2015.a.b).

#### 6) Evaluasi Program Kesetaraan Paket B dan C

##### 1. Evaluasi Perkembangan Warga Belajar

Adapun tujuan evaluasi perkembangan warga belajar adalah sebagai berikut: (1) untuk mengetahui kemajuan hasil belajar warga belajar selama jangka waktu tertentu, (2) untuk mengetahui efektifitas metode dan pendekatan pembelajaran yang dilakukan selama jangka waktu tertentu (Ditjen PAUD-DIKMAS, 2015.a: 18).

Pengetahuan mengenai warga belajar dimaksudkan untuk memperoleh informasi penting mengenai warga belajar apakah perlu dilakukan pengayaan, saran, bimbingan penyuluhan, diskusi dengan warga belajar, dan lain sebagainya (Ditjen PAUD-DIKMAS, 2015.a: 18).

Hartani (2011: 196) yang menyatakan bahwa Evaluasi proses pembelajaran secara periodik, sekurang-kurangnya dua

kali dalam setahun, pada akhir semester akademik. Langkah evaluasi dibutuhkan untuk menambahkan, mengurangi, memperbaiki, menyebarluaskan, atau menghentikan program. Dalam hal ini program kesetaraan dievaluasi agar layanan pendidikan bagi masyarakat (warga belajar) terlaksana sesuai tujuan.

## 2. Evaluasi Penyelenggaraan

Evaluasi penyelenggaraan program merupakan sebuah kegiatan untuk mengevaluasi atau mengoreksi hal-hal yang telah terjadi atau dilakukan selama kegiatan penyelenggaraan program sedang atau telah berlangsung. Dengan kata lain merupakan sebuah kegiatan “merekaulang” untuk mengetahui hal-hal penting baik yang berupa kelebihan maupun kekurangan yang terjadi pada kegiatan penyelenggaraan program yang telah berlangsung dengan harapan agar dapat melakukan perbaikan pada saat kegiatan penyelenggaraan program berikutnya (Ditjen PAUD-DIKMAS, 2015.a.b).

Hasil evaluasi dapat dijadikan pedoman sebagai langkah tindak lanjut pengelola maupun tutor untuk menghadapi permasalahan atau bahkan kelebihan yang muncul dalam program.

Monitoring dan supervisi menjadi reka evaluasi dalam pengawasan program kesetaraan. Dalam Peraturan Menteri



Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 pengawasan proses pembelajaran meliputi kegiatan pemantauan, supervisi dan evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut. Aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan monitoring dan supervisi, antara lain adalah (Ditjen PAUD-DIKMAS, 2015.a.b):

- i) Kredibilitas lembaga penyelenggara program
- ii) Kesesuaian warga belajar atau sasaran program
- iii) Materi pembelajaran/pelatihan
- iv) Jadwal kegiatan dan alokasi waktu
- v) Kompetensi tutor/narasumber
- vi) Proses pembelajaran/pelatihan
- vii) Tingkat kehadiran warga belajar
- viii) Penggunaan dana bantuan
- ix) Dokumen penyelenggaraan program.

#### B. Penelitian yang Relevan

##### **1. Maria Adhiaty – Universitas Negeri Semarang (2012) : Manajemen Program Kejar Paket C di PKBM Sarana Maju Kota Tegal.**

Hasil penelitian menyatakan : (1) Perencanaan program Paket C di PKBM Sarana Maju Kota Tegal disusun Penyelenggara kelompok belajar Paket C Sarana Maju berdasarkan masukan dari tutor, warga belajar dan tenaga kependidikan. Perencanaan program disusun dalam bentuk Rencana Tahunan dan Rencana Semester, kemudian disusun jadwal kegiatan. (2) Program Kejar Paket C di PKBM Sarana Maju Kota Tegal dilaksanakan oleh warga belajar, tutor dan tenaga kependidikan di pimpin oleh Penyelenggara Kejar Paket C sesuai dengan jadwal kegiatan. (3) Evaluasi Program Kejar Paket C di PKBM Sarana Maju Kota Tegal dilakukan

melalui tes formatif, tes sumatif dan tes akhir. Sedangkan Pengendalian program dilakukan melalui monitoring dan evaluasi.

**Analisa :** penelitian Maria memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam tujuan umumnya yakni mendeskripsikan pengelolaan program kesetaraan. Secara spesifik Maria mengambil paket C untuk dibahas dalam tiga tahap pengelolaan : (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) evaluasi. Hal tersebut berbeda dengan penelitian ini yang mengambil dua paket kesetaraan yaitu paket B dan C untuk dibahas dalam empat tahap pengeolaan : (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pelaksanaan, (4) pengawasan/evaluasi. Metode penelitian tidak banyak memiliki perbedaan bahwa sama-sama memakai pendekatan kualitatif deskriptif dengan tiga teknik pengambilan data berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hanya dalam keabsahan data perbedaan itu muncul kembali, peneliti mengambil teknik triangulasi dan Maria memakai teknik kriteriakredibilitas (validitasinternal).

## **2. Sodik – Universitas Negeri Semarang (2012) : Pola Pengelolaan Program Pendidikan Kesetaraan Berbasis Kecakapan Hidup di PKBM Bendan Jaya Kota Pekalongan.**

Pola pengelolaan PKBM Bendan Jaya dalam program Pendidikan kesetaraan secara umum mengikuti pendapat Holt yakni dengan memadukan antara perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi dengan tetap memperhatikan pasar yang dibidik dan kondisi finansial dan material PKBM. Dalam setiap kegiatan yang dilakukan selalu

melibatkan seluruh elemen PKBM, dan berakar pada kondisi lingkungan, dan budaya setempat. Partisipasi aktif warga belajar sangat tinggi sebagai kekuatan PKBM Bendan Jaya dalam mengembangkan program-programnya.

**Analisa :** tujuan utamanya memiliki kesamaan dengan menggunakan empat fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Hanya saja, dalam penelitian Sodik, letak pengorganisasian berada setelah pelaksanaan atau di urutan ketiga. Pengorganisasian yang dimaksud adalah pengorganisasian untuk sumber daya manusia. Dalam penelitian Sodik, bagian pengorganisasian kurang dibahas secara jelas karena pembahasan justru mengarah pada teori rekrutmen sumber daya manusia. Secara metode penelitian, perbedaan ada pada pendekatannya yaitu kualitatif studi kasus, pada teknik keabsahan data Sodik tidak hanya memakai triangulasi tetapi juga memakai teknik memperpanjang waktu penelitian.

**3. Ida Kintamani Dewi Hermawan - Sekjend Kemdikbud (2012) :  
Kinerja Pendidikan Kesetaraan sebagai Salah Satu Jenis  
Pendidikan Nonformal.**

Berdasarkan hasil dan bahasan maka dapat dilihat dari kelompok belajar pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C terbesar diselenggarakan oleh PKBM sekitar 58,07% sedangkan oleh masyarakat sekitar 26,55% dan terkecil yang diselenggarakan lainnya. Peserta didik pendidikan kesetaraan terbesar pada kelompok usia yang lebih tua dari

ketentuan (38,97%), Paket A terbesar ternyata berusia >15 tahun (55,58%), berarti tidak sesuai dengan ketentuan sedangkan Paket B terbesar adalah berusia 13-15 tahun (40,95%), berarti telah sesuai dengan kebijakan agar anak usia 13-15 tahun bersekolah di Paket B. Paket C, ternyata peserta didik terbesar juga pada usia >21 tahun (40,98%), berarti juga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat pendidikan tutor pendidikan Paket A terbesar dengan pendidikan SMA/MA (39,19%), Paket B terbesar dengan pendidikan diploma (33,38%) dan Paket C terbesar dengan pendidikan S1/S2 (62,73%). Berdasarkan jenis pekerjaan maka tutor pendidikan kesetaraan sebagian besar (106.544 orang) adalah guru dan nonguru (53.268 orang). Kondisi ini mendukung pendidikan kesetaraan dapat meningkatkan mutunya karena sebagian besar berasal dari guru pendidikan formal. Pengelola pendidikan kesetaraan yang sudah mendapatkan pelatihan sebesar 51,18% dengan rincian laki-laki (56,64%) lebih banyak yang dilatih dibandingkan dengan perempuan (45,30%).

Program Paket B menjadi primadona dalam pendidikan kesetaraan karena semua programnya termasuk kelompok belajar, peserta didik, lulusan, tutor, dan pengelola memiliki data yang terbesar. Hal yang sama juga terjadi pada dana pendidikan di mana Paket B mendapatkan dana terbesar Rp 515.406.931 ribu dengan block grant dengan satuan biaya sebesar Rp 1.122 ribu sehingga jumlahnya menjadi Rp 489.243.612 ribu.

Program Paket A dan C juga mendapatkan dana namun kurang dari sepersepuluh dari Paket B.

Dengan menggunakan pemerataan dan mutu maka kinerja pendidikan kesetaraan sebesar 69,05 dengan Paket B terbesar (73,68) dan Paket C terkecil (65,85).

**Analisa :** Tujuan penulisan ini adalah memberikan gambaran kepada seluruh *stakeholder* tentang tiga hal, yaitu 1) sasaran pendidikan kesetaraan, 2) profil pendidikan kesetaraan, dan 3) kinerja pendidikan kesetaraan. Namun penelitian Ida memiliki satu lagi tujuan khusus, dari tiga tujuan di atas kemudian akan dianalisa akankah kinerja program kesetaraan mempengaruhi kebijakan penghapusan Direktorat Pendidikan Kesetaraan pada tahun 2011 sebagai rumusan masalah keempat. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pembahasan antara manajemen dengan implementasi melalui dokumentasi. Metode penelitian Ida pun hanya menggunakan studi dokumentasi. Hasil yang dipaparkan juga berupa rekap dokumentasi namun sudah menyangkut ranah nasional. Hal ini berbeda dengan pembahasan peneliti yang hanya mencakup satu lembaga (satuan pendidikan).

**4. Linatus Sofiah – Universitas Negeri Yogyakarta (2010) :**  
**Pelaksanaan Kegiatan Tutorial Pendidikan Kesetaraan Serta**  
**Faktor-faktor yang Mempengaruhi di Kecamatan Jeruklegi**  
**Kabupaten Cilacap.**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Kegiatan Tutorial Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan tutorial pada Program Pendidikan Kesetaraan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya warga belajar yang tidak aktif mengikuti kegiatan tutorial, persiapan pembelajaran yang kurang memadai yaitu belum adanya silabus maupun RPP yang disiapkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran yaitu faktor yang mendukung antara lain: sarana, alat dan bahan telah tersedia, lokasi kegiatan dekat dengan tempat warga, tidak ada pungutan biaya. Faktor menghambat jalannya pelaksanaan kegiatan tutorial, yaitu: motivasi warga belajar rendah, kemampuan warga belajar dalam memahami materi pelajaran, kesibukan warga belajar yang mengikuti kegiatan sambil bekerja, strategi pembelajaran yang belum sesuai dengan kebutuhan dan latar belakang warga belajar, keterbatasan pengetahuan dan informasi penyelenggara dan tutor tentang ketentuan penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan, pengawasan yang kurang optimal.

**Analisa** : perbedaan berada pada obyek penelitian. Penelitian ini mengambil obyek pengelolaan pendidikan kesetaraan, sedangkan penelitian Linatus mengambil obyek pelaksanaan kegiatan tutorial pendidikan kesetaraan. Selain pelaksanaan, Linatus menambahkan faktor-faktor penghambat kegiatan tutorial program kesetaraan. Penelitian Linatus mengambil banyak subyek yakni paket A, B, C dari beberapa PKBM yang ada di Cilacap sehingga dia menggunakan teknik pengambilan sampel. Hasilnya, Paket A dari satu PKBM, Paket B dari tiga PKBM, dan Paket C dari satu PKBM. Penelitian ini berbeda dengan Penelitian Linatus karena tidak mengambil sampel berhubung penelitian hanya dilakukan di satu lembaga. Persamaan ada pada pendekatan penelitian yakni deskriptif kualitatif, namun Linatus memakai dua metode pengumpulan data yakni dengan wawancara dan studi dokumentasi.

**5. Intan Ayu Kinasih dan Nurul Fatimah – Universitas Negeri Semarang (2015) : Kebijakan Semu - Sebuah Analisis tentang Implementasi Program Pendidikan Kesetaraan Kelompok Belajar (Kejar) Paket C Widya Wiyata Mandala di PKBM Pratama Kecamatan Batang Kabupaten Batang.**

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) Akses pendidikan Kejar Paket C dimanfaatkan oknum-oknum warga belajar untuk memperoleh ijazah dalam rangka mencapai kepentingan untuk mewujudkan status sosial yang lebih tinggi (meningkatkan golongan dalam pekerjaan, persyaratan menjadi anggota DPR) dan mencapai mobilitas sosial vertikal.

Para tutor yang ingin mendapatkan sertifikasi guru, kesempatan mengajar di Kejar Paket C dimanfaatkan sebagai persyaratan sertifikasi untuk penambahan jam mengajar, (2) Bentuk penyimpangan dalam penerapan program pendidikan Kejar Paket C di Widya Wiyata Mandala diantaranya kecurangan rapel tanda tangan presensi kehadiran warga belajar, jam pelajaran yang sering kosong tanpa alasan yang jelas, pelayanan mengajar tutor ketika di kelas yang masih jauh dari kata layak, materi ketrampilan yang tidak diperoleh warga belajar, pelaksanaan UAS yang dibebaskan dalam contek-mencontek, serta pengkatrolan nilai UAS dan UTS di raport.

**Analisa** : menariknya penelitian ini karena tidak hanya mendeskripsikan pelaksanaa penelitian namun lebih membahas mengenai *hidden orientation* warga belajar menempuh pendidikan kesetaraan Kejar Paket C, penerapan program pendidikan kesetaraan Kejar Paket C oleh pengelola yang masih melenceng dari aturan, serta kecurangan-kecurangan dibalik pelaksanaan proses pembelajaran Kejar Paket C di lokasi penelitian. Hal ini sangat berbeda dengan tujuan peneliti dalam penelitian ini yang mengungkap proses pengelolaan mulai dari perencanaan hingga evaluasi program kesetaraan. Persamaan ada pada metode penelitian yakni deskriptif kualitaif.



### C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana bentuk pendataan dan seleksi calon warga belajar Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
2. Bagaimana bentuk pendataan dan seleksi calon tutor dan nara sumber teknis Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
3. Bagaimana proses penetapan tempat pembelajaran dan pelatihan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
4. Bagaimana proses pengusulan bantuan operasional kegiatan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
5. Bagaimana pengelompokan rombongan belajar Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
6. Bagaimana kondisi kualifikasi pengelola program kesetaraan paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta menurut Standar Nasional Pendidikan?
7. Bagaimana penempatan sumber daya manusia (Pengelola, Pendidik dan Tenaga Kependidikan) di program kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
8. Bagaimana pembagian tugas pokok masing-masing sumber daya manusia (Pengelola, Pendidik dan Tenaga Kependidikan) di program kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
9. Bagaimana kondisi warga belajar dalam melaksanakan tugas dan mendapat kebutuhannya selama pelaksanaan Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?

10. Bagaimana bentuk pemenuhan tugas tutor selama pelaksanaan Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
11. Bagaimana pelaksanaan kurikulum program kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
12. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran akademik di Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
13. Bagaimana pelaksanaan pelatihan keterampilan di Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
14. Bagaimana evaluasi penyelenggaraan Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
15. Bagaimana evaluasi perkembangan warga belajar Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?

### **BAB III METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Menurut Aunurrahman, dkk., (2007) bahwa, penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran, orang secara individual maupun kelompok, dan berguna untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas.

Pendapat diatas berhubungan dengan pengertian bahwa pendekatan kualitatif dapat mempersyarat tujuan yang berbeda dalam pencarian (*inquiry*) dengan cara berproses mencari dan menemukan makna dengan seperangkat metode penyelidikan yang berbeda (Deddy Mulyana, 2003: 32).

Hasil penelitian akan dijelaskan secara deskriptif dengan menggambarkan paparan pengelolaan Program Kesetaraan Paket B dan C di PKBM Rangsang Imojoyo. Data yang dicari meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian program kesetaraan yang dijelaskan melalui kata-kata dengan analisis dengan prinsip logika.

#### **B. *Setting* Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di PKBM Rangsang Imojoyo, yang terletak di Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta. Waktu pelaksanaan adalah pada bulan Desember 2015 sampai dengan April 2016. Penelitian dilakukan dengan beberapa tahap: penyusunan proposal,

perizinan, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan penelitian.

### C. Subyek Penelitian

Variabel Penelitian ini adalah tunggal yaitu Pengelolaan Program Kesetaraan. Suharsimi Arikunto (2005: 88), menjelaskan bahwa subyek penelitian adalah benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat dan yang dipermasalahkan.

Subyek dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi karena berangkat dari kasus tertentu dan hasilnya ditransfer pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi yang diteliti. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden tetapi narasumber, atau partisipan, informan, teman, dan guru dalam penelitian (Sugiyono, 2010: 298).

Subyek Penelitian yang dipilih dalam penelitian ini yaitu pengelola Paket B dan C dengan Ketua PKBM sebagai informan kunci dan data di *cross check* pada informan pendukung seperti perwakilan tutor, warga belajar, dan pembina lembaga.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian harus obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik yang digunakan harus mampu mengungkap tujuan penelitian dan menemukan hasil yang ingin dicapai. Dalam penelitian ini ingin mendapatkan hasil berupa deskripsi data bagaimana pengelolaan Program Kesetaraan Paket B dan C di PKBM Rangsang Imojoyo.

Pengelolaan program akan mencakup warga belajar, tutor, sarana prasarana, biaya, dan kurikulum yang ada dalam program tersebut.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Dokumentasi

Metode ini paling populer sebagai bahan untuk mendapat data secara fisik. Metode dokumentasi yaitu suatu metode pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya (Suharsimi Arikunto, 2006: 231). Mengenai pengertian tersebut, Tiur a. Siburian (2013: 72) menambahkan bahwa di dalam melaksanakan metode dokumentasi, penulis menyelidiki badan-badan tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mendapat identitas lembaga, legalitas lembaga, salinan ijazah pengelola dan tutor, sertifikat pengembangan pengelola dan tutor, proposal yang pernah dibuat PKBM, daftar hadir, RPP, Silabus, soal ujian, dan dokumen pendukung penelitian lainnya.

#### 2. Wawancara

Metode ini dilakukan secara lisan dengan saling bertukar atau mencari informasi. Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan bertanya langsung kepada responden (Tiur a. Siburian, 2013: 64).

Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan secara bebas terpimpin. Menurut S. Nasution (1996: 113) wawancara bebas terpimpin yaitu memberi pertanyaan sesuai dengan keinginan peneliti namun tetap berpedoman pada ketentuan yang menjadi pengontrol relevansi isi wawancara.

Wawancara tersebut dilakukan kepada subyek penelitian untuk mendapat data mayoritas, mulai dari perencanaan hingga evaluasi dan menyangkut masalah warga belajar, tutor, kurikulum, sarana prasarana, dan biaya pendidikan kesetaraan.

### 3. Observasi

Mempunyai arah dan tujuan yang khusus. Observasi adalah cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis (Tiur a. Siburian, 2013: 63). Pendapat ini senada dengan pendatat Suharsimi Arikunto (2006: 128) yang mengatakan observasi sebagai kegiatan pengamatan, pencatatan, secara sistematis mengenai fenomena yang diselidiki. Maka dari itu, observasi tidak dilakukan secara untung-untungan dan sesuka hati dalam usaha mendekati situasi. Akan tetapi semua pelaksanaan dilakukan secara sistematis dan berencana.

Observasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat secara langsung sarana belajar sekaligus kegiatan belajar mengajar dalam program kesetaraan Paket B dan C. Jenis observasi yang dipakai adalah

pengamatan *nonpartisipan* yang berarti peneliti tidak terlibat secara langsung dalam tindakan personal atau interaksi sosial.

#### E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat ukur yang digunakan sebagai pengumpulan data. Kegunaan instrumen ini agar lebih mudah dalam penelitian dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai alat atau instrumen itu sendiri berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas semuanya (Sugiyono, 2010: 306).

Walau demikian, berhubungan dengan instrumen, pendapat tersebut masih ditambah bahwa setelah fokus penelitian menjadi jelas, kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui teknik pengumpulan data (Sugiyono, 2010: 307).

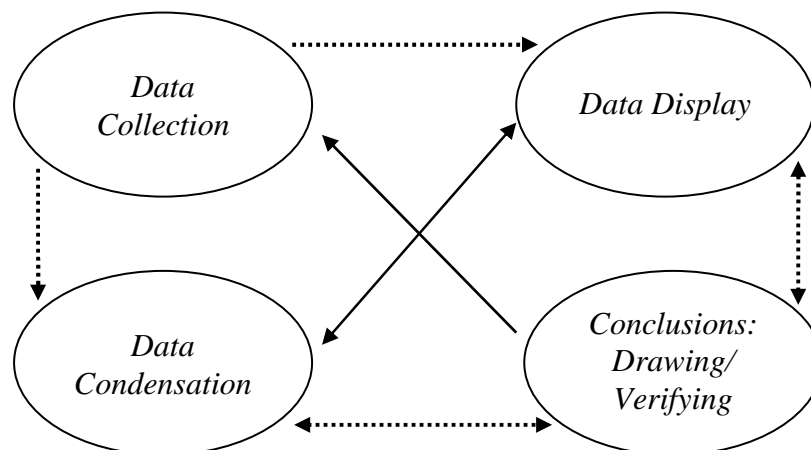
Instrumen dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara, pedoman dokumentasi, dan pedoman observasi. Jumlah pedoman wawancara adalah lima yaitu untuk Pembina PKBM, Pengelola PKBM, Tutor/Narasumber Teknis, Koordinator Program B dan C, dan untuk warga belajar program Kesetaraan. Pedoman Observasi digunakan untuk melihat kondisi sarana prasarana dan proses belajar mengajar Program Kesetaraan. Pedoman

dokumentasi dimaksudkan untuk melihat arsip lembaga yang menunjang pelaksanaan program kesetaraan seperti Silabus, RPP, Presensi, dan Soal Ujian.

#### F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu analisis data wawancara, analisis data studi dokumentasi, dan analisis data hasil observasi langsung. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif Miles dan Matthew B. (2014: 14), *like their qualitative colleagues, they must be preoccupied with data condensation (calculating means, standar deviations), with display (correlation tables, regression printouts), and with conclusion drawing/verification (significance levels, experimental/control group differences).*

Gambar 1.  
*Component of Data Analysis : Interactive Model*



Sumber : Miles, M. B., & Huberman, A.M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.



Hal-hal dalam gambar tersebut dijelaskan oleh Tri Atmaja (2012: 50-51) sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data

*Data Condensation* sama dengan reduksi data. Fungsinya adalah menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan dari data tersebut. Dalam reduksi data tersebut mengandung unsur, yaitu; (a) proses pemilihan data atas dasar tingkat relevansi dan kaitannya dengan setiap kelompok data, (b) menyusun data dalam satuan jenis, (c) membuat koding data sesuai dengan kisi-kisi kerja penelitian, (d) memfokuskan, menyederhanakan, dan mentransfer data kasar ke catatan lapangan. Dari data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dikelompokkan berdasarkan sumber informan, dari hasil wawancara dipindahkan ke bentuk tulisan. Kemudian data yang ada dikelompokkan dan disederhanakan.

### 2. *Display* Data atau Penyajian

Dalam display data ini kecenderungan mengarah pada penyederhanaan data kompleks kedalam kesatuan bentuk yang sederhana dan selektif sehingga mudah dipahami. Tahap penyajian data, prosesnya adalah dari konsep penyajian data yang telah dibuat. Data yang ada dimasukkan sesuai dengan pembahasannya, dalam proses ini juga dilakukan konsultasi dengan dosen pembimbing agar apa saja yang disajikan dan alur penyampain informasi dari data yang

telah diperoleh dapat disajikan dengan baik dan benar serta maksud dari penelitian dapat dipecahkan.

### 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah dilakukan pengumpulan data, pemilihan data dalam penyajian data, langkah berikutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan tujuan menjawab rumusan masalah. Pada langkah verifikasi, peneliti hendaknya masih tetap mampu disamping menuju kearah kesimpulan yang sifatnya terbuka, peneliti juga masih bisa menerima masukan dari peneliti lain. Penarikan kesimpulan dan verifikasi diuraikan secara detail sesuai permasalahan yang ada di lapangan serta memberikan solusi konkrit.

### G. Pengujian Keabsahan Data

Kevalidan data lebih baik jika tidak hanya diukur dari satu sumber saja. Maka dari itu penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Dalam triangulasi, peneliti melakukan pengecekan data dan sumber informasi yang diperoleh.

Dalam pengumpulan data atau informasi peneliti melakukan triangulasi sumber data dan teknik yang dijelaskan Sugiyono (2010: 373-374):

1. Triangulasi Sumber, yaitu untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari beberapa narasumber diantaranya Pembina PKBM, Pengelola PKBM, Tutor, Koordinator Program, dan warga belajar program kesetaraan, misalnya data tentang

perencanaan peserta didik (warga belajar) dicantumkan dalam pedoman wawancara yang dijawab oleh Ketua PKBM, Koordinator Paket, dan Warga Belajar. Data yang bersumber dari ketiga narasumber tersebut kemudian dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda dan mana yang spesifik. Data yang telah dianalisis oleh peneliti selanjutnya menghasilkan suatu kesimpulan.

2. Triangulasi Teknik, yaitu untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada responden yang sama dengan teknik yang berbeda, misalnya data tentang pelaksanaan pembelajaran Paket B dan C dituangkan dalam pedoman wawancara dan pedoman observasi. Wawancara dengan beberapa responden menghasilkan beragam data dan hasil observasi juga menunjukkan data tertentu. Melalui teknik wawancara dan observasi selanjutnya dilakukan analisa sehingga bisa memunculkan satu kesimpulan. Bila dengan beberapa teknik tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar, atau mungkin kesemuanya benar karena dilihat dari sudut pandang yang berbeda.

Melalui triangulasi sumber dan teknik, data dideskripsikan, dikategorikan, dicari persamaan dan perbedaannya kemudian menyimpulkan secara keseluruhan.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Lembaga Penyelenggara Program Kesetaraan Paket**

#### **B dan C di Kecamatan Wirobrajan**

##### **1. Profil PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)**

- a. Nama PKBM : RANGSANG IMO JOYO
- b. Ketua PKBM : DRS. SUPATMO PRIYO
- c. No.Telp./Hp : (0274)415211 / 08121551029
- d. Alamat Sekretariat : Patangpuluhan WB 3 / 436 Yogyakarta  
55251, Telp. 386006, 415211, 379440
- e. Lokasi Pembelajaran : SMK Pembangunan Yogyakarta (Jalan  
Madumurti No. 28 Bugisan, Yogyakarta  
55251)
- f. Ijin Dinas Pendidikan : 031 / LBG.PNF / 2007
- g. Akta Notaris : Tanggal 30 April 2007
- h. No.Akte Notaris : 18
- i. Nama Notaris : SUTARNA,SH
- j. NPWP : 02.755.322.1 – 541.000
- k. No.Rekening Bank : BRI UNIT WIROBRAJAN 3007-01-  
014008-53-2

## **2. Struktur Pengelola Program Kesetaraan di PKBM Rangsang Imo Joyo**

- a. Pembina : Camat Wirobrajan  
Lurah Patangpuluhan
- b. Pembina Teknis : Penilik PNF Kecamatan Wirobrajan
- c. Ketua : Drs.Supatmo Priyo
- d. Sekretaris I : Soleh Bukhori, SE
- e. Sekretaris II : Feri Artha
- f. Bendahara I : Dewi Fadilatunnaim
- g. Bendahara II : Hariyati
- h. Koordinator Program Kesetaraan
  - 1) Paket B : Fitria Ulfa, S.Si
  - 2) Paket C : Joko Sugiyanto, M.Pd
- i. Jumlah Tutor : 14 orang (Tahun Pelajaran 2015/2016)
- j. Jumlah Warga Belajar : 14 orang (Tahun Pelajaran 2015/2016).

## **3. Tujuan Umum Program Paket di PKBM Rangsang Imo Joyo**

- a. Tujuan Umum
  - 1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas
  - 2) Menyiapkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
  - 3) Ikur serta mensukseskan dan menuntaskan wajar 12 tahun.
- b. Tujuan Khusus
  - 1) Memberi bekal pengetahuan dan keterampilan yang nantinya dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya

- 2) Meningkatkan status sosial dalam kehidupan bermasyarakat
- 3) Memiliki keterampilan yang dapat dijadikan bekal untuk mencari nafkah.

#### **4. Bentuk Organisasi PKBM Rangsang Imo Joyo**

Mulai berdiri, PKBM Rangsang Imo Joyo memiliki tiga program awal Pendidikan Kesetaraan yaitu Paket A, B, dan C. Setelah satu kali meluluskan, Paket A berhenti karena tidak adanya warga belajar dan program yang dijalankan PKBM Rangsang Imo Joyo berkurang menjadi Paket B dan C. Pendiri PKBM ini adalah Pak Supatmo (Ketua), Pak Soleh (Sekretaris 1), Bu Dewi (Bendahara 1) bersama perangkat Kelurahan Patangpuluhan melalui musyawarah bersama pada tahun 2007.

Dari metode dokumentasi melalui Akta Notaris PKBM Rangsang Imo Joyo, peneliti mendapat beberapa data sebagai berikut. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Rangsang Imo Joyo berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Organisasi ini bersifat swadaya masyarakat yang independen dilandasi kemandirian organisasi, dan tidak terkait pada kepentingan dan keuntungan baik pribadi maupun golongan dan nazab politik dan agama. PKBM ini dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seluruh pengurus sesuai dengan tugas dan fungsinya. Anggota terdiri dari seluruh masyarakat yang mempunyai kesamaan Visi dan Misi PKBM dan mau bergabung dalam wadah PKBM.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas, lembaga melakukan beberapa usaha yaitu:

- a. Berperan aktif menyelenggarakan pendidikan non formal bagi masyarakat yang mengalami putus sekolah, dan atau belum memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan formal
- b. Menyelenggarakan kegiatan yang bersifat pendidikan dan keterampilan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, sesuai dengan potensi masyarakat
- c. Melakukan usaha-usaha lainnya yang dapat menunjang terselenggaranya kegiatan lembaga dalam mencapai maksud dan tujuannya.

Kekayaan lembaga bisa bertambah karena bantuan atau sumbangan yang tidak mengikat antara lain dari Hibah Pemerintah, Donatur, dan Hasil Usaha lain yang sah dan halal. Sisa hasil usaha dan sisa usaha yang tercantum dalam laporan tahunan badan pengurus akan dipergunakan untuk pengembangan usaha lembaga dan dibagikan menurut keputusan rapat pleno pendiri dan badan pengurus.

## **5. Mitra kerja**

- a. LPMK Patangpuluhan : H. Irwan Nur S.
- b. BKM Semeru : Teguh Siswanto, SH.
- c. TBM “19” : Sumanto
- d. PKK Kel. : Sri Kasiyah Ahmadi
- e. PAUD : Anna Deliya Rosa, S.Psi

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Perencanaan Program Pendidikan Kesetaraan Paket B dan C**

#### **a. Bentuk Penerimaan dan Seleksi Calon Warga Belajar**

Penerimaan calon warga belajar Paket B dan C di PKBM Rangsang Imo Joyo dilaksanakan setiap tahun pelajaran baru, satu tahun sekali. Waktu penerimaan hampir sama dengan pendidikan formal karena pada dasarnya PKBM Rangsang Imo Joyo memakai sistem Pendidikan Kesetaraan sesuai Standar Nasional dimana satu tingkat pendidikan ditempuh selama satu tahun.

Proses penerimaan warga belajar dimulai dengan sosialisasi baik secara tertulis maupun lisan. Hasil dokumentasi menunjukkan bahwa secara tertulis, sosialisasi dilakukan melalui penyebaran brosur yang berisi tentang Pendidikan Kesetaraan Paket B dan C di PKBM Rangsang Imo Joyo, Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta. Brosur tersebut berisi syarat pendaftaran, beberapa profil tentang PKBM Rangsang Imo Joyo, kontak person, dan alamat sekretariat, namun satu hal yang belum ada yaitu jadwal pendaftaran. Selanjutnya, brosur tersebut disebar di beberapa wilayah termasuk luar Kelurahan Patangpuluhan karena peserta yang diterima adalah umum dari segala wilayah.

Hasil Wawancara bersama Ketua PKBM menunjukkan bahwa secara lisan sosialisasi dilaksanakan melalui Rapat Koordinasi di Kelurahan Patangpuluhan, Rapat RT, Rapat RW, Mitra Kerja, Lembaga di



bawah Kelurahan Patangpuluhan lainnya seperti PKK dan sebaran lisan dari satu pihak ke pihak yang lain. Isi yang disampaikan adalah menjelaskan apa itu Pendidikan Kesetaraan, mengapa harus mengikuti Pendidikan Kesetaraan, dan bagaimana cara untuk ikut serta dalam Pendidikan Kesetaraan. Sosialisasi lisan ini bertujuan untuk menyampaikan informasi secara terbuka dan lebih rinci agar masyarakat yang membutuhkan pendidikan khusus dalam hal ini Pendidikan Kesetaraan bisa mengerti dan bersedia mengikuti. Selama ini, kemauan dari masyarakat menjadi pengaruh utama dalam berjalannya PKBM Rangsang Imo Joyo.

Paparan di atas dibuktikan dengan hasil wawancara bersama Bapak SP (Ketua PKBM dan Tutor) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2016 :

“Selain menyebar brosur, kami mensosialisasikan lewat RW dan PKK RW dalam satu pertemuan. Kemarin pernah mengundang PKK se Kelurahan Patangpuluhan dan Ketua RWnya, kemudian kita sosialisasikan PKBM Rangsang Imo Joyo dan bila ada masyarakat yang belum memenuhi pendidikan 12 tahun maka diharap untuk mengikuti program kesetaraan.....”

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu FU (Koor Paket B dan Tutor) pada wawancara tanggal 29 Januari 2016 :

“Sebenarnya di tiap RW gitu pasti ada sosialisasi. Dari kelurahan pasti ada kerjasama dari masing-masing wakil RT RW yang dikumpulkan, misalnya pas ada rapat PKK atau rapat RT RW akan disosilaisakan tentang PKBM ini. Ada juga brosurnya.”

Cara mendaftar untuk menjadi warga belajar adalah memenuhi persyaratan tersebut di atas dan menyerahkannya langsung pada Pengelola.

Pengumpulan bisa melalui sekretariat lembaga di Kelurahan Patangpuluhan tetapi selanjutnya diarahkan ke Rumah Pengelola seperti Pak Supatmo (Ketua PKBM dan Tutor Fisika) atau Pak Soleh (Sekretaris 1 dan Tutor Akuntansi). Hal ini ditunjukkan oleh pernyataan RM (warga belajar) pada wawancara tanggal 6 Januari 2016 :

“.....Daftar paket ini ke rumah Pak Patmo. Menyerahkan KK dan Foto. Ada warga belajar yang dari awal paket dan ada yang dari tengah-tengah. Informasi tentang Kesetaraan di sini diperoleh dari orang dekat. “

Pernyataan tentang hal itu juga disampaikan VG (warga belajar) dalam wawancara tanggal 27 Januari 2016:

“Saya masuk disini mulai kelas 7, rumahnya daerah sini. Info tentang kesetaraan karena dulu ikut PKBM terus sama pendampingnya dikasih tau kalau di sini ada paket, jadi saya mendaftar. Saya ikut kesetaraan karena saya putus sekolah dan kebetulan ada informasi kejar paket di Rangsang Imo Joyo. Syaratnya ijazah, nilai akhir, sama foto.”

Menurut pendapat di atas, warga belajar memperoleh informasi mengenai Pendidikan Kesetaraan dari warga sekitar. Hal ini menunjukkan keberhasilan sosialisasi program oleh lembaga kepada masyarakat. Calon warga belajar bisa mendaftar dari awal Program Paket yakni Kelas VII untuk Paket B dan kelas X untuk Paket C. Selain itu, ada pula warga belajar yang mendaftar dari tengah Program Paket misalnya mulai menjadi warga belajar di Kelas VIII, IX untuk Paket B dan Kelas XI, dan XII untuk Paket C.

Metode dokumentasi menunjukkan bahwa dalam brosur tertera syarat pendaftaran yaitu Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah

Terakhir, dan Foto 3x4 sebanyak 4 lembar. Hasil wawancara menunjukkan pula syarat untuk pendaftaran calon warga belajar seperti yang disampaikan Ibu FU (Koor paket B dan Tutor) berikut:

“.....Warga belajar yang penting ada raport terakhir”.

Syarat ijazah terakhir bisa didukung dengan raport terakhir untuk membantu melihat tingkat kelas terakhir yang sudah ditempuh warga belajar.

Tidak ada seleksi untuk calon warga belajar. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Bapak SP (Ketua PKBM dan Tutor) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2016 :

“Seleksi masuk kita hanya membutuhkan ijazah terakhir sama foto. Hal ini diperuntukkan segala umur asalkan dia masih mampu menempuh pendidikan.”

Seleksi untuk penerimaan warga belajar baru adalah terbuka bagi siapa saja, seperti yang disampaikan Bapak SB (Sekretaris 1 dan Tutor) pada wawancara tanggal 8 Januari 2016 :

“Dasarnya, PKBM ini bukan hanya lingkup lokal tetapi nasional, jadi siapapun orang yang ingin menempuh pendidikan paket bisa mendaftar....”

Seluruh masyarakat segala jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, wilayah dan suku/ras/agama diperbolehkan mendaftar sebagai peserta Pendidikan Kesetaraan di PKBM Rangsang Imo Joyo. Syarat utama untuk menjadi peserta (warga belajar) adalah kemauan. Siapapun pihak yang mau belajar bisa ikut serta dalam Pendidikan Kesetaraan Paket B dan C. Dari beberapa wawancara dan dokumentasi didapat data bahwa ada warga

belajar yang berasal dari luar Kecamatan Wirobrajan yaitu dari Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Wonogiri. Hal ini menunjukkan bahwa PKBM Rangsang Imo Joyo menerima peserta secara terbuka.

Setelah warga belajar terdaftar, maka diadakan pendataan untuk mengisi buku induk warga belajar. Dari hasil dokumentasi diperoleh keterangan bahwa data tentang warga belajar yang dikumpulkan di buku induk adalah : Nama Warga Belajar, Nomor Induk, Jenis Kelamin, Tempat dan Tgl.Lahir, Agama, Status Perkawinan, Status dalam keluarga, Alamat, Nomor Telepon, Pekerjaan, Jenis Paket dan Kelas, Tanggal Penerimaan, Sekolah Asal, STTB Terakhir, Nama Orang Tua, Alamat Orang Tua, Telpn Orang Tua, dan Pekerjaan Orang Tua. Data ini mempermudah pengelola untuk pengumpulan *database* yang dapat digunakan saat data warga belajar dibutuhkan.

**b. Bentuk Perekrutan dan Seleksi Calon Tutor dan Nara Sumber Teknis**

Sistem rekrutmen tutor di PKBM Rangsang Imo Joyo adalah fleksibel. Salah satu kelemahan yang menyangkut Sumber Daya Manusia Tenaga Pendidik di sini adalah seringnya bongkar pasang formasi. Maka dari itu, perekrutan tutor dapat dilakukan kapan saja saat dibutuhkan.

Cara merekrut tutor untuk Paket B dan C yaitu dengan informasi secara lisan dan memanfaatkan *link* yang tersedia. Hal ini tersirat dalam pernyataan Bapak SP selaku Ketua PKBM pada wawancara tanggal 6 Januari 2016 :

“Selama tutor mau membantu kita, ya kita rekrut. Itu saja. Sistem mendapatkannya “*gethok tular*” dari mulut ke mulut, misal tutor bahasa Inggris mbak Baroroh ini kenalan dari mbak Endang, dan beliau bersedia menjadi tutor maka kami terima.”

Pernyataan di atas dikroscek oleh peneliti melalui wawancara kepada pihak yang bersangkutan yaitu Mbak BB selaku Tutor pada wawancara tanggal 8 Januari 2016:

“.....dulu caranya saya bisa mengajar di sini, saya dikasih tau saudara saya yang ikut kegiatan ini. Ada lowongan karena ada tutor Bahasa Inggris yang keluar jadi saya mendaftar.”

Mendukung pernyataan tersebut, Ibu FU (Koor Paket B dan Tutor) pada wawancara tanggal 29 Januari 2016 menyatakan bahwa :

“Cara merekrut tutor informasi secara lisan mbak, jadi tutor yang mau pergi mengenalkan temannya untuk menggantikan. Kebanyakan mahasiswa. Tutor sering bongkar pasang karena kecuali tutor yang berdomisili sekitar sini.....”

Belum pernah PKBM ini membuat *open recruitment* yang diketahui pihak umum secara luas. Tutor baru biasanya mendapat informasi dari tutor lama yang sudah berhenti maupun dari pengelola dan warga sekitar PKBM Rangsang Imo Joyo. Pemilihan *close recruitment* ini menimbang kecepatan waktu, biaya dan kesanggupan untuk menjadi tutor karena seluruh tutor yang ada di PKBM Rangsang Imo Joyo harus berlandas pada azas sosial di mana bukan materi yang menjadi tujuan utama dalam menjalankan tugasnya sebagai Guru. Pihak PKBM tidak menjanjikan banyak hal terkait pemenuhan Hak Tutor mengingat segala sistem Pendidikan Kesetaraan di sini masih fluktuatif.

Walau memakai *close recruitment*, namun untuk menjadi tutor sebenarnya hanya dari segi persebaran informasi. Mengenai calon tutor sendiri pihak PKBM bersifat terbuka bagi siapa saja yang mau mengamalkan ilmunya di bidang pendidikan. Bila informasi diterima dan ada kemauan dari pihak pendaftar kemudian pengelola merasa pihak tersebut layak, maka hal tersebut memungkinkan.

Seleksi untuk calon tutor sepenuhnya ditentukan dan dilaksanakan oleh Pengelola terutama Drs. Supatmo Priyo selaku Ketua PKBM. Walaupun beliau menyampaikan tidak ada sistem seleksi yang rumit, namun untuk pelaksanaan pendidikan yang baik tetap membutuhkan Tenaga Pendidik yang dapat dipercaya. Salah satu syarat untuk menjadi tutor adalah Strata-1 dan sehat secara psikologis. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak SP (Ketua PKBM dan Tutor) pada tanggal 6 Januari 2016 :

“Kita tidak terpancang pada ijazah karena kita sifatnya sosial, jadi siapa yang mau dan siap membantu di sini secara sosial, maka kita rekrut. Tapi saya juga melihat dari psikologis dan sifatnya di sosial masyarakat, harus baik, jadi tidak sembarangan juga mengambil tutor.....”

Ada sedikit penjelasan lain tentang penerimaan calon tutor yang disampaikan oleh Ibu FU (Koor Paket B dan Tutor) pada wawancara tanggal 29 Januari 2016:

“Tidak ada seleksi tutor secara khusus karena pengelola sudah tau latar belakang tutor.”

Maksud Ibu FU sebenarnya mendukung pernyataan bahwa Pengelola lah yang memiliki wewenang utama dalam perekrutan calon

tutor Paket B dan C. Dukungan terhadap pernyataan tersebut datang pula dari Bapak SB (Sekretaris 1 dan Tutor) pada wawancara tanggal 8 Januari 2016 :

“Tutor di sini sebenarnya harus berdasarkan keikhlasan karena kita lembaga yang mengusung rasa sosial.....”

Dari beberapa syarat menjadi tutor di atas, kemauan menjadi faktor utama yang dipertimbangkan. Hal ini sangat ditekankan pengelola terbukti dari beberapa kalimat yang menuju ke arah tersebut. Kemauan tutor menjadi syarat pokok karena tutor di PKBM ini harus bekerja dengan strategi yang berbeda dari pendidikan formal. Hasil observasi menunjukkan bahwa peserta atau warga belajar Paket B dan C di PKBM Rangsang Imo Joyo tidak bisa diberi tekanan dan metode mengajar seperti pada umumnya. Warga belajar pendidikan non formal memiliki alasan dan motivasi khusus dalam mengikuti Paket B maupun Paket C sehingga kedisiplinan dalam mengikuti pembelajaran kurang teratur. Selain itu, bongkar pasang tutor juga mempengaruhi sistem pembelajaran yang mengharuskan adanya koordinasi secara baik antara satu tutor dan lainnya. Di sinilah peran pengelola harus dimunculkan dalam pemenuhan posisi tutor.

Selain tutor, ada satu jenis lagi pendidik dalam Pendidikan Kesetaraan yaitu narasumber teknis yang bertugas memberi pelatihan praktek keterampilan pada warga belajar dalam proses pelatihan program Pendidikan Kesetaraan. Pendidikan Kesetaraan Paket B dan C di PKBM Rangsang Imo Joyo belum memiliki narasumber teknis dengan alasan

bahwa masih dalam tahap rencana yang belum terwujud dan kesiapan yang semakin menurun mengingat jumlah warga belajar juga menurun. Bapak SB selaku Sekretaris 1 dan Tutor Akuntansi menambahkan :

“Belum ada program keterampilan di PKBM ini. PKBM ini konsen sama kesetaraan karena kita manut pada kemauan/kebutuhan warga belajar. Mereka punya ijazah A atau B jadi mereka butuh kelanjutan pendidikan lewat paket. Dulu pernah, waktu warga belajarnya banyak kita mau bikin praktek, tetapi semakin kesini ternyata minat warga belajar semakin menurun sehingga niat itu kita urungkan.”

Hal serupa disampaikan pula oleh Ibu FU (Koor Paket B dan Tutor) pada wawancara tanggal 29 Januari 2016 :

“Sebenarnya kita juga ingin warga belajar memiliki keterampilan tertentu, tapi dalam pelaksanaan belum terlaksana. Kita masih berencana untuk mewujudkan itu.”

Dua pernyataan tersebut diperkuat oleh informan lainnya seperti warga belajar dan tutor yang mengatakan bahwa selama mereka melaksanakan tugas di PKBM Rangsang Imo Joyo, belum pernah ditemukan adanya narasumber teknis. Bapak SP sebagai Ketua PKBM dalam wawancara tanggal 6 Januari 2016 memiliki pandangan lain sebagai berikut:

“Lembaga tidak memiliki narasumber teknis, tetapi tutor-tutor di sini memiliki keterampilan khusus seperti mbak Subektiningsih (Ning) pintar menari jadi warga belajar yang ingin belajar menari bisa minta diajarkan sama mbak Ning. Selain tutor, ada juga mbak Eri sebagai ketua Batik Patangpuluhan. Perkembangan batiknya sudah bagus jadi warga belajar bisa belajar usaha di sana. Kemudian mas Soleh wirausaha di rumah yakni laundry, pak Joko Purwanto juga mempunyai laundry. Jadi, kami ingin mengarahkan warga belajar menjadi personal yang bisa dipakai di masyarakat. Tinggal warga belajarnya mau konsen ke salah satu bidang tersebut apa tidak. Nanti kita mau tawarkan.”



Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa rencana pemenuhan narasumber teknis untuk membimbing warga belajar sudah tersedia yaitu para tutorlah yang sanggup menjalankan hal tersebut. Semua kembali pada kebutuhan dan kesungguhan dari pihak warga belajar itu sendiri apakah keterampilan menjadi penting untuk dipelajari sedangkan kemauan untuk belajar materi pelajaran saja masih kurang. Pengelola memang belum secara resmi mengangkat narasumber teknis tapi memiliki pandangan ke arah bahwa warga belajar sebenarnya membutuhkan keterampilan untuk membantu memenuhi bekal hidup.

### **c. Penetapan Kurikulum Pendidikan Kesetaraan**

Pendidikan Kesetaraan di PKBM ini memang bersifat non formal namun sistem pembelajarannya mengacu pada pendidikan formal. Sistem pembelajaran yang dimaksud adalah satu tingkat pendidikan (kelas) ditempuh selama satu tahun. Maka, satu jenjang pendidikan yakni Paket B atau Paket C membutuhkan waktu tiga tahun pembelajaran. Hal ini berdasar pada hasil dokumentasi dari bentuk proposal kegiatan satu program paket untuk satu semester berjalan selama enam bulan. Data tersebut didukung oleh pernyataan VG sebagai warga belajar pada wawancara tanggal 27 Januari 2016:

“.....Intinya program paket di sini, satu paket tiga tahun, tapi bedanya sama formal kita seminggu masuk tiga kali.”

Kurikulum yang digunakan adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Hal ini karena PKBM berdiri di tahun 2007 yang

mana kurikulum terbaru dari masa itu adalah KTSP. Bapak SB (Sekretaris 1 dan Tutor) menyatakan hal ini pada wawancara tanggal 8 Januari 2016 :

“Kurikulum yang dipakai dari dulu adalah KTSP. Ini karena berdirinya PKBM sama dengan saat berlakunya KTSP.....”

Adapun, kurikulum ini dirasa sesuai dengan penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang mana memiliki tujuan meminimalisir jarak pemisah antara pendidikan formal dan nonformal, dengan kata lain adalah usaha menyetarakan. Secara khusus, Paket C untuk kelas XI dan XII saat ini hanya menyediakan jurusan IPS. Hal ini menurut kesepakatan Pengelola yang disesuaikan dengan minat warga belajar dan kemampuan lembaga. Pernyataan ini diberikan oleh RM pada wawancara tanggal 6 Januari 2016:

“Di sini jurusan Paket C itu IPS, nggak banyak praktek jadi belum pernah ada praktek pembelajaran”

Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak SB pada wawancara tanggal 8 Januari 2016:

“Seperti paket C itu kelas 11 dan 12 dimasukkan ke program IPS sehingga tidak banyak praktek pelajaran.....”

Pendapat senada disampaikan Ibu FU pada wawancara tanggal 29 Januari 2016:

“.....Materinya disamakan sama pendidikan formal, cuma kalau formal ada IPA dan IPS, di sini cuma ada IPS saja mbak”.

Kurikulum pendidikan Kesetaraan Paket B dan C menyangkut tiga hal yaitu rencana pembelajaran, susunan materi, dan metode pembelajaran. Di PKBM Rangsang Imo Joyo, rencana pembelajaran dituangkan dalam

bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dibuat oleh tutor. Susunan materi pelajaran juga disiapkan tutor dengan mengacu pada Standar Kelulusan (SKL) Pendidikan Kesetaraan yang tidak jauh berbeda dari pendidikan formal karena sistem SKL Paket B dan C juga mengacu pada Sistem Standar Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah. Metode pembelajaran diserahkan sepenuhnya oleh Pengelola kepada tutor pengampu masing-masing mata pelajaran.

Melalui metode penelitian dokumentasi, diketahui bahwa RPP yang dibuat oleh lembaga ini berisi tentang : 1) Standar Kompetensi, 2) Kompetensi Dasar, 3) Indikator, 4) Alokasi Waktu, 5) Tujuan Pembelajaran, 6) Materi Pokok, 7) Uraian Materi, 8) Pendekatan, 9) Metode Pembelajaran, 10) Skenario Pembelajaran, 11) Sumber dan Alat, 12) Penilaian. Sedangkan silabus di lembaga ini terdiri dari rincian : 1) Kompetensi Dasar, 2) Indikator, 3) Kegiatan Pembelajaran, 4) Materi, 5) Alokasi Waktu, 6) Sumber Belajar, 7) Penilaian: Jenis Tagihan, Teknik, dan Bentuk Instrumen.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti atas proses pembelajaran, susunan materi yang diberikan tutor banyak terintegrasi pada soal kemudian dijabarkan secara teori satu per satu. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa metode yang digunakan tutor lebih condong pada ceramah semi diskusi yang mana kedekatan tutor dan warga belajar diunggulkan agar suasana pembelajaran tidak kaku.

#### **d. Proses Penetapan Tempat Pembelajaran dan Pelatihan**

Sekretariat PKBM Ragsang Imo Joyo berada di Kelurahan Patangpuluhan dengan alamat Patangpuluhan WB III / 436 Yogyakarta namun tempat pembelajaran berbeda. Saat ini lokasi pembelajaran ditempatkan pada SMK Pembangunan Yogyakarta di Jalan Madumurti No. 28 Bugisan, Yogyakarta.

Sebelum ditetapkan SMK Pembangunan Yogyakarta sebagai prasarana belajar mengajar Pendidikan Kesetaraan Paket B dan C, pindah-pindah lokasi menjadi hal biasa bagi warga belajar dan tutor. Di awal berdiri, lokasi pembelajaran berada di Ruang Serbaguna Kantor Kelurahan Kelurahan. Bila suatu waktu ruangan tersebut dipakai untuk keperluan Kelurahan dan berbenturan dengan pembelajaran Paket B dan C maka pembelajaran dipindahkan ke Ruangan yang ada di Kantor Kecamatan Wirobrajan. Begitu sebaliknya saat Ruangan di Kantor Kecamatan digunakan untuk keperluan Kecamatan Wirobrajan sehingga pada saat itu PKBM Rangsang Imo Joyo memiliki dua lokasi pembelajaran secara bersamaan dan bergantian dalam pemakaian. Hal ini didukung pernyataan dari Bapak DL (Perwakilan Pembina) pada wawancara tanggal 29 Januari 2016:

“.....lokasi pembelajaran ada di balai kecamatan, atau memakai ruangan kantor kelurahan. Tergantung mana yang *selo*, itu yang dipakai. Kalau satunya nggak bisa ya pakai satunya lagi.”

Pindah-pindah lokasi pembelajaran berlangsung mulai berdirinya PKBM di tahun 2007 sampai vakum pada tahun 2012. Setelah satu tahun

vakum, PKBM membenahi kekurangan salah satunya di bidang sarana prasarana. Akhirnya, di awal tahun ajaran 2015/2016 PKBM memutuskan untuk memindahkan lokasi pembelajaran di tempat yang lebih tenang, nyaman, dan memadai yaitu SMK Pembangunan Yogyakarta. Paparan ini sesuai hasil wawancara dengan Bapak SP (Ketua PKBM dan Tutor) pada tanggal 6 Januari 2016 :

“Awal tempat pembelajaran dulunya di kelurahan patangpuluhan dan sekarang pindah di SMK Pembangunan Yogyakarta ini. Alasannya karena disana sering berbenturan dengan acara kelurahan sehingga kita tergusur, misal ada rapat kita harus pindah. Padahal, waktu itu warga belajar kita sedang banyak-banyaknya, sekitar tiga puluhan, tidak seperti sekarang. Jadi kami memutuskan untuk pindah kesini.”

Pendapat yang sama disampaikan oleh Ibu FU (Koordinator Paket B dan Tutor) pada wawancara tanggal 29 Januari 2016 :

“Dulu sempat kita kesulitan dalam tempat, karena dulu warga belajar kita banyak, kita pindah-pindah dari gedung serbaguna kelurahan ke kantor kecamatan, muter-muter. Selanjutnya tahun 2015 kita putuskan untuk pindah di sini, SMK Pembangunan agar lebih pasti.”

Hasil observasi menunjukkan bahwa lokasi yang dipilih tidak terlalu menyulitkan warga belajar sebab berada tidak jauh dari pusat Kantor Kelurahan Patangpuluhan dan Kantor Kecamatan Wirobrajan. Jika sebelumnya Kantor Kelurahan dan Kantor Kecamatan hanya berdampingan, kini tempat pembelajaran (SMK Pembangunan Yogyakarta) berada seratus meter dari lokasi tersebut.

**e. Sumber Dana Pendidikan Kesetaraan Paket B dan C**

Biaya pendidikan PKBM Rangsang Imo Joyo diperoleh dari beberapa sumber dana. Dalam metode dokumentasi Akta Notaris PKBM Rangsang Imo Joyo diketahui bahwa dana awal untuk mendapat hak menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan berasal dari para Pendiri Lembaga sebesar lima juta rupiah. Dana tersebut selanjutnya bertambah dengan Hibah dari Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dan Donatur yang tidak mengikat. Bapak SP selaku Ketua PKBM dan Tutor, dalam wawancara tanggal 6 Januari menjelaskan bahwa :

“Dulu, sebelum vakum kita membuat proposal untuk meminta dana ke Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Tetapi setelah vakum, kita kekurangan warga belajar sehingga kita tidak bisa mengajukan proposal ke Dinas lagi. Syarat minimal dari Dinas Pendidikan untuk mengajukan proposal itu 20 warga belajar. Setelah vakum, warga belajar yang mendaftar makin dikit, tidak sampai 20. Prosedurnya ya saya datang ke Dinas langsung mbak..”

Hal ini didukung pernyataan Ibu FU (Koor Paket B dan Tutor) dalam wawancara tanggal 29 Januari 2016:

“Sepertinya kemarin ada membuat proposal, tapi itu pengelola sendiri yang melaksanakan. Itu kadang proposal sudah dibuat berdasar jumlah warga belajarnya. Kan kalau diatas 20 bisa diajukan ke Dinas, kalau dibawahnya diajukan ke umum.”

Melalui hasil wawancara tersebut juga diperoleh data bahwa PKBM Rangsang Imo Joyo berdiri pada tahun 2007, vakum pada tahun 2012, dan aktif kembali di tahun 2013. Ada perbedaan kondisi keuangan di tahun sebelum dan sesudah vakum. Sebelum vakum, PKBM mendapat bantuan dana dari APBD Kota Yogyakarta yang diberikan melalui Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

Prosedur yang digunakan adalah dengan mengajukan proposal setiap satu semester sekali. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian dari metode dokumentasi contoh proposal yang pernah dibuat oleh lembaga untuk semester enam tahun ajaran 2009.

Syarat utama dalam pengajuan proposal adalah Lembaga Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan memiliki jumlah Warga Belajar minimal dua puluh orang. Hal ini disampaikan oleh Ketua PKBM melalui hasil wawancara di atas. Sebelum vakum, PKBM Rangsang Imo Joyo memiliki 30-35 warga belajar sehingga pengajuan atau pengusulan dana bantuan dari Dinas Pendidikan dapat dilaksanakan. Selain dari dana tersebut, PKBM juga tetap berusaha mencari dana dari Donatur yang tidak mengikat.

Kondisi setelah vakum berbeda karena jumlah warga belajar mengalami penyusutan. Kondisi ini dijelaskan oleh Ketua PKBM bahwa partisipasi dan kontribusi masyarakat berkurang. Sosialisasi juga dirasa kurang sehingga warga belajar yang mendaftar tidak sampai dua puluh orang. Hasil dokumentasi menunjukkan bahwa jumlah warga belajar terbaru adalah empat belas orang. Jumlah tersebut terdiri dari warga belajar mulai tahun 2013 dan tahun berikutnya. Alhasil, PKBM tidak lagi memperoleh dana BOK dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Saat ini sumber dana berasal dari Donatur dan iuran warga belajar.

Pengelola memberi gambaran bahwa donatur yang dimaksud di sini adalah masyarakat umum yang peduli akan pendidikan. Sampai saat ini

donatur yang sudah menyumbang adalah warga sekitar kecamatan Wirobrajan yang secara langsung dan tulus menyerahkan sejumlah dana pada saat ada sosialisasi Paket B dan C di berbagai acara maupun saat rapat di Kelurahan Patangpuluhan.

Pengelola mengatakan bila niat awal penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan ini adalah membantu masyarakat tanpa memberatkan, namun kondisi terkini membuat diadakannya iuran warga belajar. Iuran warga belajar dijadikan biaya rutin sebesar dua puluh ribu rupiah setiap bulan. Kondisi seperti ini berjalan setelah PKBM mengalami kevakuman sehingga iuran dilaksanakan mulai tahun ajaran 2013. Sebelum vakum, sumber dana untuk pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan tidak menyangkut iuran warga belajar sebab saat itu ada dana BOK dari Dinas Pendidikan Yogyakarta untuk memenuhi alokasi dana yang dibutuhkan.

## **2. Pelaksanaan Program Pendidikan Kesetaraan Paket B dan C**

### **a. Pemenuhan Tugas dan Kebutuhan Warga Belajar**

Kebutuhan warga belajar terpenuhi melalui beberapa peran pengelola dan tutor dalam hal pembelajaran dan hal yang mendukung hingga terselesaikannya program Paket yang diambil. Sebelum proses pembelajaran, warga belajar dikelompokkan dalam rombongan belajar tertentu.

Sistem pengelompokan rombongan belajar (rombel) menjadi wewenang pengelola sebagai pihak yang menerima warga belajar baru. Pembagian rombel tidak memperhatikan usia maupun jenis kelamin



melainkan berdasar pada ijazah terakhir atau raport terakhir dari warga belajar. Hal ini didukung pernyataan Mbak BB selaku tutor pada wawancara 8 Januari 2016, “Masuknya kelas 7, 8, 9, dan seterusnya itu ditentukan sama pengelola.” Hal senada disampaikan pula oleh Bapak SB selaku Sekretaris 1 dan tutor PKBM dalam wawancara tanggal 8 Januari 2016:

“Rombel bukan ditentukan oleh pengelola tetapi sesuai ijazah, misal mbaknya dulu ijazah SMP jadi masuk sini bisa ambil Paket C kelas 10. Misal berhenti di tengah, Kelas 10 mau lanjut kelas 11 bisa asal ada raport terakhir kelas 10. Jadi, bisa masuk disini di Paket C kelas 11.”

Hasil penelitian dengan metode dokumentasi buku induk warga belajar menunjukkan bahwa Jumlah warga belajar terbaru per rombel di PKBM Rangsang Imo Joyo adalah sebagai berikut :

- 1) Kelas VII : 3 orang
- 2) Kelas VIII : 2 orang
- 3) Kelas IX : 1 orang
- 4) Kelas X : tidak ada
- 5) Kelas XI : 3 orang
- 6) Kelas XII : 5 orang

Jumlah warga belajar yang terdaftar di Paket B saat ini adalah enam orang dan di Paket C adalah delapan orang. Total warga belajar yang terdaftar pada tahun ajaran 2015/2016 seluruhnya empat belas orang.

Ijazah terakhir menunjukkan jenjang pendidikan yang sudah dicapai warga belajar sehingga selanjutnya penentuan rombel diawali dengan

penentuan Paket yang akan diikuti yakni Paket B ataupun Paket C. Raport terakhir menunjukkan tingkat atau kelas yang pernah ditempuh oleh warga belajar untuk selanjutnya penentuan rombongan dimasukkan pada satu tingkat di atas hasil raport terakhir, misalnya raport terakhir warga belajar adalah kelas X maka PKBM Rangsang Imo Joyo memasukkan warga belajar tersebut pada kelas XI. Secara garis besar, pengelompokan rombongan belajar adalah berdasarkan capaian terakhir warga belajar itu sendiri.

Kebutuhan warga belajar terpenuhi namun pada kenyataannya warga belajar belum melaksanakan kewajiban utamanya secara optimal yaitu belajar. Hal ini didukung pernyataan Ketua PKBM, Bapak SP dalam wawancara tanggal 6 Januari 2016: “Pada dasarnya, kemauan warga belajar tidak bisa dipaksakan. Kewajiban mereka adalah belajar tetapi masih sering malas.”, juga pernyataan VG (warga belajar) pada wawancara tanggal 27 Januari 2016: “Seminggu masuk rata-rata dua kali. Masuknya tergantung hujannya mbak. Kalau terang ya berangkat tapi kalau hujan deras, banyak nggak masuknya.”, dan paparan tersebut diperkuat lagi oleh pernyataan RM (warga belajar) pada wawancara tanggal 6 Januari 2016: “Warga belajar masuk tiga kali seminggu, tiap hari Senin, Rabu, Jum’at. Yang hadir tiap Paket di satu pertemuan kadang dua kadang tiga anak.”.

Dari empat belas orang jumlah warga belajar yang terdaftar di Paket B dan C Pendidikan Kesetaraan PKBM Rangsang Imo Joyo, hanya sekitar lima orang yang terlihat aktif. Sembilan warga belajar hanya terlihat di

awal kemudian muncul kembali pada saat ada ujian. Data ini berdasar pada hasil observasi kegiatan pembelajaran dan hasil beberapa wawancara dengan informan. Dari tiga kali seminggu pertemuan, tidak semua warga belajar aktif menghadiri ketiga-tiganya. Rata-rata berkisar dua kali hadir dalam pertemuan. Keadaan tersebut dipengaruhi pula oleh kondisi cuaca saat ini, bila hujan sangat deras di sekitar lokasi pertemuan maka pembelajaran diliburkan melalui koordinasi oleh petugas piket. Hal ini dimungkinkan mengingat warga belajar yang aktif berasal dari sekitar Kecamatan Wirobrajan dan mendapat cuaca yang hampir sama.

Pihak lembaga mengatakan bahwa tidak bisa memaksa warga belajar untuk selalu hadir di tiap pertemuan sebab pendidikan nonformal sangat bergantung dari kemauan dari warga belajar itu sendiri. Absennya warga belajar menjadi tanggungjawab pihak itu sendiri sebab materi yang diajarkan terus berjalan, tidak ada pengulangan yang terlalu sering sehingga ketertinggalan wajib dikejar oleh warga belajar dengan caranya sendiri namun tutor dapat membimbing bila benar-benar mengalami kesulitan.

Keputusan warga belajar untuk mengikuti pembelajaran secara rutin atau tidak dipengaruhi pula oleh kondisi keluarga yang mana dukungan keluarga menjadi salah satu motivasi untuk warga belajar. Bapak SB selaku Sekretaris 1 dan Tutor dalam hasil wawancara tanggal 8 Januari 2016 memaparkan:

“.....Sebenarnya dorongan keluarga juga menentukan, kalau keluarga mendukung ya dia bisa rajin, kalau tidak ya kurang. Kita

tidak bisa terlalu memaksa warga belajar untuk rajin karena semua itu tergantung minat dari warga belajar sendiri. Faktor X seperti itu yang sering mempengaruhi. Padahal dari dinas kota sudah diarahkan untuk menempuh pendidikan di sini.....”

Penjelasan Bapak SB termasuk dalam ringkasan berikut yang menyebutkan bahwa pernah suatu kondisi ada dua warga belajar dengan status suami-istri. Setelah beberapa kali mengikuti pembelajaran, sang istri diminta berhenti oleh suami dengan alasan harus mengurus anak. Bila dilihat dari segi Hak Asasi Manusia, sang istri sebenarnya berhak memperoleh pendidikan namun terhalang oleh kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Walaupun bisa disiasati, namun pada akhirnya tetap tidak berjalan lancar dan sang istri harus kembali putus sekolah.

Latar belakang warga belajar di PKBM ini bermacam-macam. Beberapa orang adalah anak usia sekolah, ada yang sudah bekerja, dan ada pula ibu rumah tangga. Bapak SP selaku Ketua PKBM dan Tutor menyampaikan pada tanggal 6 Januari 2016:

“.....Latar belakang warga belajar di sini kebanyakan adalah masyarakat putus sekolah yang sedang bekerja dan ibu rumah tangga.”

Motivasi dari masing-masing latar belakang itupun bermacam-macam. Hal ini disampaikan oleh Bapak SB selaku Sekretaris 1 dan Tutor dalam hasil wawancara tanggal 8 Januari 2016:

“....Motivasi warga belajar ada yang melanjutkan pendidikan, tapi ada juga bapak/ibu bertujuan untuk tunjangan jabatan, tunjangan pensiun, dan sebagainya. Motivasi diluar melanjutkan malah lebih rajin karena ada motif tanda petiknya sehingga sangat membutuhkan ijazah paket.”

Anak usia sekolah termotivasi untuk mengikuti Pendidikan Kesetaraan karena ingin menuntaskan wajib belajar dua belas tahun. Orang yang sudah bekerja termotivasi karena ingin menyelesaikan wajib belajar dan beberapa orang menginginkan hal tersebut dengan maksud memenuhi prasyarat keperluan tertentu seperti membutuhkan ijazah Paket C untuk mendapat tunjangan fungsional dan sebagainya. Sementara ibu rumah tangga mengikuti Paket karena mengisi waktu luang. Pada dasarnya, semua warga belajar tetap ingin memperoleh pendidikan yang setara dengan SMA/MA sehingga di kehidupan sosial dapat berlaku lebih percaya diri.

Kehadiran warga belajar memiliki ketentuan yang sudah tertera di Peraturan nasional namun pihak pengelola menyatakan bahwa hal tersebut tidak dapat dijadikan acuan di PKBM Rangsang Imo Joyo. Gambaran mengenai hal ini disampaikan Mbak BB selaku tutor pada wawancara tanggal 8 Januari 2016:

“Warga belajar ada yang tertib, ada yang semangat, tapi kebanyakan kurang. Alasannya kurang tertarik, kadang hanya datang pas ujian saja, hari-hari biasa tidak pernah mengikuti. Tapi walau begitu tetap dianggap warga belajar.”

Kelulusan warga belajar tidak semata-mata dipengaruhi oleh kehadiran melainkan hasil belajar. Hal ini dijelaskan oleh pernyataan Bapak SB selaku sekretaris 1 dan tutor dalam hasil wawancara tanggal 8 Januari 2016:

“Kebanyakan warga belajar bekerja, makanya hanya beberapa yang ikut sampai akhir, beberapa ada yang berhenti di tengah semester. yang berhenti di tengah semester tidak bisa ikut UN, bukan masalah

minimal hadir tetapi kehadiran saat ujian, misal ikut saat UTS, UKK, dan UN itu sendiri. Kehadiran sebenarnya memang diperhitungkan tetapi praktek di lapangan tidak bisa terlalu diterapkan karena ini pendidikan nonformal.”

Lembaga nonformal tidak terlalu mengikat seperti pendidikan formal sehingga sumber daya manusia di dalamnya juga bersikap fleksibel terhadap aturan. Hal ini bukan berarti melalaikan kewajiban, namun kedisiplinan masing-masing pihak masih perlu dipupuk.

Terhadap pelaksanaan program selama ini, warga belajar memiliki kesan seperti yang disampaikan oleh RM (warga belajar) pada wawancara 6 Januari 2016:

“Saya suka belajar di sini, tidak ribet dan tutornya santai waktu ngajar. Materi pelajaran itu jadi nggak terlalu berat pas dibikin diskusi sambil ketawa-ketawa gitu mbak. Nggak enaknya, kalo menurut saya waktu tutor telat datang. Tutor seringnya telat, jadi pelajaran molor, bisa sampai maghrib.”

Kesan lainnya disampaikan VG (warga belajar) dalam wawancara tanggal 27 Januari 2016 :

“Belajar di sini enak karena tutornya bagus. Nggak enaknya itu, saya kan Paket B, tapi warga belajar Paket B yang lain jarang sekali masuk jadi saya jarang ada temennya.”

Dari dua pendapat di atas, kesan yang muncul adalah kepuasan warga belajar terhadap lembaga pendidikan kesetaraan mengenai sistem pembelajaran yang nyaman dan tutor yang bagus. Di lain sisi, ada permasalahan yang dirasa warga belajar mengganggu proses pembelajaran selama ini. Masalah pertama berkaitan dengan kehadiran tutor dan masalah kedua berkaitan dengan kehadiran warga belajar. Meski demikian, pembelajaran tetap berjalan hingga saat ini.

**b. Kualifikasi serta Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola**

Kualifikasi menggambarkan latar belakang pengelola di PKBM Rangsang Imo Joyo. Pengelola inti adalah tiga jabatan yang dipegang oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Hal ini sesuai pernyataan Bapak SB selaku Sekretaris 1 dan Tutor dalam hasil wawancara tanggal 8 Januari 2016:

“Pembentukan PKBM ini adalah saat rapat koordinasi di kelurahan. Sebelum ditetapkan, sudah ditentukan gambaran struktur pengelolanya. Sebenarnya unsur dari pengelola itu banyak tapi mengacu pada dinas, hanya ada 3 pengelola, yang lainnya tutor.”

Berdasar hasil dokumentasi, ditemukan keterangan tentang daftar pengelola PKBM Rangsang Imo Joyo khususnya pihak yang terkait dengan Program Kesetaraan Paket B dan C sebagai berikut:

**Tabel 5. Daftar Pengelola PKBM Rangsang Imo Joyo Tahun 2015**

No.	Jabatan	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Status PNS/Non	Pendidikan	
					Jenjang-Jurusan	Kepend. /Non
1.	Ketua	Drs. Supatmo Priyo	L	PNS	S1 – Fisika	Kepend
2.	Sekretaris 1	Soleh Bukhori, SE	L	Non PNS	S1 – Ekonomi	Non Kepend
3.	Sekretaris 2	Feri Artha	P	Non PNS	SMA	Non Kepend
4.	Bendahara 1	Dewi Fadhilatunnaim	P	Non PNS	D3	Non Kepend
5.	Bendahara 2	Hariyati	P	Non PNS	SMA – IPS	Non Kepend
6.	Koord. Paket B	Fitria Ulfa, S.Si	P	Non PNS	S1 – Matematika	Non Kepend
7.	Koord. Paket C	Joko Sugiyanto, M.Pd	L	PNS	S2 –Ekonomi	Kepend

*Sumber: Buku Induk Pengelola PKBM Rangsang Imo Joyo Tahun 2015*

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pengelola inti untuk Program Kesetaraan Paket B dan C adalah tujuh orang. Empat diantara

pengelola berjenis kelamin Perempuan dan tiga orang berjenis kelamin Laki-laki. Dari tabel juga diketahui bahwa dua orang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan lima yang lainnya Non-PNS. Empat orang sudah memiliki latar belakang minimal S1 dan tiga lainnya masih di bawah jenjang tersebut. Adapun latar belakang yang menyangkut Kependidikan ada dua orang dan lainnya berasal dari bidang Non-Kependidikan.

Lembaga PKBM memakai sistem *double job* yang mana dari ketujuh pengelola di atas, empat diantaranya memiliki *double job* sebagai tutor. Hal ini didukung oleh sinkronisasi hasil dokumentasi pada data tutor dan data pengelola. Pengelola yang juga bertugas sebagai tutor adalah : 1) Drs.Supatmo Priyo sebagai Tutor Fisika, 2) Soleh Bukhori, SE sebagai Tutor Akuntansi, 3) Fitria Ulfa, S.Si sebagai Tutor Matematika, dan 4) Joko Sugiyanto, M.Pd sebagai Tutor Ekonomi.

Sebelum ini, sudah ada pergantian jabatan untuk posisi Koordinator Paket B dan C pada tahun 2013 dan Penambahan jumlah pengelola dari lima orang menjadi tujuh orang seperti keterangan di atas. Pernyataan ini disampaikan dalam wawancara tanggal 8 Januari 2016 bersama Bapak SB selaku Sekretaris 1 dan Tutor :

“Hanya tutor sering bongkar pasang, tetapi pengelola utama tetap P. Patmo, saya, Bu Dewi dari awal. Kemudian karena kesibukan masing-masing maka sekretaris dan bendahara dibuat *double*, jadi ada 1 dan 2. Saya sebagai Sekretaris 1 di PKBM ini.”

Lima orang yang dimaksud adalah Ketua, Sekretaris, Bendahara, Koordinator Paket B, dan Koordinator Paket C. Setelah tahun 2013,



Sekretaris dan Bendahara ditambah menjadi dua. Hal ini karena kesibukan pihak yang bersangkutan bertambah sehingga jabatan tersebut pun dibagi menjadi dua posisi agar tugas-tugas tetap terlaksana apabila ada berbenturan kepentingan.

Pembagian tugas untuk masing-masing pengelola di atas belum terlaksana secara optimal. Ketua PKBM menyatakan bahwa *Job Description* setiap jabatan belum ada secara mendetail. Hal ini menyebabkan tugas pengelolaan hanya dibebankan ke beberapa pihak saja. Ketua PKBM, Bapak SP menyampaikan bahwa Beliau sering mengerjakan tugas sekretaris maupun bendahara, seperti tercantum dari hasil wawancara tanggal 6 Januari 2016 berikut:

“.....Bendahara ya prakteknya yang mengelola dana-dana yang ada, Untuk sekretaris ya ada tugasnya tapi prakteknya sering saya kerjakan sendiri. Mengenai uraian tugas, jobdesk belum ada karena memang kita lebih dominan sosialnya. Jadi, kalau saya bagi jobdesk secara organisasi, pasti tidak berjalan.”

Hasil dokumentasi melalui akta notaris mengatakan bahwa “Pembagian tugas dan pekerjaan diantara anggota badan pengurus diserahkan kepada mereka sendiri”. Walau begitu ternyata belum ada kejelasan mengenai rincian tugas masing-masing jabatan.

Diluar data pengelola, ada pihak yang membantu pelaksanaan Paket B dan C yaitu petugas piket. Ketua PKBM juga menyampaikan hal tersebut pada wawancara tanggal 6 Januari 2016:

“Pengelola terdiri dari pengurus harian, ketua sekretaris bendahara dan koordinator program, sama satu tambahan lagi petugas piket. Cuma itu saja. Pengaturannya ya kita minta saja. Mbak Eri

kemudian mbak Dewi dan istri saya, saya suruh piket dihari-hari pembelajaran, Senin, Rabu, dan Jum'at, dibagi tiga orang.”

Tugasnya adalah menjaga absensi warga belajar serta memastikan bahwa pada hari tersebut tutor yang datang berapa dan bila tidak seluruhnya hadir maka akan dikonfirmasi. Hal ini ditambahkan oleh pernyataan Ketua PKBM bahwa:

“Tujuan piket adalah mengkomunikasikan kondisi tutor siap dan tidaknya. Kalau misalnya tutor belum ada pas warga belajar sudah siap berarti ya dikomunikasikan. Itu terkait piket.”

Dengan adanya petugas piket, pengawasan terhadap pelaksanaan program semakin terjaga. Petugas piket tidak masuk dalam struktur pengelola PKBM namun perannya juga penting mengingat pembelajaran tidak diadakan di satu lokasi dan satu waktu dengan kegiatan pengelola.

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) pengelola belum ada secara rinci sehingga pelaksanaan tupoksi masing-masing pengelola juga belum optimal. Ketua PKBM, Bapak SP mengatakan dalam wawancara tanggal 6 Januari 2016 bahwa :

“.....Sementara ini yang bergerak adalah ketua, sekretaris, dan bendahara. Jika ada sesuatu dan saya mampu maka saya selesaikan sendiri, tapi jika saya berhalangan baru saya limpahkan ke orang lain. Contohnya ada rapat UNPK (Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan) saya tidak bisa hadir sehingga saya delegasikan pada sekretaris satu.”

Hal tersebut menggambarkan adanya penumpukan tugas di satu atau beberapa pihak saja. Secara garis besar beban paling banyak ada pada Ketua PKBM yang seringkali merangkap sebagai sekretaris, bendahara, maupun koordinator Paket. Walau begitu, pengelola menambahkan bahwa

sampai saat ini sistem Pendidikan Kesetaraan tetap berjalan dengan baik. Pengelola inti berjumlah tujuh orang, namun beberapa dari tujuh orang tersebut memegang *double job* sebagai pengelola sekaligus tutor Pendidikan Kesetaraan Paket B dan atau Paket C. Hal tersebut di luar kesibukan pihak terkait selain di lembaga PKBM Rangsang Imo Joyo, sebagai Guru di sekolah formal misalnya.

Penumpukan tugas di beberapa pihak saja juga dipengaruhi atas sedikitnya beban kerja masing-masing jabatan bahwa tidak semua tugas dilakukan secara rutin. Pihak pengelola menyatakan bahwa pengelola bekerja saat ada pekerjaan tertentu dan tidak memiliki beban kerja harian. Pengelola bahkan tidak memiliki sekretariat atau kantor sebagai koordinasi saat melakukan pekerjaan. Sekretariat secara formalitas ada di Kelurahan Patangpuluhan namun tidak dipergunakan secara nyata. Hal ini diperkuat oleh pengakuan Ketua PKBM, Bapak SP pada wawancara tanggal 6 Januari 2016:

“Sekretariat lembaga secara formal ada di kelurahan tetapi hanya tulisan saja. Prakteknya, pengelola melaksanakan tugas di rumah masing-masing. Pihak kelurahan sudah tahu kalau ada apa-apa mengenai PKBM maka akan dilarikan ke rumah saya yang tidak jauh dari kelurahan. Kelurahan juga sebagai tempat promosi PKBM....”

Koordinasi internal sering dilakukan di rumah Ketua PKBM, namun pada dasarnya koordinasi di PKBM ini dilakukan secara fleksibel, bahwa dapat dilakukan kapan dan di mana saja. Komunikasi tetap terjaga walaupun pekerjaan tidak dilakukan secara merata. Pengelola telah berhasil menjaga keaktifan PKBM Rangsang Imo Joyo. Ketua PKBM

menambahkan : “Pengelola sudah menyiapkan pembelajaran 3 kali seminggu dan lokasi pembelajaran yang memadai di SMK Pembangunan Yogyakarta”. Pembagian tugas masing-masing belum optimal, namun secara luas, sistem pengelolaan lembaga tetap berjalan.

**c. Kualifikasi serta Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Tutor**

Pembagian tutor Program Kesetaraan di PKBM Rangsang Imo Joyo berdasarkan mata pelajaran yang diampu sehingga bisa menunjukkan posisinya mengajar berada di Paket B atau C. Satu tutor mengampu satu sampai dua mata pelajaran dan mengajar minimal dua kali seminggu. Latar belakang tutor di sini beragam karena ada yang dasarnya Guru di sekolah formal dan ada beberapa yang non kependidikan. Penjelasan tentang hal ini adalah dari hasil wawancara tanggal 6 Januari 2016 bersama Bapak SP selaku Ketua PKBM dan Tutor:

“Dari semua tutor, kebanyakan sudah S1, tapi ada yang non pendidikan. Jadi, dia bukan guru tetapi sanggup menjadi tutor disini. Walau begitu latar belakang pendidikan sama dengan yang diajarkan pada warga belajar.”

Pendapat serupa disampaikan Mbak BB (Tutor) dalam wawancara tanggal 8 Januari 2016:

“Kebanyakan tutor adalah guru sekolah formal. Tutor disini kayaknya tidak semua sesuai *backgroundnya*, ada beberapa yang bukan dari pendidikan. Tetapi mayoritas sudah minimal S1, hanya satu yang belum karena dia masih menyelesaikan pendidikan S1 nya tetapi sudah bersedia menjadi tutor disini. Masalah tentang tutor adalah sering gonta-ganti. Sistemnya kaya *freelance* atau *parttime*, nggak lama lalu pindah.”

Hal tersebut didukung oleh hasil dokumentasi tentang data tutor Paket B dan C terbaru di PKBM Rangsang Imo Joyo sebagai berikut:

Tabel 6. Daftar Tutor PKBM Rangsang Imo Joyo  
Tahun 2015

No.	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Status PNS/Non	Pendidikan		Mengajar Mata Pelajaran	Paket	
				Jenjang-Jurusan	Kepend./Non		B	C
1.	Drs. Supatmo Priyo	L	PNS	S1 – Fisika	Kepend	Fisika / Matematika	√	√
2.	Endang Sri Sumiyati, S.Pd	P	PNS	S1 – Bhs. Inggris	Kepend	Bhs. Inggris	√	√
3.	Dra. Sri Subektingrum	P	Non PNS	S1 – Sosiologi	Kepend	Sejarah & Sosiologi	√	√
4.	Dra. E. Mujiyah	P	Non PNS	S1 – Geografi	Kepend	Geografi		√
5.	Drs. Magiyono	L	Non PNS	S1 – PKn	Kepend	PKn		√
6.	Joko Purwantoro, S.Si	L	Non PNS	S1 – Biologi	Non Kepend	Biologi	√	√
7.	Soleh Bukhori, SE	L	Non PNS	S1 – Ekonomi	Non Kepend	Akuntansi		√
8.	Dodi Erwanto, M.Pd	L	Non PNS	S2 – Kimia	Kepend	Kimia		√
9.	Dewi Andriani, S.Pd	P	PNS	S1 – Bhs. Indonesia	Kepend	Bhs. Indonesia	√	√
10.	Joko Sugiyanto, M.Pd	L	PNS	S1- Ekonomi	Kepend	Ekonomi		√
11.	Rr. Zeny Nur R., SH	P	Non PNS	S1 – PKn	Non Kepend	PKn	√	√
12.	Fitria Ulfa, S.Si	P	Non PNS	S1 – Matematika	Non Kepend	Matematika	√	√
13.	Henry Wahono	L	Non PNS	SMA (sedang menyelesaikan S1 PKn)	Kepend	PKn	√	√
14.	Baroroh Barid, S.Pd	P	Non PNS	S1 – Bhs. Inggris	Kepend	Bhs. Inggris	√	√

*Sumber: Buku Induk Tutor PKBM Rangsang Imo Joyo Tahun 2015*

Berdasar tabel di atas, mayoritas tutor Paket B dan C memiliki minimal pendidikan Strata-1. Hanya ada satu tutor yang belum yaitu Pak Henry Wahono yang mana beliau sedang menempuh pendidikan untuk menyelesaikan gelar Strata-1, dan secara tidak langsung pendidikan terakhirnya adalah SMA. Bila dilihat lebih lanjut, latar belakang pendidikan tutor mayoritas sudah sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. Pernyataan tersebut didukung oleh paparan Ketua PKBM, Bapak SP pada wawancara tanggal 6 Januari 2016:

“.....Minimal pendidikan tutor di sini adalah sarjana muda, tapi mayoritas sudah S1 walaupun dasarnya bukan pendidikan secara keseluruhan. Rata-rata satu tutor mengajar satu mata pelajaran tapi karena kondisi PKBM, terpaksa harus ada beberapa yang mengajar dua mata pelajaran.”

Ada beberapa tutor yang memang mengajar lebih dari satu mata pelajaran, hal tersebut disampaikan oleh Ketua PKBM dengan alasan jumlah tutor belum memenuhi sejumlah mata pelajaran yang ada di Paket B dan C sehingga ada tutor yang harus mengajar dua mata pelajaran sekaligus. Alasan lain dibalik hal tersebut adalah karena tutor mata pelajaran tertentu tidak bisa lagi mengajar sehingga ada posisi kosong yang belum terisi, untuk sementara digunakan strategi tersebut di atas.

Walaupun konsentrasi pendidikan tutor kebanyakan sudah sesuai dengan mata pelajaran yang diampu, namun tidak kesemuanya berasal dari jurusan pendidikan. Beberapa tutor adalah lulusan non kependidikan sehingga ilmu yang didapat adalah ilmu murni dan pihak tersebut tidak memperoleh ilmu untuk mengajar. Hal ini tidak terlalu mempengaruhi pembelajaran di PKBM Rangsang Imo Joyo karena penyaluran ilmu dalam pendidikan nonformal dilakukan dengan teknis yang fleksibel.

Tugas pokok dan fungsi tutor berkaitan erat dengan proses pembelajaran. Bila dilihat dari hasil dokumentasi berupa pembagian jadwal pelajaran di bagian pengorganisasian, tugas mengajar tutor satu mata pelajaran terjadi setiap hari dengan tingkatan kelas yang berbeda-beda. Secara tidak langsung, tugas mengajar tutor adalah tiga kali dalam seminggu. Namun, kenyataan sedikit berbeda karena beberapa faktor.

Kurang aktifnya warga belajar membuat kelas yang hadir dari Paket B dan C tidak lengkap. Satu pertemuan misalnya hanya dihadiri oleh perwakilan tiga kelas yaitu kelas IX, X, dan XII. Hal ini berpengaruh juga pada kehadiran tutor. Selain alasan tersebut, Ketua PKBM yaitu Bapak SP pada wawancara tanggal 6 Januari 2016 menyampaikan:

“Pendidik mengajar sesuai mata pelajaran yang diampunya. Pendidik atau tutor datang saat jadwalnya ada tetapi tidak selalu seperti itu. Tutor kadang ada kesibukan lain yang membuat mata pelajaran di hari itu dikurangi.”

Beberapa hal di atas menyebabkan jadwal mengajar tutor menjadi tidak menentu. Hal ini dikomunikasikan oleh petugas piket pada hari tertentu. Selain itu, tutor yang tidak bisa hadir biasanya karena berhalangan dengan kesibukan lain yang tidak dapat ditinggalkan. Resikonya adalah warga belajar belajar tidak sesuai jadwal pelajaran dan ada materi pelajaran yang menumpuk dan harus menyesuaikan waktu berikutnya.

Selain jadwal mengajar, kewajiban tutor termasuk juga datang tepat waktu saat ada proses belajar mengajar. Pada kenyataannya, tidak semua tutor dan warga belajar datang sesuai jadwal sehingga proses pembelajaran juga sering terulur. Hal ini sesuai pernyataan warga belajar seperti VG dalam wawancara tanggal 27 Januari 2016:

“Setiap pelajaran, tutor kebanyakan hadir, kan ada jadwalnya sendiri-sendiri tapi pernah ada jadwal pelajaran yang diganti karena tutornya nggak hadir.”

Hal senada tentang kehadiran tutor disampaikan oleh RM pada wawancara tanggal 6 Januari 2016:

“Tutor kadang-kadang telat misal datang jam setengah 5, kadang juga nggak datang tapi jarang. Seringnya tutor selalu datang. Satu tutor mengajar satu mata pelajaran.”

Proses pembuatan RPP dan silabus juga menjadi salah satu tanggungjawab tutor, namun pelaksanaan di lapangan berbeda. Ketua PKBM, Bapak SP menyampaikannya di wawancara tanggal 6 Januari 2016:

“Sejauh ini tutor tidak selalu membuat RPP, hanya berjalan saja sesuai target. Tutor tetap mengacu pada SKL, saya hanya mengontrol itu saja. Terutama bagi warga belajar yang mau ujian, kita fokuskan pada SKL nya.”

Pendapat serupa datang dari hasil wawancara tanggal 8 Januari 2016 bersama Bapak SB selaku Sekretaris 1 dan Tutor PKBM:

“RPP/Silabus sebetulnya mirip sekolah formal, tetapi kita jarang membuat. Kita jalan aja sesuai ancer-ancer dari Dinas. Kita juga mengacu pada buku pelajaran atau materi di sekolah formal.”

Berdasar hasil dokumentasi, diketahui bahwa mata pelajaran Paket B berjumlah enam yang terdiri dari Bahasa Inggris, Matematika, IPA, PKn, IPS, dan Bahasa Indonesia. Dari data tersebut juga diketahui bahwa jumlah mata pelajaran Paket C berjumlah sebelas dan terdiri dari Sosiologi, PKn, Ekonomi, Fisika, Biologi, Kimia, Matematika, Geografi, Sejarah, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Hal ini berpengaruh pada kinerja tutor yang mana satu tutor bisa mengampu satu atau dua mata pelajaran di atas. Berdasar hasil dokumentasi, saat ini jumlah tutor yang aktif adalah sembilan orang. Kondisi ini bukan berarti bahwa tutor yang lain tidak melaksanakan tugas melainkan tidak mendapat jatah mengajar ketika warga belajar didikannya tidak hadir, misalnya tutor Biologi untuk



mengajar Paket C kelas X akan pasif saat warga belajar kelas X juga sedang pasif. Hal ini menurut hasil observasi peneliti saat memperhatikan beberapa kali pembelajaran di SMK Pembangunan Yogyakarta.

#### d. Pelaksanaan Pembelajaran Akademik

Melalui metode dokumentasi, peneliti memperoleh jadwal pelajaran yang dijadikan acuan Paket B dan C di PKBM Rangsang Imo Joyo sebagai berikut:

Tabel 7. Jadwal Pembelajaran Paket B  
Tahun Ajaran 2015/2016

No.	Hari	Waktu	Kelas/Mata Pelajaran		
			VII	VIII	IX
1.	Senin	13.30 – 14.15	Bahasa Inggris	Matematika	IPA
		14.15 – 15.00	Bahasa Inggris	Matematika	IPA
		<b>15.00 – 15.15</b>	<b>Istirahat</b>	<b>Istirahat</b>	<b>Istirahat</b>
		15.15 – 16.00	PPKN	IPS	Bahasa Indonesia
		16.00 – 17.45	PPKN	IPS	Bahasa Indonesia
2.	Rabu	13.30 – 14.15	IPA	Bahasa Inggris	Matematika
		14.15 – 15.00	IPA	Bahasa Inggris	Matematika
		<b>15.00 – 15.15</b>	<b>Istirahat</b>	<b>Istirahat</b>	<b>Istirahat</b>
		15.15 – 16.00	Bahasa Indonesia	PPKN	IPS
		16.00 – 17.45	Bahasa Indonesia	PPKN	IPS
3.	Jumat	13.30 – 14.15	Matematika	IPA	Bahasa Inggris
		14.15 – 15.00	Matematika	IPA	Bahasa Inggris
		<b>15.00 – 15.15</b>	<b>Istirahat</b>	<b>Istirahat</b>	<b>Istirahat</b>
		15.15 – 16.00	IPS	Bahasa Indonesia	PPKN
		16.00 – 17.45	IPS	Bahasa Indonesia	PPKN

Sumber: Jadwal Pembelajaran Paket B PKBM Rangsang Imo Joyo TA. 2015/2016

**NB :** Belajar Mandiri dan Tutorial

- 1) Pendidikan Agama (Hari Kamis pukul 14.00 s.d 16.00 WIB)
- 2) Penjaskes (Hari Minggu pukul 08.00 s.d 10.00 WIB)

**Tabel 8. Jadwal Pembelajaran Paket C  
Tahun Ajaran 2015/2016**

No.	Hari	Waktu	Kelas/Mata Pelajaran		
			X	XI	XII
1.	Senin	13.30 – 14.15	Sosiologi	PKn	Ekonomi
		14.15 – 15.00	Fisika	Ekonomi	PKn
		15.00 – 15.15	<b>Istirahat</b>	<b>Istirahat</b>	<b>Istirahat</b>
		15.15 – 16.00	PKn	Matematika	Geografi
		16.00 – 17.45	Geografi	Matematika	Sejarah
2.	Rabu	13.30 – 14.15	Bhs.Indonesia	Bhs. Indonesia	Sosiologi
		14.15 – 15.00	Kimia	Bhs. Indonesia	Sosiologi
		15.00 – 15.15	<b>Istirahat</b>	<b>Istirahat</b>	<b>Istirahat</b>
		15.15 – 16.00	Ekonomi	Bhs. Inggris	Matematika
		16.00 – 17.45	Sejarah	Bhs. Inggris	Matematika
3.	Jumat	13.30 – 14.15	Bhs.Inggris	Sosiologi	Bhs. Indonesia
		14.15 – 15.00	Biologi	Sosiologi	Bhs. Indonesia
		15.00 – 15.15	<b>Istirahat</b>	<b>Istirahat</b>	<b>Istirahat</b>
		15.15 – 16.00	Matematika	Sejarah	Bhs. Inggris
		16.00 – 17.45	Matematika	Geografi	Bhs. Inggris

*Sumber: Jadwal Pembelajaran Paket C PKBM Rangsang Imo Juyo TA. 2015/2016*

**NB :** Kelas XI & XII Program IPS

Belajar Mandiri dan Tutorial

- 1) Pendidikan Agama (Hari Kamis pukul 14.00 s.d 16.00 WIB)
- 2) Penjaskes (Hari Minggu pukul 08.00 s.d 10.00 WIB)

Berdasar tabel di atas, diketahui bahwa mata pelajaran antara satu tingkatan kelas dan lainnya tidak saling berbenturan. Pembelajaran untuk satu tingkatan kelas dilaksanakan selama satu tahun ajaran dengan total satu Paket (B atau C) dilaksanakan selama tiga tahun. Pembelajaran

diadakan tiga kali dalam satu minggu yaitu hari Senin, Rabu, dan Jum'at. Hal tersebut memungkinkan tutor untuk mengajar secara bergiliran tanpa ada jadwal rangkap. Mata pelajaran setiap pertemuan minimal dua macam. Kehadiran tutor paling tidak dua pertemuan dari tiga kali seminggu. Pengelola melaksanakan salah satu tugasnya dalam pembelajaran yaitu menyusun jadwal pelajaran secara teratur. Hingga sekarang, sistem tersebut tetap berjalan menurut hasil observasi peneliti terhadap pembelajaran di Pendidikan Kesetaraan PKBM Rangsang Imo Joyo.

Pembelajaran paket B dan C menjadi tanggungjawab utama pengelola dan tutor. Sistemnya berdasar pada acuan Nasional dan Daerah, namun pelaksanaannya tidak terstruktur dan tidak sistematis berdasar rincian RPP maupun silabus. Ibu FU (Koor Paket B dan Tutor) dalam wawancara tanggal 29 Januari 2016 menyampaikan:

“Pembelajaran enak langsung belajar melalui soal. Pembahasan tentang RPP sendiri mungkin sudah ada, tapi bukan untuk dibahas terus, tidak. Yang penting manut SKL.”

Hal serupa disampaikan oleh Mbak BB (Tutor) dalam wawancara tanggal 8 Januari 2016:

“.....Tutor belum membuat RPP, tapi kemarin ditawarkan RPP dibuatkan oleh pengelola. Walau begitu tiap tutor punya target materi minimal yang harus dikuasai warga belajar untuk persiapan Ujian.”

Menurut hasil dokumentasi jadwal pelajaran seperti yang tertera di bagian pengorganisasian, durasi untuk pelajaran setiap pertemuan adalah sama yaitu empat jam pembelajaran dan lima belas menit istirahat sehingga total waktu dalam satu pertemuan adalah empat jam lima belas

menit mulai dari 13.30-17.45 WIB. Berbeda hasil mengenai hal tersebut diperoleh dari observasi dan wawancara. Menurut hasil observasi, pembelajaran dimulai pukul 16.00 dan berakhir pukul 17.30 WIB. Hal ini diperkuat oleh pendapat berikut: VG (warga belajar) dalam wawancara tanggal 27 Januari 2016:

”Pelajaran dimulai habis ‘Ashar dan biasanya sampai setengah enam, mau Maghrib itu. Ada jadwal pelajaran buat tiap pertemuan, tapi nggak pasti sesuai jadwal. Kadang tergantung tutor yang hadir, tapi tutor juga jarang nggak hadirnya.”

Pendapat serupa disampaikan oleh RM (warga belajar) pada wawancara tanggal 6 Januari 2016:

“Masuknya, kalau nggak molor ya nggak sampai dua jam. Kalau tutor telat bisa mulai setengah lima sampai maghrib. Satu pertemuan bisa satu atau dua pelajaran, tergantung tutor yang datang.”

Selaku Seketaris 1 dan tutor, dalam wawancara tanggal 8 Januari 2016 Bapak SB menambahkan:

“.....Minimal 30 menit per mapel. Satu kali pertemuan ada 2-3 mapel. Karena seminggu Cuma 3 kali pertemuan, jadi diharapkan sekali pertemuan ada paling tidak 3 mapel.....”

Pendapat ini didukung Mbak BB (Tutor) dalam wawancara tanggal 8 Januari 2016:

“Pertemuan per mata pelajaran kadang masing-masing setengah jam. Tapi fleksibel misal hanya ada dua tutor yang hadir maka waktu per mapel lebih lama.”

Pembelajaran sering dilakukan dalam satu ruang kelas dengan dibagi menjadi kelompok kecil sesuai tingkatan kelas masing-masing warga belajar. Pernah suatu kondisi yang mengharuskan tutor memegang dua kelas sekaligus, hal ini membuat pilihan kelompok kecil menjadi

wajib mengingat tutor akan kesulitan bila dibagi menjadi dua ruang kelas yang berbeda. Hal tersebut berlaku juga saat hanya ada satu atau dua tutor yang mengajar secara bergiliran pada tingkatan kelas satu dan lainnya. Saat satu tutor mengajar paket B maka tutor yang lain mengajar paket C. Hal ini diperoleh dari hasil observasi peneliti di dalam kelas saat pembelajaran berlangsung.

Sistem pembelajaran seluruhnya dilaksanakan dengan pemberian materi di kelas. Belum pernah ada praktek pelajaran. Alasan dari pihak lembaga karena materi diarahkan pada penyampaian melalui ceramah dan diskusi. Jurusan untuk kelas XI, XII Paket C di PKBM Rangsang Imo Joyo hanya ada jurusan IPS sehingga tidak membutuhkan lab untuk praktek.

#### **e. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana**

Sarana dan Prasarana (Sarpras) yang mendukung pembelajaran Pendidikan Kesetaraan Paket B dan C di PKBM Rangsang Imo Joyo yang pertama dari segi data adalah RPP, silabus serta susunan materi pelajaran. RPP dan silabus dibuat oleh tutor dengan mengacu pada materi pelajaran pendidikan formal dan SKL nasional untuk Paket B dan C di kelas akhir. Susunan materi menyangkut kegiatan pembelajaran sehari-hari warga belajar dan tutor.

Materi biasanya diberikan melalui modul secara *hardcopy* atau *softcopy*. *Hardcopy* diberikan pada warga belajar sebagai media pembelajaran yang bisa dibawa pulang dan dipelajari di rumah. *Softcopy* materi diberikan saat pembelajaran berlangsung dengan cara tutor

menunjukkan materi menggunakan laptop ataupun tab. Materi dalam bentuk ini biasaya dilakukan saat ada variasi media pembelajaran. Pernyataan yang mendukung adanya pemberian materi dalam bentuk *softcopy* disampaikan oleh Bapak SP selaku Ketua PKBM dan Tutor pada wawancara tanggal 6 Januari 2016:

“Materi dan sarana pembelajaran, kita hanya menunjukkan softfile nya saja....”

Hal senada disampaikan VG sebagai warga belajar mengenai adanya *hardcopy* materi pada wawancara tanggal 27 Januari 2016:

“Kalau ada materi apa gitu difotocopiin sama tutornya”.

Selain itu, ada pula sarpras dari segi bentuk barang yang menyangkut gedung lokasi pembelajaran, ruang kelas dan perangkat pendukung penyampaian materi pelajaran seperti meja, kursi dan papan tulis. Lokasi pembelajaran berada di SMK Pembangunan Yogyakarta. Pada tahap perencanaan sudah dijelaskan proses penunjukkan SMK tersebut menjadi lokasi Pendidikan Kesetaraan. Gedung SMK Pembangunan digunakan oleh lembaga SMK itu sendiri pada pagi hingga siang hari. Sore hari berganti jadwal untuk digunakan PKBM Rangsang Imo Joyo pada hari Senin, Rabu, dan Jum’at.

Ketua PKBM menambahkan bahwa cara mendapatkan izin untuk meminjam gedung tersebut berasal dari link Ketua dengan pemilik lembaga (SMK Pembangunan Yogyakarta) yang diperoleh secara kekeluargaan. Dalam wawancara tanggal 6 Januari 2016 hal tersebut disampaikan:

“Pengelola juga menyediakan sarana prasarana seperti ruang kelas yakni di sini, di SMK Pembangunan untuk paket B dan C. Tutor dan warga belajar melaksanakan proses belajar mengajar di sini juga. Peminjaman lokasi ini tidak menggunakan biaya, saya hanya kenal dengan pemilik gedung dan perjanjian sebatas kekeluargaan saja.”

Maksud dari pernyataan tersebut adalah tidak ada perjanjian yang menyangkut imbalan berupa materi dari PKBM kepada SMK. Perizinan hanya melalui surat izin yang menyatakan bahwa PKBM dapat mempergunakan gedung SMK Pembangunan Yogyakarta sebagai tempat penyelenggaraan pembelajaran pada sore hari. Lembaga SMK ikut membantu dalam pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan yang ditujukan untuk masyarakat.

Sarana pembelajaran seperti materi dan media disiapkan oleh tutor ataupun pengelola di awal pelajaran. Materi dimanfaatkan tutor dalam setiap pertemuan berdasar pada kurikulum tingkatan kelas dan SKL untuk kelas akhir. Pelajaran dilakukan dengan diskusi melalui soal atau materi yang telah difotocopy oleh tutor dan atau melalui *softfile*. Penjelasan materi diberikan melalui tulisan langsung di buku siswa. Hal ini berdasar hasil observasi peneliti pada tanggal 29 Januari 2016.

Mengenai adanya buku pelajaran, VG (warga belajar) menjelaskan pada wawancara tanggal 27 Januari 2016:

“Buku seringnya bawa sendiri atau dipinjem dari kecamatan. Tapi jarang pakai juga, seringnya materi langsung diberikan oleh tutor.”

Pendapat lain dari Bapak SB (Sekretaris dan Tutor) dalam wawancara tanggal 8 Januari 2016 menyampaikan:

“Buku difasilitasi dari Dinas. Untuk materi ya itu masing-masing tutor yang mengatur. Untuk soal-soal kita dektekan untuk selanjutnya dikerjakan warga belajar.”

Mengenai hal tersebut, Bapak DL (Perwakilan Pembina) dalam wawancara 29 Januari 2016 menyampaikan:

“Untuk masalah modul, kelurahan tidak membantu banyak, itu Pak Patmo sendiri yang mengkomunikasikan langsung pada Dinas Pendidikan Kota, tidak melalui kami.”

Hasil wawancara di atas menggambarkan perbedaan informasi atas asal buku pelajaran.

Selain paparan di atas, pihak pengelola maupun tutor menambahkan bahwa tidak memanfaatkan barang milik SMK Pembangunan yang berkaitan dengan prasarana di dalam gedung seperti papan tulis, spidol, dan sejenisnya. Prasarana yang digunakan yaitu ruang kelas, meja, dan kursi. Dari keseluruhan gedung SMK, PKBM Rangsang Imo Joyo hanya mempergunakan ruang kelas saja. Pihak pengelola menyampaikan bahwa pembelajaran paling tidak membutuhkan satu sampai dua ruang kelas melihat kondisi tutor dan warga belajar yang hadir. Hal ini berdasar pada penjelasan Ibu FU (Koor Paket B dan Tutor) dalam wawancara tanggal 29 Januari 2016:

“Misal ada 6 kelas masuk semua, saya tidak memakai enam kelas juga, saya hanya memakai satu dua kelas kemudian saya bagikan materi atau soal, biar saya juga tidak bolak-balik.”

Berdasar hasil observasi terlihat bahwa satu kelas di gedung SMK Pembangunan Yogyakarta bisa menampung 32 siswa. Maka dari itu, bila



warga belajar yang hadir hanya sedikit, pembelajaran dijadikan satu kelas dengan jeda meja kursi sebagai penanda perbedaan tingkatan kelas.

Sebagai bentuk perawatan fasilitas, pihak pengelola menyerahkan sepenuhnya pada satu penjaga sekolah yang juga warga lingkungan Kelurahan Patangpuluhan. Hal ini diperoleh melalui hasil observasi pada tanggal 6 Januari 2016. Penjaga sekolah tersebut adalah petugas SMK Pembangunan Yogyakarta yang memiliki kewajiban menjaga dan memegang kunci gedung sekolah. Dalam kegiatan pembelajaran seminggu tiga kali, koordinasi mengenai tempat pembelajaran selalu dilakukan oleh petugas piket Paket B dan C dengan penjaga sekolah tersebut untuk membuka gerbang sekolah dan menyiapkan ruang kelas yang dibutuhkan PKBM Rangsang Imo Joyo.

#### **f. Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan**

Dalam tahap perencanaan telah tertera dari mana sumber dana untuk menyokong seluruh kegiatan di Program Kesetaraan Paket B dan C PKBM Rangsang Imo Joyo. Pengelola menjelaskan bahwa saat ini tidak ada pembuatan RAPBS secara resmi. Bapak SP dalam wawancara tanggal 6 Desember 2016 mengatakan:

“Kita tidak membuat RAPBS secara resmi karena pengelolaan dana PKBM dikelola mandiri lembaga. Kita hanya mengira-ngira menurut pengeluaran sebelumnya. Nanti kalau dalam pelaksanaan ada kurangnya, baru kita carikan.”

Dana-dana tersebut selanjutnya dikelola oleh Pengelola terutama Bendahara untuk beberapa hal rinci yang ada di PKBM ini. Ketua PKBM, Bapak SP pada tanggal 6 Januari 2016, menambahkan bahwa penggunaan

dana sejauh ini fokus pada dua hal: “Anggaran larinya ke gaji tutor dan pelaksanaan pembelajaran sehari-hari. Kalau tutor membutuhkan fotocopy, selama itu tidak banyak, pengelola bisa membantu.”, pendapat yang sama disampaikan Bapak SB selaku Sekretaris 1 dan Tutor dalam hasil wawancara tanggal 8 Januari 2016: “Biaya pendidikan dikelola langsung oleh pengelola. Biaya pendidikan dianggarkan untuk Hak Tutor dan operasional sehari-hari.”

Contoh anggaran kegiatan sehari-hari adalah untuk administrasi lembaga seperti absensi, rapot, dan fotocopy materi pelajaran, namun biaya tidak selalu ditanggung oleh dana lembaga. Pendapat yang mendukung pernyataan ini juga disampaikan Ketua PKBM pada wawancara tanggal 6 Januari 2016:

“.....tutor disini sering tidak tega sehingga fotocopy mereka sendiri yang nanggung. Semua tutor sudah paham bahwa rasa sosial disini lebih tinggi sehingga untuk masalah seperti itu ditangani sendiri.”

Perihal lokasi (gedung) dan prasarana di dalamnya tidak mempergunakan biaya. Pak Patmo sebelumnya sudah mengatakan bahwa pinjam-meminjam gedung SMK Pembangunan Yogyakarta tidak memperhitungkan biaya melainkan berdasar pada hubungan kekeluargaan berlandaskan rasa sosial.

Mengenai gaji tutor, pihak PKBM tidak menyebutkan secara jelas berapa jumlahnya karena kembali pada sistem sosial lembaga yang mana semua bekerja dengan mengutamakan rasa ikhlas. Mbak BB (Tutor) dalam wawancara tanggal 8 Januari 2016:

“Dalam hal gaji, per bulan, ngitungnya per pertemuan lalu dibayar di akhir bulan. Untuk tutor per pertemuan atau sekali datang diitung satu kali, walaupun sehari mengajar beberapa kali tapi tetap diitung satu kali. Nominalnya per pertemuan Rp 15.000,- . sumber uangnya dari donatur dan lain-lain sehingga jumlahnya tidak pasti. Masalah nominal bukan prioritas karena yang diutamakan adalah sosialnya.”

Imbalan yang diberikan merupakan bonus disaat lembaga memang mampu memberikan. Hal ini juga dilatarbelakangi karena dana yang masuk dari beberapa sumber dana lembaga tidak pasti jumlahnya. Mengenai hak Pengelola, beberapa informan tidak terlalu menjelaskan secara detail karena mayoritas pengelola juga berperan sebagai tutor di Paket B dan C.

Bila pendapat di atas menunjukkan bahwa alokasi dana hanya untuk gaji tutor dan biaya kegiatan sehari-hari, lain hal dengan hasil dokumentasi yang menunjukkan kebutuhan lembaga lebih dari dua hal tersebut di atas. Berikut adalah contoh alokasi pengusulan dana bantuan melalui proposal lembaga, ditujukan untuk Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta pada tahun 2009 dengan rincian :

- 1) Pengadaan Bahan : Pengadaan Bahan Persiapan UNPK dan Penilaian 1 kali
- 2) Bantuan Alat : ATK Peserta didik, Administrasi Pembelajaran, dan Sarana Pembelajaran
- 3) Bantuan Tenaga : Transport Tutor dan Transport Pengelola.

Perbedaan alokasi anggaran dana tersebut terjadi sebelum dan setelah vakumnya PKBM. Kedua alokasi dana sebenarnya tidak jauh berbeda sebab keduanya masih masuk dalam lingkup dana operasional

lembaga. Alokasi dana sebelum vakum lebih banyak dibandingkan setelah vakum. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi lembaga dan sistem keuangan yang ada.

Sumber dana pendidikan untuk pendidikan kesetaraan Paket B dan C di PKBM Rangsang Imojoyo saat ini berasal dari donatur dan iuran warga belajar. Donatur yang tidak mengikat membantu secara sukarela sedangkan warga belajar wajib membayar dua puluh ribu rupiah setiap bulan. Pengelola mengatakan bahwa kondisi lembaga memaksa diadakannya iuran tersebut, seperti pernyataan Bapak SP selaku Ketua PKBM pada wawancara tanggal 6 Januari 2016:

“Prinsip kita, selama masih ada dana kita tidak akan memberatkan Warga Belajar. Tetapi kondisi sekarang membuat kami harus memungut 20 ribu tiap bulan yang diambil dari Warga Belajar.”

Berbagai sumber dana selanjutnya dipergunakan untuk memenuhi alokasi dana pendidikan seperti yang sudah dijelaskan di bagian pengorganisasian. Ketua PKBM juga mengatakan bahwa suatu hal diluar dugaan PKBM ini bertahan hingga sekarang dengan tanpa bantuan dana dari pemerintah. Rekan, mitra dan wargalah yang sependapat dengan hal itu.

Sebenarnya, bila mengandalkan dana dari donasi dan iuran saja belum bisa memenuhi segala kebutuhan lembaga. Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh Bapak SP, Ketua PKBM:

“.....dana itupun juga tidak mungkin cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional dan untuk hak Tutor. Makanya kita tetap menerima bantuan dari donatur tidak tetap, misal dana didapat saat koordinasi seperti di kelurahan Patangpuluhan. Disitu saya ceritakan

kondisi lembaga dan kondisi peserta di kesetaraan, kemudian ada saja yang membantu, walaupun tidak kontinyu.”

Strategi pengelola untuk menghadapi masalah ini dipersiapkan sejak beberapa tahun lalu. Bapak SP dalam wawancara tersebut menambahkan:

“Kita bisa berjalan seperti sekarang ini, karena dulu pas kita memiliki Warga Belajar banyak dan mendapat dana dari Dinas dan sebagainya, dalam pemakaian dana tersebut tidak kita habiskan, masih ada sisa. Kemudian kita vakum. Nah setelah itu, kita coba aktif kembali dengan dana dari sisa yang dahulu, ditambah dana iuran dari warga belajar 20 ribu per bulan.”

Pengelola meminimalisir pengeluaran dana BOK tanpa mengurangi kualitas sistem lembaga sehingga sampai saat ini masih terdapat dana (kas) lembaga untuk memenuhi kekurangan anggaran biaya pendidikan kesetaraan. Selain itu, kembali pada azas lembaga yang sangat menjunjung rasa sosial, semua pihak menghargai itu sehingga pelayanan hak sumber daya manusia mengenai keuangan tidak menjadi tuntutan utama melainkan pendukung. Maka dari itu, lembaga ini tetap berdiri meski tidak mendapat bantuan dana dari pemerintah lagi.

### **3. Evaluasi Pendidikan Kesetaraan**

#### **a. Evaluasi Hasil Belajar**

Tahap akhir dari pembelajaran adalah evaluasi. Bentuk evaluasi hasil belajar dilakukan melalui ulangan. Ulangan dibagi menjadi beberapa macam yaitu Ulangan Harian (UH), Ulangan Tengah Semester (UTS), Ulangan Akhir Semester (UAS), Ulangan Kenaikan Kelas (UKK), dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK).

Ulangan harian tidak digunakan oleh keseluruhan tutor. Beberapa tutor memilih menggunakan ulangan harian saat beberapa materi telah dikuasai warga belajar. Hal ini disampaikan oleh warga belajar VG (warga belajar) dalam wawancara tanggal 27 Januari 2016: “Tutor nggak pernah kasih ulangan-ulangan. Cuma nanti abis materi-materi biasanya dikasih soal gitu.”. Pendapat serupa juga disampaikan RM (warga belajar) dalam wawancara tanggal 6 Januari 2016: “Ulangan di akhir, tidak ada di sela-sela pembelajaran. Misalnya UKK atau Ulangan Akhir Semester. Per BAB biasanya hanya dikasih soal-soal biasa untuk dikerjakan di kelas.”

Beberapa tutor lain memilih menggunakan metode pembahasan soal-soal dalam penyampaian materi sehingga ulangan harian bukan lagi menjadi momentum. Hal ini diperoleh peneliti dari hasil observasi yang menggambarkan bahwa pembelajaran saat itu dilakukan dengan pemberian soal kepada warga belajar untuk kemudian dibahas bersama berdasar sub materi masing-masing. Perlakuan evaluasi UH ini sama dengan UTS, yakni ada tutor yang memakai UTS dan ada yang tidak. Soal-soal untuk UH dan UTS dibuat mandiri oleh tutor yang bersangkutan. Pernyataan-pernyataan tersebut didukung oleh pendapat beberapa tutor.

Pelaksanaan UAS dan UKK ada dibawah binaan Dinas Pendidikan Yogyakarta. Tahun ajaran sebelumnya, soal ditentukan oleh Dinas tetapi waktu pelaksanaan diserahkan sepenuhnya pada lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan. Mulai tahun ajaran saat ini soal dan waktu pelaksanaan UAS dan UKK ditentukan oleh Dinas. Soal diambil paling

cepat satu minggu sebelum waktu pelaksanaan UAS atau UKK. Pelaksanaannya sendiri berada di lokasi masing-masing lembaga namun waktu ditentukan dengan memiliki jeda waktu pelaksanaan. Hal ini didukung pernyataan Ibu FU (Koor Paket B dan Tutor) dalam wawancara tanggal 29 Januari 2016:

“.....UKK soalnya dari Dinas. Waktunya untuk semua PKBM itu sama. Dulu 2014-2015 dikasih soal dan waktunya terserah PKBM, tapi kalau sekarang soal dan waktu ditentukan Dinas, ada jeda waktu untuk ujian misalnya ujian haru dilaksanakan antara tanggal 10-20.”

Jenis evaluasi belajar yang terakhir adalah Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK). Pada dasarnya, sistem UNPK Paket B dan C adalah sama. Soal UNPK dan waktu pelaksanaan diatur secara nasional. Mata pelajaran yang diujikan dalam UNPK sama dengan Ujian Nasional sekolah formal, bahkan Standar Kelulusan (SKL) nya pun juga sama yaitu mengacu pada SKL Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Pelaksanaan UNPK diatur secara nasional namun dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Kota, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. UNPK dilakukan serempak satu kota di satu lokasi. Pernyataan ini didukung oleh Ketua PKBM, Bapak SP dalam wawancara tanggal 6 Januari 2016:

“Ujian Nasional biasanya dijadikan satu se-kota. Soal ujian sama seperti formal. Ujian kesetaraan dulu tahun 2014-2015, kita hanya mengikuti satu warga belajar paket C tetapi satu orang tersebut Alhamdulillah terbaik se-Kota Yogyakarta. Hal itu membantu nama Rangsang Imo Joyo jadi lebih baik.”

Walaupun sistem sudah diatur secara nasional, pihak pengelola yang diwakili Bapak SP menyampaikan keluhannya selama ini:

“.....harapan pemerintah memang menyamakan, bahwa kesetaraan itu sama dengan reguler, sehingga soal-soal juga sama, lha wong SKL nya juga sama. Cuma yang membuat tetap beda, jadi SKL nya sama tetapi untuk kesetaraan yang membuat orang PLS, walaupun PLS itu orang-orangnya juga dari Dinas kota. Saya pikir soalnya sama, kalau dia disuruh membuat soal UN dan dia juga pernah ikut membuat soal paket, saya rasa jatuhnya juga sama.”

Keluhan tersebut muncul karena terlihat perbedaan yang sangat jelas antara formal dan nonformal mengenai jadwal pembelajaran. Sekolah formal dilaksanakan lima hari dalam seminggu dan sekolah nonformal hanya tiga kali dalam seminggu. Pernyataan tersebut ditambah pula dengan perbedaan durasi pembelajaran setiap pertemuan yang memaksa lembaga nonformal harus mempunyai strategi khusus untuk membuat hasil belajar yang sesuai harapan.

#### **b. Evaluasi Penyelenggaraan Program**

Evaluasi penyelenggaraan pendidikan kesetaraan sama halnya dengan evaluasi lembaga sebab saat ini program yang berjalan di PKBM Rangsang Imo Joyo hanyalah pendidikan kesetaraan Paket B dan C. Evaluasi program dilakukan pengelola setiap satu semester sekali, setiap akhir pembelajaran atau menjelang Evaluasi Hasil Belajar (EHB). Bentuk evaluasi adalah rapat dengan pihak Pembina Lembaga (Kelurahan Patangpuluhan), Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, dan Evaluasi Internal lembaga. Hal ini disampaikan oleh Ketua PKBM, Bapak SP dalam wawancara tanggal 6 Januari 2016:



“Ada rakor menjelang evaluasi tiap EHB atau tiap semester sekali bersama bu Lurah Patangpuluhan tetapi beliau tidak selalu hadir. Seringnya rakor tersebut dihadiri tutor dan pengelola juga pimpinan lain. Selain itu ada juga ada koordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta berupa pelatihan kesiapan EHB tiap akhir semester. Inisi dari pertemuan itu adalah memberi info persiapan EHB, kalau pesertanya banyak harus ada tim, kalau tidak ya pengelola yang mengurus.....”

Berdasar pada paparan di atas, evaluasi bersama Pembina dihadiri oleh beberapa pimpinan lembaga-lembaga di bawah naungan Kelurahan Patangpuluhan lainnya seperti PKK, PAUD, dan Perkumpulan Dharma Wanita. Rapat tersebut dipimpin oleh Ibu Lurah yang berisi laporan pelaksanaan dan koordinasi untuk program-program tersebut kedepannya.

Pembinaan secara resmi dijelaskan berdasar data di atas, namun secara tidak resmi dilakukan kapan dan dimanapun. Pihak pembina mengatakan bahwa pembinaan memang tidak terlalu intens. Hal ini sesuai pernyataan Bapak DL (Perwakilan Pembina) dalam wawancara tanggal 29 Januari 2016:

“PKBM ada di bawah naungan kelurahan Patangpuluhan tetapi kita tidak terlalu ikut dalam pengelolaannya. Semua diserahkan pada pengelola terutama Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Pembinaan untuk PKBM tidak intens.”

Kelurahan Patangpuluhan selaku lembaga yang menaungi PKBM Rangsang Imo Joyo hanya berlaku sebagai lambang sekretariat PKBM. Informasi yang diberikan dan dicari melalui kelurahan selanjutnya dialihkan ke rumah Ketua PKBM yang tidak jauh dari Kantor Kelurahan. Hal ini karena tanggungjawab mengenai PKBM sudah dilimpahkan pada

pengelola dan tutor lembaga penyelenggara. Pernyataan yang mendukung hal ini disampaikan oleh Bapak DL :

“Sekretariat lembaga, bisa lewat sini, kelurahan Patangpuluhan mbak. Tetapi sebenarnya semua dilakukan di rumah Pak Patmo yang kebetulan tidak jauh juga dari kantor kelurahan. Jadi semisal ada keperluan yang menyangkut PKBM atau kesetaraan, maka nanti akan kami sambungkan langsung ke rumah Pak Patmo. Seperti itu mbak.”

Hubungan pembina dengan pengelola lembaga secara personal adalah baik. Pembina mengibaratkan hubungan pembina dan pengelola sebagai hubungan keluarga. Pembina juga memandang hubungan antar pengelola satu dan yang lain berjalan harmonis. Bapak DL (Perwakilan Pembina) dalam wawancara tanggal 29 Januari 2016 menyampaikan :

“Hubungan Pembina dengan Pengelola sangat harmonis, saya sendiri dengan Pak Patmo sudah seperti bapak dan anak mbak. Beliau adalah pendidik atau guru yang sebenar-benarnya. Pengelolaan di sini bagus karena semua sistemnya kekeluargaan, makanya bisa bertahan sampai sekarang.”

Evaluasi bersama Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dilakukan satu semester sekali. Perwakilan dari PKBM Rangsang Imo Joyo adalah Ketua Lembaga yaitu Bapak Supatmo Priyo menghadiri pertemuan di Dinas. Pertemuan itu dihadiri oleh para pimpinan lembaga penyelenggara nonformal se-kota Yogyakarta. Isi dari pertemuan tersebut adalah pembahasan pelaksanaan penyelenggaraan lembaga secara umum dan pemberian informasi sekaligus petunjuk untuk pelaksanaan semester selanjutnya. PKBM Rangsang Imo Joyo sendiri tidak membuat laporan pertanggungjawaban karena saat ini tidak mendapat dana BOK.

Secara internal, ada bentuk evaluasi lembaga oleh pengelola, tutor, dan pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan program kesetaraan di PKBM Rangsang Imo Joyo. Komunikasi antar pihak tersebut berjalan tanpa ada suatu rapat rutin. Seperti bentuk evaluasi lainnya, evaluasi internal ini berjalan secara fleksibel, misalnya dalam pertemuan sehari-hari. Pengelola sempat menyebutkan salah satu sarana untuk koordinasi adalah grup di salah satu media sosial. Bapak SB selaku Sekretaris dan Tutor memberi pernyataan dalam wawancara tanggal 8 Januari 2016: “Koordinasi, rapat antar pengelola jarang kumpul karena kesibukan masing-masing, lewat *whatsapp* seringnya.”. Koordinasi berjalan secara fleksibel dan tidak resmi, jadi koordinasi dapat dilakukan di tempat dan waktu yang tidak tentu.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Perencanaan Program Pendidikan Kesetaraan Paket B dan C**

##### **a. Penerimaan dan Seleksi Calon Warga Belajar**

Sistem penerimaan warga belajar baru di Pendidikan Kesetaraan PKBM Rangsang Imo Joyo bersifat terbuka dimana seluruh lapisan masyarakat yang sanggup (secara psikologis) menempuh pendidikan diperbolehkan mendaftar. Sebelum pendaftaran, pihak lembaga melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik dalam bentuk tertulis maupun lisan. Bentuk sosialisasi tertulis dilakukan melalui penyebaran brosur, sedangkan secara lisan adalah melalui pertemuan, rapat, maupun dari warga ke warga. Penerimaan dilakukan satu tahun sekali tiap awal

tahun ajaran baru namun calon warga belajar tidak harus memulai dari awal program Paket. Warga belajar bisa masuk di awal tingkatan kelas di satu Paket dan bukan harus di awal Paket, misalnya kelas VIII Paket B.

Lembaga penyelenggara program melakukan pendataan dan seleksi calon warga belajar yang meliputi aspek: nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat tempat tinggal, jenis kelamin, pendidikan terakhir yang pernah diikuti, dan nama ibu kandung (Ditjen PAUD-DIKMAS, 2015.a.b).

Dari hasil dokumentasi diperoleh keterangan bahwa data tentang warga belajar yang dikumpulkan di buku induk adalah : Nama Warga Belajar, Nomor Induk, Jenis Kelamin, Tempat dan Tanggal Lahir, Agama, Status Perkawinan, Status dalam keluarga, Alamat, Nomor Telepon, Pekerjaan, Jenis Paket dan Kelas, Tanggal Penerimaan, Sekolah Asal, STTB Terakhir, Nama Orang Tua, Alamat Orang Tua, Telpon Orang Tua, serta Pekerjaan Orang Tua. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga sudah memenuhi peraturan pendataan warga belajar baru dan bahkan data yang dikumpulkan lebih lengkap. Data ini dimanfaatkan pengelola sebagai informasi *database* untuk keperluan yang terkait dengan hal itu. Penerimaan calon warga belajar sama halnya dengan mewujudkan sasaran Pendidikan Kesenakaraan. Dalam aturan Ditjen PAUD-DIKMAS tersebut juga dijelaskan mengenai Sasaran Program Pendidikan Kesenakaraan Paket B dan C, sebagai berikut:

Sasaran Paket B adalah warga negara Indonesia yang ingin memperoleh pendidikan setara SMP/MTs yaitu (1) Tamatan Paket

A/SD/MI, (2) Putus sekolah di SMP/MTS, dibuktikan dengan raport terakhir, (3) Prioritas bagi anak usia sekolah, (4) Bersedia mengikuti proses pembelajaran dan pelatihan sampai akhir program.

Sasaran Paket C adalah (Ditjen PAUD-DIKMAS, 2015.b: 8) : (1) putus sekolah di kelas X, XI, dan XII di tingkat SMA/SMK/MA, dibuktikan dengan raport terakhir, (2) tamatan Paket B/SMP/MTs, prioritas bagi anak usia sekolah (< 21 tahun), (3) bersedia mengikuti proses pembelajaran dan pelatihan sampai akhir program.

Peraturan Paket B dan C di atas menggambarkan bahwa sasaran untuk warga belajar suatu paket haruslah berasal dari tingkatan yang setara paket sebelumnya yang dibuktikan dengan raport terakhir. Sasaran warga belajar diprioritaskan bagi masyarakat putus sekolah dan masih termasuk anak usia sekolah.

Syarat pendaftaran calon warga belajar di Paket B dan C PKBM Rangsang Imo Joyo adalah ijazah terakhir, raport terakhir, foto, dan fotocopy KTP. Syarat ijazah dimaksudkan untuk melihat pendidikan terakhir yang sudah ditempuh calon warga belajar. Raport terakhir menunjukkan capaian tingkatan kelas yang telah ditempuh warga belajar dan syarat itu dapat digunakan pengelola untuk mengelompokkan rombongan belajar. Foto dan fotocopy KTP digunakan untuk melengkapi identitas warga belajar.

Sasaran pendidikan kesetaraan di PKBM ini lebih luas daripada petunjuk teknis tersebut sebab PKBM Rangsang Imo Joyo tidak memprioritaskan calon warga belajar usia sekolah melainkan masyarakat umum segala usia dan segala latar belakang. Dalam aturan sebenarnya

bukan berarti membatasi sasaran yang harus didahulukan, namun lebih kepada memberi fokus target yang akan direkrut dalam pendidikan kesetaraan di setiap tingkatan. PKBM Rangsang Imo Joyo bukan mengabaikan hal tersebut, namun mencoba bersifat terbuka karena pada kenyataannya, dengan tidak adanya prioritas sasaran pun, warga belajar yang mendaftar dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Penurunan jumlah peserta pendidikan kesetaraan bisa dianggap baik bila memang angka putus sekolah semakin mengecil. Maka dari itu, sasaran untuk penerimaan calon warga belajar di lembaga ini pun mencakup daerah yang tidak terbatas pula. Berbagai daerah bisa mengikuti pendidikan kesetaraan di PKBM Rangsang Imo Joyo.

Melalui paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam tahap penerimaan dan seleksi warga belajar Paket B dan C di PKBM Rangsang Imo Joyo mengikuti Peraturan Pemerintah Ditjen PAUD-DIKMAS yang tertuang dalam petunjuk teknis Paket B dan C.

#### **b. Perekrutan dan Seleksi Calon Tutor**

Pengelolaan sebuah lembaga memanfaatkan tenaga Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam hal ini, SDM yang dimaksud adalah Pengelola dan Pendidik (Tutor). Tutor adalah pendidik yang memberikan bimbingan pada warga belajar dalam proses pembelajaran program Pendidikan Kesetaraan Paket B dan C sesuai dengan kompetensinya (Ditjen PAUD-DIKMAS, 2015.a.b).

Persyaratan calon tutor menurut peraturan di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Pendidikan minimal S1, prioritas yang berlatar belakang pendidikan keguruan diutamakan yang berprofesi sebagai Guru SMP/MTS (Paket B) dan sebagai Guru SMA/MAN (Paket C)
- 2) Menguasai substansi yang akan dibelajarkan
- 3) Memiliki dasar-dasar kemampuan pembelajaran partisipatif serta mampu mengelola proses pembelajaran orang dewasa
- 4) Bersedia membelajarkan warga belajar sampai akhir penyelenggaraan program.

Ada empat poin dalam persyaratan tutor pendidikan kesetaraan Paket B dan C. Poin pertama adalah syarat kualifikasi yang sebaiknya dimiliki calon tutor yaitu pendidikan minimal S1 dengan prioritas latar belakang pendidikan keguruan atau berprofesi sebagai guru. Tutor di PKBM Rangsang Imo Joyo berjumlah empat belas orang. Tiga belas diantaranya memiliki pendidikan minimal S1 dan satu orang tutor dengan pendidikan terakhir, namun pihak yang bersangkutan sedang menyelesaikan tugas akhir untuk mendapat gelar S1. Mengenai prioritas latar belakang pendidikan keguruan, PKBM Rangsang Imo Joyo memiliki kebijakan yang berbeda dalam menerima tutor baru. Dari empat belas tutor, sepuluh berasal dari latar belakang pendidikan keguruan dan empat lainnya termasuk berlatar belakang non-kependidikan. Pengelola mengaku bahwa benar adanya empat tutor yang berasal dari non-kependidikan namun ilmu yang dimiliki sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Hal ini bukan menjadi masalah karena pembelajaran di kelas untuk pendidikan nonformal tidak terpaku pada ilmu dasar kependidikan yang harus menguasai pengelolaan kelas secara teoritis.

Menjadi pertimbangan di sini adalah pendidik (tutor) pendidikan kesetaraan haruslah memahami warga belajar dengan baik sehingga tahu bagaimana strategi untuk penyampaian materi kepadanya. Terlepas dari hal tersebut, kemauan dan keikhlasan tutor-tutor tersebut menjadi hal penting yang dijadikan pertimbangan pengelola menerima tutor. Lembaga ini tidak mengutamakan pencarian gaji namun lebih ke pengalaman dan pengaplikasian rasa sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Adanya perbedaan ini bukan menjadi pelanggaran lembaga sebab tertulis dalam peraturan bahwa diprioritaskan latar belakang pendidikan keguruan sehingga bukan menjadi keharusan bahwa tutor haruslah dari latar pendidikan keguruan. Bila kondisi membuat lembaga untuk mengambil keputusan diluar latar belakang keguruan, maka hal tersebut diperbolehkan.

Poin kedua dari peraturan di atas adalah seorang tutor harus menguasai substansi yang diajarkan. Dari empat belas tutor di PKBM ini, semua sudah mengajar mata pelajaran yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Satu tutor diantaranya mengampu dua mata pelajaran (rangkap) sehingga ada pergeseran substansi ajar. Tutor yang dimaksud adalah Ibu Subektiningrum dengan mengajar Sosiologi dan Sejarah. Dua materi yang diajar oleh tutor tersebut memang berbeda namun masih dalam satu bidang. Rangkapnya substansi membuat tutor mengajar satu mata pelajaran di luar ilmu dasarnya. Hal ini dilakukan lembaga karena belum tersedianya tutor untuk mata pelajaran sejarah. Sosiologi dan



sejarah memang memiliki kajian ilmu masing-masing namun masih dalam paduan ilmu IPS. Selama materi tersampaikan dan pihak terkait baik tutor dan warga belajar tidak merasa keberatan maka tindakan ini baik untuk dilakukan.

Poin ketiga membahas kemampuan dasar tutor mengenai pembelajaran partisipatif serta kemampuan mengelola proses pembelajaran orang dewasa. Pembelajaran partisipatif menempatkan pendidik sebagai fasilitator. Menurut Sujarwo (2013: 27) pembelajaran partisipatif melibatkan warga belajar dalam proses membuat rencana, kegiatan pembelajaran, dan evaluasinya. Pendapat tersebut menitikberatkan pada kemampuan tutor atas pengelolaan pembelajaran dengan melibatkan warga belajar di setiap tahapannya. Di tahap rencana dan evaluasi, pengelola tidak dapat bertindak secara leluasa sebab ada ketentuan yang mengarahkan standar materi maupun kelulusan pada standar sekolah formal di jenjang pendidikan dasar dan menengah, namun tutor dapat merencanakan metode pembelajaran ke arah pendidikan orang dewasa. Aplikasi dalam pembelajaran sendiri melihat pada kemauan warga belajar. Hal ini mengenai kecepatan materi dan proses penyampaian.

Pembelajaran partisipatif menggunakan metode pembelajaran orang dewasa, maka pengertian orang dewasa menurut Suprijanto (2007: 14) adalah:

Pendidikan bagi orang dewasa yang menggunakan sebagian waktunya dan tanpa dipaksa ingin meningkatkan pengetahuan,

keterampilan, dan mengubah sikapnya dalam rangka pengembangan dirinya sebagai individu dan meningkatkan partisipasi dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya secara seimbang dan utuh.

Definisi di atas merupakan kesimpulan dari pendapat UNESCO dan para ahli. Inti dari pendidikan orang dewasa adalah mendidik untuk pengembangan individu agar dapat hidup bermasyarakat dengan baik. Sebenarnya definisi ini tidak jauh berbeda dari makna pendidikan pada umumnya, namun sasaran pendidikan ini adalah orang dewasa yang telah memiliki usia di atas 16 tahun. Orang dewasa dianggap mampu mengarahkan diri sendiri untuk membedakan hal yang benar dan salah serta bertanggungjawab atas hal tersebut. Hubungan dengan kemampuan tutor adalah bukan hanya mengenai bagaimana dan sejauh mana materi disampaikan namun apa makna dari materi tersebut. Tutor di PKBM Rangsang Imo Joyo memiliki kepribadian yang santai, maksudnya bahwa tutor mudah bergaul dengan warga belajar sehingga pembelajaran di kelas tidak kaku dan fleksibel. Saat pelajaran berlangsung, warga belajar terlihat akrab dengan tutor. Hal ini menggambarkan pembawaan dari segi tutor yang berpengaruh pada perilaku warga belajar juga dan bukan menggambarkan ketidakseriusan atas proses pembelajaran yang ada. Maka dari itu, tutor dapat memahami warga belajar lebih dekat.

Poin keempat menurut persyaratan di atas mengharuskan tutor mendidik warga belajar hingga akhir program. Hal ini belum sepenuhnya dilaksanakan oleh PKBM Rangsang Imo Joyo karena posisi tutor pernah mengalami bongkar pasang dikarenakan ada tutor yang bukan dari

domisili sekitar lembaga. Alasan lain karena kesibukan dan tutor tersebut adalah seorang *fresh graduate* yang mencari pengalaman. Secara garis besar tutor lembaga mendidik warga belajar mulai awal masuk hingga akhir program. Maka dari itu, perekrutan tutor dilakukan secara fleksibel dengan melihat formasi tutor itu sendiri. Perekrutan dilaksanakan saat ada kekosongan tutor.

Tenaga pendidik selain tutor adalah narasumber teknis, namun hal tersebut tidak dibahas sebab lembaga PKBM Rangsang Imo Joyo belum mengaplikasikan pelatihan keterampilan dengan narasumber teknis sebagai pendidik atau pelatihnya. Hal ini masih menjadi wacana ke depan untuk pengembangan PKBM dan direalisasikan saat kondisi lembaga sudah memungkinkan.

Berdasar paparan di atas, diperoleh kesimpulan bahwa tutor yang ada di Program Paket B dan C di PKBM Rangsang Imo Joyo mengikuti persyaratan tutor untuk pendidikan kesetaraan. Tutor di lembaga ini sudah S1 dengan mayoritas berasal dari pendidikan keguruan, tutor mengajar sesuai substansi latar belakang pendidikannya, tutor memiliki kemampuan pembelajaran partisipatif untuk orang dewasa dan secara sistemik tutor membimbing dan mendidik warga belajar dari awal dan akhir program pendidikan kesetaraan.

### **c. Penetapan Kurikulum Pendidikan Kesetaraan**

Kurikulum pendidikan Kesetaraan di PKBM Rangsang Imo Joyo adalah KTSP. Selain karena saat pendirian lembaga kurikulum yang

berlaku adalah KTSP, prinsip yang terkandung dalam KTSP sesuai dengan prinsip pendidikan kesetaraan.

Menurut Trianto (2010: 22) KTSP dikembangkan berdasar pada prinsip: 1) berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya, 2) beragam dan terpadu, 3) tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, 4) relevan dengan kebutuhan kehidupan, 5) menyeluruh dan berkesinambungan, 6) belajar sepanjang hayat, 7) seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.

Pendidikan kesetaraan termasuk Paket B dan C di PKBM Rangsang Imo Joyo mementingkan perkembangan potensi peserta didik dengan melihat lingkungan sekitarnya sehingga ilmu yang diperoleh relevan dengan kebutuhan hidup di masyarakat. Pendidikan kesetaraan jelas mendukung program pendidikan sepanjang hayat melalui usaha menarik masyarakat umum untuk mengikuti program paket agar memperoleh pendidikan yang layak tanpa memandang ras, suku, budaya, maupun usia.

Kurikulum terdiri dari tiga hal yaitu rencana pembelajaran, susunan materi, dan metode pembelajaran (Draf SNPPNF Th. 2013, Pasal 8 ayat 2). PKBM rangsang Imo Joyo menuangkan rencana pembelajaran dalam bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dibuat oleh tutor. Susunan materi pelajaran juga disiapkan tutor dengan mengacu pada Standar Kelulusan (SKL) sesuai Sistem Standar Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah, sementara bentuk susunan materi yang diberikan lembaga lebih banyak melalui pembahasan soal-soal. Metode pembelajaran diserahkan sepenuhnya oleh Pengelola kepada tutor

pengampu masing-masing mata pelajaran dan para tutor faham atas pembelajaran partisipatif dengan memasukkan metode pembelajaran orang dewasa. Di lembaga ini, satu paket ditempuh dalam waktu tiga tahun sehingga tiap satu tingkatan kelas ditempuh selama satu tahun.

#### **d. Penetapan Tempat Pembelajaran**

Tempat untuk kegiatan Program Paket B dan C di PKBM Rangsang Imo Joyo hanya meliputi tempat pembelajaran dan tidak menggunakan tempat pelatihan sebab di lembaga ini belum ada program pelatihan keterampilan bagi warga belajar. Tempat pembelajaran dan segala isinya masuk ke dalam jenis sarana prasarana (sarpras) yang mendukung pembelajaran pendidikan kesetaraan di PKBM Rangsang Imo Joyo. Sebelum tahun ajaran 2015/2016 tempat pembelajaran bergiliran antara aula kantor Kecamatan Wirobrajan atau ruang serba guna di kantor Kelurahan Patangpuluhan, tergantung ruangan yang sedang tidak terpakai. Dua ruangan tersebut belum berbentuk kelas sehingga pengelola melakukan perubahan tata ruang misal membutuhkan sarana pembelajaran lain seperti papan tulis dan sejenisnya. Saat ini, tempat pembelajaran sudah pasti yaitu di SMK Pembangunan Yogyakarta. Tempat pembelajaran saat ini diperoleh secara pinjam-meminjam dengan pemilik secara kekeluargaan. Lokasi SMK tidak jauh dari Kantor Kelurahan dan Kecamatan sehingga jangkauan lokasi tidak jauh berbeda dari lokasi sebelumnya. Warga belajar dan tutor yang berdomisili di sekitar Kecamatan Wirobrajan tidak kesulitan mencapai lokasi yang baru.

Mengenai warga belajar dari luar daerah, pihak pengelola tidak mempermasalahkan hal itu terhadap lokasi sebab warga belajar dari luar daerah seperti Wonogiri atau Wonosobo dan lainnya rata-rata memiliki kerabat di sekitar lokasi pembelajaran dan berdomisili sementara di tempat kerabat tersebut. Keadaan ini mengikuti poin pertama petunjuk teknis tentang Paket B dan C berdasar pada peraturan Ditjen PAUD-DIKMAS (2015.a.b) dalam menetapkan lokasi pembelajaran dan pelatihan, perlu mempertimbangkan:

- 1) Jarak tempuh lokasi tempat belajar, tidak terlalu jauh dari rumah warga belajar, atau mudah dijangkau oleh warga belajar
- 2) Luas ruang belajar yang memadai, minimal bisa memuat sebanyak 15 orang (Paket B) dan minimal memuat 20 orang (Paket C).
- 3) Memiliki sarana belajar, seperti: papan tulis/*whiteboard*, kapur/spidol, meja belajar dan kursi, dan fasilitas pembelajaran lainnya
- 4) Memiliki penerangan yang cukup.

Kesesuaian syarat poin kedua dengan lokasi pembelajaran PKBM Rangsang Imo Joyo ditunjukkan melalui hasil observasi yang menggambarkan bahwa satu kelas di SMK Pembangunan Yogyakarta dapat menampung 32 siswa. Hal ini memenuhi syarat minimal bahwa ruang kelas untuk Paket B minimal memuat 15 warga belajar dan Paket C minimal menampung 20 warga belajar. Di dalam ruang kelas tersebut juga sudah tersedia sarana pembelajaran lain seperti meja, kursi, papan tulis, penerangan, dan sebagainya.

Kesimpulan dari analisa di atas yaitu seluruh tempat pembelajaran Paket B dan C yang pernah digunakan bukanlah milik lembaga. PKBM

Rangsang Imo Joyo belum mampu membangun tempat pembelajaran sendiri sehingga jalan yang dipilih adalah meminjam. Lokasi sebelum tahun 2015 belum sesuai dengan persyaratan mengingat bentuk ruangan berupa aula. Meskipun demikian, hal ini diperbolehkan sesuai tambahan peraturan di Ditjen PAUD-DIKMAS (2015.a.b) yang menyatakan: apabila lokasi atau tempat pembelajaran/pelatihan kurang memadai sesuai persyaratan, dapat dipilih salah satu lokasi atau tempat yang paling mendekati persyaratan sebagai tempat penyelenggaraan program. Pendapat ini diperkuat lagi dengan peraturan berdasar Draf SNPPNF Th. 2013 Pasal 24 ayat (3) yang mengatakan bahwa satuan pendidikan nonformal yang belum memiliki kemampuan untuk menyediakan sarana penunjang penyelenggaraan, dapat bermitra dengan pihak lain yang terkait.

#### **e. Sumber Dana Pendidikan Kesetaraan**

Dalam rencana anggaran, pengelola menentukan pula sumber dana yang dapat membantu lembaga untuk pelaksanaan kegiatan Pendidikan Kesetaraan di PKBM Rangsang Imo Joyo dari segi finansial. Menurut Hartani (2011: 156), perencanaan keuangan yang strategis salah satunya diawali dengan analisis sumber-sumber dana dan jumlah nominal yang mungkin diperoleh serta dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan.

Sumber dana di lembaga ini terbagi menjadi dua fase. Fase pertama sebelum vakum (sebelum tahun 2012) sumber dana awal berasal dari

dana pendiri lembaga kemudian dibantu dana dari donatur yang tidak mengikat, dan dana hibah pemerintah melalui Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Menurut Ditjen PAUD-DIKMAS (2015.a.b):

Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) adalah sejumlah dana yang diberikan kepada lembaga penyelenggara program yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran dan pelatihan program Pendidikan Kesetaraan Paket B dan C. Pemberi BOK adalah pemerintah melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Fase kedua adalah kondisi setelah PKBM vakum merubah sumber dana menjadi donatur yang tidak mengikat dan iuran warga belajar. Iuran warga belajar diadakan mulai tahun ajaran 2013/2014 hingga sekarang. Jumlah iuran per bulan yakni dua puluh ribu rupiah. Dana tersebut selanjutnya digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan alokasi anggaran dana lembaga.

Menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, manajemen pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Tiga unsur ada dalam sumber dana PKBM Rangsang Imo Joyo baik secara langsung maupun tidak. Sebelum vakum, dana bantuan secara langsung diberikan pemerintah daerah melalui BOK sedangkan saat ini bantuan pemerintah diberikan secara tidak langsung dan termasuk dalam lingkup operasional seperti pengadaan UKK atau UNPK. Peran masyarakat mengenai sumber dana ada dalam dua fase keuangan PKBM Rangsang Imo Joyo yaitu



sebagai donatur tidak mengikat dan iuran warga belajar. Jadi, tiga pihak yang bertanggungjawab dalam manajemen keuangan pendidikan memiliki peran di lembaga PKBM Rangsang Imo Joyo.

## **2. Pelaksanaan Program Pendidikan Kesetaraan Paket B dan C**

### **a. Pemenuhan Tugas dan Kebutuhan Warga Belajar**

Kebutuhan awal warga belajar setelah penerimaan dan seleksi adalah penempatan atau pembagian rombongan belajar. Pembagian Rombongan Belajar (Rombel) di PKBM Rangsang Imo Joyo tidak memperhatikan usia maupun jenis kelamin melainkan berdasar pada ijazah terakhir atau raport terakhir dari warga belajar. Jumlah warga belajar yang terdaftar di Paket B saat ini adalah enam orang dan di Paket C adalah delapan orang. Total warga belajar yang terdaftar pada tahun ajaran 2015/2016 seluruhnya empat belas orang. Rombongan Belajar Paket B merupakan pembagian warga belajar ke dalam beberapa kriteria. Penempatan warga belajar Paket B di kelas VII, VIII atau kelas IX, atas dasar kriteria sebagai berikut (Ditjen PAUD-DIKMAS, 2015.a: 11):

- 1) Rombongan belajar untuk kelas VII adalah calon warga belajar yang tamat SD/MI atau putus SMP/MTs di kelas VII, 2) Rombongan belajar untuk kelas VIII adalah calon warga belajar yang putus SMP/MTs di kelas VIII, 3) Rombongan belajar untuk kelas IX adalah calon warga belajar yang putus SMP/MTs di kelas IX. Setiap rombongan belajar dapat berjumlah antara 15 – 25 orang warga belajar.

Sementara itu, ada pula Penempatan Rombongan Belajar Paket C di kelas X, XI atau kelas XII menurut (Ditjen PAUD-DIKMAS, 2015.b:

- 12) rombongan belajar Paket C adalah:

1) rombongan belajar untuk kelas X adalah calon warga belajar tamatan Paket B/SMP/MTs atau yang putus SMA/SMK/MA di kelas X, 2) rombongan belajar untuk kelas XI adalah calon warga belajar yang putus SMA/SMK/MA di kelas XI, 3) rombongan belajar untuk kelas XII adalah calon warga belajar yang putus SMA/SMK/MA di kelas XII. Setiap rombongan belajar dapat berjumlah antara 20 – 30 orang warga belajar.

Peraturan di atas menunjukkan bahwa ada kesamaan prinsip pembagian rombongan belajar Paket B dan C. Warga belajar yang ada di rombel kelas awal di tiap paket berasal dari tamatan tingkat pendidikan (Paket) sebelumnya atau warga belajar yang putus sekolah di tingkatan kelas tersebut. Kelas selanjutnya menunjukkan rombel berasal dari calon warga belajar yang putus sekolah di tingkatan kelas tersebut.

Paket B dan C di PKBM Rangsang Imo Joyo menggunakan sistem pembagian rombel dengan mengikuti beberapa paparan peraturan di atas. Syarat ijazah digunakan untuk menentukan jenis Paket yang akan ditempuh warga belajar dan syarat rapot terakhir digunakan untuk penentuan tingkatan kelas bagi warga belajar. Meskipun demikian, jumlah rombel per kelas di lembaga ini belum memenuhi persyaratan di atas sebab jumlah warga belajar per kelas hanya berkisar satu sampai lima orang, sedangkan peraturan menyebutkan setiap rombel Paket B adalah 15-25 orang dan rombel Paket C adalah 20-30 orang. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya minat masyarakat atas pendidikan kesetaraan.

Inti dari pelaksanaan pendidikan kesetaraan adalah warga belajar itu sendiri. Kebutuhan atau hak warga belajar yang harus dipenuhi oleh

tenaga pendidik dan kependidikan di program kesetaraan Paket B dan C menurut Ditjen PAUD-DIKMAS (2015.a.b) yaitu:

- 1) Memperoleh bimbingan, pengajaran, dan pelatihan sesuai dengan kurikulum dan silabus pembelajaran dan pelatihan yang ditentukan,
- 2) Memperoleh bahan belajar/modul yang digunakan,
- 3) Memperoleh penilaian hasil belajar, sesuai dengan tahap-tahapannya,
- 4) Mengikuti evaluasi hasil belajar dan ujian nasional yang dilaksanakan pemerintah.

Kebutuhan warga belajar tersebut sudah dipenuhi oleh lembaga penyelenggara program Paket B dan C di PKBM Rangsang Imo Joyo dengan menyediakan materi sesuai ketentuan dan diajarkan langsung oleh tutor yang berkompeten di bidangnya. Warga belajar juga disediakan tempat belajar yang nyaman sehingga dapat menempuh program paket dari awal hingga akhir. Segala urusan mengenai administrasi dan kebutuhan warga belajar dari awal hingga lulus sudah disiapkan oleh pihak pengelola maupun tutor. Tahap awal warga belajar adalah perekrutan dan tahap akhir warga belajar adalah evaluasi belajar berupa Ujian Kenaikan Kelas (UKK) atau Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK).

Selain pemenuhan kebutuhan, ada pula tugas atau kewajiban warga belajar selama pelaksanaan program menurut Ditjen PAUD-DIKMAS (2015.a.b), yaitu:

- 1) Mengikuti seluruh proses pembelajaran dan pelatihan sesuai jadwal yang ditentukan,
- 2) Mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang ditentukan, serta mentaati tata tertib yang disepakati,

- 3) Menghargai dan menghormati tenaga pendidik (tutor dan nara sumber teknis) dan tenaga kependidikan (pengurus atau pengelola lembaga penyelenggara program),
- 4) Memelihara dan merawat sarana/prasarana pembelajaran dan pelatihan.

Pemenuhan kewajiban warga belajar kurang maksimal. Dari empat belas orang jumlah warga belajar yang terdaftar di Paket B dan C Pendidikan Kesetaraan PKBM Rangsang Imo Joyo, hanya sekitar lima orang yang terlihat aktif. Sembilan warga belajar hanya terlihat di awal kemudian muncul kembali pada saat ada ujian. Kedisiplinan warga belajar dalam kehadiran di setiap pembelajaran dipengaruhi oleh cuaca, dukungan keluarga, dan kemauan (motivasi) pribadi. Meski demikian, Mustofa Kamil (2011: 128) menerangkan beberapa prinsip yang perlu diterapkan dalam pengelolaan program PKBM sebagai strategi pembelajaran dan sekaligus sebagai wadah proses pembelajaran yaitu:

- 1) Partisipasi warga belajar dalam pengelolaan pembelajaran,
- 2) Pemberian tanggungjawab kepada warga belajar dalam mengelola kegiatan pembelajaran itu sendiri.

Warga belajar yang jarang hadir harus mempertanggungjawabkan ketertinggalan materi pelajaran melalui sistem belajar mandiri sebab PKBM Rangsang Imo Joyo tidak lagi melakukan pengulangan materi untuk beberapa kali.

Berdasar paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa terpenuhinya kebutuhan warga belajar ternyata kurang mendapat timbal balik atas pemenuhan kewajibannya. Kemauan belajar warga belajar di PKBM

Rangsang Imo Joyo tergolong rendah. Pihak lembaga tidak dapat memaksa warga belajar karena memang pendidikan nonformal berpusat pada kemauan warga belajar. Cara memotivasi warga belajar tidak dapat dengan paksaan yang berupa ancaman atau sanksi. Pengelola harus lebih melakukan pendekatan personal dengan menggambarkan segala bentuk tantangan di kehidupan saat ini karena lulusan pendidikan kesetaraan diharapkan untuk siap terjun dalam kehidupan bermasyarakat.

#### **b. Kualifikasi serta Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola**

Kualifikasi akademik bagi Pengelola program kesetaraan adalah Lulusan MA/SMK/MA/Paket C dan telah memperoleh sertifikat pelatihan sebagai pengelola pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C yang dilakukan oleh Jurusan PLS terakreditasi minimal B, atau PPPNFI atau BPPNFI, (Permendiknas No. 44 Tahun 2009). Mengenai latarbelakang ijazah, pengelola di PKBM Rangsang Imo Joyo sudah mengikuti paparan di atas sebab mayoritas pengelola berpendidikan S1. Mengenai sertifikat, belum ada bentuk sertifikat pelatihan khusus pengelola, yang ada yaitu dokumentasi SK (surat keterangan) pengelola yang tertera di akta notaris lembaga.

Jumlah pengelola inti untuk Program Kesetaraan Paket B dan C adalah tujuh orang. Empat diantara pengelola berjenis kelamin Perempuan dan tiga orang berjenis kelamin Laki-laki. Dua orang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan lima yang lainnya Non-PNS. Empat orang sudah memiliki latar belakang minimal S1 dan tiga lainnya

masih di bawah jenjang tersebut. Adapun latar belakang yang menyangkut Kependidikan ada dua orang dan lainnya berasal dari bidang Non-Kependidikan. Selain pengelola inti, PKBM rangsnag Imo Joyo juga memiliki petugas piket sebanyak tiga orang yang dibagi untuk tugas di hari Senin, Rabu, dan Jum'at sesuai jadwal pembelajaran pendidikan kesetaraan. Tugas petugas piket adalah menjaga absensi warga belajar serta memastikan jumlah tutor yang hadir pada hari tersebut dan bila tidak seluruhnya hadir, maka akan dikonfirmasi kemudian dikomunikasikan.

Draf SNPPNF Th. 2013 Pasal 23 ayat (3) menyebutkan bahwa tenaga kependidikan (pengelola) yang harus ada untuk menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan paling kurang: 1 (satu) orang dan tenaga administrasi 1 (satu) orang yang bertanggungjawab pada pengelolaan keuangan, sarana prasarana, serta administrasi pembelajaran.

Syarat di atas terpenuhi oleh PKBM Rangsang Imo Joyo dengan satu orang ketua dan dibantu beberapa pengelola lain yang bisa disebut sebagai tenaga administrasi. Jumlah yang ada sudah memenuhi syarat minimal di atas.

Lembaga PKBM memakai sistem *double job* yang mana dari ketujuh pengelola di atas, empat diantaranya memiliki *double job* sebagai tutor. Hal ini didukung oleh hasil dokumentasi pada data tutor dan data pengelola. Walau demikian, sistem *double job* ini diperbolehkan dalam pengelolaan pendidikan kesetaraan sesuai Draf SNPPNF Th. 2013 Pasal 23 ayat (4) yang berisi: Fungsi Tenaga Kependidikan (Pengelola) dapat dijalankan oleh Tenaga Pendidik (Tutor).

Pembagian tugas untuk masing-masing pengelola di atas belum terlaksana secara optimal. Tugas masing-masing jabatan belum tertulis secara resmi. Ketua PKBM menyatakan bahwa *Job Description* setiap jabatan belum ada secara mendetail karena kondisi lembaga yang mengandalkan rasa sosial sebagai tumpuan setiap tugas. Walau demikian, pembagian seharusnya dilakukan setelah terbentuk pengelola inti bahkan sebelum diadakannya rangkap posisi untuk jabatan sekretaris dan bendahara. Dahulu pengelola inti adalah lima orang. Bila jumlah pengelola inti kini tujuh orang, maka jobdesk satu jabatan sekretaris atau bendahara tidak bisa diampu oleh satu orang, sementara jobdesk untuk jabatan-jabatan tersebut belum terperinci. Secara resmi maupun tidak, pengelola harus segera menjabarkan tugas masing-masing jabatan seperti tugas yang jelas untuk petugas piket lembaga ini.

Pengelola adalah pihak yang bertanggungjawab atas pelaksanaan penyelenggaraan program. Dalam pelaksanaan program kesetaraan paket B dan C, lembaga penyelenggara memiliki tugas pokok sebagai berikut (Ditjen PAUD-DIKMAS, 2015.a.b) :

- 1) Bertanggungjawab penuh atas penyelenggaraan program,
- 2) Membuat dan menyusun silabus pembelajaran dan pelatihan sebagai dasar penyusunan RPP oleh tutor dan nara sumber teknis,
- 3) Membuat pedoman penyelenggaraan program,
- 4) Membuat jadwal pembelajaran dan pelatihan,
- 5) Menyediakan dan menyiapkan sarana/prasarana pembelajaran dan pelatihan serta fasilitas belajar (teori dan praktek) yang diperlukan,
- 6) Membuat dan menyusun peraturan dan tata tertib pembelajaran dan pelatihan,

- 7) Menyediakan dan mengadministrasikan dokumen pendukung penyelenggaraan program, seperti: buku presensi peserta didik dan tutor, kapur atau spidol, alat dan bahan praktek keterampilan, buku evaluasi kemajuan belajar warga belajar,
- 8) Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan program,
- 9) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan program,
- 10) Menilai keaktifan dan kemampuan tutor,
- 11) Menumbuhkan dan memotivasi minat belajar warga belajar.

Mayoritas poin di atas sudah dipenuhi oleh PKBM Rangsang Imo Joyo. Tanggungjawab ada di tangan seluruh anggota lembaga dengan melalui pelaksanaan tugasnya masing-masing. Hal berbeda dari peraturan tersebut adalah belum adanya program pelatihan untuk warga belajar pendidikan kesetaraan yang juga berkaitan dengan tidak adanya narasumber teknis. Jadwal pembelajaran dibuat oleh pengelola dengan menyediakan dan mengadministrasi dokumen pendukung penyelenggaraan program. Sarana dan Prasarana disiapkan untuk pembelajaran seminggu tiga kali. Hal terakhir, pengelola mengevaluasi dari segi penyelenggaraan program maupun perkembangan warga belajar untuk kemudian mengetahui bentuk keaktifan tutor dan menentukan tindak lanjut untuk mendekatkan diri dengan warga belajar melalui penyaluran motivasi yang baik.

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) pengelola di PKBM Rangsang Imo Joyo belum ada secara rinci dan jelas sehingga pelaksanaan tugas masing-masing pengelola juga belum optimal. Pihak pengelola menyatakan bahwa pengelola bekerja saat ada pekerjaan tertentu dan tidak memiliki beban kerja harian. Hal tersebut karena kesibukan pihak



terkait selain di lembaga PKBM Rangsang Imo Joyo, misalnya sebagai Guru di sekolah formal. Akibatnya, terjadi kesenjangan pembagian tugas dimana tugas sering menumpuk di satu pihak saja. Penumpukan tugas di satu pihak membuat pengelolaan juga berjalan kurang sistematis.

**c. Kualifikasi serta Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Tutor**

Pada tahun ajaran 2015/2016, jumlah tutor yang terdaftar di PKBM Rangsang Imo Joyo adalah empat belas (14) orang. Setiap tutor rata-rata mengajar minimal dua kali seminggu. Mayoritas tutor Paket B dan C berpendidikan minimal S1 dan hanya ada satu tutor yang belum memenuhi. Beliau sedang menempuh pendidikan untuk menyelesaikan gelar Strata-1, dan secara tidak langsung pendidikan terakhirnya adalah SMA. Tutor tersebut merupakan tutor baru yang mengisi kekosongan pengampu mata pelajaran PKn. Bila dilihat lebih lanjut, latar belakang pendidikan tutor mayoritas sudah sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. Walaupun konsentrasi pendidikan tutor kebanyakan sudah sesuai dengan mata pelajaran yang diampu, namun tidak kesemuanya berasal dari jurusan pendidikan. Beberapa tutor adalah lulusan non kependidikan sehingga ilmu yang didapat adalah ilmu murni dan pihak tersebut tidak memperoleh ilmu untuk mengajar.

Kualifikasi Akademik tutor pendidikan kesetaraan tidak jauh dari syarat untuk menjadi tutor. Tutor paling kurang memiliki kualifikasi akademik yang dinyatakan dengan ijazah sebagai berikut (Draf SNPPNF Pasal 22 ayat (1)):

- 1) Ijazah sarjana strata satu (S1) atau Diploma Empat (D-IV) pendidikan bidang studi atau sarjana bidang studi yang telah memiliki akta IV yang diperoleh dari program studi terakreditasi untuk melaksanakan proses pembelajaran pada program pendidikan kesetaraan, atau bukti lain bahwa yang bersangkutan mampu melakukan tugas sebagai pendidik suatu mata ajar yang diampu,
- 2) Ijazah serendah-rendahnya Pendidikan Menengah untuk Program Pendidikan Kesetaraan Paket A dan B.

Berdasar peraturan tersebut, tutor di lembaga ini mengikuti kualifikasi akademik karena mayoritas sudah memiliki latar belakang pendidikan S1 dan satu tutor yang belum lulus S1 diperbolehkan mengajar untuk Paket B menurut paparan ayat (2) di atas.

Proses pembuatan RPP dan silabus juga menjadi salah satu tanggungjawab tutor, namun pelaksanaannya tidak optimal. Tutor tidak membuat RPP atau silabus sebagai persiapan bahan ajar. Materi disesuaikan dengan sekolah formal. Hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan Ditjen PAUD-DIKMAS (2015.a.b) tentang tugas Tutor dan Nara Sumber Teknis program paket B dan C selama pelaksanaan program di poin pertama yaitu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran/pelatihan (RPP). Pengelola kurang menekankan hal ini karena kelembagaan tidak tersistem secara disiplin administrasi. Dampaknya yaitu kurang terkontrolnya perkembangan pembelajaran dan perkembangan warga belajar oleh pihak pengelola. Secara tersirat dampak yang terjadi adalah seperti itu, namun bila kembali melihat pada situasi *double job* yang ada di lembaga ini, pihak tutor merupakan pihak pengelola sehingga perkembangan dipantau lewat *double job* ini.

Selain itu, ada sedikit pergeseran antara data tutor dan data mata pelajaran di mana jumlah tutor tidak sesuai dengan jumlah mata pelajaran, dan hal ini mengharuskan adanya tutor yang mengampu dua mata pelajaran. Walau demikian, tutor di PKBM Rangsang Imo Joyo pada dasarnya mengajar sesuai latar belakang pendidikan masing-masing, kecuali tutor yang merangkap mengampu dua mata pelajaran. Ada pergeseran konsentrasi mata pelajaran oleh tutor tersebut namun masih menjadi satu rumpun materi yang terpadu misalnya mengajar Sejarah dan Sosiologi yang menjadi Terpadu di Mata Pelajaran IPS. Hal ini sesuai dengan teori Trianto (2010: 119) yang mengatakan bahwa eksistensi guru dalam implikasi pembelajaran terpadu dapat dilakukan salah satunya dengan sistem guru tunggal yang mengajar mata pelajaran serumpun.

Jadwal pelajaran Paket B dan C di PKBM Rangsang Imo Joyo menunjukkan bahwa tugas mengajar tutor satu mata pelajaran terjadi setiap hari dengan tingkatan kelas yang berbeda-beda. Namun, karena berbagai alasan, kenyataan di lapangan berbeda. Kehadiran tutor sering tidak tepat waktu dan jadwal mengajar kadang meleset dari jadwal pelajaran yang sudah disiapkan oleh pengelola. Dampak yang bisa terjadi dari situasi ini adalah materi yang tersampaikan tidak teratur dan warga belajar harus lebih banyak belajar mandiri. Padahal peraturan Ditjen PAUD-DIKMAS (2015.a.b) tentang tugas Tutor dan Nara Sumber Teknis program paket B dan C selama pelaksanaan program yang ke tiga

(3) yaitu membuat bahan belajar pelengkap yang diperlukan untuk mempercepat penguasaan warga belajar terhadap bidang studi yang dipelajari. Pengawasan tutor sebaiknya ada di pembelajaran kelas, tutorial maupun mandiri, misalnya dengan mengontrol hasil yang dicapai warga belajar.

#### **d. Proses Pembelajaran Akademik dan Pemanfaatan Sarana Prasarana**

Pembelajaran di PKBM Rangsang Imo Joyo diadakan tiga kali dalam satu minggu yaitu hari Senin, Rabu, dan Jum'at. Hal ini berdasar pada peraturan Ditjen PAUD-DIKMAS (2015.a.b) mengenai pembelajaran akademik pendidikan kesetaraan yang dilakukan sesuai ketentuan standar isi dan standar proses, yaitu 1) pembelajaran dilakukan minimal 2 hari dalam seminggu @3 jam pelajaran, atau 3 hari dalam seminggu @2 jam pelajaran, 2) pembelajaran dilakukan dengan tatap muka, tutorial, dan/atau mandiri

Berdasar analisa jadwal pelajaran, diketahui bahwa pembelajaran Paket B dimulai pukul 13.30-17.45 WIB dengan durasi satu mata pelajaran (SKK) adalah 45 menit dan istirahat 15 menit. Satu kali pertemuan berisi 2 mata pelajaran atau 4 SKK sehingga total waktu pembelajaran adalah 180 menit atau 3 jam. Pembelajaran sudah menganut sistem KTSP dimana pelajaran terpadu berlaku untuk IPA dan IPS. Mata pelajaran lainnya adalah Bahasa Inggris, Matematika, Bahasa Indonesia, dan PKn.

Serupa dengan jadwal pelajaran Paket B, sistem pembelajaran Paket C menunjukkan bahwa satu SKK dilakukan selama 45 menit. Satu kali pertemuan berisi 2 sampai 4 mata pelajaran dengan total 4 SKK sehingga total waktu pembelajaran Paket C juga 180 menit atau 3 jam. Beban belajar kelas X, XI, dan XII adalah sama besar, hanya saja jumlah mata pelajaran kelas X (sepuluh) lebih besar yaitu 11 macam dibandingkan dengan beban mata pelajaran kelas XI dan XII yang fokus terhadap SKL yaitu 8 macam. Paparan mengenai Paket B dan C tersebut mencakup seluruh kegiatan tatap muka di kelas, namun PKBM juga memiliki jadwal pembelajaran mandiri dan tutorial yang berisi Pendidikan Agama di hari Kamis dan Penjaskes di hari Minggu. Masing-masing waktu pelaksanaannya adalah 2 (dua) jam.

Analisa di atas berdasar pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Kesetaraan, yaitu:

Beban belajar program pendidikan kesetaraan dinyatakan dalam satuan kredit kompetensi (SKK). Satu SKK adalah satu satuan kompetensi yang dicapai melalui pembelajaran 1 jam tatap muka atau 2 jam tutorial atau 3 jam mandiri, atau kombinasi secara proposional dari ketiganya. Satu jam tatap muka yang dimaksud adalah satu jam pembelajaran, yaitu sama dengan 40 menit (Paket B) dan 45 menit (Paket C).

Meski demikian, pelaksanaan di lapangan tidak selalu seperti data yang tertulis tersebut. Fleksibilitas pembelajaran mengenai jam dan mata pelajaran yang dipelajari di hari tersebut sangat bergantung kondisi warga belajar dan tutor. Sebelumnya telah disampaikan bahwa warga

belajar kurang rajin untuk hadir dalam pembelajaran dan kehadiran tutor juga tidak selalu tepat waktu dan tepat jadwal sehingga harus ada penyesuaian oleh semua pihak dan semua hal termasuk pembelajaran. Waktu pelaksanaan pembelajaran berkurang dari seharusnya yaitu berkisar antara pukul 16.00-17.30 WIB atau dalam durasi 90 menit. Pelaksanaan pembelajaran akademik ini tidak sesuai dengan peraturan tertulis yang dibuat lembaga sendiri seperti yang tertera di atas. Berkaitan dengan itu, Ishak Abdulhak (2012: 25) menjelaskan bahwa ciri-ciri pendidikan noformal antara lain:

- 1) Berpusat pada peserta didik. Dalam pendidikan non formal dan belajar mandiri, peserta didik adalah pengambilan inisiatif dan mengontrol kegiatan belajarnya
- 2) Waktu penyelenggaraannya relative singkat, dan pada umumnya tidak berkesinambungan
- 3) Menggunakan kurikulum kafetaria. Kurikulum bersifat fleksibel, dapat dimusyawarahkan secara terbuka, dan banyak ditentukan oleh peserta didik
- 4) Menggunakan metode pembelajaran yang partisipatif, dengan penekanan pada belajar mandiri.

Pendapat di atas juga mendukung paparan hasil penelitian yang menyatakan bahwa pembelajaran di PKBM Rangsang Imo Joyo tidak selalu menggunakan RPP dan silabus sehingga materi yang diberikan fleksibel. Walau demikian, pembelajaran mengacu pada kurikulum KTSP dan SKL seperti penjelasan dari pengelola. Pada dasarnya materi pembelajaran pendidikan kesetaraan mengacu kepada standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah dalam Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Jenis sarpras di PKBM Rangsang Imo Joyo dilihat dari segi data yaitu berupa RPP, silabus serta susunan materi pelajaran. Selain itu, ada pula sarpras dari segi bentuk barang yang menyangkut gedung pembelajaran, ruang kelas dan perangkat pendukung penyampaian materi pelajaran seperti meja, kursi dan papan tulis.

Mulyasa dalam Sri Minarti (2011: 251) menyebutkan sarana pendidikan yaitu perlengkapan yang secara langsung dipergunakan untuk proses pendidikan seperti meja, kursi, kelas, dan media pengajaran. Prasarana pendidikan yaitu fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan seperti halaman, kebun, dan taman.

Melihat pada keadaan sarpras PKBM Rangsang Imo Joyo dan teori Mulyasa, fasilitas yang ada di lembaga ini mayoritas tergolong dalam sarana pendidikan. Adapaun prasarana yang digunakan oleh lembaga berupa *lobby* sebagai lokasi penjaga piket mengontrol absensi, serta ada tempat parkir bagi warga belajar, tutor, serta pengelola. Walaupun tidak masuk langsung dalam proses pembelajaran, namun hal ini juga mendukung pelaksanaan proses pembelajaran tersebut.

Sarana prasarana yang ada di PKBM Rangsang Imo Joyo mayoritas adalah hasil pinjam-meminjam dengan SMK Pembangunan Yogyakarta. maka dari itu, dalam pengelolaan lembaga tidak ada proses pengadaan fasilitas secara keseluruhan. Fasilitas yang direncanakan dan diadakan oleh pihak lembaga hanya berupa kebutuhan operasional saat penyampaian materi seperti spidol dan penghapus, selebihnya adalah wewenang SMK Pembangunan Yogyakarta. PKBM hanya

mengkondisikan sarana prasarana yang sudah tersedia agar sesuai dengan kebutuhan Paket B dan C PKBM Rangsang Imo Joyo.

Sarana prasarana yang digunakan dalam pembelajaran ini tidak banyak sebab sistem pembelajaran seluruhnya dilaksanakan dengan pemberian materi di dalam kelas. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan ruang kelas menurut Hartani (2011: 145) adalah:

- 1) Kapasitas Ruang : standar yang dipakai saat ini adalah antara 32-40 peserta didik per kelas. Semakin kecil jumlah peserta didik akan semakin tinggi tingkat interaksi antara guru dan peserta didik.
- 2) Jadwal Penggunaan Ruang : a) menetap, peserta didik tetap di ruangan dan guru yang menghampiri, b) bergerak, peserta didik bergerak menuju ruang kelas tempat guru mengajar mata pelajaran tertentu.
- 3) Pengaturan tata letak ruang kelas : tempat duduk dapat diatur setiap saat untuk kegiatan kelompok kecil atau kelompok besar, posisi tempat duduk dapat ditukar antar peserta didik pada waktu tertentu, dan mengganti posisi hiasan ruangan untuk menghindari kebosanan.
- 4) Kebersihan dan keindahan ruang kelas yang ditujukan untuk kenyamanan guru serta peserta didik dalam proses pembelajaran.

Poin pertama terpenuhi karena kapasitas kelas di tempat pembelajaran PKBM Rangsang Imo Joyo adalah 32 orang. Poin kedua mengenai jadwal penggunaan ruang, lembaga ini menggunakan dua teknik tersebut di atas secara kondisional, ada saatnya menetap dan ada saatnya dilakukan teknik bergerak. Poin ketiga terlaksana karena kondisi lembaga memungkinkan pengelolaan kelas menjadi kelompok kecil dalam satu ruang. Poin keempat juga terpenuhi mengingat lokasi pembelajaran digunakan setiap hari oleh lembaga pemiliknya sehingga perawatan sarpras juga terjaga.



Lebih lanjut, dijelaskan bahwa pembelajaran sering dilakukan dalam satu ruang kelas dengan dibagi menjadi kelompok kecil sesuai tingkatan kelas masing-masing warga belajar. Sistem yang digunakan adalah tutor mengajar secara bergiliran pada tingkatan kelas satu dan lainnya saat jadwal harus disesuaikan dengan tutor yang hadir. Sistem ini merupakan strategi mengajar dari tutor dan pengelola namun tetap mengutamakan adanya suasana belajar yang kondusif walaupun kelas kosong yang tersedia masih ada. Lembaga tidak menggunakan ruang kelas tersebut saat warga belajar dan tutor yang hadir hanya sedikit dengan alasan untuk memudahkan dalam penyampaian materi secara bergiliran oleh tutor. Penggunaan dua ruang kelas adalah saat warga belajar dari masing-masing paket cukup banyak sehingga pembagian kelas hanya berdasar tingkatan kelas dengan satu kelas untuk Paket B dengan tingkatan kelasnya dan satu ruang kelas lagi untuk Paket C dengan tingkatan kelasnya. Berikut adalah beberapa suasana belajar yang dianjurkan oleh Lunandi dalam Suprijanto (2007: 46) : 1) kumpulan manusia aktif, 2) saling percaya, menghormati dan menghargai, 3) suasana penemuan diri yang tidak mengancam, 4) suasana keterbukaan, 5) suasana mengakui kekhasan diri, serta 6) suasana mengakui hak berbuat salah dan membolehkan keragu-raguan. Bila pijakan pembelajaran sudah memenuhi syarat ini, maka walaupun dibentuk kelompok kecil dari berbagai tingkatan kelas dalam satu ruangan, bukan menjadi masalah yang berarti.

Walau demikian, pembagian ruang kelas berdasar tingkatan kelas tetap dianjurkan untuk membangkitkan konsentrasi warga belajar mengingat jumlah kelas kosong yang bisa dimanfaatkan masih tersisa. Tutor dan warga belajar menyelesaikan permasalahan kelas rangkap dengan lebih tertib secara kehadiran sehingga tidak ada tutor yang menganggur saat warga belajarnya tidak masuk atau sebaliknya yang membuat sistem pembelajaran berganti jadwal secara mendadak. Segala segi personalia harus mulai menjunjung tinggi kedisiplinan terhadap tugas masing-masing.

#### **e. Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan**

Langkah awal pengelolaan anggaran biaya pendidikan mencakup dua hal menurut Sri Minarti (2011: 229) :

- 1) Penyusunan anggaran pembiayaan yang dikembangkan dalam format sumber pendanaan dan pengeluaran,
- 2) Pengembangan Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RAPBS), kegiatan ini termasuk kelanjutan poin di atas.

Poin pertama mengenai sumber dana pendidikan kesetaraan, telah dibahas dalam tahap perencanaan. Poin kedua mengenai RAPBS menjadi hal yang belum terlaksana secara optimal di PKBM Rangsang Imo Joyo. Pengelola menjelaskan bahwa lembaga tidak membuat RAPBS secara resmi dan rutin. Hanya ada perkiraan dana menurut kebutuhan sebelumnya dan bila terjadi kekurangan dana, akan dicarikan solusi saat itu juga. Gambaran ini bukan membuktikan bahwa lembaga mengabaikan

segi pembiayaan pendidikan namun sistem keuangan dilaksanakan secara spontan serta berdasar pada pengalaman yang sudah pernah dilaksanakan, namun kurang terstruktur.

Draf SNPPNF Pasal 31 ayat (2) menyebutkan jenis dan pemanfaatan pembiayaan pendidikan kesetaraan yaitu:

- 1) Biaya investasi, untuk pengadaan sarana prasarana, dan pengembangan SDM,
- 2) Biaya operasional, untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan (pengelola) serta tunjangan yang melekat, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya operasional pendidikan tak langsung,
- 3) Biaya personal, meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran.

Alokasi anggaran dana di Pendidikan Kesetaraan PKBM Rangsang Imo Joyo fokus pada dana operasional yang dibagi menjadi dana untuk hak tutor dan untuk kegiatan pembelajaran sehari-hari. Mengenai gaji tutor, pihak PKBM tidak menyebutkan secara jelas berapa jumlahnya karena kembali pada sistem sosial lembaga yang mana semua bekerja dengan mengutamakan rasa ikhlas, begitu halnya dengan hak pengelola. Beberapa informan tidak terlalu menjelaskan secara detail karena mayoritas pengelola juga berperan sebagai tutor di Paket B dan C. Perihal lokasi (gedung) dan prasarana di dalamnya tidak mempergunakan biaya. Contoh anggaran kegiatan sehari-hari adalah untuk fotocopy materi pelajaran, pembelian spidol, penghapus, dan administrasi lembaga (absensi harian, rapot warga belajar, dan sebagainya).

Biaya investasi belum menjadi bagian dari jenis pembiayaan di PKBM Rangsang Imo Joyo karena sarana prasarana yang ada sejak dulu

hingga sekarang mayoritas bukan milik lembaga ini. Sarana prasarana dibantu dengan disiapkan serta dipinjam oleh masyarakat. Adapun, untuk dana personal yang mana berhubungan erat dengan iuran warga belajar, diadakan setelah PKBM mengalami kevakuman. Setiap warga belajar membayar dua puluh ribu rupiah setiap bulannya. Maka dari itu, dari ketiga jenis alokasi anggaran dana pendidikan kesetaraan di atas, PKBM Rangsang Imo Joyo menggunakan dua dari tiga jenis dana yang ada.

Mulyasa dalam Sri Minarti (2011: 211) menyebutkan ada tiga kegiatan pokok atau tiga fase yang harus dilakukan dalam manajemen keuangan yaitu perencanaan pembiayaan (*budgeting*), pelaksanaan pembiayaan (*accounting*), dan evaluasi pembiayaan (*controlling*).

Dalam tahap *accounting* ini, PKBM Rangsang Imo Joyo terpaksa harus menarik iuran dari warga belajar seperti dijelaskan di atas. Pelaksanaannya, berbagai sumber dana termasuk iuran warga belajar masih belum mampu memenuhi segala kebutuhan lembaga dari segi finansial. Strategi pengelola untuk menghadapi masalah ini dipersiapkan sejak beberapa tahun lalu. Pengelola meminimalisir pengeluaran dana BOK sehingga sampai saat ini masih terdapat dana (kas) lembaga yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kekurangan anggaran biaya. Draft Standar Nasional Pendidikan Nonformal Pasal 31 ayat (3) menyatakan bahwa sumber pembiayaan dapat diperoleh dari pemerintah, pemerintah daerah, yayasan, partisipasi masyarakat dan atau pihak lain yang tidak

mengikat. Maka dari itu, iuran warga belajar termasuk dalam sumber dana partisipasi masyarakat, sedangkan kas lembaga dari sisa sebelumnya bisa dikategorikan dalam sumber dana yayasan karena dahulu dana BOK sudah diterima dan menjadi milik lembaga sehingga tanggungjawab pengelolaannya berada di tangan pengelola. Strategi lembaga ini diperbolehkan demi keberlangsungan Paket B dan C PKBM Rangsang Imo Joyo.

Selain itu, permasalahan keuangan ini dibantu oleh azas lembaga yang sangat menjunjung tinggi rasa sosial, dimana semua pihak menghargai adanya ketidak teraturan pemenuhan hak sumber daya manusia mengenai gaji sehingga tujuan utama bekerja di lembaga ini bukanlah uang. Maka dari itu, lembaga ini tetap berdiri meski tidak mendapat bantuan dana dari pemerintah lagi.

### **3. Evaluasi Pendidikan Kesetaraan**

#### **1. Evaluasi Hasil Belajar**

Evaluasi Hasil Belajar secara umum disebut juga EHB. Tujuan evaluasi hasil belajar menurut Ditjen PAUD-DIKMAS, (2015.a.b: 18) adalah sebagai berikut: 1) untuk mengetahui kemajuan hasil belajar warga belajar selama jangka waktu tertentu, 2) untuk mengetahui efektifitas metode dan pendekatan pembelajaran yang dilakukan selama jangka waktu tertentu.

Bentuk EHB di PKBM Rangsang Imo Joyo ada dengan model bersifat formatif dan ada pula model sumatif. Model formatif ditunjukkan

melalui Ulangan harian (UH) dan Ulangan tengah Semester (UTS) yang tidak digunakan oleh keseluruhan tutor. Beberapa tutor memilih menggunakan UH dan UTS saat beberapa materi telah dikuasai warga belajar. Beberapa tutor lain memilih tidak menggunakan UH dan UTS melainkan menggunakan metode pembahasan soal-soal dalam penyampaian materi. Soal-soal untuk UH dan UTS dibuat mandiri oleh tutor yang bersangkutan.

Model EHB sumatif ditunjukkan melalui Pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) dan Ujian Kenaikan Kelas (UKK) yang ada dibawah binaan Dinas Pendidikan Yogyakarta. Mulai tahun ajaran saat ini, soal-soal dan waktu pelaksanaan UAS atau UKK ditentukan oleh Dinas. Jenis evaluasi belajar yang terakhir adalah Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK). Jenis ini juga masuk dalam model evaluasi sumatif. Pada dasarnya, sistem UNPK Paket B dan C adalah sama. Pelaksanaan UNPK diatur secara nasional namun dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Kota, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Mata pelajaran yang diujikan dalam UNPK sama dengan Ujian Nasional sekolah formal, bahkan Standar Kelulusan (SKL) nya pun juga sama yaitu mengacu pada SKL Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.

Dari paparan di atas, ada lima jenis Evaluasi Hasil Belajar (EHB) warga belajar di PKBM Rangsang Imo Joyo yaitu UH, UTS, UAS, UKK, dan UNPK. Hal tersebut mengikuti teori Hartani (2011: 196) yang

menyatakan bahwa Evaluasi proses pembelajaran secara periodik, sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun, pada akhir semester akademik.

## **2. Evaluasi Penyelenggaraan Program**

Evaluasi penyelenggaraan program merupakan sebuah kegiatan untuk mengevaluasi atau mengoreksi hal-hal yang telah terjadi atau dilakukan selama kegiatan penyelenggaraan program sedang atau telah berlangsung. (Ditjen PAUD-DIKMAS, 2015.a.b). Hasil evaluasi dapat dijadikan pedoman sebagai langkah tindak lanjut pengelola maupun tutor untuk menghadapi permasalahan atau bahkan kelebihan yang muncul dalam program.

Evaluasi program dilakukan pengelola setiap satu semester sekali, setiap akhir pembelajaran atau menjelang Evaluasi Hasil Belajar (EHB). Bentuk evaluasi adalah rapat dengan pihak Pembina Lembaga (Kelurahan Patangpuluhan), Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, dan Evaluasi Internal lembaga. Evaluasi bersama Pembina dihadiri oleh beberapa pimpinan lembaga-lembaga di bawah naungan Kelurahan Patangpuluhan. Rapat tersebut dipimpin oleh Ibu Lurah yang berisi laporan pelaksanaan dan koordinasi untuk program-program tersebut kedepannya. Pihak pembina mengatakan bahwa pembinaan memang tidak terlalu intens. Kelurahan Patangpuluhan selaku lembaga yang menaungi PKBM Rangsang Imo Joyo hanya berlaku sebagai lambang

sekretariat PKBM. Walau demikian, hubungan pembina dengan pengelola lembaga secara personal masih terjaga.

Evaluasi bersama Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dilakukan satu semester sekali. Perwakilan dari PKBM Rangsang Imo Joyo adalah Ketua Lembaga yaitu Bapak Supatmo Priyo yang menghadiri pertemuan di Dinas. Pertemuan itu dihadiri oleh para pimpinan lembaga penyelenggara nonformal se-kota Yogyakarta. Isi dari pertemuan tersebut adalah pembahasan pelaksanaan penyelenggaraan lembaga secara umum dan pemberian informasi sekaligus petunjuk untuk pelaksanaan semester selanjutnya. PKBM Rangsang Imo Joyo sendiri tidak membuat laporan pertanggungjawaban keuangan karena saat ini tidak mendapat dana BOK.

Secara internal, bentuk evaluasi lembaga dilakukan secara fleksibel dimana solusi dicari saat ada permasalahan dan rapat tidak berjalan rutin, hanya koordinasi dilakukan melalui komunikasi spontan saat bertemu satu sama lain atau melalui media elektronik.

Jenis-jenis evaluasi di atas termasuk dalam salah satu bagian monitoring. Monitoring dan supervisi menjadi reka evaluasi dalam pengawasan program kesetaraan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 pengawasan proses pembelajaran meliputi kegiatan pemantauan, supervisi dan evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut. Aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan monitoring dan supervisi menurut Ditjen PAUD-DIKMAS,



(2015.a.b: 24), adalah: 1) kredibilitas lembaga penyelenggara, 2) kesesuaian warga belajar, 3) materi pembelajaran/pelatihan, 4) jadwal kegiatan dan alokasi waktu, 5) kompetensi tutor atau narasumber teknis, 6) proses pembelajaran atau pelatihan, 7) tingkat kehadiran warga belajar, 8) penggunaan dana bantuan, dan 9) dokumen penyelenggaraan program.

Maka dari itu, evaluasi program Paket B dan C di PKBM Rangsang Imo Joyo mengikuti syarat monitoring yang mana evaluasi dilakukan mencakup pembelajaran maupun penyelenggaraan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perencanaan pengelolaan Paket B dan C meliputi: a) penerimaan warga belajar baru dilakukan tiap awal tahun ajaran baru dan bersifat terbuka tanpa seleksi; b) perekrutan tutor dilakukan secara tertutup dengan syarat utamanya adalah kemauan dan kesehatan psikologis, lembaga belum memiliki narasumber teknis sebab belum ada kegiatan pelatihan keterampilan; c) kurikulum yang digunakan adalah KTSP dengan struktur mata pelajaran terpadu pada Paket B dan penjurusan pada Paket C, fleksibilitas pada durasi SKK untuk kedua Paket; d) saat ini, tempat pembelajaran di SMK Pembangunan Yogyakarta; e) sebelum vakum di tahun 2012, sumber dana awal berasal dari dana pendiri lembaga dan dana hibah pemerintah melalui BOK. Setelah vakum, sumber dana berasal dari iuran warga belajar dan kas lembaga. Di luar itu, donatur yang tidak mengikat menjadi sumber dana sebelum maupun setelah vakum.
2. Pelaksanaan pengelolaan Paket B dan C meliputi: a) pembagian rombel berdasar pada ijazah atau raport terakhir dari warga belajar; b) enam dari tujuh pengelola memenuhi kualifikasi yaitu pendidikan minimal SMA/SMK/ sederajat dan mengikuti pelatihan dari lembaga PLS terakreditasi minimal B, namun beberapa tugas menumpuk di pihak tertentu saja; c) tiga belas dari empat belas tutor memenuhi kualifikasi yaitu berpendidikan minimal S1 dan konsentrasi pendidikan tutor sesuai dengan mata pelajaran yang diampu walaupun tidak kesemuanya berasal dari keguruan, kehadiran tutor sering tidak tepat waktu dan jadwal mengajar kadang meleset dari jadwal pelajaran; d)

pembelajaran diadakan tiga kali dalam satu minggu tetapi jadwal pelajaran yang tertulis berbeda dengan pelaksanaan di lapangan dan pembelajaran tidak selalu menggunakan RPP-silabus; e) peminjaman sarpras tidak dipungut biaya, sistem pembelajaran dilaksanakan dengan pemberian materi dalam kelas rangkap dengan dibagi menjadi kelompok kecil; f) lembaga tidak membuat RAPBS secara resmi dan rutin, alokasi anggaran dana untuk insentif tutor dan kegiatan pembelajaran sehari-hari, namun dalam pelaksanaannya berbagai sumber dana belum mampu memenuhi segala kebutuhan lembaga dari segi finansial.

3. Evaluasi dibagi menjadi dua yaitu : (a) Evaluasi Hasil Belajar, model formatif ditunjukkan melalui Ulangan harian (UH) dan Ulangan tengah Semester (UTS) yang tidak digunakan oleh keseluruhan tutor. Soal-soal untuk UH dan UTS dibuat mandiri oleh tutor yang bersangkutan. Model EHB sumatif ditunjukkan melalui Pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) dan Ujian Kenaikan Kelas (UKK) yang ada dibawah binaan Dinas Pendidikan Yogyakarta. Jenis evaluasi belajar yang terakhir adalah Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK). Jenis ini juga masuk dalam model evaluasi sumatif. Pada dasarnya, sistem UNPK Paket B dan C adalah sama. Mata pelajaran dalam UNPK sama dengan Ujian Nasional sekolah formal, bahkan Standar Kelulusan pun sama. (b) Evaluasi penyelenggaraan program dilakukan pengelola setiap satu semester sekali, setiap akhir pembelajaran atau menjelang EHB. Bentuk evaluasi adalah rapat dengan pihak Pembina Lembaga (Kelurahan Patangpuluhan), Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, dan Evaluasi Internal lembaga.

## **B. Saran**

1. Pada tahap perencanaan, sosialisasi seharusnya bisa lebih luas dengan memanfaatkan media elektronik juga. Adapun untuk masalah anggaran, tidak lagi dilakukan pengelolaan secara mendadak namun lembaga harus membuat RAPBS yang jelas dan tertib agar finansial lembaga bisa terjaga.
2. Pada tahap pelaksanaan, lembaga sebaiknya membuat rincian tugas secara pasti untuk pengelola karena bertambahnya jumlah pengelola saat ini kurang mengoptimalkan pengelolaan lembaga mengingat masih ada penumpukan tugas di beberapa pihak tertentu. Bila saat ini lembaga tidak dapat meminta dana BOK dari pemerintah, maka lembaga harusnya lebih proaktif dalam penyusunan dan penyebaran proposal untuk memperoleh dana dari beberapa lembaga swasta di sekitar Kota Yogyakarta. Selain itu, pengelola dan tutor lebih melakukan pendekatan kepada warga belajar agar motivasi untuk mengikuti pembelajaran semakin tinggi sehingga jumlah warga belajar yang terhitung aktif sama dengan jumlah warga belajar yang terdaftar dari awal program.
3. Evaluasi penyelenggaraan program secara internal lembaga akan lebih baik bila dilakukan secara tertib dengan tatap muka walaupun dalam intensitas waktu yang sedikit karena hal tersebut mempengaruhi kekompakan satu pihak dan lainnya serta membantu menggugah rasa tanggungjawab.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aunurahman., & M. Tajudin Nur., & M. Syukri. (2007). *Penelitian Pendidikan Sekolah Dasar*. Bahan Ajar Cetak.
- Deddy Mulyana. (2003). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Didin Kurniadin & Imam Machali. (2013). *Manajemen Pendidikan: Konsep & Prinsip Pengelolaan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Direktorat Pendidikan Kesetaraan. (2010). *Profil Pendidikan Kesetaraan dalam Fakta dan Angka*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Ditjen PAUD-DIKMAS. (2015).a. *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket B dan Prosedur Memperoleh Bantuan Operasional Kegiatan*. Jakarta : Kemdikbud, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat.
- \_\_\_\_\_. (2015).b. *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C dan Prosedur Memperoleh Bantuan Operasional Kegiatan*. Jakarta : Kemdikbud, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat.
- Draft Standar Nasional Program Pendidikan Nonformal (SNPPNF). (2013). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Hartani. (2011). *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Ida Kintamani Dewi Hermawan. (2012). Kinerja Pendidikan Kesetaraan Sebagai Salah Satu Jenis Pendidikan Nonformal. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* (Vol. 18, Nomor 1). Hlm 65-84.
- Intan Ayu Kinasih dan Nurul Fatimah. (2015). Kebijakan Semu: Sebuah Analisis Tentang Implementasi Program Pendidikan Kesetaraan Kelompok Belajar (Kejar) Paket C Widya Wiyata Mandala di PKBM Pratama Kecamatan Batang Kabupaten Batang. *Solidarity* 4 (1) (2015). Hlm -.
- Ishak Abdulhak dan Ugi Suprayogi. (2012). *Penelitian Tindakan Dalam Pendidikan Non Formal*, Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka.

- Katalog BPS. (2013). *Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka*. Yogyakarta: BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi D.I.Y.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2013). *Draft Standar Nasional Program Pendidikan Nonformal (SNPPNF)*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional
- Linatus Sofiah. (2010). Pelaksanaan Kegiatan Tutorial Pendidikan Kesetaraan serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhi di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap. *Skripsi*. UNY.
- Miles, Matthew B.. (2014). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook/Matthew B. Miles, A. Michae Huberman, Johny Saldana (Third Ed.)*. Arizona State University.
- Mahmuddin. (2004). *Manajemen Dakwah Rasulullah (Suatu Telaah Historis Kritis)*. Jakarta: Restu Ilahi.
- Maria Adhiaty. (2012). Manajemen Program Kejar Paket C di PKBM Sarana Maju Kota Tegal. *Lembaran Ilmu Kependidikan* (Volume 41. Nomor 2, September 2012). Hlm 71-75.
- Mustafa Kamil. (2009). *Pendidikan Nonformal*. Bandung: Alfabeta.
- Mustafa Kamil. (2011). *Pendidikan Nonformal: Pengembangan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Indonesia (Sebuah Pembelajaran dari Kominkan di Jepang)*. Bandung: Alfabeta.
- Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Permendiknas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengawasan Proses Pembelajaran.
- Permendiknas Nomor 44 Tahun 2009 tentang Kualifikasi dan Kompetensi Pengelola Program Kesetaraan.
- Permendiknas Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C.
- Permendiknas Nomor 81 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal.
- Siburian, Tiur Asi. (2013). *Metodologi Penelitian Manajemen Pendidikan*. Medan: Universitas Negeri Medan

- Siswatari. (2011). Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Nonformal. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang Kemdiknas.
- Sodik. (2012). Pola Pengelolaan Program Pendidikan Kesetaraan Berbasis Kecakapan Hidup di PKBM Bendan Jaya Kota Pekalongan. *Educational Management* 1 (2). Hlm 118-122.
- Sri Minarti. (2011). *Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan secara Mandiri*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sudjana, D.. (2004). *Manajemen Program Pendidikan*. Bandung: Falah Production.
- \_\_\_\_\_. (2010). *Manajemen Program Pendidikan: untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Falah Production.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (2005). *Manajemen Kurikulum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sujarwo. (2013). *Pembelajaran Orang Dewasa (Metode dan Teknik)*. Yogyakarta: CV. Venus Gold Press.
- Sule, Ernie Tisnawati dan Saefullah, Kurniawan. (2010). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana.
- Suprijanto. (2007). *Pendidikan Orang Dewasa : dari Teori Hingga Aplikasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- S. Nasution. (1996). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. (2010). *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta : UNY Press.
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. (2011). *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Trianto. (2010). *Model Pembelajaran Terpadu: Konsep, Strategi, dan Implementasinya dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Tri Atmaja Danang Wijaya. (2012). Pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul dalam Program Pemberantasan Buta Aksara. *Skripsi*. UNY.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Yohannes Yahya. (2006). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.



**LAMPIRAN 1**  
**SURAT PENELITIAN**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281  
Telpn (0274) 540611 pesawat 405, Fax (0274) 5406611  
Laman: fip.uny.ac.id, E-mail: humas\_fip@uny.ac.id



Nomor : 7624 /UN34.11/PL/2015  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan izin Penelitian

15 Desember 2015

Yth. Walikota Yogyakarta  
Cq. Ka. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta  
Jl. Kenari No.56 Yogyakarta Kode Pos 55165  
Telp (0274) 555241 Fax. (0274) 555241  
Yogyakarta

Diberitahukan dengan hormat, bahwa untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik yang ditetapkan oleh Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, mahasiswa berikut ini diwajibkan melaksanakan penelitian:

Nama : Putri Syafrida Riyana  
NIM : 12101241003  
Prodi/Jurusan : MP/AP  
Alamat : Jl. Basuki Rahmat 70B, RT 4 RW 1, Purbosuman, Kec/Kab. Ponorogo

Sehubungan dengan hal itu, perkenankanlah kami memintakan izin mahasiswa tersebut melaksanakan kegiatan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

Tujuan : Memperoleh data penelitian tugas akhir skripsi  
Lokasi : PKBM Rangsang Imojoyo, Kec. Wirobrajan, Kota Yogyakarta  
Subyek : Pembina, Pengelola, Koordinator Program, Tutor, Warga Belajar Program Kesetaraan  
Obyek : Pengelolaan Program Kesetaraan  
Waktu : Desember-Februari 2016  
Judul : Pengelolaan Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih.



Dekan,

Dr. Haryanto, M. Pd.  
NIP196009021987021001

Tembusan :  
1. Rektor ( sebagai laporan)  
2. Wakil Dekan I FIP  
3. Ketua Jurusan AP FIP  
4. Kabag TU  
5. Kasubbag Pendidikan FIP  
6. Mahasiswa yang bersangkutan  
Universitas Negeri Yogyakarta



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA  
DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 515866, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

**SURAT IZIN**

NOMOR : 070/3839  
7528/34

Membaca Surat : Dari Dekan Fak. Ilmu Pendidikan - UNY  
Nomor : 7634/UN34.11/PL/2015 Tanggal : 17 Desember 2015

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.  
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;  
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;  
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;  
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijinkan Kepada : Nama : PUTRI SYAFRIDA RIYANA  
No. Mhs/ NIM : 12101241003  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Ilmu Pendidikan - UNY  
Alamat : Kampus Karangmalang, Yogyakarta  
Penanggungjawab : Dr. Wiwik Wijayanti, M.Pd.  
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PENGELOLAAN PROGRAM KESETARAAN PAKET B DAN C DI KECAMATAN WIROBRAJAN KOTA YOGYAKARTA

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta  
Waktu : 17 Desember 2015 s/d 17 Maret 2016  
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan  
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)  
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat  
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah  
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan  
Pemegang Izin

PUTRI SYAFRIDA RIYANA



Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 17-12-2015  
Kepala Dinas Perizinan  
Sekretaris

Drs. HARDONO  
NIP. 195804101985031013

Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)  
2. Ka. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta  
3. Camat Wirobrajan Kota Yogyakarta  
4. Lurah Patangpuluhan Kota Yogyakarta  
5. Dekan Fak. Ilmu Pendidikan - UNY  
6. Ybs.

**PKBM "RANGSANG IMO JOYO"**  
**KEL.PATANGPULUHAN, KEC.WIROBRAJAN, KOTA YOGYAKARTA**  
**Sekretariat : Patangpuluhan Wb. III / 436 Yogyakarta Telp. 386006, 415211**

---

**SURAT KETERANGAN**  
**No. 003 / RIJ / IV / 2016**

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Drs.Supatmo Priyo  
Jabatan : Ketua PKBM Rangsang Imo Joyo  
Alamat : Jl.Dorodasih No. 7 Yogyakarta

Menerangkan bahwa,

Nama : Putri Syafrida Riyana  
NIM : 12101241003  
Jurusan/Prodi : Administrasi Pendidikan/Manajemen Pendidikan  
Fakultas : Ilmu Pendidikan UNY.

Telah melaksanakan Penelitian di PKBM Rangsang Imo Joyo dengan Judul :  
" Pengelolaan Program Pendidikan Kesetaraan Paket B dan C di Kelurahan  
Patangpuluhan,Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta"

Yang berlangsung pada bulan Januari – Februari 2016.

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 7 April 2016  
Ketua PKBM Rangsang Imo Joyo

  
Drs/Supatmo Priyo

**LAMPIRAN 2**  
**INSTRUMEN PENELITIAN**  
**(Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi,**  
**Pedoman Dokumentasi)**

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**UNTUK PEMBINA PROGRAM KESETARAAN**

Nama Informan :  
Jabatan :  
Hari/Tanggal :  
Pertanyaan :

1. Apa saja bukti legalitas administratif PKBM Rangsang Imojoyo dalam menyelenggarakan program Kesetaraan paket B dan C?
2. Apa saja bukti legalitas substantif PKBM Rangsang Imojoyo dalam menyelenggarakan program Kesetaraan paket B dan C?
3. Apakah pengelola sudah memenuhi kualifikasi menurut Standar Nasional Pendidikan?
4. Bagaimana **penempatan pengelola** di program kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
5. Bagaimana **penempatan pendidik** di program kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
6. Bagaimana penempatan **tenaga kependidikan** di program kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
7. Bagaimana **pembagian tugas pokok masing-masing pengelola** di program kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
8. Bagaimana **pembagian tugas pokok masing-masing pendidik** di program kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
9. Bagaimana **pembagian tugas pokok masing-masing tenaga kependidikan** di program kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
10. Bagaimana **proses pengusulan bantuan operasional** kegiatan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
11. Apa saja **peran lembaga penyelenggara dalam proses pelaksanaan Program** Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?

12. Bagaimana **pengelolaan Hak Pengelola, Pendidik dan Tenaga Kependidikan** Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
13. Apakah tutor program Kesetaraan Paket B dan C sudah memenuhi **persyaratan tutor** menurut Peraturan Nasional?
14. Apakah narasumber teknis program Kesetaraan Paket B dan C sudah memenuhi **persyaratan narasumber teknis** menurut Peraturan Nasional?

**PEDOMAN WAWANCARA  
UNTUK PENGELOLA PROGRAM KESETARAAN**

Nama Informan :  
Jabatan :  
Hari/Tanggal :  
Pertanyaan :

1. Bagaimana **profil lengkap** PKBM Rangsang Imojoyo?
2. Bagaimana bentuk **struktur organisasi** PKBM Rangsang Imojoyo?
3. Apa saja bukti legalitas administratif PKBM Rangsang Imojoyo dalam menyelenggarakan program Kesetaraan paket B dan C?
4. Apa saja bukti legalitas substantif PKBM Rangsang Imojoyo dalam menyelenggarakan program Kesetaraan paket B dan C?
5. Bagaimana bentuk **pendataan calon warga belajar** Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
6. Bagaimana bentuk **seleksi calon warga belajar** Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
7. Bagaimana bentuk **pendataan calon tutor** Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
8. Bagaimana bentuk **seleksi calon tutor** Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
9. Bagaimana bentuk pendataan calon nara sumber teknis Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
10. Bagaimana bentuk seleksi calon nara sumber teknis Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
11. Bagaimana proses penetapan tempat pembelajaran Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
12. Bagaimana proses penetapan tempat pelatihan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
13. Apakah luas ruang belajar Paket B cukup untuk minimal 15 warga belajar?



14. Apakah luas ruang belajar Paket C cukup untuk minimal 20 warga belajar?
15. Apakah lembaga sudah menyusun sarana pembelajaran yang memadai?
16. Bagaimana rancangan anggaran Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
17. Bagaimana **penempatan pengelola** di program kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
18. Bagaimana **penempatan pendidik** di program kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
19. Bagaimana **penempatan tenaga kependidikan** di program kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
20. Bagaimana **pembagian tugas pokok masing-masing pengelola** di program kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
21. Bagaimana pembagian **tugas pokok masing-masing pendidik** di program kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
22. Bagaimana pembagian **tugas pokok masing-masing tenaga kependidikan** di program kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
23. Bagaimana **proses pengusulan bantuan operasional kegiatan** Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
24. Apa saja peran lembaga penyelenggara dalam proses pelaksanaan Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
25. Apakah warga belajar melaksanakan kewajibannya selama pelaksanaan Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta? Jelaskan!
26. Apakah warga belajar mendapat haknya selama pelaksanaan Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta? Jelaskan!
27. Apakah tutor sudah mengoptimalkan tugasnya selama pelaksanaan (khususnya pembelajaran) Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
29. Bagaimana pengelolaan **Hak** Pengelola, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?

30. Bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran akademik Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta? Sudahkah berdasar kurikulum nasional?
31. Bagaimana proses **pelaksanaan Pelatihan Keterampilan** Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
32. Bagaimana **pelaksanaan biaya pendidikan** Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
33. Bagaimana **evaluasi penyelenggaraan Program Kesetaraan** Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
34. Bagaimana **evaluasi perkembangan warga belajar** Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
35. **Apakah tutor** program Kesetaraan Paket B dan C sudah **memenuhi persyaratan tutor** menurut Peraturan Nasional?
36. **Apakah narasumber teknis** program Kesetaraan Paket B dan C sudah **memenuhi persyaratan narasumber teknis** menurut Peraturan Nasional?

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**UNTUK TUTOR - NARASUMBER TEKNIS**

Nama Informan :  
Jabatan :  
Mata Pelajaran :  
Hari/Tanggal :  
Pertanyaan :

1. Bagaimana pengelompokkan rombongan belajar Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
2. Apakah warga belajar melaksanakan kewajibannya selama pelaksanaan Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta? Jelaskan!
3. Apakah warga belajar mendapat haknya selama pelaksanaan Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta? Jelaskan!
4. Apakah tutor sudah mengoptimalkan tugasnya selama pelaksanaan (khususnya pembelajaran) Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
5. Apakah narasumber teknis sudah mengoptimalkan tugasnya selama pelaksanaan (khususnya pembelajaran) Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
6. Bagaimana pengelolaan Hak Pengelola, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
7. Bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran akademik Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta? Sudahkah berdasar kurikulum nasional?
8. Bagaimana proses pelaksanaan Pelatihan Keterampilan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
9. Bagaimana pelaksanaan biaya pendidikan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?

10. Bagaimana evaluasi penyelenggaraan Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
11. Bagaimana evaluasi perkembangan warga belajar Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?

**PEDOMAN WAWANCARA  
UNTUK KOORDINATOR PROGRAM PAKET B DAN C**

Nama Informan :  
Jabatan :  
Hari/Tanggal :  
Pertanyaan :

1. Bagaimana bentuk pendataan calon warga belajar Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
2. Bagaimana bentuk seleksi calon warga belajar Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
3. Bagaimana bentuk pendataan calon tutor Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
4. Bagaimana bentuk seleksi calon tutor Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
5. Bagaimana bentuk pendataan calon nara sumber teknis Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
6. Bagaimana bentuk seleksi calon nara sumber teknis Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
7. Bagaimana proses penetapan tempat pembelajaran Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
8. Bagaimana proses penetapan tempat pelatihan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
9. Apakah luas ruang belajar Paket B cukup untuk minimal 15 warga belajar?
10. Apakah luas ruang belajar Paket C cukup untuk minimal 20 warga belajar?
11. Apakah lembaga sudah menyusun sarana pembelajaran yang memadai?
12. Bagaimana rancangan anggaran Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
13. Bagaimana pengelompokan rombongan belajar Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?

**PEDOMAN WAWANCARA  
UNTUK WARGA BELAJAR**

Nama Informan :  
Kelas :  
Hari/Tanggal :  
Pertanyaan :

1. Apakah warga belajar melaksanakan kewajibannya selama pelaksanaan Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta? Jelaskan!
2. Apakah warga belajar mendapat haknya selama pelaksanaan Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta? Jelaskan!
3. Apakah tutor sudah mengoptimalkan tugasnya selama pelaksanaan (khususnya pembelajaran) Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
4. Apakah narasumber teknis sudah mengoptimalkan tugasnya selama pelaksanaan (khususnya pembelajaran) Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
5. Bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran akademik Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta? Sudahkah berdasar kurikulum nasional?
6. Bagaimana proses pelaksanaan Pelatihan Keterampilan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
7. Bagaimana evaluasi penyelenggaraan Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
8. Bagaimana evaluasi perkembangan warga belajar Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
9. Apakah tutor program Kesetaraan Paket B dan C sudah memenuhi persyaratan tutor menurut Peraturan Nasional?
10. Apakah narasumber teknis program Kesetaraan Paket B dan C sudah memenuhi persyaratan tutor menurut Peraturan Nasional?

## **PEDOMAN OBSERVASI**

Data yang akan diamati melalui metode observasi ada dua yaitu Sarana Belajar dan Kegiatan Belajar Mengajar. Pertanyaan yang menjadi acuan dalam observasi :

### **1. Sarana Belajar**

- a. Apakah luas ruang belajar Paket B cukup untuk minimal 15 warga belajar?
- b. Apakah luas ruang belajar Paket C cukup untuk minimal 20 warga belajar?
- c. Apakah lembaga sudah menyusun sarana pembelajaran yang memadai?

### **2. Kegiatan Pembelajaran**

- a. Apakah warga belajar melaksanakan kewajibannya selama pelaksanaan Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta? Jelaskan!
- b. Apakah warga belajar mendapat haknya selama pelaksanaan Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta? Jelaskan!
- c. Apakah tutor sudah mengoptimalkan tugasnya selama pelaksanaan (khususnya pembelajaran) Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
- d. Apakah narasumber teknis sudah mengoptimalkan tugasnya selama pelaksanaan (khususnya pembelajaran) Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
- e. Bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran akademik Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta? Sudahkah berdasar kurikulum nasional?
- f. Bagaimana proses pelaksanaan Pelatihan Keterampilan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?

## **PEDOMAN DOKUMENTASI**

Data yang akan diamati melalui metode dokumentasi ada dua yaitu Arsip Lembaga. Pertanyaan yang menjadi acuan dalam dokumentasi :

- a. Apa saja bukti legalitas administratif PKBM Rangsang Imojoyo dalam menyelenggarakan program Kesetaraan paket B dan C?
- b. Apa saja bukti legalitas substantif PKBM Rangsang Imojoyo dalam menyelenggarakan program Kesetaraan paket B dan C?
- c. Apakah pengelola program kesetaraan paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta sudah memenuhi kualifikasi menurut Standar Nasional Pendidikan?
- d. Bagaimana proses pengusulan bantuan operasional kegiatan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
- e. Apakah warga belajar melaksanakan kewajibannya selama pelaksanaan Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta? Jelaskan! (contoh: Presensi)
- f. Apakah tutor sudah mengoptimalkan tugasnya selama pelaksanaan (khususnya pembelajaran) Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta? (contoh : RPP, Silabus)
- g. Apakah narasumber teknis sudah mengoptimalkan tugasnya selama pelaksanaan (khususnya pembelajaran) Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta? (contoh : RPP, Silabus)
- h. Bagaimana evaluasi penyelenggaraan Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta? (contoh : Soal Ujian)
- i. Bagaimana evaluasi perkembangan warga belajar Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta? (contoh : Soal Ujian)



### **LAMPIRAN 3**

### **CATATAN WAWANCARA**

Catatan Wawancara 1

**CATATAN WAWANCARA  
PENGELOLA PROGRAM KESETARAAN**

Nama Informan : Drs. Supatmo Priyo  
Jabatan : Ketua PKBM Rangsang Imo Joyo dan Tutor Fisika  
Hari/Tanggal : Rabu, 6 Januari 2016, Pukul 17.00-17.45 WIB  
Lokasi : SMK Pembangunan Yogyakarta  
Keterangan : Pengelola (SP) → Pengelola Pak Supatmo Priyo

**Catatan**

Peneliti : Bagaimana profil lengkap PKBM Rangsang Imo Joyo?

Pengelola (SP) : ada di blog dan brosur lembaga mbak.

Peneliti : Bagaimana bentuk struktur organisasi PKBM Rangsang Imo Joyo?

Pengelola (SP) : ada. Nanti saya kasih saja hardfile nya.

Peneliti : Apa saja bukti legalitas administratif PKBM Rangsang Imo Joyo dalam menyelenggarakan program Kesetaraan paket B dan C? Misalnya akte notaris, ijin operasional, rekening bank, dan NPWP.

Pengelola (SP) : buktinya ada suratnya tapi tidak saya bawa. Tetapi ada legalitas berupa akte notaris pendirian lembaga yaitu Sutarno, SH. , ijin operasional lembaga dari dinas pendidikan kota sejak tanggal 21 April 2007. Selain itu kita punya rekening bank atas nama lembaga. NPWP juga kita ada : 02.755.322.1-541.000. surat rekomendasi dari Dinas sama dengan ijin operasional.

Peneliti : Apa saja bukti legalitas substantif PKBM Rangsang Imo Joyo dalam menyelenggarakan program Kesetaraan paket B dan C? Misalnya memiliki sekretariat lembaga, susunan pengurus, menyediakan sarpras, menyediakan tutor, dan melaksanakan proses belajar mengajar.

Pengelola (SP) : Sekretariat lembaga secara formal ada di kelurahan tetapi hanya tulisan saja. Prakteknya, pengelola melaksanakan tugas di rumah masing-masing. Pihak kelurahan sudah tahu kalau ada apa-

apa mengenai PKBM maka akan dilarikan ke rumah saya yang tidak jauh dari kelurahan. Kelurahan juga sebagai tempat promosi PKBM. Mengenai uraian tugas, jobdesk belum ada karena memang kita lebih dominan sosialnya. Jadi, kalau saya bagi jobdesk secara organisasi, pasti tidak berjalan. Sementara ini yang bergerak adalah ketua sekretaris bendahara. Jika ada sesuatu dan saya mampu maka saya selesaikan sendiri, tapi jika saya berhalangan baru saya limpahkan ke orang lain. Contohnya ada rapat UNPK (Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan) saya tidak bisa hadir sehingga saya delegasikan pada sekretaris satu. Pengelola juga menyediakan sarana prasarana seperti ruang kelas yakni di sini, di SMK Pembangunan untuk paket B dan C. Tutor dan warga belajar melaksanakan proses belajar mengajar di sini juga. Peminjaman lokasi ini tidak menggunakan biaya, saya hanya kenal dengan pemilik gedung dan perjanjian sebatas kekeluargaan saja.

Peneliti : Bagaimana strategi perekrutan calon warga belajar Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta? Dan bagaimana latar belakang warga belajarnya?

Pengelola (SP) : selain menyebar brosur, kami mensosialisasikan lewat RW dan PKK RW dalam satu pertemuan. Kemarin pernah mengundang PKK se Kelurahan Patangpuluhan dan Ketua RW nya, kemudian kita sosialisasikan PKBM Rangsang Imo Joyo dan bila ada masyarakat yang belum memenuhi pendidikan 12 tahun maka diharap untuk mengikuti program kesetaraan. Latar belakang warga belajar di sini kebanyakan adalah masyarakat putus sekolah yang sedang bekerja dan ibu rumah tangga.

Peneliti : Bagaimana bentuk seleksi calon warga belajar Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?

Pengelola (SP) : Seleksi masuk kita hanya membutuhkan ijazah terakhir sama foto. Hal ini diperuntukkan segala umur asalkan dia masih mampu menempuh pendidikan.

Peneliti : Bagaimana strategi perekrutan calon tutor Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?

Pengelola (SP) : Selama tutor mau membantu kita, ya kita rekrut. Itu saja. Sistem mendapatkannya “*gethok tular*” dari mulut ke mulut saja, misal tutor bahasa Inggris mbak Baroroh ini kenalan dari mbak Endang, dan beliau bersedia menjadi tutor maka kami terima.

Peneliti : Bagaimana bentuk seleksi calon tutor Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?

Pengelola (SP) : Kita tidak terpancang pada ijazah karena kita sifatnya sosial, jadi siapa yang mau dan siap membantu di sini secara sosial maka kita rekrut. Tapi saya juga melihat dari SPikologis dan sifatnya di sosial masyarakat, harus baik, jadi tidak sembarangan juga mengambil tutor. Minimal pendidikan tutor di sini adalah sarjana muda, tapi mayoritas sudah S1 walaupun dasarnya bukan pendidikan secara keseluruhan. Rata-rata satu tutor mengajar satu mata pelajaran tapi karena kondisi PKBM, terpaksa harus ada beberapa yang mengajar dua mata pelajaran.

Peneliti : Bagaimana strategi perekrutan calon nara sumber teknis Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?

Pengelola (SP) : Lembaga tidak memiliki narasumber teknis, tetapi tutor-tutor di sini memiliki keterampilan khusus seperti mbak Subektiningsih (Ning) pintar menari jadi warga belajar yang ingin belajar menari bisa minta diajarkan sama mbak Ning. Selain tutor, ada juga mbak Eri sebagai ketua Batik Patangpuluhan. Perkembangan batiknya sudah bagus jadi warga belajar bisa belajar usaha di sana. Kemudian mas Soleh wirausaha di rumah yakni laundry, pak Joko Purwanto juga mempunyai laundry. Jadi, kami ingin mengarahkan warga belajar menjadi personal yang bisa dipakai di masyarakat. Tinggal warga belajarnya mau konsen ke salah satu bidang tersebut apa tidak. Nanti kita mau tawarkan.

Peneliti : Bagaimana bentuk seleksi calon nara sumber teknis Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?

Pengelola (SP) : tidak ada.

Peneliti : Bagaimana proses penetapan tempat pembelajaran Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?

Pengelola (SP) : Awal tempat pembelajaran dulunya di kelurahan patangpuluhan dan sekarang pindah di SMK Pembangunan Yogyakarta ini. Alasannya karena disana sering berbenturan dengan acara kelurahan sehingga kita tergusur, misal ada rapat kita harus pindah. Padahal, waktu itu warga belajar kita sedang banyak-banyaknya, sekitar tiga puluhan, tidak seperti sekarang. Jadi kami memutuskan untuk pindah kesini.

Peneliti : Bagaimana proses penetapan tempat pelatihan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?

Pengelola (SP) : belum ada.

Peneliti : Apakah luas ruang belajar Paket B cukup untuk minimal 15 warga belajar?

Pengelola (SP) : cukup.

Peneliti : Apakah luas ruang belajar Paket C cukup untuk minimal 20 warga belajar?

Pengelola (SP) : cukup.

Peneliti : Apakah lembaga sudah menyusun sarana pembelajaran yang memadai?

Pengelola (SP) : sudah.

Peneliti : Bagaimana rancangan anggaran Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?

Pengelola (SP): Kita tidak membuat RAPBS secara resmi karena pengelolaan dana PKBM dikelola mandiri lembaga. Kita hanya mengira-ngira menurut pengeluaran sebelumnya. Nanti kalau dalam pelaksanaan ada kurangnya, baru kita carikan. Prinsip kita, selama masih ada dana kita tidak akan memberatkan Warga Belajar. Tetapi kondisi

sekarang membuat kami harus memungut 20 ribu tiap bulan yang diambil dari Warga Belajar. Dana itupun juga tidak mungkin cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional dan untuk hak Tutor. Makanya kita tetap menerima bantuan dari donatur tidak tetap, misal dana didapat saat koordinasi seperti di kelurahan Patangpuluhan. Disitu saya ceritakan kondisi lembaga dan kondisi peserta di kesetaraan, kemudian ada saja yang membantu, walaupun tidak kontinyu.

Peneliti : Bagaimana penempatan pengelola di program kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?

Pengelola (SP) : Pengelola terdiri dari pengurus harian, ketua sekretaris bendahara dan koordinator program, sama satu tambahan lagi petugas piket. Cuma itu saja. Pengaturannya ya kita minta saja. Mba eri kemudian mba dewi dan istri saya, saya suruh piket dihari-hari pembelajaran, Senin Rabu Jum'at dibagi tiga orang.

Peneliti : Bagaimana penempatan pendidik di program kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?

Pengelola (SP) : tutor sudah mengajar sesuai latar belakang pendidikannya.

Peneliti : Bagaimana pembagian tugas pokok masing-masing pengelola di program kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?

Pengelola (SP) : Tujuan piket adalah mengkomunikasikan kondisi tutor siap dan tidaknya. Kalau misalnya tutor belum ada pas warga belajar sudah siap berarti ya dikomunikasikan. Itu terkait piket. Bendahara ya prakteknya yang mengelola dana-dana yang ada, untuk sekretaris ya ada tugasnya tapi prakteknya sering saya kerjakan sendiri.

Peneliti : Bagaimana pembagian tugas pokok masing-masing pendidik di program kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?

Pengelola (SP) : Pendidik mengajar sesuai mata pelajaran yang diampunya. Pendidik atau tutor datang saat jadwalnya ada tetapi tidak selalu seperti itu. Tutor kadang ada kesibukan lain yang membuat mata pelajaran di hari itu dikurangi.

Peneliti : Bagaimana proses pengusulan bantuan operasional kegiatan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?

Pengelola (SP) : Dulu, sebelum vakum kita membuat proposal untuk meminta dana ke Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Tetapi setelah vakum, kita kekurangan warga belajar sehingga kita tidak bisa mengajukan proposal ke Dinas lagi. Syarat minimal dari Dinas Pendidikan untuk mengajukan proposal itu 20 warga belajar. Setelah vakum, warga belajar yang mendaftar makin dikit, tidak sampai 20. Prosedurnya ya saya datang ke Dinas langsung mbak.

Peneliti : Apa saja peran lembaga penyelenggara dalam proses pelaksanaan Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?

Pengelola (SP) : Kami sudah mengusahakan agar program tetap berjalan seperti pengelolaan anggaran, menyusun jadwal pelajaran, menentukan lokasi dan sarana prasarana pembelajaran, mengevaluasi dan sebagainya.

Peneliti : Apakah warga belajar melaksanakan kewajibannya selama pelaksanaan Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta? Jelaskan!

Pengelola (SP) : Pada dasarnya, kemauan warga belajar tidak bisa dipaksakan. Kewajiban mereka adalah belajar tetapi masih sering malas.

Peneliti : Apakah warga belajar mendapat haknya selama pelaksanaan Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta? Jelaskan!

Pengelola (SP) : Pengelola sudah menyiapkan pembelajaran 3 kali seminggu dan lokasi pembelajaran yang memadai di SMK Pembangunan Yogyakarta.

Peneliti : Apakah tutor sudah mengoptimalkan tugasnya selama pelaksanaan (khususnya pembelajaran) Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?

Pengelola (SP) : Sejauh ini tutor tidak selalu membuat RPP, hanya berjalan saja sesuai target. Tutor tetap mengacu pada SKL, saya hanya mengontrol itu saja. Terutama bagi warga belajar yang mau ujian, kita fokuskan pada SKL nya.

Peneliti : Apakah narasumber teknis sudah mengoptimalkan tugasnya selama pelaksanaan (khususnya pembelajaran) Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?

Pengelola (SP) : tidak ada narasumber teknis

Peneliti : Bagaimana pengelolaan Hak Pengelola dan Pendidik Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?

Pengelola (SP) : Anggaran larinya ke gaji tutor dan pelaksanaan pembelajaran sehari-hari. Kalau tutor membutuhkan fotocopy, selama itu tidak banyak, pengelola bisa membantu. Tetapi tutor disini sering tidak tega sehingga fotocopy mereka sendiri yang nanggung. Semua tutor sudah paham bahwa rasa sosial disini lebih tinggi sehingga untuk masalah seperti itu ditangani sendiri.

Peneliti : Bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran akademik Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta? Sudahkah berdasar kurikulum nasional?

Pengelola (SP) : Materi dan sarana pembelajaran, kita hanya menunjukkan softfile nya, misal kurikulum. File kurikulum bahasa inggris, kita siapkan file tentang RPP bahasa inggris dan sebagainya. Syukur, beliaunya yang sudah guru, membuat sendiri. Kita tidak mengelola secara kelembagaan, hal itu dikembalikan ke tutor.



Peneliti : Bagaimana proses pelaksanaan Pelatihan Keterampilan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?

Pengelola (SP) : Belum ada pelatihan keterampilan yang diterapkan untuk program kesetaraan.

Peneliti : Bagaimana pelaksanaan biaya pendidikan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?

Pengelola (SP) : **OUT of the RECORD**. Kita bisa berjalan seperti sekarang ini, karena dulu pas kita memiliki Warga Belajar banyak dan mendapat dana dari Dinas dan sebagainya, dalam pemakaian dana tersebut tidak kita habiskan, masih ada sisa. Kemudian kita vakum. Nah setelah itu, kita coba aktif kembali dengan dana dari sisa yang dahulu, ditambah dana iuran dari warga belajar 20 ribu per bulan.

Peneliti : Bagaimana evaluasi penyelenggaraan Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?

Pengelola (SP) : Ada rakor menjelang evaluasi tiap EHB atau tiap semester sekali bersama bu Lurah Patangpuluhan tetapi beliau tidak selalu hadir. Seringnya rakor tersebut dihadiri tutor dan pengelola juga pimpinan lain. Selain itu ada juga ada koordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta berupa pelatihan kesiapan EHB tiap akhir semester. Initi dari pertemuan itu adalah memberi info persiapan EHB, kalau pesertanya banyak harus ada tim, kalau tidak ya pengelola yang mengurus. Lalu soal-soal diambil di Dinas sebelum mapel diujikan.

Peneliti : Bagaimana evaluasi perkembangan warga belajar Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?

Pengelola (SP) : Ujian Nasional biasanya dijadikan satu se-kota. Soal ujian sama seperti formal. Ujian kesetaraan dulu tahun 2014-2015, kita hanya mengikuti satu warga belajar paket C tetapi satu orang tersebut Alhamdulillah terbaik se-Kota Yogyakarta. Hal itu membantu nama Rangsang Imo Joyo jadi lebih baik. Dia putus sekolah, asli Wonosobo, familinya tutor. Yang jadi masalah :

harapan pemerintah memang menyamakan, bahwa kesetaraan itu sama dengan reguler, sehingga soal-soal juga sama, lha wong SKL nya juga sama. Cuma yang membuat tetap beda, jadi SKL nya sama tetapi untuk kesetaraan yang membuat orang PLS, walaupun PLS itu orang-orangnya juga dari Dinas kota. Saya pikir soalnya sama, kalau dia disuruh membuat soal UN dan dia juga pernah ikut membuat soal paket, saya rasa jatuhnya juga sama.

Peneliti : Apakah tutor program Kesetaraan Paket B dan C sudah memenuhi persyaratan tutor menurut Peraturan Nasional?

Pengelola (SP) : Dari semua tutor, kebanyakan sudah S1, tapi ada yang non pendidikan. Jadi, dia bukan guru tetapi sanggup menjadi tutor disini. Walau begitu latar belakang pendidikan sama dengan yang diajarkan pada warga belajar.

Peneliti : Apakah narasumber teknis program Kesetaraan Paket B dan C sudah memenuhi persyaratan tutor menurut Peraturan Nasional?

Pengelola (SP) : tidak ada narasumber teknis.

**CATATAN WAWANCARA  
WARGA BELAJAR**

Nama Informan : Viani Gupita Sari (16 Tahun)  
Kelas : Paket B Kelas VII  
Hari/Tanggal : Rabu, 27 Januari 2016, Pukul 16.30-17.00 WIB  
Lokasi : SMK Pembangunan Yogyakarta  
Keterangan : Viani Gupita Sari → VG

**Catatan**

**Peneliti** : Apakah warga belajar melaksanakan kewajibannya selama pelaksanaan Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta? Jelaskan!

**VG** : Saya masuk disini mulai kelas 7, rumahnya daerah sini. Info tentang kesetaraan karena dulu ikut PKBM terus sama pendampingnya dikasih tau kalau di sini ada paket, jadi saya mendaftar. Saya ikut kesetaraan karena saya putus sekolah dan kebetulan ada informasi kejar paket di Rangsang Imo Joyo. Syaratnya ijazah, nilai akhir, sama foto. Daftarnya gratis. Seminggu masuk rata-rata dua kali. Masuknya tergantung hujannya mbak. Kalau terang ya berangkat tapi kalau hujan deras, banyak nggak masuknya.

**Peneliti** : Apakah warga belajar mendapat haknya selama pelaksanaan Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta? Jelaskan!

**VG** : Kalau ada materi apa gitu difotocopiin sama tutornya. Kita nggak pernah ganti uang fotocopy.

**Peneliti** : Apakah tutor sudah mengoptimalkan tugasnya selama pelaksanaan (khususnya pembelajaran) Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?

**VG** : Setiap pelajaran, tutor kebanyakan hadir, kan ada jadwalnya sendiri-sendiri tapi pernah ada jadwal pelajaran yang diganti karena tutornya

nggak hadir. Buku seringnya bawa sendiri atau dipinjem dari kecamatan. Tapi jarang pakai juga, seringnya materi langsung diberikan oleh tutor.

**Peneliti** : Apakah narasumber teknis sudah mengoptimalkan tugasnya selama pelaksanaan (khususnya keterampilan) Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?

**VG** : tidak ada narasumber teknis.

**Peneliti** : Bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran akademik Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta? Sudahkah berdasar kurikulum nasional?

**VG** : Pelajaran dimulai habis 'Ashar dan biasanya sampai setengah enam, mau Maghrib itu. Ada jadwal pelajaran buat tiap pertemuan, tapi nggak pasti sesuai jadwal. Kadang tergantung tutor yang hadir, tapi tutor juga jarang nggak hadirnya. Intinya program paket di sini, satu paket tiga tahun, tapi bedanya sama formal kita seminggu masuk tiga kali.

**Peneliti** : Bagaimana proses pelaksanaan Pelatihan Keterampilan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?

**VG** : Di sini belum pernah ada pelatihan keterampilan. Baru dengar juga tentang itu, belum ada informasi.

**Peneliti** : Bagaimana evaluasi perkembangan warga belajar Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?

**VG** : Tutor nggak pernah kasih ulangan-ulangan. Cuma nanti abis materi-materi biasanya dikasih soal gitu. Misal sekolah formal jadwal ujian, kita juga ada ujian.

**Peneliti** : Apakah tutor program Kesetaraan Paket B dan C sudah memenuhi persyaratan tutor menurut Peraturan Nasional?

**VG** : kurang tahu mbak, tapi ngajarnya enak-enak.

**Peneliti** : Apakah narasumber teknis program Kesetaraan Paket B dan C sudah memenuhi persyaratan tutor menurut Peraturan Nasional?

**VG** : tidak ada narasumber teknis.

**Peneliti** : Apa kesan anda terhadap program Kesetaraan Paket B dan C selama ini?

**VG** : Belajar di sini enak karena tutornya bagus. Nggak enaknya itu, saya kan Paket B, tapi warga belajar Paket B yang lain jarang sekali masuk jadi saya jarang ada temennya.

**CATATAN WAWANCARA  
WARGA BELAJAR**

Nama Informan : Rumiya (26 Tahun)  
Kelas : Paket C Kelas XII  
Hari/Tanggal : Rabu, 6 Januari 2016, Pukul 16.30-17.00 WIB  
Lokasi : SMK Pembangunan Yogyakarta  
Keterangan : Rumiya → RM

**Catatan**

**Peneliti** : Apakah warga belajar melaksanakan kewajibannya selama pelaksanaan Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta? Jelaskan!

**RM** : Warga belajar masuk tiga kali seminggu, tiap hari Senin, Rabu, Jum'at. Yang hadir tiap Paket di satu pertemuan kadang dua kadang tiga anak. Paket C punya warga belajar 8 anak. Daftar paket ini ke rumah Pak Patmo. Menyerahkan KK dan Foto. Ada warga belajar yang dari awal paket dan ada yang dari tengah-tengah. Informasi tentang Kesetaraan di sini diperoleh dari orang dekat. Rata-rata warga belajar Paket C bekerja dan ibu rumah tangga. warga belajar bayar 20 ribu per bulan.

**Peneliti** : Apakah warga belajar mendapat haknya selama pelaksanaan Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta? Jelaskan!

**RM** : Media dan materi pelajaran sudah disiapkan oleh tutor. Kita nggak perlu ganti untuk fotocopy, sudah disiapkan sama tutor atau pengelola.

**Peneliti** : Apakah tutor sudah mengoptimalkan tugasnya selama pelaksanaan (khususnya pembelajaran) Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?

**RM** : Tutor kadang-kadang telat misal datang jam setengah 5, kadang juga nggak datang tapi jarang. Seringnya tutor selalu datang. Satu tutor

mengajar satu mata pelajaran. Hanya satu yang ngrapel yaitu bu Ning, mengajar Sosiologi dan Sejarah.

**Peneliti** : Apakah narasumber teknis sudah mengoptimalkan tugasnya selama pelaksanaan (khususnya pembelajaran) Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?

**RM** : tidak ada narasumber teknis

**Peneliti** : Bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran akademik Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta? Sudahkah berdasar kurikulum nasional?

**RM** : Masuknya, kalau nggak molor ya nggak sampai dua jam. Kalau tutor telat bisa mulai setengah lima sampai maghrib. Satu pertemuan bisa satu atau dua pelajaran, tergantung tutor yang datang. Untuk tiap pertemuan yang seminggu 3 kali, didampingi oleh petugas piket dari pengelola. Senin : Bu Mamok (Istri Pak Supatmo), Rabu: Bu Eri (Sekretaris 2), Jumat: Bu Dewi. Di sini jurusan Paket C itu IPS, nggak banyak praktek jadi belum pernah ada praktek pembelajaran.

**Peneliti** : Bagaimana proses pelaksanaan Pelatihan Keterampilan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?

**RM** : Nggak ada pembelajaran praktek selama tiga tahun ini dan belum ada juga pelatihan bekal keterampilan. Kayaknya masih fokus buat pelajaran di kelas.

**Peneliti** : Bagaimana evaluasi perkembangan warga belajar Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?

**RM** : Ulangan di akhir, tidak ada di sela-sela pembelajaran. Misalnya UKK atau Ulangan Akhir Semester. Per BAB biasanya hanya dikasih soal-soal biasa untuk dikerjakan di kelas. Kelas 12 semua, ujian kesetaraan sekitar bulan maret 2016, Ujian Nasional Pend Kesetaraan biasanya satu Jogja jadi satu. Habis ujian, ambil ijazah nanti bayar sekitar satu jutaan, kata temenku di sekolah-sekolah lain. Kejar paket rata-rata SMA, nggak ada SMK kan.

**Peneliti** : Apakah tutor program Kesetaraan Paket B dan C sudah memenuhi persyaratan tutor menurut Peraturan Nasional?

**RM** : Tiap tutor mengajar sesuai ijasahnya. Paket B dan C belajar di satu kelas dengan tutor yang berputar, pelajaran yang beda, dan tugas yang beda-beda juga.

**Peneliti** : Apakah narasumber teknis program Kesetaraan Paket B dan C sudah memenuhi persyaratan tutor menurut Peraturan Nasional?

**RM** : Tidak ada narasumber teknis.

**Peneliti** : Apa kesan anda terhadap program Kesetaraan Paket B dan C selama ini?

**RM** : Saya suka belajar di sini, tidak ribet dan tutornya santai waktu ngajar. Materi itu jadi nggak terlalu berat pas dibikin diskusi sambil ketawa-ketawa gitu mbak. Nggak enaknya, kalo menurut saya waktu tutor telat datang. Tutor seringnya telat, jadi pelajaran molor, bisa sampai maghrib.



**CATATAN WAWANCARA  
TUTOR PENDIDIKAN KESETARAAN**

Nama Informan : Soleh Bukhori, SE  
Jabatan : Sekretaris 1 dan Tutor  
Mata Pelajaran : Akuntansi  
Hari/Tanggal : Jum'at 8 Januari 2016, Pukul 16.30-17.00 WIB  
Lokasi : SMK Pembangunan Yogyakarta  
Keterangan : Soleh Bukhori → **SB**

**Catatan**

**Peneliti** : Bagaimana pengelompokkan rombongan belajar Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?

**SB** : Rombel bukan ditentukan oleh pengelola tetapi sesuai ijazah, misal mbaknya dulu ijazah SMP jadi masuk sini bisa ambil Paket C kelas 10. Misal berhenti di tengah, Kelas 10 mau lanjut kelas 11 bisa asal ada raport terakhir kelas 10. Jadi bisa masuk disini di Paket C kelas 11.

**Peneliti** : Apakah warga belajar melaksanakan kewajibannya selama pelaksanaan Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta? Jelaskan!

**SB** : Seperti ini kalau warga belajar tidak ada kemauan ya mau gimana lagi, semua tergantung dari kemauan warga belajarnya. Kalau yang minatnya ada itu ya dia rajin. Kalau tidak hujan pembelajaran berhenti, kalau tidak deras ya berangkat. Yang rajin di paket C kelas 12 ada 2. Yang paket B ada beberapa. Tapi kebanyakan perempuan, yang laki-laki agak kurang. Sebenarnya dorongan keluarga juga menentukan, kalau keluarga mendukung ya dia bisa rajin, kalau tidak ya kurang. Kita tidak bisa terlalu memaksa warga belajar untuk rajin karena semua itu tergantung minat dari warga belajar sendiri. Faktor X seperti itu yang sering mempengaruhi. Padahal dari dinas kota sudah diarahkan untuk

menempuh pendidikan di sini. Ada 2 kalau nggak salah, kelas 8 nya. kelas 9 ada satu dan mau Ujian Nasional. Kelas sebetulnya 10 ada 1 tapi nggak ikut sampai Ujian karena kesulitan transportasi. Motivasi warga belajar ada yang melanjutkan pendidikan, tapi ada juga bapak/ibu bertujuan untuk tunjangan jabatan, tunjangan pensiun, dan sebagainya. Motivasi diluar melanjutkan malah lebih rajin karena ada motif tanda petiknya sehingga sangat membutuhkan ijazah paket.

**Peneliti** : Apakah warga belajar mendapat haknya selama pelaksanaan Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta? Jelaskan!

**SB** : Dasarnya, PKBM ini bukan hanya lingkup lokal tetapi nasional, jadi siapapun orang yang ingin menempuh pendidikan paket bisa mendaftar. Contohnya ada warga belajar kita dari Wonogiri. Kebanyakan warga belajar bekerja, makanya hanya beberapa yang ikut sampai akhir, beberapa ada yang berhenti di tengah semester. Yang berhenti di tengah semester tidak bisa ikut UN, bukan masalah minimal hadir tetapi kehadiran saat ujian, misal ikut saat UTS, UKK, dan UN itu sendiri. Kehadiran sebenarnya memang diperhitungkan tetapi praktek di lapangan tidak bisa terlalu diterapkan karena ini pendidikan nonformal.

**Peneliti** : Apakah tutor sudah mengoptimalkan tugasnya selama pelaksanaan (khususnya pembelajaran) Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?

**SB** : RPP/Silabus sebetulnya mirip sekolah formal, tetapi kita jarang membuat. Kita jalan aja sesuai ancer-ancer dari Dinas. Kita juga mengacu pada buku pelajaran atau materi di sekolah formal.

**Peneliti** : Apakah narasumber teknis sudah mengoptimalkan tugasnya selama pelaksanaan (khususnya pembelajaran) Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?

**SB** : tidak ada narasumber teknis.

**Peneliti** : Bagaimana pengelolaan Hak Pengelola dan Pendidik Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?

- SB** : Tutor di sini sebenarnya harus berdasarkan keikhlasan karena kita lembaga yang mengusung rasa sosial. Hak tutor dan pengelola adalah mendapat imbalan sebagai ganti lelah gitu saja mbak.
- Peneliti** : Bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran akademik Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta? Sudahkah berdasar kurikulum nasional?
- SB** : Kurikulum yang dipakai dari dulu adalah KTSP. Ini karena berdirinya PKBM sama dengan saat berlakunya KTSP. Minimal 30 menit per mapel. Satu kali pertemuan ada 2-3 mapel. Karena seminggu Cuma 3 kali pertemuan, jadi diharapkan sekali pertemuan ada paling tidak 3 mapel. Buku difasilitasi dari Dinas. Untuk materi ya itu masing-masing tutor yang mengatur. Untuk soal-soal kita dektekan untuk selanjutnya dikerjakan warga belajar.
- Peneliti** : Bagaimana proses pelaksanaan Pelatihan Keterampilan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
- SB** : Untuk praktek pelajaran, kita arahkan ke mapel yang tidak ada prakteknya. Seperti paket C itu kelas 11 dan 12 dimasukkan ke program IPS sehingga tidak banyak praktek pelajaran. Dulu pernah, waktu warga belajarnya banyak kita mau bikin praktek, tetapi semakin kesini ternyata minat warga belajar semakin menurun sehingga niat itu kita urungkan.
- Peneliti** : Bagaimana pelaksanaan biaya pendidikan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
- SB** : Biaya pendidikan dikelola langsung oleh pengelola. Biaya pendidikan dianggarkan untuk Hak Tutor dan operasional sehari-hari.
- Peneliti** : Bagaimana evaluasi penyelenggaraan Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
- SB** : Koordinasi, rapat antar pengelola jarang kumpul karena kesibukan masing-masing, lewat *whatsapp* seringnya.
- Peneliti** : Bagaimana evaluasi perkembangan warga belajar Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?

- SB** : Ujian sama dengan sekolah formal. Hanya proses di sekolah nonformal yang agak berbeda.
- Peneliti** : Hal apa yang sekiranya menjadi masalah dalam pelaksanaan program kesetaraan ini?
- SB** : Hanya tutor sering bongkar pasang, tetapi pengelola utama tetap P. Patmo, saya, Bu Dewi dari awal. Kemudian karena kesibukan masing-masing maka sekretaris dan bendahara dibuat *double*, jadi ada 1 dan 2. Saya sebagai Sekretaris 1 di PKBM ini. Kesulitan juga ada di warga belajar yang selain kurangnya kemauan, biasanya malas belajar, kesulitan transportasi, dan itu kebanyakan anak-anak. Walaupun ada usia sekolah di pendidikan kesetaraan ini, kita tidak menanyakan secara detail tentang alasan mengikuti paket karena yang kita inginkan adalah niatnya untuk belajar.
- Peneliti** : Bagaimana pandangan bapak terhadap Program Kesetaraan di PKBM ini?
- SB** : PKBM ini satu-satunya di kecamatan Wirobrajan. Sebenarnya ada satu lagi, yang satunya lebih dulu berdiri, tetapi berhenti karena penggerakanya hanya berpusat di satu orang yang sekarang sudah sepuh. PKBM ini secara formal berada di bawah naungan kelurahan Patangpuluhan. Pembentukan PKBM ini adalah saat rapat koordinasi di kelurahan. Sebelum ditetapkan, sudah ditentukan gambaran struktur pengelolanya. Sebenarnya unsur dari pengelola itu banyak tapi mengacu pada dinas, hanya ada 3 pengelola, yang lainnya tutor. Pembentukan ini melibatkan kelurahan, undangan dari kelurahan.

**CATATAN WAWANCARA  
TUTOR PENDIDIKAN KESETARAAN**

Nama Informan : Baroroh Barid, S.Pd  
Jabatan : Tutor  
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris  
Hari/Tanggal : Jum'at, 8 Januari 2016, Pukul 17.00-17.30 WIB  
Lokasi : SMK Pembangunan Yogyakarta  
Keterangan : Baroroh Barid → **BB**

**Catatan**

**Peneliti** : Bagaimana pengelompokkan rombongan belajar Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?

**BB** : Masuknya kelas 7, 8, 9, dan seterusnya itu ditentukan sama pengelola.

**Peneliti** : Apakah warga belajar melaksanakan kewajibannya selama pelaksanaan Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta? Jelaskan!

**BB** : Warga belajar ada yang tertib, ada yang semangat, tapi kebanyakan kurang. Alasannya kurang tertarik, kadang hanya datang pas ujian saja, hari-hari biasa tidak pernah mengikuti. Tapi walau begitu tetap dianggap warga belajar.

**Peneliti** : Apakah warga belajar mendapat haknya selama pelaksanaan Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta? Jelaskan!

**BB** : Modul atau materi disiapkan oleh masing-masing tutor. Buku belum ada. Tutor baru memberi materi sama tugas-tugas.

**Peneliti** : Apakah tutor sudah mengoptimalkan tugasnya selama pelaksanaan (khususnya pembelajaran) Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?

**BB** : Kebanyakan tutor adalah guru sekolah formal. Tutor disini kayaknya tidak semua sesuai backgroundnya, ada beberapa yang bukan dari pendidikan. Tetapi mayoritas sudah minimal S1, hanya satu yang belum karena dia masih menyelesaikan pendidikan S1 nya tetapi sudah bersedia menjadi tutor disini. Masalah tentang tutor adalah sering gonta-ganti. Sistemnya kaya *freelance* atau *parttime*, nggak lama lalu pindah. Dulu caranya saya bisa mengajar di sini, saya dikasih tau saudara saya yang ikut kegiatan ini. Lalu ada lowongan karena ada tutor bahasa inggris yang keluar jadi saya mendaftar. Bu endang bhs Inggris tetapi sekarang tidak aktif. Tutor belum membuat RPP, tapi kemarin ditawarkan RPP dibuatkan oleh pengelola. Walau begitu tiap tutor punya target materi minimal yang harus dikuasai warga belajar untuk persiapan Ujian.

**Peneliti** : Apakah narasumber teknis sudah mengoptimalkan tugasnya selama pelaksanaan (khususnya pembelajaran) Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?

**BB** : Tidak ada narasumber teknis.

**Peneliti** : Bagaimana pengelolaan Hak Pengelola dan Pendidik Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?

**BB** : Dalam hal gaji, per bulan, ngitungnya per pertemuan lalu dibayar di akhir bulan. Untuk tutor per pertemuan atau sekali datang diitung satu kali, walaupun sehari mengajar beberapa kali tapi tetap diitung satu kali. Nominalnya per pertemuan Rp 15.000,- . sumber uangnya dari donatur dan lain-lain sehingga jumlahnya tidak pasti. Masalah nominal bukan prioritas karena yang diutamakan adalah sosialnya.

**Peneliti** : Bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran akademik Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta? Sudahkah berdasar kurikulum nasional?

**BB** : Pertemuan per mata pelajaran kadang masing-masing setengah jam. Tapi fleksibel misal hanya ada dua tutor yang hadir maka waktu per mapel lebih lama.

- Peneliti** : Bagaimana proses pelaksanaan Pelatihan Keterampilan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
- BB** : Praktek-praktek pelajaran belum ada. Belum pernah. Keterampilan belum ada disini.
- Peneliti** : Bagaimana pelaksanaan biaya pendidikan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
- BB** : Uang fotocopy materi dan sebagainya sebenarnya suruh dihitung lalu diserahkan ke pengelola tetapi untuk tutor baru seperti saya enak pake uang sendiri aja dulu.
- Peneliti** : Bagaimana evaluasi penyelenggaraan Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
- BB** : Saya belum pernah ikut evaluasi pengelola karena saya baru. Tapi tadi ada rapat antara pengelola dan pihak kelurahan. Awalnya mau disini tapi pindah ke Kecamatan sepertinya.
- Peneliti** : Bagaimana evaluasi perkembangan warga belajar Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
- BB** : Karena masih awal belum ada ulangan, tapi mungkin nanti akan ada ujian ujian. Soal-soal kelas 9 dan 12 mengacu pada UN, untuk kelas dibawahnya mengacu pada UKK.

**CATATAN WAWANCARA  
PEMBINA PROGRAM KESETARAAN**

Nama Informan : Dodo Limono, S.Pd  
Jabatan : Sekretaris Kelurahan Patangpuluhan  
Hari/Tanggal : Jumat, 29 Januari 2016, Pukul 08.15-08.30 WIB  
Lokasi : Kantor Kelurahan Patangpuluhan  
Keterangan : Dodo Limono → **DL**

**Catatan**

**Peneliti** : Apa saja bukti legalitas administratif PKBM Rangsang Imo Joyo dalam menyelenggarakan program Kesetaraan paket B dan C?

**DL** : Masalah ini Pak Patmo tahu semuanya.

**Peneliti** : Apa saja bukti legalitas substantif PKBM Rangsang Imo Joyo dalam menyelenggarakan program Kesetaraan paket B dan C?

**DL** : Itu juga tanya Pak Patmo saja mbak.

**Peneliti** : Apakah pengelola program kesetaraan paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta sudah memenuhi kualifikasi menurut Standar Nasional Pendidikan?

**DL** : Saya rasa sudah karena mayoritas dari mereka adalah pendidik yang paham betul atas pendidikan.

**Peneliti** : Bagaimana penempatan pengelola di program kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?

**DL** : itu secara musyawarah saja mbak.

**Peneliti** : Bagaimana penempatan pendidik di program kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?

**DL** : Pengelola yang tahu hal itu.



- Peneliti** : Bagaimana pembagian tugas pokok masing-masing pengelola di program kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
- DL** : Pengelola yang tahu hal itu.
- Peneliti** : Bagaimana pembagian tugas pokok masing-masing pendidik di program kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
- DL** : Pengelola yang tahu hal itu.
- Peneliti** : Bagaimana proses pengusulan bantuan operasional kegiatan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
- DL** : Pak Patmo yang tahu betul tentang itu mbak.
- Peneliti** : Apa saja peran lembaga penyelenggara dalam proses pelaksanaan Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
- DL** : Salah satunya menyediakan lokasi pembelajaran. Lokasi pembelajaran ada di balai kecamatan, atau memakai ruangan kantor kelurahan. Tergantung mana yang *sele*, itu yang dipakai. Kalau satunya nggak bisa ya pakai satunya lagi.
- Peneliti** : Bagaimana pengelolaan Hak Pengelola dan Pendidik Program Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
- DL** : Mengenai hal itu, dikelola langsung oleh pengelola.
- Peneliti** : Apakah tutor program Kesetaraan Paket B dan C sudah memenuhi persyaratan tutor menurut Peraturan Nasional?
- DL** : Semua tutor sudah baik. Untuk menjadi tutor, syaratnya adalah bersedia. Yang mau jadi tutor, silahkan.
- Peneliti** : Apakah narasumber teknis program Kesetaraan Paket B dan C sudah memenuhi persyaratan tutor menurut Peraturan Nasional?
- DL** : tidak ada narasumber teknis di Rangsang Imo Joyo.
- Peneliti** : Bagaimana kondisi warga belajar di PKBM Rangsang Imo Joyo?
- DL** : Dulu peserta yang ikut PKBM ada banyak, tetapi sekarang jumlahnya menyusut, padahal sudah kita gratiskan semuanya. Peserta yang

mengikuti pendidikan kesetaraan tidak melulu hanya dari kelurahan Patangpuluhan atau Kecamatan Wirobrajan, tetapi semua boleh ikut. Kami terbuka, siapa saja yang ingin belajar silahkan daftar ke sini. Cara mendapat peserta adalah dengan pengumuman untuk ikut PKBM, sifatnya himbauan mbak, ditujukan kepada ketua RT dan RW yang ada di kelurahan Patangpuluhan. Kami tidak mengharuskan, semua tergantung kesadaran masyarakat.

**Peneliti** : Bagaimana bentuk pembinaan program kesetaraan di PKBM Rangsang Imo Joyo?

**DL** : PKBM ada di bawah naungan kelurahan Patangpuluhan tetapi kita tidak terlalu ikut dalam pengelolaannya. Semua diserahkan pada pengelola terutama Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Pembinaan untuk PKBM tidak intens. Tetapi Bu Lurah yang biasa memimpin rapat koordinasi beberapa lembaga di bawah naungan kelurahan salah satunya PKBM. Sekretariat lembaga, bisa lewat sini, kelurahan Patangpuluhan mbak. Tetapi sebenarnya semua dilakukan di rumah Pak Patmo yang kebetulan tidak jauh juga dari kantor kelurahan. Jadi semisal ada keperluan yang menyangkut PKBM atau kesetaraan, maka nanti akan kami sambungkan langsung ke rumah Pak Patmo. Seperti itu mbak. Untuk masalah evaluasi, dilakukan melalui musyawarah dengan pengelola, rapat dipimpin bu Lurah langsung. Itu resminya, tetapi jika sehari-hari ada sesuatu hal yang perlu dibicarakan ya biasanya langsung dikomunikasikan.

**Peneliti** : Bagaimana hubungan pembina dengan pengelola program kesetaraan?

**DL** : Hubungan Pembina dengan Pengelola sangat harmonis, saya sendiri dengan Pak Patmo sudah seperti bapak dan anak mbak. Beliau adalah pendidik atau guru yang sebenar-benarnya. Pengelolaan di sini bagus karena semua sistemnya kekeluargaan, makanya bisa bertahan sampai sekarang.

**Peneliti** : Apa saja peran pembina dalam membantu pembelajaran program kesetaraan?

**DL** : Kelurahan hanya memfasilitas apa kebutuhan PKBM. Tapi kita hanya membantu hal-hal tersebut saja, seperti ruangan atau tempat dan beberapa surat-menyurat kebutuhan administrasi PKBM. Untuk masalah modul, kelurahan tidak membantu banyak, itu Pak Patmo sendiri yang mengkomunikasikan langsung pada Dinas Pendidikan Kota, tidak melalui kami.

**CATATAN WAWANCARA  
KOORDINATOR PROGRAM KESETARAAN**

Nama Informan : Fitria Ulfa, S.Si  
Jabatan : Koordinator Paket B dan Tutor Matematika  
Hari/Tanggal : Jum'at, 29 Januari 2016, Pukul 17.15-17.45 WIB  
Lokasi : SMK Pembangunan Yogyakarta  
Keterangan : Fitriana Ulfa → FU

**Catatan**

**Peneliti** : Bagaimana bentuk perekrutan calon warga belajar Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?

**FU** : Sebenarnya di tiap RW gitu pasti ada sosialisasi. Dari kelurahan pasti ada kerjasama dari masing-masing wakil RT RW yang dikumpulkan, misalnya pas ada rapat PKK atau rapat RT RW akan disosilaisakan tentang PKBM ini. Ada juga brosurnya.

**Peneliti** : Bagaimana bentuk seleksi calon warga belajar Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?

**FU** : Tidak ada seleksi Warga belajar, yang penting ada raport terakhir.

**Peneliti** : Bagaimana bentuk perekrutan calon tutor Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?

**FU** : Cara merekrut tutor informasi secara lisan mbak, jadi tutor yang mau pergi mengenalkan temannya untuk menggantikan. Kebanyakan mahasiswa. Tutor sering bongkar pasang, kecuali tutor yang berdomisili sekitar sini. Satu tutor paling tidak mengajar 2 kali seminggu.

**Peneliti** : Bagaimana bentuk seleksi calon tutor Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?

**FU** : Tidak ada seleksi tutor secara khusus karena pengelola sudah tau latar belakang tutor.

- Peneliti** : Bagaimana bentuk perekrutan calon nara sumber teknis Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
- FU** : Sebenarnya kita juga ingin warga belajar memiliki keterampilan tertentu, tapi dalam pelaksanaan belum terlaksana. Kita masih berencana untuk mewujudkan itu.
- Peneliti** : Bagaimana bentuk seleksi calon nara sumber teknis Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
- FU** : Belum ada.
- Peneliti** : Bagaimana proses penetapan tempat pembelajaran Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
- FU** : Dulu sempat kita kesulitan dalam tempat, karena dulu warga belajar kita banyak, kita pindah-pindah dari gedung serbaguna kelurahan ke kantor kecamatan, muter-muter. Selanjutnya tahun 2015 kita putuskan untuk pindah di sini, SMK Pembangunan agar lebih pasti. Kita hanya memakai satu sampai dua kelas tiap pembelajarannya.
- Peneliti** : Bagaimana proses penetapan tempat pelatihan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
- FU** : Tidak ada proses pelatihan keterampilan maupun praktek mata pelajaran.
- Peneliti** : Apakah luas ruang belajar Paket B cukup untuk minimal 15 warga belajar?
- FU** : Cukup.
- Peneliti** : Apakah luas ruang belajar Paket C cukup untuk minimal 20 warga belajar?
- FU** : Cukup.
- Peneliti** : Apakah lembaga sudah menyusun sarana pembelajaran yang memadai?
- FU** : Cukup.
- Peneliti** : Bagaimana rancangan anggaran Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?

- FU** : Sepertinya kemarin ada membuat proposal, tapi itu pengelola sendiri yang melaksanakan. Itu kadang proposal sudah dibuat berdasar jumlah warga belajarnya. Kan kalau diatas 20 bisa diajukan ke Dinas, kalau dibawahnya diajukan ke umum. Warga belajar ada yang berumah tangga, bekerja, putus sekolah, anak binaan, dan sebagainya.
- Peneliti** : Bagaimana pengelompokan rombongan belajar Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
- FU** : Misal ada 6 kelas masuk semua, saya tidak memakai enam kelas juga, saya hanya memakai satu dua kelas kemudian saya bagikan materi atau soal, biar saya juga tidak bolak-balik.
- Peneliti** : Bagaimana kondisi warga belajar Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
- FU** : Sebenarnya masih ada banyak anak-putus sekolah tetapi minatnya yang kurang. Warga belajar ada yang berumah tangga, bekerja, putus sekolah, anak binaan, dan sebagainya.
- Peneliti** : Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
- FU** : RPP/Silabus, dari pengelola sudah menyiapkan karena pengelola ada pertemuan di Dinas. Hanya saja pelaksanaan tidak bisa optimal, karena kita hanya 3 kali seminggu. Pembelajaran enak langsung belajar melalui soal. Pembahasan tentang RPP sendiri mungkin sudah ada, tapi bukan untuk dibahas terus, tidak. Yang penting manut SKL. Materinya disamakan sama pendidikan formal, cuma kalau formal ada IPA dan IPS, di sini cuma ada IPS saja mbak.
- Peneliti** : Bagaimana evaluasi belajar Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?
- FU** : Untuk ulangan harian itu diserahkan sama tutor, UKK soalnya dari Dinas. Waktunya untuk semua PKBM itu sama. Dulu 2014-2015 dikasih soal dan waktunya terserah PKBM, tapi kalau sekarang soal dan waktu ditentukan Dinas, ada jeda waktu untuk ujian misalnya ujian haru dilaksanakan antara tanggal 10-20.

**Peneliti** : Bagaimana hak untuk tutor Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?

**FU** : Materi, balikan dari sini. Kalau di sini ya memang ada, tapi ya sekedarnya saja. Tutor sendiri itu ikhlasnya lebih, jadi yang utama bukan hal itu. Yaa istilahnya ada imbalan untuk pengganti transport. Giu saja mbak.

**Peneliti** : Bagaimana lulusan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta?

**FU** : Lulusan sebelum vakum saya kurang tahu, kalau setelah vakum, ada sekali meluluskan mbak. Saya masuk di sini mulai tahun 2013, setelah vakum. Saya masuk pas tahun ajaran baru antara bulan Juli.

**Peneliti** : Bagaimana hubungan Pembina dan Pengelola Program Paket di sini?

**FU** : Hubungan dengan kelurahan selaku pembina : yaa baik. Tiap ada kegiatan atau rapat nanti dilaksanakan di kelurahan. Nanti bu lurah yang memberi arahan, bimbingan. Ada lagi, Pak Patmo melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota, paling tidak satu semester sekali.

## **LAMPIRAN 4**

### **HASIL OBSERVASI**



## DATA HASIL OBSERVASI

### Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan

#### Wirobrajan Kota Yogyakarta

Pengamatan dilakukan peneliti terhadap Proses Belajar Mengajar Paket B dan C di PKBM Rangsnag Imo Joyo beserta sarana prasarana yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Pengamatan dilaksanakan selama peneliti mengambil data di lapangan. Hasil Observasi menunjukkan:

No.	Komponen	Penjelasan
1.	Proses Belajar Mengajar (PBM) Paket B dan C	Peserta atau warga belajar Paket B dan C di PKBM Rangsnag Imo Joyo tidak bisa diberi tekanan dan metode mengajar seperti pada umumnya. Pembelajaran bukan terpaku satu arah di mana tutor memberi instruksi pada warga belajar namun ada pula interaksi yang berasal dari warga belajar terhadap tutor misalnya saat materi melalui penyelesaian soal-soal, keluhan atas jumlahnya soal datang dari warga belajar dan meminta tutor untuk mengurangi jumlah soal-soal tersebut. Selain itu, warga belajar juga mengeluh ketika tutor memberi Pekerjaan Rumah (PR) sehingga tutor menyebutkan bahwa sangat jarang diadakannya PR.
		Susunan materi yang diberikan tutor banyak terintegrasi pada soal kemudian dijabarkan secara teori satu per satu. Materi tidak selalu menggunakan modul untuk dipelajari bersama-sama tetapi dengan penyelesaian soal-soal seperti soal UKK maupun soal UN atau bahkan soal-soal yang dibuat oleh tutor. Hasil pengamatan terhadap PBM Bahasa Inggris saat itu juga menggunakan soal yang dibuat oleh tutor dengan penekanan pada materi tensis. Soal dibagi melalui tulisan tangan tutor yang telah digandakan.
		Metode yang digunakan tutor lebih condong pada ceramah semi diskusi yang mana kedekatan tutor dan warga belajar menjadi salah satu hal yang

		diperhatikan. Keadaan ini ditunjukkan dari pengamatan pembelajaran dari tiga tutor di tiga kelas dalam satu ruangan kelas yang mana satu sama lain tutor dan warga belajar saling tegur dan terkadang saling bercanda akrab. Saat itu ada tutor senior dan ada tutor baru dan semua melebur.
		Pelajaran dilakukan dengan diskusi melalui soal atau materi yang telah difotocopy oleh tutor dan atau melalui <i>softfile</i> . Pembelajaran saat itu dilakukan dengan pemberian soal kepada warga belajar untuk kemudian dibahas bersama berdasar sub materi masing-masing. Penjelasan materi diberikan melalui tulisan langsung di buku siswa. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa papan tulis yang ada di ruang kelas tidak digunakan karena masih ada materi dari SMK Pembangunan Yogyakarta dan hal tersebut dibenarkan tutor yang sedang mengajar saat itu.
		Jumlah tutor yang aktif adalah sembilan orang. Beberapa tutor tidak mendapat jatah mengajar ketika warga belajar didikannya tidak hadir sehingga tutor yang bersangkutan pun juga tidak hadir.
		Pembelajaran untuk satu tingkatan kelas dilaksanakan selama satu tahun ajaran dengan total satu Paket (B atau C) dilaksanakan selama tiga tahun. Pembelajaran diadakan tiga kali dalam satu minggu yaitu hari Senin, Rabu, dan Jum'at. Ada hari di mana pembelajaran diliburkan dan hal tersebut atas sepengetahuan petugas piket, pengelola, tutor, dan warga belajar.
		PBM dimulai pukul 16.00 dan berakhir pukul 17.30 WIB. Pernah pula pembelajaran lebih dari 17.30 yakni hingga adza maghrib. Selama melakukan penelitian beberapa waktu, hal tersebut sangat jelas terlihat dan dibenarkan oleh penjual makanan yang ada di depan gedung SMK Pembangunan Yogyakarta.
		Tutor sering terlambat dari jadwal namun terkadang karena kesibukan, ada tutor yang terpaksa tidak hadir. Hasilnya, ada kehaursan satu tutor memegang dua tingkatan kelas sekaligus, sehingga tutor

		membuat kelompok kecil dari beberapa tingkatan kelas yang dijadikan dalam satu ruang kelas. Hal tersebut berlaku juga saat hanya ada satu atau dua tutor yang mengajar secara bergiliran pada satu tingkatan kelas dan kelas lainnya.
2.	Kondisi Sarana dan Prasarana	Lokasi yang dipilih tidak terlalu menyulitkan warga belajar sebab berada tidak jauh dari pusat Kantor Kelurahan Patangpuluhan dan Kantor Kecamatan Wirobrajan. Jarak dari kantor ke SMK Pembangunan Yogyakarta hanya berkisar 100meter.
		Dari tempat parkir, melewati gerbang sekolah, lalu di SMK Pembangunan Yogyakarta ada lobby yang digunakan petugas piket untuk menjaga absensi saat warga belajar dan tutor berdatangan untuk pembelajaran. Di kanan lobby ada ruang guru dan di kiri lobby ada ruang tata usaha SMK Pembangunan Yogyakarta. Ruang tersebut tidak digunakan oleh PKBM Rangsang Imo Joyo. Lebih ke dalam, ada deretan ruang kelas. PKBM Rangsang Imo Joyo menggunakan satu sampai dua ruang kelas paling depan (dekat dengan lobby). Satu kelas di gedung SMK Pembangunan Yogyakarta bisa menampung 32 siswa. Hal tersebut terlihat dari jumlah meja dan kursi yang tersedia dalam satu ruang kelas. Dalam kelas pun sudah tersedia meja dan kursi untuk guru, papan tulis, pencahayaan, dan ventilasi yang cukup. PKBM Rangsang Imo Joyo tidak meminjam lab yang ada di SMK Pembangunan karena pelajaran fokus pada materi dalam kelas. Belum ada praktek pelajaran maupun pelatihan keterampilan untuk warga belajar.
		Pihak pengelola menyerahkan sepenuhnya pada satu penjaga sekolah yang juga warga lingkungan Kelurahan Patangpuluhan. Penjaga sekolah tersebut karyawan SMK Pembangunan Yogyakarta yang telah mengetahui jadwal PKBM Rangsang Imo Joyo sehingga beliau lah yang membuka gerbang sekolah setiap habis Ashar dan menunggu pula saat PBM Paket B dan C PKBM Rangsang Imo Joyo berlangsung.

## **LAMPIRAN 5**

### **STUDI DOKUMEN**

## STUDI DOKUMEN

### Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta

No.	Nama Dokumen	Ada	Tidak	Keterangan
<b>A. Bukti Legalitas Lembaga</b>				
1.	Struktur Pengelola	√		Terdiri dari dua jenis. Pertama adalah struktur Pengelola Lembaga lengkap, dan kedua adalah struktur Pengelola inti pendidikan kesetaraan.
2.	Akte notaris pendirian lembaga	√		Tanggal Akta 30 April 2007, nomor 18, nama Notaris : Sutarna, SH.
3.	Ijin operasional lembaga	√		Surat Keterangan (SK) Penyelenggaraan PKBM dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
4.	Rekening bank atas nama lembaga	√		BRI UNIT WIROBRAJAN 3007-01-014008-53-2
5.	NPWP atas nama lembaga	√		NPWP PKBM Rangsang Imo Joyo: 02.755.322.1 – 541.000
<b>B. Arsip Lembaga</b>				
1.	Buku Induk Tutor	√		Jumlah tutor tahun ajaran 2015/2016 adalah 14 orang
2.	Contoh Proposal yang pernah dibuat lembaga	√		Proposal pada tahun 2009 untuk pengajuan bantuan dana kepada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
3.	Contoh Presensi kehadiran (Warga Belajar dan Tutor)	√		Format presensi tutor, pengelola, dan warga belajar yang aktif di Paket B dan C
4.	Contoh RPP atau Silabus	√		RPP dan silabus yang pernah dibuat (bukan terbaru)
5.	Soal Ujian yang pernah diberikan	√		Contoh soal UKK untuk Paket B dan C

	kepada warga belajar			
6.	Brosur	√		Brosur sebagai sarana sosialisasi tertulis Pendidikan Kesetaraan
7.	Buku Induk Warga Belajar	√		Jumlah warga belajar tahun ajaran 2015/2016 adalah 14 orang
8.	Jadwal Pelajaran Tahun 2015/2016	√		Terdiri dari jadwal pelajaran Paket B dan Paket C yang berisi waktu (hari) dan jam pelaksanaan, jenis mata pelajaran, dan durasi masing-masing mata pelajaran yang ada. Satu pertemuan adalah empat jam lima belas menit mulai dari 13.30-17.45 WIB.
9.	Buku Induk Pengelola	√		Jumlah pengelola inti untuk Program Kesetaraan Paket B dan C adalah tujuh orang.

## **LAMPIRAN 6**

### **DOKUMENTASI FOTO**



Lokasi Pembelajaran PKBM Rangsang Imo Joyo  
(SMK Pembangunan Yogyakarta)



Kondisi penataan ruangan kelas



Pembelajaran dalam kelas





Interaksi tutor dan warga belajar



Contoh materi pembelajaran melalui soal-soal



Persiapan evaluasi internal antara (Tutor dan Pengelola)

## **LAMPIRAN 7**

### **HASIL DOKUMENTASI**



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP D.I. YOGYAKARTA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA

JL. PANEMBAHAN SENOPATI NO. 20  
YOGYAKARTA 55121

Telepon : 0274-373403, 0274-38041  
Fax : 0274-380417

**SURAT KETERANGAN TERDAFTAR**  
PEM-02613/WPJ.23/KP.0203/2008

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ/2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-160/PJ/2007 dengan ini diterangkan bahwa:

- |   |   |   |  |                                       |  |                                       |  |  |  |                                       |  |
|---|---|---|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|
| 1. Nama   | : YAY PKBM RANGSANG IMO JOYO  |   |  |                                       |  |                                       |  |  |  |                                       |  |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)                   | : 02.755.322.1-541.000  |   |  |                                       |  |                                       |  |  |  |                                       |  |
| 3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)                 | : 91990 - ORGANISASI SOSIAL MASYARAKAT  |   |  |                                       |  |                                       |  |  |  |                                       |  |
| 4. Alamat   | : DORUDASIH PATANGPULUHAN WB III/436 RT/RW ;<br>015/003, PATANGPULUHAN, WIROBRAJAN,<br>YOGYAKARTA, D I YOGYAKARTA<br>55251  |   |  |                                       |  |                                       |  |  |  |                                       |  |
| 5. Merk/Akronim                                     | : -   |   |  |                                       |  |                                       |  |  |  |                                       |  |
| 6. Status Modal                                     | : SWASTA  |   |  |                                       |  |                                       |  |  |  |                                       |  |
| 7. Status Usaha                                     | : PUSAT   |   |  |                                       |  |                                       |  |  |  |                                       |  |
| 8. Kewajiban Pajak                                  | : <table border="0"><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 4 (2)</td><td><input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 23</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> PPh Pasal 15</td><td><input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 25</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> PPh Pasal 19</td><td><input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 26</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 21</td><td><input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 29</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> PPh Pasal 22</td><td></td></tr></table> | <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 4 (2) | <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 23 | <input type="checkbox"/> PPh Pasal 15 | <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 25 | <input type="checkbox"/> PPh Pasal 19 | <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 26 | <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 21 | <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 29 | <input type="checkbox"/> PPh Pasal 22 |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 4 (2) | <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 23  |   |  |                                       |  |                                       |  |  |  |                                       |  |
| <input type="checkbox"/> PPh Pasal 15               | <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 25  |   |  |                                       |  |                                       |  |  |  |                                       |  |
| <input type="checkbox"/> PPh Pasal 19               | <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 26  |   |  |                                       |  |                                       |  |  |  |                                       |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 21    | <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 29  |   |  |                                       |  |                                       |  |  |  |                                       |  |
| <input type="checkbox"/> PPh Pasal 22               |   |   |  |                                       |  |                                       |  |  |  |                                       |  |

telah terdaftar pada tata usaha KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA .  
Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan, wajib mencantumkan NPWP tersebut di atas sejak tanggal 15 Agustus 2008



NPWP : 02.755.322.1-541.000

NAMA : YAY PKBM RANGSANG IMO JOYO

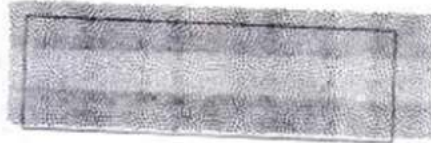
Yogyakarta, 15 Agustus 2008

a.n KEPALA KANTOR  
Kepala Seksi Pelayanan,

Endang Proborini  
NIP. 080051425

RA 0073626

Stempel dan Tandatangan Pejabat Bank



30 12 2017

Nama Kantor [11] CABANG SENOPATI  
No. Rekening 22.02.1.42281-9  
Nama PKBM "RANGSANG IMO JOYO"

No. Rek. Transfer ATM : 112-06000422021422819



**Kode Sandi Transaksi :**

- |                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| 01 - Penyetoran Tunai      | 09 - Koreksi Undian                |
| 02 - Pengambilan Tunai     | 10 - Koreksi Kesalahan Debet       |
| 03 - Penyetoran Kiriing    | 11 - Koreksi Kesalahan Kredit      |
| 04 - Penyetoran Pemindahan | 22 - Penarikan Tunai ATM           |
| 05 - Penarikan Pemindahan  | 24 - Penyetoran Pemindahan Via ATM |
| 06 - Bunga                 | 25 - Penarikan Pemindahan Via ATM  |
| 07 - Pajak Bunga           | 26 - Biaya Administrasi ATM        |
| 08 - Hadiah Undian         | 27 - Biaya Transaksi ATM           |
|                            | 28 - Biaya Pengelolaan Rekening    |

Untuk keterangan lebih lanjut hubungi kantor cabang kami yang terdekat. Buku ini adalah milik Bank, apabila ditemukan harap dikembalikan ke kantor pelayanan Bank BPO DIY terdekat.

PKBM "Rangsang Imo Joyo" didirikan pada :  
Tanggal 28 April 2006.

#### Susunan Pengurus PKBM

Pembina : Camat Wirobrajan  
Lurah Patangpuluhan

Pembina Teknis : Penilik PNFI Kota  
Yogyakarta

Ketua : Drs. Supatmo Priyo  
Sekretaris I : Saleh Bukhori SE  
Sekretaris II : Feriarta K.

Bendahara I : Dewi Fadilatunnaim  
Bendahara II : Hariyati

#### Koor Program

Paket B : Rr. Zeny Nur Rahmawati, SH

Paket C : Dra Sri Subektiningrum

#### Mitra Kerja Lembaga :

LPMK Patangpuluhan : H. Iwan Nur S  
BKM Semeru : Teguh Siswanto, SH  
TBM " 19 " : Sumanto  
PKK Kel. : Sri Kasyah Ahmadi  
PAUD : Anna Deliya Rosa, S. Psi

#### Kontak Person :

Pak Mamok : (0274) 415211 / 08121551029  
Pak Soleh Bukhori: 081914976041

#### Daftar Nama Tutor sbb:

1. Drs. Supatmo Priyo
2. Saleh Bukhori, SE
3. Rr. Zeny Nur Rohmawati, SH
4. Endang Sri S, S. Pd
5. Dra. Sri Subektiningrum
6. Dra E. Mujiah
7. Joko Purwantoro
8. Fitria Ulfa, S. Si
9. Joko Sugiyanto, MM
10. Henri Wahono
11. Fajar Prabowo
12. Annisa N. H.
13. Mutia
14. Barrah = B. Iq

#### Fasilitas

Ruang Belajar & Ketrampilan di Gedung  
Serbaguna Kel. Patangpuluhan, Pendopo  
Kec. Wirobrajan

#### Program Yang Disiapkan

1. Kejar Paket B, C
2. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
3. Kelompok Belajar Usaha (KBU)
4. PAUD

#### Kurikulum

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan  
( KTSP )  
Pendidikan Luar Sekolah ( PLS )

#### Syarat Pendaftaran :

1. Fotocopy KTP
2. Ijazah Terakhir
3. Foto 3x4 sebanyak 4 lembar

## Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat " RANGSANG IMO JOYO "

Kel. Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan, Yogyakarta



Kami siap menerima  
Warga Belajar Baru pada tiap Tahun Ajaran  
Paket B, C  
Segera Daftar kan di Sekretariat  
Tidak dipungut Biaya

Sekretariat : Patangpuluhan WB III / 436 Yogyakarta  
Telp. (0274) 386006, 415211, 379440



**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
(PKBM) "RANGSANG IMO JOYO"**

Kel. Patangpuluhan, Wirobrajan Yogyakarta.  
Jemberlatal, Patangpuluhan WB III 436 YOGYAKARTA  
Telp. (0274) 386006, 415211, 379440

PKBM "RANGSANG IMO JOYO"  
Kel. Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan,  
Yogyakarta

Sekretariat : Patangpuluhan WB III / 436  
Yogyakarta  
Telp. (0274) 386006, 415211, 379440

Akte Notaris : Sutarno, SH  
No : 18  
Tanggal : 30 April 2007

Ijin Operasional : 031 / LBG. PNF / 2007

NPWP : 02.755.322.1 - 541.000

**A. Latar Belakang**

Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar yang harus dimiliki oleh setiap warga masyarakat. Melalui pendidikan, seseorang lebih memahami suatu hal yang disampaikan oleh orang lain. Dengan demikian akan tercipta komunikasi yang baik diantara masyarakat.

Dengan dicanangkannya wajib belajar 12 tahun oleh pemerintah dan ditindak lanjuti oleh Disdikpora Kota Yogyakarta melalui Program Pendidikan Non Formal dan Informal tentunya akan membantu masyarakat luas

untuk mendapat kesempatan belajar. Kemiskinan yang menjadi salah satu penyebab keterbelakangan pendidikan, dapat dipahami karena faktor biaya sekolah. Dengan memberikan prioritas kepada anak usia sekolah untuk mengikuti program Pendidikan Non Formal diharapkan dapat menekan kesenjangan sosial dan ekonomi dimasa mendatang.



**B. Tujuan**

Tujuan yang akan dicapai dalam penyelenggaraan program paket meliputi tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum program Paket adalah :

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas
2. Menyiapkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
3. ikut serta mensukseskan dan menuntaskan wajib belajar 12 tahun

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

1. Memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan yang nantinya dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
2. Meningkatkan status sosial dalam kehidupan bermasyarakat
3. Memiliki ketrampilan yang dapat dijadikan bekal untuk mencari nafkah.



**C. Hasil Yang diharapkan**

Sesuai dengan Program PNF bahwa Kegiatan Pendidikan Kesetaraan diharapkan dapat meratakan peningkatan kesempatan belajar masyarakat serta Peningkatan Kompetensi Warga Belajar sesuai jenjang dan dapat berpeluang melanjutkan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

**PKBM "RANGSANG IMO JOYO"**  
**KEL.PATANGPU'UHAN, KEC.WIROBRAJAN, KOTA YOGYAKARTA**  
 Sekretariat : Patangpuluhan Wb. 3 / 436 Yogyakarta Telp. 386006, 415211

**Presensi Tutor & Pengurus**  
**Program Paket B dan C**  
**Tahun Ajaran 2015/2016**

Bulan :

No.	Nama	L	P	Tanggal/Paraf											
1.	Drs.Supatmo Priyo	✓													
2.	Soleh Bukhori,SE	✓													
3.	Dewi Fadilatunnaim		✓												
4.	Dra.Sri Subektiningrum		✓												
5.	Endang S.S.,SPd.		✓												
6.	Joko Purwantoro	✓													
7.	Nur Endah Sari		✓												
8.	Fitria Ulfa,S.Si		✓												
9.	Joko Sugiyanto,MPd.	✓													
10.	Haryati		✓												
11.	Feri Artha		✓												
12.	Rio Pamungkas	✓													
13.	Hendri Wahono	✓													
14.	Baroroh Barid,S.Pd.		✓												
15.															
16.															
17.															

Ketua Penyelenggara

Drs.Supatmo Priyo

**PKBM "RANGSANG IMO JOYO"**  
**KEL.PATANGPULUHAN, KEC.WIROBRAJAN, KOTA YOGYAKARTA**  
 Sekretariat : Patangpuluhan Wb. III / 436 Yogyakarta Telp. 386006, 415211, 379440

**Presensi Warga Belajar**  
**Program Paket B Klas VIII & VII**  
**Tahun Ajaran 2015/2016**

Bulan :

No.	Nama	L	P	Tanggal											
1.	Anggara Perdana Putra	L													
2.	Daniva Dewi M.SR		P												
3.	Viani Gupita Sari		P												
4.	Nur Seto	L													
5.	Pujangga Patrin M.	L													

Ketua Penyelenggara

Drs.Supatmo Priyo

**PKBM "RANGSANG IMO JOYO"**  
**KEL.PATANGPULUHAN, KEC.WIROBRAJAN, KOTA YOGYAKARTA**  
 Sekretariat : Patangpuluhan Wb. III / 436 Yogyakarta Telp. 386006, 415211, 379440

**Presensi Warga Belajar**  
**Program Paket B Klas IX**  
**Tahun Ajaran 2015/2016**

Bulan :

No.	Nama	L	P	Tanggal											
1.	R.Ongkowiyo Putra	L													
2.															
3.															
4.															
5.															
6.															
7.															

Ketua Penyelenggara



**PKBM "RANGSANG IMO JOYO"**  
**KEL.PATANGPULUHAN, KEC.WIROBRAJAN, KOTA YOGYAKARTA**  
**Sekretariat : Patangpuluhan Wb. III / 436 Yogyakarta Telp. 386006, 415211, 379440**

**Presensi Warga Belajar**  
**Program Paket C Klas XI IPS & X**  
**Tahun Ajaran 2015/2016**

Bulan :

No.	Nama	L	P	Tanggal											
1.	Rita Kurniawati		P												
2.	Wagiman	L													
3.	Muhammad Jafar	L													
4.															
5.															

Ketua Penyelenggara

Drs.Supatmo Priyo

**PKBM "RANGSANG IMO JOYO"**  
**KEL.PATANGPULUHAN, KEC.WIROBRAJAN, KOTA YOGYAKARTA**  
**Sekretariat : Patangpuluhan Wb. 3 / 436 Yogyakarta Telp. 386006, 415211, 379440**

**Presensi Warga Belajar**  
**Program Paket C Klas XII IPS**  
**Tahun Ajaran 2015/2016**

Bulan :

No.	Nama	L	P	Tanggal											
1.	Miyarsih		P												
2.	Munita Sari		P												
3.	Rumiyati		P												
4.	Donna Gabriella		P												
5.	Siti Mulyati		P												
6.															
7.															
8.															
9.															

### I. RENCANA PENGGUNAAN DANA BOP

Rencana penggunaan dana subsidi yang diterima dari Proyek untuk Program Paket C semester 6, sebesar : **Rp 8.880.000,00**  
(Delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah )

dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN BIAYA(Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1.	Pengadaan Bahan :			
	a. Pengadaan Bahan Persiapan UNPK	20 set	40.000,00	800.000,00
	b. Penilaian 1 kali	20 org	25.000,00	500.000,00
2.	Bantuan alat :			
	a. ATK Peserta didik	20 org	25.000,00	500.000,00
	b. Adm Pembelajaran	1 klp	25.000,00	25.000,00
	c. Sarana Pembelajaran	1 klp	50.000,00	50.000,00
3.	Bantuan Tenaga :			
	a. Transport Tutor ( 3 org x 6 bl )	18 OB	350.000,00	6.300.000,00
	b. Transport Penyelenggara ( 1 org x 6 bl )	6 OB	117.500,00	705.000,00
4.	Jumlah			8.880.000,00

**Jumlah keseluruhan yang diajukan : Rp 8.880.000,00**  
(Delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah )

## **LAMPIRAN 8**

### **ANALISIS DATA**

**ANALISIS DATA  
TRIANGULASI SUMBER**  
**“Pengelolaan Program Pendidikan Kesetaraan Paket B dan C  
di Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta”**

<b>A. PERENCANAAN</b>			
<b>1.</b>	<b>Bentuk Penerimaan dan Seleksi Warga Belajar</b>		
	Hasil Wawancara	SP	“Selain menyebar brosur, kami mensosialisasikan lewat RW dan PKK RW dalam satu pertemuan. Kemarin pernah mengundang PKK se Kelurahan Patangpuluhan dan Ketua RWnya, kemudian kita sosialisasikan PKBM Rangsang Imo Joyo dan bila ada masyarakat yang belum memenuhi pendidikan 12 tahun maka diharap untuk mengikuti program kesetaraan.....” // “Seleksi masuk kita hanya membutuhkan ijazah terakhir sama foto. Hal ini diperuntukkan segala umur asalkan dia masih mampu menempuh pendidikan.”
		FU	“Sebenarnya di tiap RW gitu pasti ada sosialisasi. Dari kelurahan pasti ada kerjasama dari masing-masing wakil RT RW yang dikumpulkan, misalnya pas ada rapat PKK atau rapat RT RW akan disosilaisakan tentang PKBM ini. Ada juga brosurnya.” // “..... Warga belajar yang penting ada raport terakhir”.
		RM	“.....Daftar paket ini ke rumah Pak Patmo. Menyerahkan KK dan Foto. Ada warga belajar yang dari awal paket dan ada yang dari tengah-tengah. Informasi tentang Kesetaraan di sini diperoleh dari orang dekat. “
		SB	“Dasarnya, PKBM ini bukan hanya lingkup lokal tetapi nasional, jadi siapapun orang yang ingin menempuh pendidikan paket bisa mendaftar....”
	<b>Kesimpulan</b>		Sosialisasi program dilakukan secara tertulis dan lisan serta terbuka untuk masyarakat umum dan dilakukan satu tahun sekali di tiap tahun ajaran baru. Syarat pendaftaran tidak banyak dan gratis.
<b>2.</b>	<b>Bentuk Perekrutan dan Seleksi Calon Tutor dan Narasumber Teknis</b>		
	Hasil	SP	“Selama tutor mau membantu kita, ya kita rekrut.

	Wawancara		Itu saja. Sistem mendapatkannya “gethok tular” dari mulut ke mulut, misal tutor bahasa Inggris mbak Baroroh ini kenalan dari mbak Endang, dan beliau bersedia menjadi tutor maka kami terima.”
		BB	“.....dulu caranya saya bisa mengajar di sini, saya dikasih tau saudara saya yang ikut kegiatan ini. Ada lowongan karena ada tutor Bahasa Inggris yang keluar jadi saya mendaftar.”
		FU	“Cara merekrut tutor informasi secara lisan mbak, jadi tutor yang mau pergi mengenalkan temannya untuk menggantikan. Kebanyakan mahasiswa. Tutor sering bongkar pasang karena kebanyakan juga mahasiswa, kecuali tutor yang berdomisili sekitar sini.....” // “Tidak ada seleksi tutor secara khusus karena pengelola sudah tau latar belakang tutor.” // “Sebenarnya kita juga ingin warga belajar memiliki keterampilan tertentu, tapi dalam pelaksanaan belum terlaksana. Kita masih berencana untuk mewujudkan itu.”
		SP	“Kita tidak terpancang pada ijazah karena kita sifatnya sosial, jadi siapa yang mau dan siap membantu di sini secara sosial, maka kita rekrut. Tapi saya juga melihat dari psikologis dan sifatnya di sosial masyarakat, harus baik, jadi tidak sembarangan juga mengambil tutor.....” // “Lembaga tidak memiliki narasumber teknis, tetapi tutor-tutor di sini memiliki keterampilan khusus seperti mbak Subektiningsih (Ning) pintar menari jadi warga belajar yang ingin belajar menari bisa minta diajarkan sama mbak Ning. Selain tutor, ada juga mbak Eri sebagai ketua Batik Patangpuluhan. Perkembangan batiknya sudah bagus jadi warga belajar bisa belajar usaha di sana. Kemudian mas Soleh wirausaha di rumah yakni laundry, pak Joko Purwanto juga mempunyai laundry. Jadi, kami ingin mengarahkan warga belajar menjadi personal yang bisa dipakai di masyarakat. Tinggal warga belajarnya mau konsen ke salah satu bidang tersebut apa tidak. Nanti kita mau tawarkan.”
		SB	“Tutor di sini sebenarnya harus berdasarkan

			keikhlasan karena kita lembaga yang mengusung rasa sosial.....” // “Belum ada program keterampilan di PKBM ini. PKBM ini konsen sama kesetaraan karena kita manut pada kemauan/kebutuhan warga belajar. Mereka punya ijazah A atau B jadi mereka butuh kelanjutan pendidikan lewat paket. Dulu pernah, waktu warga belajarnya banyak kita mau bikin praktek, tetapi semakin kesini ternyata minat warga belajar semakin menurun sehingga niat itu kita urungkan.”
	<b>Kesimpulan</b>		Tutor di PKBM Rangsang Imo Joyo berjumlah empat belas orang. Perekrutan tutor dilakukan secara tertutup dimana informasi lowongan tidak dibuka pada masyarakat umum melainkan dengan penyaluran lisan dari tutor yang berhenti ataupun dari kenalan anggota PKBM Rangsang Imo Joyo. Syarat utama dalam perekrutan tutor adalah kemauan dan kesehatan psikologis. Di PKBM Rangsang Imo Joyo belum ada narasumber teknis sebab belum ada pula kegiatan pelatihan keterampilan.
<b>3.</b>	<b>Penetapan Kurikulum untuk Paket B dan C</b>		
	Hasil Wawancara	VG	“.....Intinya program paket di sini, satu paket tiga tahun, tapi bedanya sama formal kita seminggu masuk tiga kali.”
		SB	“Kurikulum yang dipakai dari dulu adalah KTSP. Ini karena berdirinya PKBM sama dengan saat berlakunya KTSP.....” // “Seperti paket C itu kelas 11 dan 12 dimasukkan ke program IPS sehingga tidak banyak praktek pelajaran.....”
		RM	“Di sini jurusan Paket C itu IPS, nggak banyak praktek jadi belum pernah ada praktek pembelajaran”
		FU	“.....Materinya disamakan sama pendidikan formal, cuma kalau formal ada IPA dan IPS, di sini cuma ada IPS saja mbak”
	<b>Kesimpulan</b>		Kurikulum yang digunakan adalah KTSP dan satu angkatan dikenai pembelajaran satu tahun.

		Pembelajaran dilakukan melalui materi dalam kelas. Penjurusan untuk Paket C hanya ada IPS.
<b>4.</b>	<b>Proses Penetapan Tempat Pembelajaran dan Pelatihan</b>	
Hasil Wawancara	DL	“.....lokasi pembelajaran ada di balai kecamatan, atau memakai ruangan kantor kelurahan. Tergantung mana yang selo, itu yang dipakai. Kalau satunya nggak bisa ya pakai satunya lagi.”
	SP	“Awal tempat pembelajaran dulunya di kelurahan Patangpuluhan dan sekarang pindah di SMK Pembangunan Yogyakarta ini. Alasannya karena disana sering berbenturan dengan acara kelurahan sehingga kita tergusur, misal ada rapat kita harus pindah. Padahal, waktu itu warga belajar kita sedang banyak-banyaknya, sekitar tiga puluhan, tidak seperti sekarang. Jadi kami memutuskan untuk pindah kesini.”
	FU	“Dulu sempat kita kesulitan dalam tempat, karena dulu warga belajar kita banyak, kita pindah-pindah dari gedung serbaguna kelurahan ke kantor kecamatan, muter-muter. Selanjutnya tahun 2015 kita putuskan untuk pindah di sini, SMK Pembangunan agar lebih pasti.”
	<b>Kesimpulan</b>	Sebelum tahun ajaran 2015/2016 tempat pembelajaran bergiliran antara aula kantor Kecamatan Wirobrajan atau ruang serba guna di kantor Kelurahan Patangpuluhan. Saat ini, tempat pembelajaran sudah pasti yaitu di SMK Pembangunan Yogyakarta.
<b>5.</b>	<b>Sumber Dana Pendidikan Kesetaraan</b>	
Hasil Wawancara	SP	“Dulu, sebelum vakum kita membuat proposal untuk meminta dana ke Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Tetapi setelah vakum, kita kekurangan warga belajar sehingga kita tidak bisa mengajukan proposal ke Dinas lagi. Prosedurnya ya saya datang ke Dinas langsung mbak.” // “Syarat utama dalam pengajuan proposal adalah Lembaga Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan memiliki jumlah Warga Belajar minimal dua puluh orang.” // Selain dari dana tersebut, PKBM juga tetap berusaha mencari dana dari Donatur yang tidak mengikat.

		FU	“Sepertinya kemarin ada membuat proposal, tapi itu pengelola sendiri yang melaksanakan. Itu kadang proposal sudah dibuat berdasar jumlah warga belajarnya. Kan kalau diatas 20 bisa diajukan ke Dinas, kalau dibawahnya diajukan ke umum.”
	<b>Kesimpulan</b>		Sebelum vakum sempat meminta dana dari Dinas Pendidikan melalui proposal kegiatan sebab jumlah warga belajar memenuhi standar minimal. Sumber dana juga datang dari donatur.
<b>B. PELAKSANAAN</b>			
<b>1. Pemenuhan Tugas dan Kebutuhan Warga Belajar</b>			
	Hasil Wawancara	SP	“Pada dasarnya, kemauan warga belajar tidak bisa dipaksakan. Kewajiban mereka adalah belajar tetapi masih sering malas.” // “.....Latar belakang warga belajar di sini kebanyakan adalah masyarakat putus sekolah yang sedang bekerja dan ibu rumah tangga.”
		VG	“Seminggu masuk rata-rata dua kali. Masuknya tergantung hujannya mbak. Kalau terang ya berangkat tapi kalau hujan deras, banyak nggak masuknya.”
		RM	“Warga belajar masuk tiga kali seminggu, tiap hari Senin, Rabu, Jum’at. Yang hadir tiap Paket di satu pertemuan kadang dua kadang tiga anak.”
		SB	“.....Sebenarnya dorongan keluarga juga menentukan, kalau keluarga mendukung ya dia bisa rajin, kalau tidak ya kurang. Kita tidak bisa terlalu memaksa warga belajar untuk rajin karena semua itu tergantung minat dari warga belajar sendiri. Faktor X seperti itu yang sering mempengaruhi. Padahal dari dinas kota sudah diarahkan untuk menempuh pendidikan di sini.....” // “.....Motivasi warga belajar ada yang melanjutkan pendidikan, tapi ada juga bapak/ibu bertujuan untuk tunjangan jabatan, tunjangan pensiun, dan sebagainya. Motivasi diluar melanjutkan malah lebih rajin karena ada motiv tanda petiknya sehingga sangat membutuhkan ijazah paket.” // “Kebanyakan warga belajar bekerja, makanya hanya beberapa yang ikut sampai akhir, beberapa ada yang berhenti di tengah



			<p>semester. Yang berhenti di tengah semester tidak bisa ikut UN, bukan masalah minimal hadir tetapi kehadiran saat ujian, misal ikut saat UTS, UKK, dan UN itu sendiri. Kehadiran sebenarnya memang diperhitungkan tetapi praktek di lapangan tidak bisa terlalu diterapkan karena ini pendidikan nonformal.” // “Rombel bukan ditentukan oleh pengelola tetapi sesuai ijazah, misal mbaknya dulu ijazah SMP jadi masuk sini bisa ambil Paket C kelas 10. Misal berhenti di tengah, Kelas 10 mau lanjut kelas 11 bisa asal ada raport terakhir kelas 10. Jadi, bisa masuk disini di Paket C kelas 11.”</p>
		BB	<p>“Warga belajar ada yang tertib, ada yang semangat, tapi kebanyakan kurang. Alasannya kurang tertarik, kadang hanya datang pas ujian saja, hari-hari biasa tidak pernah mengikuti. Tapi walau begitu tetap dianggap warga belajar.” // “Masuknya kelas 7, 8, 9, dan seterusnya itu ditentukan sama pengelola.”</p>
	<b>Kesimpulan</b>		<p>Pembagian Rombongan Belajar (Rombel) di PKBM Rangsang Imo Joyo tidak memperhatikan usia maupun jenis kelamin melainkan berdasar pada ijazah terakhir atau raport terakhir dari warga belajar. Total warga belajar yang terdaftar pada tahun ajaran 2015/2016 seluruhnya empat belas orang. Jumlah warga belajar yang terdaftar di Paket B saat ini adalah enam orang dan di Paket C adalah delapan orang. Pengelola memenuhi kebutuhan belajar warga belajar dengan menyiapkan materi beserta sarpras yang dibutuhkan, namun warga belajar belum melaksanakan tugasnya secara optimal karena kedisiplinan warga belajar sangat kurang.</p>
<b>2.</b>	<b>Kualifikasi serta Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola</b>		
	Hasil Wawancara	SP	<p>“.....Bendahara ya prakteknya yang mengelola dana-dana yang ada, Untuk sekretaris ya ada tugasnya tapi prakteknya sering saya kerjakan sendiri. Mengenai uraian tugas, jobdesk belum ada karena memang kita lebih dominan sosialnya. Jadi, kalau saya bagi jobdesk secara organisasi, pasti tidak berjalan.” // “Pengelola terdiri dari pengurus</p>

			<p>harian, ketua, sekretaris, bendahara dan koordinator program, sama satu tambahan lagi petugas piket. Cuma itu saja. Pengaturannya ya kita minta saja. Mba eri kemudian mba dewi dan istri saya, saya suruh piket dihari-hari pembelajaran, Senin Rabu Jum'at dibagi tiga orang.” // “Tujuan piket adalah mengkomunikasikan kondisi tutor siap dan tidaknya. Kalau misalnya tutor belum ada pas warga belajar sudah siap berarti ya dikomunikasikan. Itu terkait piket.” // “.....Sementara ini yang bergerak adalah ketua, sekretaris, dan bendahara. Jika ada sesuatu dan saya mampu maka saya selesaikan sendiri, tapi jika saya berhalangan baru saya limpahkan ke orang lain. Contohnya ada rapat UNPK (Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan) saya tidak bisa hadir sehingga saya delegasikan pada sekretaris satu.” // “Sekretariat lembaga secara formal ada di kelurahan tetapi hanya tulisan saja. Prakteknya, pengelola melaksanakan tugas di rumah masing-masing. Pihak kelurahan sudah tahu kalau ada apa-apa mengenai PKBM maka akan dilarikan ke rumah saya yang tidak jauh dari kelurahan. Kelurahan juga sebagai tempat promosi PKBM....” // “Pengelola sudah menyiapkan pembelajaran 3 kali seminggu dan lokasi pembelajaran yang memadai di SMK Pembangunan Yogyakarta”</p>
		SB	<p>“Pembentukan PKBM ini adalah saat rapat koordinasi di kelurahan. Sebelum ditetapkan, sudah ditentukan gambaran struktur pengelolanya. Sebenarnya unsur dari pengelola itu banyak tapi mengacu pada dinas, hanya ada 3 pengelola, yang lainnya tutor.” // “Hanya tutor sering bongkar pasang, tetapi pengelola utama tetap P. Patmo, saya, Bu Dewi dari awal. Kemudian karena kesibukan masing-masing maka sekretaris dan bendahara dibuat <i>double</i>, jadi ada 1 dan 2. Saya sebagai Sekretaris 1 di PKBM ini.”</p>
	<b>Kesimpulan</b>		<p>Pengelola terdiri dari pengurus harian, ketua, sekretaris, bendahara dan koordinator program,</p>

			serta pengelola tambahan, petugas piket. Tugas petugas piket adalah menjaga absensi warga belajar serta memastikan jumlah tutor yang hadir pada hari tersebut dan bila tidak seluruhnya hadir sedangkan tugas masing-masing pengelola belum ada. Tidak semua pengelola melaksanakan tugasnya secara optimal karena beberapa tugas menumpuk di beberapa pihak saja. Walau begitu, pengelola sudah melaksanakan tugasnya untuk menyiapkan pembelajaran.
<b>3.</b>	<b>Kualifikasi serta Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Tutor</b>		
	Hasil Wawancara	SP	“Dari semua tutor, kebanyakan sudah S1, tapi ada yang non pendidikan. Jadi, dia bukan guru tetapi sanggup menjadi tutor disini. Walau begitu latar belakang pendidikan sama dengan yang diajarkan pada warga belajar.” // “.....Minimal pendidikan tutor di sini adalah sarjana muda, tapi mayoritas sudah S1 walaupun dasarnya bukan pendidikan secara keseluruhan. Rata-rata satu tutor mengajar satu mata pelajaran tapi karena kondisi PKBM, terpaksa harus ada beberapa yang mengajar dua mata pelajaran.” // “Pendidik mengajar sesuai mata pelajaran yang diampunya. Pendidik atau tutor datang saat jadwalnya ada tetapi tidak selalu seperti itu. Tutor kadang ada kesibukan lain yang membuat mata pelajaran di hari itu dikurangi.” // “Sejauh ini tutor tidak selalu membuat RPP, hanya berjalan saja sesuai target. Tutor tetap mengacu pada SKL, saya hanya mengontrol itu saja. Terutama bagi warga belajar yang mau ujian, kita fokuskan pada SKL nya.”
		VG	“Setiap pelajaran, tutor kebanyakan hadir, kan ada jadwalnya sendiri-sendiri tapi pernah ada jadwal pelajaran yang diganti karena tutornya nggak hadir.”
		RM	“Tutor kadang-kadang telat misal datang jam setengah 5, kadang juga nggak datang tapi jarang. Seringnya tutor selalu datang. Satu tutor mengajar satu mata pelajaran.”
		SB	“RPP/Silabus sebetulnya mirip sekolah formal,

			tetapi kita jarang membuat. Kita jalan aja sesuai ancer-ancer dari Dinas. Kita juga mengacu pada buku pelajaran atau materi di sekolah formal.”
		BB	“Kebanyakan tutor adalah guru sekolah formal. Tutor disini kayaknya tidak semua sesuai backgroundnya, ada beberapa yang bukan dari pendidikan. Tetapi mayoritas sudah minimal S1, hanya satu yang belum karena dia masih menyelesaikan pendidikan S1 nya tetapi sudah bersedia menjadi tutor disini. Masalah tentang tutor adalah sering gonta-ganti. Sistemnya kaya <i>freelance</i> atau <i>parttime</i> , nggak lama lalu pindah.”
	<b>Kesimpulan</b>		Mayoritas tutor sudah S1 namun kedisiplinan dalam jadwal mengajar kurang optimal. Proses pembuatan RPP dan silabus juga menjadi salah satu tanggungjawab tutor, namun pelaksanaannya tidak optimal. Jadwal mengajar tutor satu mata pelajaran terjadi setiap hari dengan tingkatan kelas yang berbeda-beda tetapi kehadiran tutor sering tidak tepat waktu dan jadwal mengajar kadang meleset dari jadwal pelajaran yang sudah disiapkan oleh pengelola.
<b>4.</b>	<b>Pelaksanaan Pembelajaran Akademik</b>		
	Hasil Wawancara	FU	“Pembelajaran enak langsung belajar melalui soal. Pembahasan tentang RPP sendiri mungkin sudah ada, tapi bukan untuk dibahas terus, tidak. Yang penting manut SKL.”
		BB	“.....Tutor belum membuat RPP, tapi kemarin ditawarkan RPP dibuatkan oleh pengelola. Walau begitu tiap tutor punya target materi minimal yang harus dikuasai warga belajar untuk persiapan Ujian.” // “Pertemuan per mata pelajaran kadang masing-masing setengah jam. Tapi fleksibel misal hanya ada dua tutor yang hadir maka waktu per mapel lebih lama.”
		VG	”Pelajaran dimulai habis ‘Ashar dan biasanya sampai setengah enam, mau Maghrib itu. Ada jadwal pelajaran buat tiap pertemuan, tapi nggak pasti sesuai jadwal. Kadang tergantung tutor yang hadir, tapi tutor juga jarang nggak hadirnya.”

		RM	“Masuknya, kalau nggak molor ya nggak sampai dua jam. Kalau tutor telat bisa mulai setengah lima sampai maghrib. Satu pertemuan bisa satu atau dua pelajaran, tergantung tutor yang datang.”
		SB	“.....Minimal 30 menit per mapel. Satu kali pertemuan ada 2-3 mapel. Karena seminggu Cuma 3 kali pertemuan, jadi diharapkan sekali pertemuan ada paling tidak 3 mapel.....”
	<b>Kesimpulan</b>		Satu minggu tiga kali pertemuan antara setelah Ashar sampai menjelang Maghrib. Jumlah mata pelajaran hari itu sesuai dengan kehadiran tutor namun rata-rata dua sampai tiga mata pelajaran. Pembelajaran dilakukan di kelas dengan materi disampaikan melalui penyelesaian soal.
<b>5. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana</b>			
	Hasil Wawancara	VG	“Buku seringnya bawa sendiri atau dipinjem dari kecamatan. Tapi jarang pakai juga, seringnya materi langsung diberikan oleh tutor.” // “Kalau ada materi apa gitu difotocopiin sama tutornya”
		SB	“Buku difasilitasi dari Dinas. Untuk materi ya itu masing-masing tutor yang mengatur. Untuk soal-soal kita dektekan untuk selanjutnya dikerjakan warga belajar.”
		DL	“Untuk masalah modul, kelurahan tidak membantu banyak, itu Pak Patmo sendiri yang mengkomunikasikan langsung pada Dinas Pendidikan Kota, tidak melalui kami.”
		FU	“Misal ada 6 kelas masuk semua, saya tidak memakai enam kelas juga, saya hanya memakai satu dua kelas kemudian saya bagikan materi atau soal, biar saya juga tidak bolak-balik.”
		SP	“Materi dan sarana pembelajaran, kita hanya menunjukkan softfile nya saja....” // “Pengelola juga menyediakan sarana prasarana seperti ruang kelas yakni di sini, di SMK Pembangunan untuk paket B dan C. Tutor dan warga belajar melaksanakan proses belajar mengajar di sini juga. Peminjaman lokasi ini tidak menggunakan biaya, saya hanya kenal dengan pemilik gedung dan perjanjian sebatas kekeluargaan saja.”

	<b>Kesimpulan</b>	Sarana prasarana di lembaga ini dari segi data misalnya susunan materi pelajaran. Selain itu, ada pula sarpras dari segi bentuk barang yang menyangkut gedung pembelajaran, ruang kelas dan perangkat pendukung penyampaian materi pelajaran seperti meja, kursi dan papan tulis. Peminjaman sarpras tidak dipungut biaya.
<b>6.</b>	<b>Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan</b>	
	Hasil Wawancara	<p>SP</p> <p>“Anggaran larinya ke gaji tutor dan pelaksanaan pembelajaran sehari-hari. Kalau tutor membutuhkan fotocopy, selama itu tidak banyak, pengelola bisa membantu.” // “.....tutor disini sering tidak tega sehingga fotocopy mereka sendiri yang nanggung. Semua tutor sudah paham bahwa rasa sosial disini lebih tinggi sehingga untuk masalah seperti itu ditangani sendiri.” // “Kita tidak membuat RAPBS secara resmi karena pengelolaan dana PKBM dikelola mandiri lembaga. Kita hanya mengira-ngira menurut pengeluaran sebelumnya. Nanti kalau dalam pelaksanaan ada kurangnya, baru kita carikan.” “Prinsip kita, selama masih ada dana kita tidak akan memberatkan Warga Belajar. Tetapi kondisi sekarang membuat kami harus memungut 20 ribu tiap bulan yang diambil dari Warga Belajar.” // “.....dana itupun juga tidak mungkin cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional dan untuk hak Tutor. Makanya kita tetap menerima bantuan dari donatur tidak tetap, misal dana didapat saat koordinasi seperti di kelurahan Patangpuluhan. Disitu saya ceritakan kondisi lembaga dan kondisi peserta di kesetaraan, kemudian ada saja yang membantu, walaupun tidak kontinyu.” // “Kita bisa berjalan seperti sekarang ini, karena dulu pas kita memiliki Warga Belajar banyak dan mendapat dana dari Dinas dan sebagainya, dalam pemakaian dana tersebut tidak kita habiskan, masih ada sisa. Kemudian kita vakum. Nah setelah itu, kita coba aktif kembali dengan dana dari sisa yang dahulu, ditambah dana iuran dari warga belajar 20 ribu per bulan.”</p>

		SB	“Biaya pendidikan dikelola langsung oleh pengelola. Biaya pendidikan dianggarkan untuk Hak Tutor dan operasional sehari-hari.”
		BB	“Dalam hal gaji, per bulan, ngitungnya per pertemuan lalu dibayar di akhir bulan. Untuk tutor per pertemuan atau sekali datang diitung satu kali, walaupun sehari mengajar beberapa kali tapi tetap diitung satu kali. Nominalnya per pertemuan Rp 15.000,- . sumber uangnya dari donatur dan lain-lain sehingga jumlahnya tidak pasti. Masalah nominal bukan prioritas karena yang diutamakan adalah sosialnya.”
	<b>Kesimpulan</b>		Pembiayaan untuk kegiatan operasional yakni untuk insentif tutor/pengelola dan untuk biaya pembelajaran sehari-hari. Pembiayaan dikelola langsung oleh pengelola. Pengelola terpaksa menarik iuran dari warga belajar untuk menambah dana pendidikan namun tetap kurang untuk memenuhi kebutuhan sehingga strategi yang digunakan adalah menggunakan dana kas lembaga.

### C. EVALUASI

#### 1. Evaluasi Perkembangan Warga Belajar

	Hasil Wawancara	VG	“Tutor nggak pernah kasih ulangan-ulangan. Cuma nanti abis materi-materi biasanya dikasih soal gitu.”
		RM	“Ulangan di akhir, tidak ada di sela-sela pembelajaran. Misalnya UKK atau Ulangan Akhir Semester. Per BAB biasanya hanya dikasih soal-soal biasa untuk dikerjakan di kelas.”
		FU	“.....UKK soalnya dari Dinas. Waktunya untuk semua PKBM itu sama. Dulu 2014-2015 dikasih soal dan waktunya terserah PKBM, tapi kalau sekarang soal dan waktu ditentukan Dinas, ada jeda waktu untuk ujian misalnya ujian haru dilaksanakan antara tanggal 10-20.”
		SP	“Ujian Nasional biasanya dijadikan satu se-kota. Soal ujian sama seperti formal. Ujian kesetaraan dulu tahun 2014-2015, kita hanya mengikuti satu warga belajar paket C tetapi satu orang tersebut Alhamdulillah terbaik se-Kota Yogyakarta. Hal itu membantu nama Rangsang Imo Joyo jadi lebih

			baik.” // “.....harapan pemerintah memang menyamakan, bahwa kesetaraan itu sama dengan reguler, sehingga soal-soal juga sama, lha wong SKL nya juga sama. Cuma yang membuat tetap beda, jadi SKL nya sama tetapi untuk kesetaraan yang membuat orang PLS, walaupun PLS itu orang-orangnya juga dari Dinas kota. Saya pikir soalnya sama, kalau dia disuruh membuat soal UN dan dia juga pernah ikut membuat soal paket, saya rasa jatuhnya juga sama.”
	<b>Kesimpulan</b>		Ada lima jenis Evaluasi Hasil Belajar (EHB) warga belajar di PKBM Rangsang Imo Joyo yaitu UH, UTS, UAS, UKK, dan UNPK dengan pelaksanaan yang berbeda-beda dan bahkan ada beberapa tutor yang tidak menggunakan semua jenis ulangan tersebut.
<b>2. Evaluasi Penyelenggaraan Program</b>			
	Hasil Wawancara	SP	“Ada rakor menjelang evaluasi tiap EHB atau tiap semester sekali bersama bu Lurah Patangpuluhan tetapi beliau tidak selalu hadir. Seringnya rakor tersebut dihadiri tutor dan pengelola juga pimpinan lain. Selain itu ada juga ada koordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta berupa pelatihan kesiapan EHB tiap akhir semester. Initi dari pertemuan itu adalah memberi info persiapan EHB, kalau pesertanya banyak harus ada tim, kalau tidak ya pengelola yang mengurus.....”
		DL	“PKBM ada di bawah naungan kelurahan Patangpuluhan tetapi kita tidak terlalu ikut dalam pengelolaannya. Semua diserahkan pada pengelola terutama Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Pembinaan untuk PKBM tidak intens.” // “Sekretariat lembaga, bisa lewat sini, kelurahan Patangpuluhan mbak. Tetapi sebenarnya semua dilakukan di rumah Pak Patmo yang kebetulan tidak jauh juga dari kantor kelurahan. Jadi semisal ada keperluan yang menyangkut PKBM atau kesetaraan, maka nanti akan kami sambungkan langsung ke rumah Pak Patmo. Seperti itu mbak.” // “Hubungan Pembina dengan Pengelola sangat



			<p>harmonis, saya sendiri dengan Pak Patmo sudah seperti bapak dan anak mbak. Beliau adalah pendidik atau guru yang sebenar-benarnya. Pengelolaan di sini bagus karena semua sistemnya kekeluargaan, makanya bisa bertahan sampai sekarang.”</p>
		SB	<p>“Koordinasi, rapat antar pengelola jarang kumpul karena kesibukan masing-masing, lewat <i>whatsapp</i> seringnya.”</p>
	<b>Kesimpulan</b>		<p>Evaluasi program dilakukan pengelola setiap satu semester sekali, setiap akhir PBM atau menjelang Evaluasi Hasil Belajar (EHB). Bentuk evaluasi adalah rapat dengan pihak Pembina Lembaga (Kelurahan Patangpuluhan), Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, dan Evaluasi Internal lembaga. Hubungan pembina dan pengelola termasuk akrab.</p>

**ANALISIS DATA**  
**TRIANGULASI TEKNIK**  
**“Pengelolaan Program Pendidikan Kesetaraan Paket B dan C**  
**di Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta”**

<b>D. PERENCANAAN</b>			
<b>1.</b>	<b>Bentuk Penerimaan dan Seleksi Warga Belajar</b>		
	Hasil Wawancara		Sosialisasi program dilakukan secara tertulis dan lisan serta terbuka untuk masyarakat umum dan dilakukan satu tahun sekali di tiap tahun ajaran baru. Syarat pendaftaran tidak banyak dan gratis.
	Hasil Dokumentasi	Brosur	Secara tertulis, sosialisasi dilakukan melalui penyebaran brosur yang berisi tentang Pendidikan Kesetaraan Paket B dan C di PKBM Rangsang Imo Joyo, Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta.
		Buku Induk Warga Belajar	Data tentang warga belajar yang dikumpulkan di buku induk adalah : Nama Warga Belajar, Nomor Induk, Jenis Kelamin, Tempat dan Tanggal Lahir, Agama, Status Perkawinan, Status dalam keluarga, Alamat, Nomor Telepon, Pekerjaan, Jenis Paket dan Kelas, Tanggal Penerimaan, Sekolah Asal, STTB Terakhir, Nama Orang Tua, Alamat Orang Tua, Telpn Orang Tua, serta Pekerjaan Orang Tua.
	<b>Kesimpulan</b>		Sistem penerimaan warga belajar baru di Pendidikan Kesetaraan PKBM Rangsang Imo Joyo bersifat terbuka. Penerimaan dilakukan satu tahun sekali tiap awal tahun ajaran baru. Syarat pendaftaran calon warga belajar di Paket B dan C PKBM Rangsang Imo Joyo adalah ijazah terakhir, raport terakhir, foto, dan fotocopy KTP tanpa memungut biaya.
<b>2.</b>	<b>Bentuk Perekrutan dan Seleksi Calon Tutor dan Narasumber Teknis</b>		
	Hasil Wawancara		Tutor di PKBM Rangsang Imo Joyo berjumlah empat belas orang. Perekrutan tutor dilakukan secara tertutup dimana informasi lowongan tidak dibuka pada masyarakat umum melainkan dengan penyaluran lisan dari tutor yang berhenti ataupun dari kenalan anggota PKBM Rangsang Imo Joyo.

			Syarat utama dalam perekrutan tutor adalah kemauan dan kesehatan psikologis. Di PKBM Rangsang Imo Joyo belum ada narasumber teknis sebab belum ada pula kegiatan pelatihan keterampilan.
	Hasil Observasi	Pembelajaran	Peserta atau warga belajar Paket B dan C di PKBM Rangsang Imo Joyo tidak bisa diberi tekanan dan metode mengajar seperti pada umumnya.
	<b>Kesimpulan</b>		Tutor di PKBM Rangsang Imo Joyo berjumlah empat belas orang dan perekrutan tutor dilakukan secara tertutup. Syarat utama dalam perekrutan tutor adalah kemauan dan kesehatan psikologis serta memahami warga belajar dengan baik. Di PKBM Rangsang Imo Joyo belum ada narasumber teknis sebab belum ada pula kegiatan pelatihan keterampilan.
<b>3.</b>	<b>Penetapan Kurikulum untuk Paket B dan C</b>		
	Hasil Wawancara		Kurikulum yang digunakan adalah KTSP dan satu angkatan dikenai pembelajaran satu tahun. Pembelajaran dilakukan melalui materi dalam kelas. Penjurusan untuk Paket C hanya ada IPS.
	Hasil Dokumentasi	Proposal	Kegiatan satu program paket untuk satu semester berjalan selama enam bulan
		RPP	RPP yang dibuat oleh lembaga ini berisi tentang : 1) Standar Kompetensi, 2) Kompetensi Dasar, 3) Indikator, 4) Alokasi Waktu, 5) Tujuan Pembelajaran, 6) Materi Pokok, 7) Uraian Materi, 8) Pendekatan, 9) Metode Pembelajaran, 10) Skenario Pembelajaran, 11) Sumber dan Alat, 12) Penilaian. Sedangkan silabus di lembaga ini terdiri dari rincian : 1) Kompetensi Dasar, 2) Indikator, 3) Kegiatan Pembelajaran, 4) Materi, 5) Alokasi Waktu, 6) Sumber Belajar, 7) Penilaian: Jenis Tagihan, Teknik, dan Bentuk Instrumen.
	Hasil Observasi	Pembelajaran	Susunan materi yang diberikan tutor banyak terintegrasi pada soal kemudian dijabarkan secara teori satu per satu.
			Metode yang digunakan tutor lebih condong pada ceramah semi diskusi
	<b>Kesimpulan</b>		Kurikulum pendidikan Kesetaraan di PKBM

			Rangsang Imo Joyo adalah KTSP. Susunan materi pelajaran juga disiapkan tutor dengan mengacu pada Standar Kelulusan (SKL). Metode pembelajaran diserahkan sepenuhnya oleh Pengelola kepada tutor pengampu masing-masing mata pelajaran. Jurusan untuk Paket C kelas 11 dan 12 hanyalah IPS.
<b>4.</b>	<b>Proses Penetapan Tempat Pembelajaran dan Pelatihan</b>		
	Hasil Wawancara		Sebelum tahun ajaran 2015/2016 tempat pembelajaran bergiliran antara aula kantor Kecamatan Wirobrajan atau ruang serba guna di kantor Kelurahan Patangpuluhan. Saat ini, tempat pembelajaran sudah pasti yaitu di SMK Pembangunan Yogyakarta.
	Hasil Observasi	Lokasi Pembelajaran	Lokasi yang dipilih tidak jauh dari pusat Kantor Kelurahan Patangpuluhan dan Kantor Kecamatan Wirobrajan. Jika sebelumnya Kantor Kelurahan dan Kantor Kecamatan hanya berdampingan, kini tempat pembelajaran (SMK Pembangunan Yogyakarta) berada seratus meter dari lokasi tersebut.
	<b>Kesimpulan</b>		Saat ini, tempat pembelajaran ada di SMK Pembangunan Yogyakarta. Lokasi SMK tidak jauh dari Kantor Kelurahan dan Kecamatan sehingga jangkauan lokasi tidak jauh berbeda dari lokasi sebelumnya. Seluruh tempat pembelajaran Paket B dan C yang pernah digunakan bukanlah milik lembaga.
<b>5.</b>	<b>Sumber Dana Pendidikan Kesetaraan</b>		
	Hasil Wawancara		Sebelum vakum sempat meminta dana dari Dinas Pendidikan melalui proposal kegiatan sebab jumlah warga belajar memenuhi standar minimal. Sumber dana juga datang dari donatur.
	Hasil Dokumentasi	Akta Notaris	Dana awal untuk mendapat hak menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan berasal dari para Pendiri Lembaga sebesar lima juta rupiah. Dana tersebut selanjutnya bertambah dengan Hibah dari Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dan Donatur yang tidak mengikat.
		Proposal	Sebelum vakum, PKBM mendapat bantuan dana

			dari APBD Kota Yogyakarta yang diberikan melalui Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Bukti bentuk pengusulan biaya adalah dengan mengajukan proposal setiap satu semester sekali.
		Buku Induk Warga Belajar	Jumlah warga belajar terbaru adalah empat belas orang.
	<b>Kesimpulan</b>		Sebelum vakum (sebelum tahun 2012) sumber dana awal berasal dari dana pendiri lembaga kemudian dibantu dana dari donatur yang tidak mengikat, dan dana hibah pemerintah melalui Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. kondisi setelah PKBM vakum merubah sumber dana menjadi donatur yang tidak mengikat dan iuran warga belajar. Iuran warga belajar diadakan mulai tahun ajaran 2013/2014 hingga sekarang. BOK berhenti sebab saat ini jumlah warga belajar hanya 14 dan tidak memenuhi persyaratan.
<b>E. PELAKSANAAN</b>			
<b>1.</b>	<b>Pemenuhan Tugas dan Kebutuhan Warga Belajar</b>		
	Hasil Wawancara		Pembagian Rombongan Belajar (Rombel) di PKBM Rangsang Imo Joyo tidak memperhatikan usia maupun jenis kelamin melainkan berdasar pada ijazah terakhir atau raport terakhir dari warga belajar. Total warga belajar yang terdaftar pada tahun ajaran 2015/2016 seluruhnya empat belas orang. Jumlah warga belajar yang terdaftar di Paket B saat ini adalah enam orang dan di Paket C adalah delapan orang. Pengelola memenuhi kebutuhan belajar warga belajar dengan menyiapkan materi beserta sarpras yang dibutuhkan, namun warga belajar belum melaksanakan tugasnya secara optimal karena kedisiplinan warga belajar sangat kurang.
	Hasil Dokumentasi	Buku Induk Warga Belajar	Jumlah warga belajar yang terdaftar di Paket B saat ini adalah enam orang dan di Paket C adalah delapan orang. Total warga belajar yang terdaftar pada tahun ajaran 2015/2016 seluruhnya empat

			belas orang.
	<b>Kesimpulan</b>		Total warga belajar yang terdaftar pada tahun ajaran 2015/2016 seluruhnya empat belas orang. Jumlah warga belajar yang terdaftar di Paket B saat ini adalah enam orang dan di Paket C adalah delapan orang. Rombel dibagi atas dasar raport dan ijazah terakhir. Kebutuhan belajar warga belajar dipenuhi namun kedisiplinan warga belajar kurang optimal.
<b>2.</b>	<b>Kualifikasi serta Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola</b>		
	Hasil Wawancara		Pengelola terdiri dari pengurus harian, ketua, sekretaris, bendahara dan koordinator program, serta pengelola tambahan, petugas piket. Tugas petugas piket adalah menjaga absensi warga belajar serta memastikan jumlah tutor yang hadir pada hari tersebut dan bila tidak seluruhnya hadir sedangkan tugas masing-masing pengelola belum ada. Tidak semua pengelola melaksanakan tugasnya secara optimal karena beberapa tugas menumpuk di beberapa pihak saja. Walau begitu, pengelola sudah melaksanakan tugasnya untuk menyiapkan pembelajaran.
	Hasil Dokumentasi	Buku Induk Pengelola	Jumlah pengelola inti untuk Program Kesetaraan Paket B dan C adalah tujuh orang. Empat diantara pengelola berjenis kelamin Perempuan dan tiga orang berjenis kelamin Laki-laki. Dari tabel juga diketahui bahwa dua orang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan lima yang lainnya Non-PNS. Empat orang sudah memiliki latar belakang minimal S1 dan tiga lainnya masih di bawah jenjang tersebut. Adapun latar belakang yang menyangkut Kependidikan ada dua orang dan lainnya berasal dari bidang Non-Kependidikan.
		Akta Notaris	Pembagian tugas dan pekerjaan diantara anggota badan pengurus diserahkan kepada mereka sendiri.
	<b>Kesimpulan</b>		Jumlah pengelola inti untuk Program Kesetaraan Paket B dan C adalah tujuh orang. Empat orang sudah memiliki latar belakang minimal S1 dan tiga lainnya masih di bawah jenjang tersebut. Adapun latar belakang yang menyangkut Kependidikan ada dua orang dan lainnya berasal dari bidang Non-

			Kependidikan. Selain pengelola inti, PKBM rangsnag Imo Joyo juga memiliki petugas piket sebanyak tiga orang. Tugas petugas piket adalah menjaga absensi warga belajar serta memastikan jumlah tutor yang hadir pada hari tersebut dan bila tidak seluruhnya hadir sedangkan tugas masing-masing pengelola belum ada. Tidak semua pengelola melaksanakan tugasnya secara optimal karena beberapa tugas menumpuk di beberapa pihak saja.
<b>3.</b>	<b>Kualifikasi serta Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Tutor</b>		
	Hasil Wawancara		Mayoritas tutor sudah S1 namun kedisiplinan dalam jadwal mengajar kurang optimal. Proses pembuatan RPP dan silabus juga menjadi salah satu tanggungjawab tutor, namun pelaksanaannya tidak optimal. Jadwal mengajar tutor satu mata pelajaran terjadi setiap hari dengan tingkatan kelas yang berbeda-beda tetapi kehadiran tutor sering tidak tepat waktu dan jadwal mengajar kadang meleset dari jadwal pelajaran yang sudah disiapkan oleh pengelola.
	Hasil Dokumentasi	Buku Induk Tutor	Mayoritas tutor Paket B dan C memiliki minimal pendidikan Strata-1. Hanya ada satu tutor yang belum yaitu Pak Henry Wahono yang mana beliau sedang menempuh pendidikan untuk menyelesaikan gelar Strata-1, dan secara tidak langsung pendidikan terakhirnya adalah SMA. Bila dilihat lebih lanjut, latar belakang pendidikan tutor mayoritas sudah sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya.
		Jadwal Pelajaran	Tugas mengajar tutor satu mata pelajaran terjadi setiap hari dengan tingkatan kelas yang berbeda-beda. Secara tidak langsung, tugas mengajar tutor adalah tiga kali dalam seminggu. // mata pelajaran Paket B berjumlah enam yang terdiri dari Bahasa Inggris, Matematika, IPA, PKn, IPS, dan Bahasa Indonesia. Dari data tersebut juga diketahui bahwa jumlah mata pelajaran Paket C berjumlah sebelas dan terdiri dari Sosiologi, PKn, Ekonomi, Fisika, Biologi, Kimia, Matematika, Geografi, Sejarah, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.

		Absensi	Jumlah tutor yang aktif adalah sembilan orang.
	Hasil Observasi	Pembelajaran	Tutor tidak mendapat jatah mengajar ketika warga belajar didikannya tidak hadir.
	<b>Kesimpulan</b>		Mayoritas tutor Paket B dan C berpendidikan minimal S1 dan hanya ada satu tutor yang belum memenuhi. Walaupun konsentrasi pendidikan tutor kebanyakan sudah sesuai dengan mata pelajaran yang diampu, namun tidak kesemuanya berasal dari jurusan pendidikan. Proses pembuatan RPP dan silabus juga menjadi salah satu tanggungjawab tutor, namun pelaksanaannya tidak optimal. Jadwal mengajar tutor sering bergeser akibat kehadiran siswa atau tutor itu sendiri yang tidak masuk.
<b>4.</b>	<b>Pelaksanaan Pembelajaran Akademik</b>		
	Hasil Wawancara		Satu minggu tiga kali pertemuan antara setelah Ashar sampai menjelang Maghrib. Jumlah mata pelajaran hari itu sesuai dengan kehadiran tutor namun rata-rata dua sampai tiga mata pelajaran. Pembelajaran dilakukan di kelas dengan materi disampaikan melalui penyelesaian soal.
	Hasil Observasi	Pembelajaran	Pembelajaran diadakan tiga kali dalam satu minggu yaitu hari Senin, Rabu, dan Jum'at. // PBM dimulai pukul 16.00 dan berakhir pukul 17.30 WIB. // Pembelajaran sering dilakukan dalam satu ruang kelas dengan dibagi menjadi kelompok kecil sesuai tingkatan kelas masing-masing warga belajar.
	Hasil Dokumentasi	Jadwal Pelajaran	Mata pelajaran antara satu tingkatan kelas dan lainnya tidak saling berbenturan. Hal tersebut memungkinkan tutor untuk mengajar secara bergiliran tanpa ada jadwal rangkap. Mata pelajaran setiap pertemuan minimal dua macam. Kehadiran tutor paling tidak dua pertemuan dari tiga kali seminggu. // Durasi untuk pelajaran setiap pertemuan adalah sama yaitu empat jam PBM dan lima belas menit istirahat sehingga total waktu dalam satu pertemuan adalah empat jam lima belas menit mulai dari 13.30-17.45 WIB. // Satu tingkatan kelas dilaksanakan selama satu tahun ajaran dengan total satu Paket (B atau C) dilaksanakan selama tiga tahun.



	<b>Kesimpulan</b>		Pembelajaran di PKBM Rangsang Imo Joyo diadakan tiga kali dalam satu minggu yaitu hari Senin, Rabu, dan Jum'at. Jadwal pelajaran yang tertulis berbeda dengan pelaksanaan di lapangan. Pembelajaran di PKBM Rangsang Imo Joyo tidak selalu menggunakan RPP dan silabus sehingga materi yang diberikan fleksibel. Materi pembelajaran pendidikan kesetaraan mengacu kepada standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah.
<b>5.</b>	<b>Pemanfaatan Sarana dan Prasarana</b>		
	Hasil Wawancara		Sarana prasarana di lembaga ini dari segi data misalnya susunan materi pelajaran. Selain itu, ada pula sarpras dari segi bentuk barang yang menyangkut gedung pembelajaran, ruang kelas dan perangkat pendukung penyampaian materi pelajaran seperti meja, kursi dan papan tulis. Peminjaman sarpras tidak dipungut biaya.
	Hasil Observasi	Pembelajaran	Pelajaran dilakukan dengan diskusi melalui soal atau materi yang telah difotocopy oleh tutor dan atau melalui <i>softfile</i> . Penjelasan materi diberikan melalui tulisan langsung di buku siswa.
		Kondisi Sarpras	Satu kelas di gedung SMK Pembangunan Yogyakarta bisa menampung 32 siswa.
	<b>Kesimpulan</b>		Sarana prasarana dari segi data misalnya susunan materi pelajaran. Selain itu, ada pula dan sarpras dari segi bentuk barang menyangkut gedung pembelajaran, ruang kelas dan perangkat pendukung penyampaian materi pelajaran seperti meja, kursi dan papan tulis. Peminjaman sarpras tidak dipungut biaya. Sarana prasarana yang digunakan dalam PBM ini tidak banyak sebab sistem pembelajaran seluruhnya dilaksanakan dengan pemberian materi di dalam kelas. PBM sering dilakukan dalam satu ruang kelas dengan dibagi menjadi kelompok kecil. Ruang kelas memenuhi standar kuota kelas minimal.
<b>6.</b>	<b>Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan</b>		
	Hasil Wawancara		Pembiayaan untuk kegiatan operasional yakni untuk insentif tutor/pengelola dan untuk biaya

		pembelajaran sehari-hari. Pembiayaan dikelola langsung oleh pengelola. Pengelola terpaksa menarik iuran dari warga belajar untuk menambah dana pendidikan namun tetap kurang untuk memenuhi kebutuhan sehingga strategi yang digunakan adalah menggunakan dana kas lembaga.
	Hasil Dokumentasi	Proposal Alokasi pengusulan dana bantuan ditujukan untuk Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta pada tahun 2009 dengan rincian : 1) Pengadaan Bahan : Pengadaan Bahan Persiapan UNPK dan Penilaian 1 kali 2) Bantuan Alat : ATK Peserta didik, Administrasi Pembelajaran, dan Sarana Pembelajaran 3) Bantuan Tenaga : Transport Tutor dan Transport Pengelola.
	<b>Kesimpulan</b>	Lembaga tidak membuat RAPBS secara resmi dan rutin. Alokasi anggaran dana di Pendidikan Kesetaraan PKBM Rangsang Imo Joyo fokus pada dana operasional yang dibagi menjadi dana untuk hak tutor dan untuk kegiatan pembelajaran sehari-hari. PKBM Rangsang Imo Joyo terpaksa harus menarik iuran dari warga belajar sebagai salah satu sumber dana pendidikan. Iuran yang dimaksud sebesar dua puluh ribu rupiah setiap bulannya. Dalam pelaksanaannya, berbagai sumber dana termasuk iuran warga belajar masih belum mampu memenuhi segala kebutuhan lembaga dari segi finansial.
<b>F. EVALUASI</b>		
<b>1.</b>	<b>Evaluasi Perkembangan Warga Belajar</b>	
	Hasil Wawancara	Ada lima jenis Evaluasi Hasil Belajar (EHB) warga belajar di PKBM Rangsang Imo Joyo yaitu UH, UTS, UAS, UKK, dan UNPK dengan pelaksanaan yang berbeda-beda dan bahkan ada beberapa tutor yang tidak menggunakan semua jenis ulangan tersebut.
	Hasil Observasi	Beberapa tutor lain memilih menggunakan metode pembahasan soal-soal dalam penyampaian materi sehingga ulangan harian bukan menjadi momentum.
	<b>Kesimpulan</b>	Ada lima jenis Evaluasi Hasil Belajar (EHB) warga

		belajar di PKBM Rangsang Imo Joyo yaitu UH, UTS, UAS, UKK, dan UNPK dengan pelaksanaan yang berbeda-beda dan bahkan ada beberapa tutor yang tidak menggunakan semua jenis ulangan tersebut.
<b>2.</b>	<b>Evaluasi Penyelenggaraan Program</b>	
	Hasil Wawancara	Evaluasi program dilakukan pengelola setiap satu semester sekali, setiap akhir PBM atau menjelang Evaluasi Hasil Belajar (EHB). Bentuk evaluasi adalah rapat dengan pihak Pembina Lembaga (Kelurahan Patangpuluhan), Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, dan Evaluasi Internal lembaga. Hubungan pembina dan pengelola termasuk akrab.